



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 - 2026



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dengan akan berakhirnya periode masa jabatan Bupati Muara Enim pada tahun 2023 dan untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, perlu menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 2024-2026.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan rencana kerja pemerintah daerah atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 2005-2025.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Menengah Perangkat Daerah untuk periode 2024-2026.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah

serta digunakan sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan daerah serta kebijakan keuangan daerah Tahun 2024-2026.

- (2) RPD disusun sebagai pedoman dalam :
 - a. penyusunan dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026; dan
 - b. penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026.
- (3) Dokumen naskah RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM;
 - c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
 - e. BAB V TUJUAN DAN SASARAN
 - f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS
 - g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
 - h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
 - i. BAB IX PENUTUP.
- (4) Isi dokumen serta uraian RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 17 Maret 2023

Pt. BUPATI MUARA ENIM,



AHMAD USMARWI KAFFAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal, 17 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,



RISWANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2023 NOMOR 4.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERATURAN BUPATI	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 DASAR HUKUM	I-2
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-5
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN	I-6
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	I-7
 BAB II GAMBARAN UMUM	 II-1
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-1
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	II-4
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM	II-10
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-40
 BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	 III-1
3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU	III-1
3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU	III-14
3.3. KERANGAKA PENDANAAN DAERAH	III-21
 BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	 IV-1
4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN	IV-2
4.2. ISU STRATEGIS	IV-65
 BAB V TUJUAN DAN SASARAN	 V-1
5.1. VISI DAN MISI RPJPD KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2005-2025	V-1
5.2. TUJUAN DAN SASARAN RPD KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024-2026	V-4

BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS	VI-1
6.1.	STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	VI-1
6.2.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	VI-5
6.3.	PROGRAM PEMBANGUNAN	VI-51
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
BAB IX	PENUTUP	IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Muara Enim	II-2
Tabel 2.2	Komposisi Penduduk Kabupaten Muara Enim Menurut Kelompok Umur Tahun 2018-2022(ribu jiwa)	II-4
Tabel 2.3	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022..	II-4
Tabel 2.4	Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-6
Tabel 2.5	Indeks Pembangunan Manusia per Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022	II-7
Tabel 2.6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-9
Tabel 2.7	Kinerja Bidang Pendidikan Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-11
Tabel 2.8	Rasio Puskesmas, Klinik dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-12
Tabel 2.9	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2022	II-13
Tabel 2.10	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-14
Tabel 2.11	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2022	II-15
Tabel 2.12	Kinerja Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-16
Tabel 2.13	Kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-17
Tabel 2.14	Kualifikasi Pendidikan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018-2022	II-17
Tabel 2.15	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2022	II-18
Tabel 2.16	Kinerja Bidang Sosial Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-19
Tabel 2.17	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2022.....	II-20
Tabel 2.18	Kinerja Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-22
Tabel 2.19	Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022.....	II-22

Tabel 2.20	Kinerja Bidang Pangan Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-23
Tabel 2.21	Kinerja Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-24
Tabel 2.22	Kinerja Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-25
Tabel 2.23	Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-25
Tabel 2.24	Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-26
Tabel 2.25	Kinerja Bidang Perhubungan Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-27
Tabel 2.26	Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-28
Tabel 2.27	Kinerja Bidang Koperasi dan UKM Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-29
Tabel 2.28	Kinerja Bidang Penanaman Modal Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-29
Tabel 2.29	Kinerja Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-30
Tabel 2.30	Kinerja Bidang Statistik Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-30
Tabel 2.31	Kinerja Bidang Kebudayaan Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-31
Tabel 2.32	Kinerja Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-32
Tabel 2.33	Kinerja Bidang Perikanan Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-33
Tabel 2.34	Kinerja Bidang Pariwisata Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-33
Tabel 2.35	Kinerja Bidang Pertanian Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-34
Tabel 2.36	Kinerja Bidang Perkebunan Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-35
Tabel 2.37	Kinerja Bidang Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-35
Tabel 2.38	Kinerja Bidang Perencanaan Kabupaten Muara Enim Tahun 2017-2021	II-36
Tabel 2.39	Kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Muara Enim Tahun 2017-2021	II-37

Tabel 2.40	Kinerja Bidang Keuangan Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-37
Tabel 2.41	Kinerja Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-38
Tabel 2.42	Kinerja Bidang Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-39
Tabel 2.43	Kinerja Bidang Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-40
Tabel 2.44	Kinerja Bidang Kecamatan Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-40
Tabel 2.45	Persentase Pengeluaran Masyarakat Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 – 2022	II-41
Tabel 2.46	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 – 2022	II-42
Tabel 2.47	Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-42
Tabel 2.48	Angka Kriminalitas Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 – 2022	II-43
Tabel 2.49	Perizinan yang Diterbitkan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 – 2022	II-44
Tabel 2.50	Rasio Ketergantungan Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 -2022	II-46
Tabel 2.51	Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-47
Tabel 3.1	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	III-3
Tabel 3.2	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	III-7
Tabel 3.3	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	III-8
Tabel 3.4	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	III-10
Tabel 3.5	Hasil Analisis Rasio Likuiditas Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	III-11
Tabel 3.6	Hasil Analisis Rasio Solvabilitas Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	III-13
Tabel 3.7	Hasil Analisis Rasio Aktivitas Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	III-14
Tabel 3.8	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	III-17
Tabel 3.9	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	III-18

Tabel 3.10	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	III-19
Tabel 3.11	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	III-19
Tabel 3.12	Relisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	III-20
Tabel 3.13	Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026	III-23
Tabel 3.14	Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026	III-25
Tabel 4.1	Arah dan Tahap Pembangunan RPJPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025	IV-3
Tabel 4.2	Indikasi Program Utama	IV-8
Tabel 4.3	Capaian Layanan Bagi Bayi di Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2021	IV-33
Tabel 4.4	Perkembangan Kondisi Layanan Kesehatan Bagi Ibu di Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2021.....	IV-34
Tabel 4.5	Perkembangan APK Kabupaten Muara Enim Menurut Jenjang Tahun 2017-2021	IV-35
Tabel 4.6	Perkembangan IPG Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan dan Indonesia Tahun 2017-2021	IV-36
Tabel 4.7	Perkembangan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Muara Enim Tahun 2017-2021	IV-36
Tabel 4.8	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak Kabupaten Muara Enim dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021	IV-37
Tabel 4.9	Proporsi individu terhadap Telpon Genggam dan Menggunakan Internet Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2021	IV-41
Tabel 4.10	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan dan Indonesia Tahun 2017-2021.....	IV-42
Tabel 4.11	Jumlah Desa Tertinggal dan Desa Mandiri di Kabupaten Muara Enim Tahun 2017-2021	IV-43
Tabel 4.12	Jenis dan Skor serta Kategori Bencana Kabupaten Muara Enim Tahun 2021	IV-44
Tabel 4.13	Perkembangan Nilai Capaian Indikator Tahun 2018-2020	IV-45
Tabel 4.14	Indikator Akses Informasi Melalui BPS Tahun 2018-2020	IV-49
Tabel 4.15	Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	IV-50
Tabel 4.16	Indeks Pembangunan Manusia per Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022	IV-51
Tabel 4.17	Capaian Indikator Indeks Kota Toleran	IV-52

Tabel 4.18	Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	IV-52
Tabel 4.19	Capaian Indikator Kinerja Penurunan Angka Kemiskinan Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	IV-50
Tabel 4.20	Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	IV-53
Tabel 4.21	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2021	IV-54
Tabel 4.22	Capaian Indikator Kinerja Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	IV-55
Tabel 4.23	Capaian Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	IV-55
Tabel 4.24	Capaian Indeks Pelayanan Infrastruktur Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	IV-56
Tabel 4.25	Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	IV-56
Tabel 4.26	Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	IV-57
Tabel 4.27	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	IV-58
Tabel 4.28	Kemiskinan Ekstrema Kabupaten Muara Enim	IV-67
Tabel 4.29	Jumlah Produksi Sayuran dan Buah-Buahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2017-2021	IV-75
Tabel 4.30	Panjang Jalan Tingkat Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	IV-75
Tabel 4.31	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	IV-78
Tabel 5.1	Visi, Misi, dan Tujuan RPJPD Tahun 2005-2025 Kabupaten Muara Enim	V-1
Tabel 5.2	Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026	V-4
Tabel 6.1	Tujuan, Sasaran, dan Strategi RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026	VI-1
Tabel 6.2	Arah Kebijakan RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026	VI-5
Tabel 6.3	Tema Pembangunan RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026	VI-7
Tabel 6.4	Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026	VI-9
Tabel 6.5	Pusat-pusat Pengembangan Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026	VI-14
Tabel 6.6	Kawasan Tanaman Pangan Kabupaten Muara Enim	VI-16

Tabel 6.7	Kawasan Hortikultura Kabupaten Muara Enim	VI-19
Tabel 6.8	Kawasan Peternakan Kabupaten Muara Enim	VI-24
Tabel 6.9	Kawasan Perkebunan Kabupaten Muara Enim.....	VI-27
Tabel 6.10	Kawasan Perikanan Kabupaten Muara Enim	VI-44
Tabel 6.11	Kawasan Budidaya Gambut Kabupaten Muara Enim	VI-45
Tabel 6.12	Kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Muara Enim	VI-47
Tabel 6.13	Kawasan Pariwisata Kabupaten Muara Enim	VI-47
Tabel 6.14	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026	VI-53
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026	VII-2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026	VII-4
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026	VIII-11
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026	VII-14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antara Dokumen RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-6
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Muara Enim	II-1
Gambar 2.2	Grafik Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-3
Gambar 2.3	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-6
Gambar 2.4	Grafik Trend Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-7
Gambar 2.5	Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-8
Gambar 2.6	Grafik Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	II-10
Gambar 4.1	Komponen Pembentuk Isu Strategis Kabupaten Muara Enim	IV-1
Gambar 4.2	Grafik Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	IV-32
Gambar 4.3	Grafik Perkembangan Rasio Elektrifikasi Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2021	IV-38
Gambar 4.4	Grafik Perkembangan PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhan PRDB Perkapita Kabupaten Muara Enim Tahun 2017-2021	IV-39
Gambar 4.5	Grafik LPE Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021	IV-40
Gambar 4.6	Grafik Perkembangan Persentase Jalan Kondisi mantap jalan nasional di Kabupaten	IV-41
Gambar 4.7	Grafik Perkembangan Persentase sampah perkotaan yang tertangani Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2021	IV-44
Gambar 4.8	Grafik Perkembangan Persentase Pengguna Internet Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2021	IV-49
Gambar 4.9	Grafik Persentase Kemiskinan Kabupaten Muara Enim Tahun 2017-2022	IV-66
Gambar 4.10	Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Muara Enim Tahun 2017-2021	IV-68
Gambar 4.11	Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	IV-70
Gambar 4.12	Grafik Harapan Lama Sekolah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	IV-70

Gambar 4.13	Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	IV-71
Gambar 4.14	Grafik Prevalensi Stunting Kabupaten Muara Enim	IV-72
Gambar 4.15	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	IV-73
Gambar 4.16	Grafik Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	IV-74
Gambar 4.17	Grafik Persentase Panjang Jalan Menurut Kondis Jalan Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	IV-76
Gambar 4.18	Grafik Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dan Rumah Tangga Mempunyai Jamban Snediri dengan Tanki Septik Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022	IV-77
Gambar 5.1	Bagan Alir (Cascading) Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Visi Sehat)	V-8
Gambar 5.2	Bagan Alir (Cascading) Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Visi Mandiri)	V-9
Gambar 5.3	Bagan Alir (Cascading) Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Visi Sejahtera)	V-13
Gambar 8.1	Bagan Alir (Cascading) Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Visi Sehat)	VIII-3
Gambar 8.2	Bagan Alir (Cascading) Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Visi Mandiri)	VIII-4
Gambar 8.3	Bagan Alir (Cascading) Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Visi Sejahtera)	VIII-8

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	GAMBARAN UMUM
BAB	III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB	IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB	V	TUJUAN DAN SASARAN
BAB	VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS
BAB	VII	KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB	VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB	IX	PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu daerah yang periode masa jabatan Kepala Daerah akan berakhir pada tahun 2023 mendatang. Demikian pula periodisasi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023, yang akan berakhir pada tahun 2023.

Selain itu, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) sebagai proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan dilaksanakan secara serentak pada bulan November tahun 2024. Implikasi dari Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak tersebut, menjadikan Kabupaten Muara Enim sebagai salah satu daerah otonom yang tidak memiliki Kepala Daerah karena masa jabatannya berakhir pada tahun 2023.

Kekosongan Kepala Daerah tersebut juga menyebabkan visi dan misi Kepala Daerah sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah belum bisa ditetapkan. Sehingga sampai dengan penetapan Kepala Daerah terpilih, belum ada dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan perencanaan strategis Perangkat Daerah.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, menginstruksikan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan

Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Pj. Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024-2026. Selain itu, dokumen tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muara Enim yang disusun setiap tahun anggaran.

Penyusunan RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 memperhatikan beberapa hal, yaitu : 1) penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, 2) kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Muara Enim sampai dengan tahun 2025, 3) hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023, 4) Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 atau RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, 5) isu-isu strategis yang berkembang, 6) kebijakan nasional, dan 7) regulasi yang berlaku.

1.2 DASAR HUKUM

Dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6056);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 8) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6794).
- 10) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 16) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah

dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

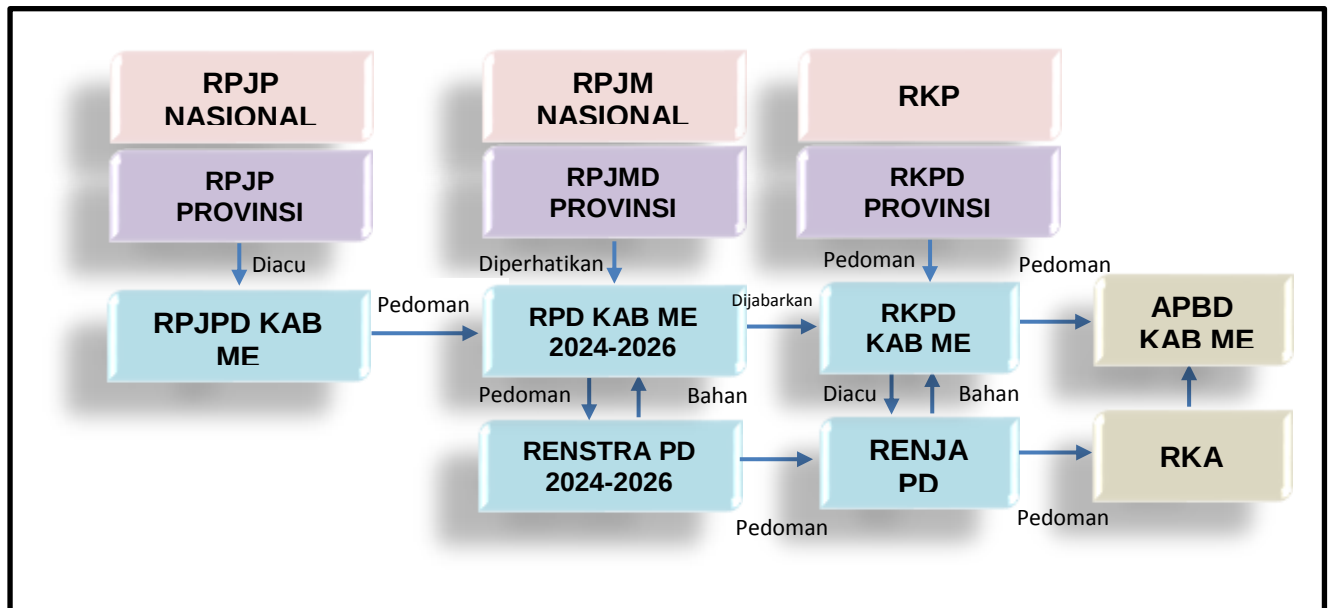
- 17) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 7);
- 18) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Nomor 13).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS, sebagai rangkaian dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muara Enim.

Penyusunan RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 mempedomani dokumen perencanaan pembangunan pada tingkat Provinsi dan Pusat dan dokumen pendukung lainnya, diantaranya yaitu RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan, RPJMN, RPD Provinsi Sumatera Selatan, dan dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Selain itu, dokumen RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan dokumen perencanaan serta penganggaran yang disusun setiap tahunnya.

Gambar 1.1
Hubungan Antara Dokumen RPD dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2004 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 adalah memberikan arahan dan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada periode tahun 2024 hingga 2026 sehingga terarah, efektif, efisien dan terpadu. Serta menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan setiap tahun anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan daerah serta kebijakan keuangan daerah tahun 2024-2026;
- 2) Sebagai tolak ukur dan evaluasi kinerja pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026;
- 3) Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026;
- 4) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026; dan
- 5) Sebagai instrumen dalam menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

a) BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

b) BAB II Gambaran Umum

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran kondisi daerah pada aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

c) BAB III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini memuat kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan daerah.

d) BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis

Bab ini memuat pemetaan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

e) BAB V Tujuan dan Sasaran

Bab ini menguraikan mengenai tujuan dan sasaran yang telah disepakati terkait pembangunan Kabupaten Muara Enim tahun 2024-2026.

f) BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi.

g) BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program

Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan proyeksi kerangka pendanaan yang akan digunakan pada periode ke depan serta program prioritas, indikator, dan target yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

h) BAB VIII Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah

Bab ini menggambarkan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

i) BAB IX Penutup

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	GAMBARAN UMUM
BAB	III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB	IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB	V	TUJUAN DAN SASARAN
BAB	VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS
BAB	VII	KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB	VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB	IX	PENUTUP

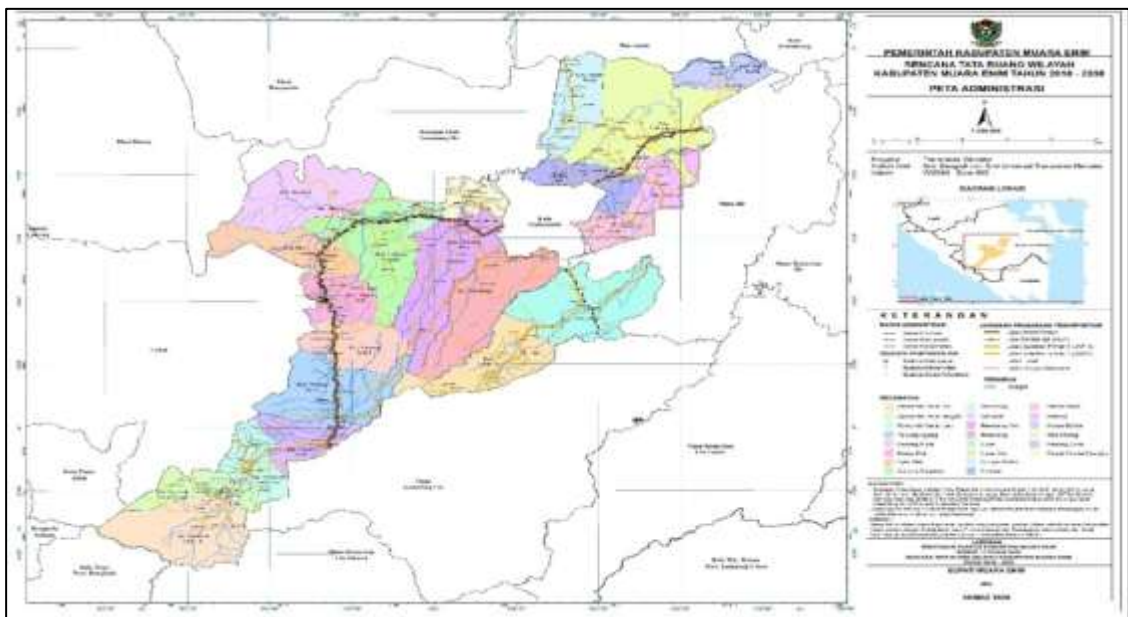
BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Secara geografis, Kabupaten Muara Enim terletak pada posisi antara 3°3'21"- 4°15'14" Lintang Selatan dan 103°18'18"-104°42'4,99" Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 7.483,06 km² terletak di tengah-tengah wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Secara administrasi, wilayah Kabupaten Muara Enim mencakup 22 Kecamatan yang terdiri atas 246 desa dan 10 kelurahan.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Muara Enim



Sumber : RTRW Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2038

Pada aspek demografi, pada tahun 2022 Jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim mengalami pertambahan penduduk menjadi 624,02 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,00%. Persebaran penduduk menurut kecamatan di wilayah Kabupaten Muara Enim tidak merata. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Muara Enim, yang dihuni oleh sekitar 75,90 ribu penduduk. Kecamatan dengan jumlah

penduduk paling sedikit adalah Muara Belida dengan jumlah penduduk sekitar 7,98 ribu.

Jika dilihat dari komposisi penduduk Kabupaten Muara Enim berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Muara Enim didominasi oleh kelompok umur 15-64 tahun. Berdasarkan data tahun 2022, jumlah penduduk dari kelompok umur 0-14 sebanyak 172,53 ribu jiwa atau 27,65 persen, kelompok umur 15-64 sebanyak 419,86 ribu jiwa atau 67,28 persen, sedangkan kelompok umur 65+ sebanyak 31,63 ribu jiwa atau 5,07 persen.

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Muara Enim

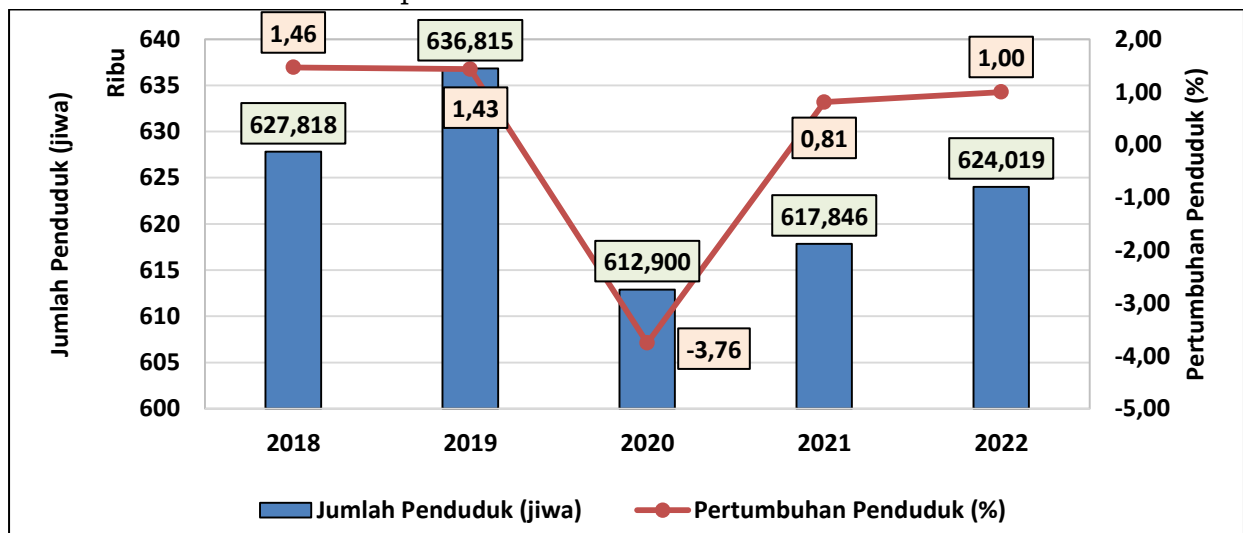
No	Kecamatan	Luas Daerah (km ²)	Persentase thd Luas Kab (%)	Jumlah Desa/ Kelurahan
1	Semende Darat Laut	269,14	3,6	10
2	Semende Darat Ulu	426,64	5,7	10
3	Semende Darat Tengah	302,24	4,04	12
4	Tanjung Agung	517,1	6,91	14
5	Panang Enim *)	192,94	2,58	12
6	Rambang	378,07	5,05	13
7	Lubai	529,32	7,07	10
8	Lubai Ulu	478,49	6,39	11
9	Lawang Kidul	287,26	3,84	7
10	Muara Enim	187,08	2,5	16
11	Ujan Mas	311,33	4,16	9
12	Gunung Megang	471,36	6,3	13
13	Benakat	451,96	6,04	6
14	Belimbing	148,69	1,99	10
15	Rambang Niru **)	634,98	8,49	16
16	Empat Petulai Dangku *)	138,35	1,85	10
17	Gelumbang	705,57	9,43	23
18	Lembak	101,44	1,36	10
19	Sungai Rotan	344,14	4,6	19
20	Muara Belida	204,67	2,74	8
21	Kelekar	138,03	1,84	7
22	Belida Darat	264,26	3,53	10
Total		7.483,06	100	256

Sumber : diolah dari data BPS Kabupaten Muara Enim, 2023

Kabupaten Muara Enim yang terdiri dari 22 Kecamatan, 256 desa/kelurahan dengan luas wilayah administrasi seluas 7.483,06 km². Kabupaten Muara Enim merupakan kabupaten/kota terluas ketiga di Provinsi Sumatera Selatan setelah Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Daerah terluas di Kabupaten Muara Enim adalah Kecamatan Gelumbang dengan luas daerah sebesar 705,57 km² atau sebesar 9,43% dari luas Kabupaten Muara Enim dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 23 desa/kelurahan. Sedangkan daerah terkecil di Kabupaten Muara Enim adalah Kecamatan Lembak dengan luas daerah sebesar 101,44 km² atau sebesar 1,36% dari luas Kabupaten Muara Enim dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 10 desa/kelurahan.

Jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim pada tahun 2022 tercatat sebanyak 624.019 jiwa. Jumlah penduduk pada tahun 2022 meningkat sebesar 1,00% dari tahun 2021 sebesar 617.846 jiwa, yang pada tahun sebelumnya meningkat sebesar 0,81% jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 636,815 jiwa.

Gambar 2.2
Grafik Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
di Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022



Sumber : diolah dari data BPS Kabupaten Muara Enim, 2023

Penurunan laju pertumbuhan penduduk disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Penurunan penduduk Kabupaten Muara Enim pada tahun 2022 didominasi oleh penduduk dengan kelompok umur 65 keatas sedangkan kenaikan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2022 terjadi pada penduduk dengan kelompok umur 65 kebawah dengan rasio ketergantungan sebesar 0,48 pada tahun 2022.

Tabel 2.2
Komposisi Penduduk Kabupaten Muara Enim Menurut
Kelompok Umur Tahun 2018-2022 (ribu jiwa)

Kelompok Umur	Tahun									
	2018		2019		2020		2021		2022	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
0 – 14	181,07	28,84	185,38	29,11	181,07	28,84	169,45	27,43	172,53	27,65
15 – 64	393,66	64,18	422,53	66,35	393,66	64,18	412,38	66,74	419,86	67,28
65 +	25,6	4,08	28,91	4,54	25,6	4,08	36,02	5,83	31,63	5,07
Jumlah	627,82	100	636,82	100	627,82	100	617,84	100	624,02	100
Rasio Ketergantungan	0,52		0,50		0,48		0,49		0,48	

Sumber : diolah dari data BPS Kabupaten Muara Enim, 2023

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muara Enim dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pembangunan daerah, diantaranya yaitu Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Penangguran, dan Indeks Gini.

Tabel 2.3
Pertumbuhan PDRB
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	2	2,51	2,45	2	3,02
2	Pertambangan & Penggalian	11,17	7,93	-2,8	8,86	12,35
3	Industri Pengolahan	6,36	7,68	9,42	3,05	0,36
4	Pengadaan Listrik dan Gas	15,58	9,77	15,71	6,11	2,78
5	Pengadaan Air, Pengolahan	9,18	6,79	5,12	-1,59	2,14

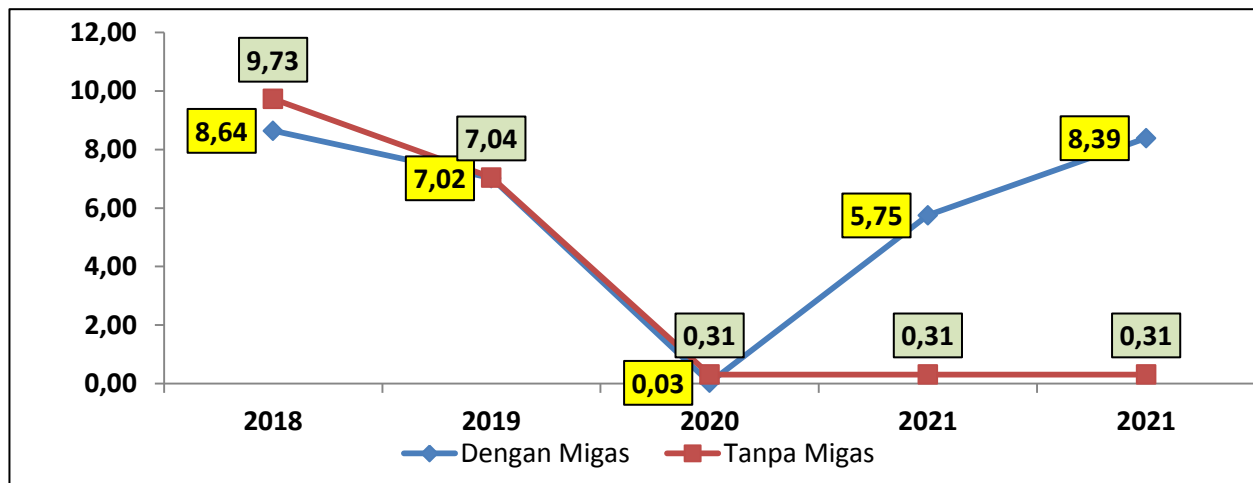
No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
	Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
6	Konstruksi	5,44	4,95	2,18	-0,17	1,82
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	8,87	8,99	-0,28	6,51	5,43
8	Transportasi dan Pergudangan	7,98	8,43	-1,22	2,58	11,13
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10	11,98	-2,14	6,1	5,13
10	Informasi dan Komunikasi	7,33	6,78	14,78	6,31	4,17
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,33	-0,03	1,01	2,75	0,29
12	Real Estat	6,83	7,72	4,47	3,72	2,18
13	Jasa Perusahaan	8,07	7,16	-0,05	1,47	4,27
14	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos wajib	3,36	2,56	2,72	4,28	3,12
15	Jasa Pendidikan	2,89	3,46	-0,32	3,64	2,78
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,27	4,86	11,45	2,39	3,22
17	Jasa Lainnya	6,47	5,12	4,56	0,07	2,06
	PDRB dengan Migas	8,64	7,02	0,03	5,75	8,39
	PDRB tanpa Migas	9,73	7,04	0,31	0,31*	0,31*

Sumber : diolah dari data BPS Kabupaten Muara Enim, 2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun pandemi Covid-19 mempengaruhi kinerja ekonomi daerah, akan tetapi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim tumbuh positif, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim pada tahun 2021 tumbuh sebesar 5,75 persen dan pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 8,39 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim mulai pulih dan bangkit pasca pandemi Covid-19.

Pada tahun 2022 sektor PDRB yang mendominasi adalah sektor pertambangan dan penggalan sebesar 12,35% dari total PDRB dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor sebesar 5,43% dari total PDRB.

Gambar 2.3
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Muara Enim
Tahun 2018-2022



Sumber : diolah dari data BPS Kabupaten Muara Enim, 2023

Tingkat kemiskinan Kabupaten Muara Enim dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2018, angka kemiskinan Kabupaten Muara Enim sebesar 12,56 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2019, 2020, dan 2021 menjadi sebesar 12,41 persen, 12,32 persen, dan 12,32 persen. Angka kemiskinan Kabupaten Muara Enim pada tahun 2021 mengalami stagnan pada angka 12,32 persen. Pada tahun 2022, angka kemiskinan Kabupaten Muara Enim mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 11,12 persen atau mengalami penurunan sebesar 1,20 persen.

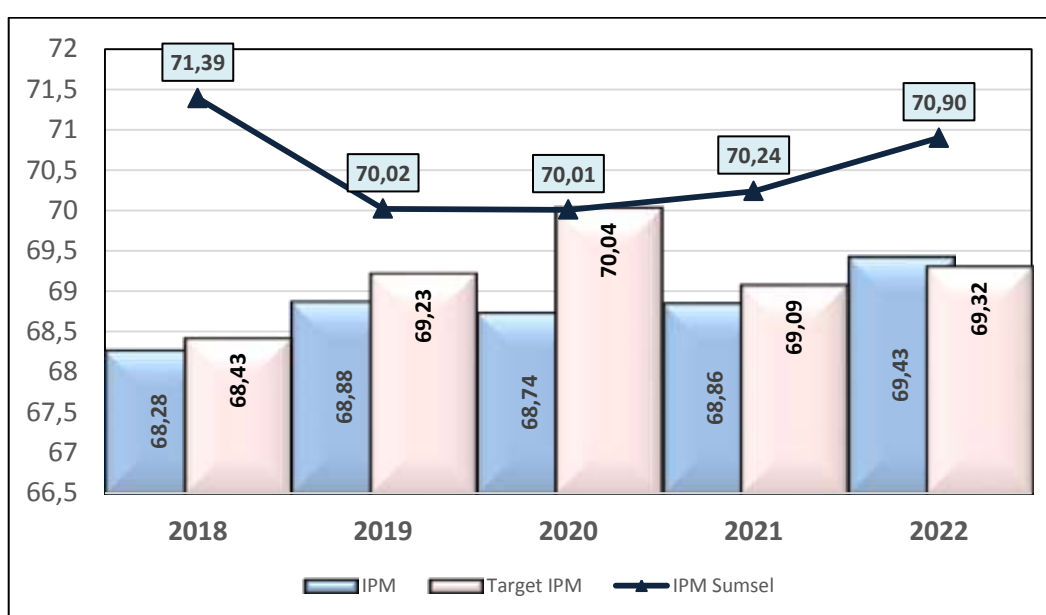
Tabel 2.4
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	628.818	636.815	612.900	617.870	624.019
2	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	77.730	78.750	79.270	80.400	73.530
3	Tingkat Kemiskinan	12,56	12,41	12,32	12,32	11,12
4	Penurunan Angka Kemiskinan	-0,63	-0,15	-0,09	0	-1,20

Sumber : diolah dari data BPS Kabupaten Muara Enim, 2023

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Muara Enim pada tahun 2018-2020 mengalami peningkatan dan penurunan dari 68,28 pada tahun 2018 meningkat menjadi 68,88 pada tahun 2019 dan menurun menjadi 68,74 pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 68,86 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 68,86. IPM Kabupaten Muara Enim berada pada peringkat 6 (enam) dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 2.4
Grafik Trend Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022



Sumber : diolah dari data BPS Kabupaten Muara Enim, 2023

Tabel 2.5
Indeks Pembangunan Manusia per Kabupaten
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022

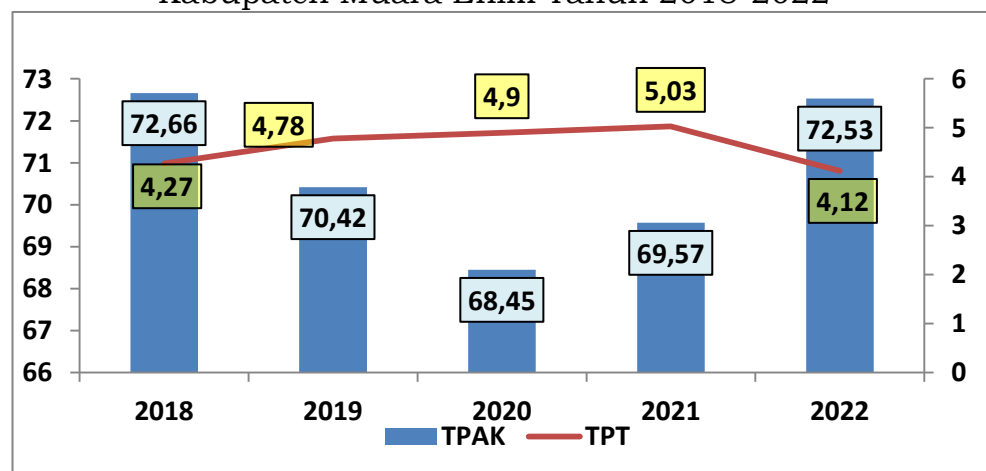
No	Kabupaten	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Palembang	77,89	78,44	78,33	78,72	79,47
2	Lubuk Linggau	74,09	74,81	74,78	74,89	75,53
3	Prabumulih	74,04	74,40	74,55	74,67	75,52
4	Ogan Komering Ulu	69,01	69,45	69,32	69,60	70,24
5	Ogan Komering Ulu Timur	68,58	69,34	69,28	69,58	70,23
6	Muara Enim	68,28	68,88	68,74	68,86	69,43
7	Pagar Alam	67,62	68,44	68,31	68,68	69,60
8	Musi Banyuasin	67,57	67,83	67,69	68,10	68,60

No	Kabupaten	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
9	Lahat	66,99	67,62	67,44	67,58	68,40
10	Ogan Komering Ilir	66,57	66,96	66,82	67,17	68,02
11	Ogan Ilir	66,43	67,22	67,06	67,17	67,96
12	Banyuasin	66,40	66,90	66,74	67,13	67,93
13	Musi Rawas	66,18	66,92	66,79	67,01	67,78
14	Empat Lawang	64,81	65,10	65,25	65,39	66,00
15	Ogan Komering Ulu Selatan	64,84	65,43	65,30	65,34	65,87
16	Musi Rawas Utara	63,75	64,32	64,49	64,93	65,74
17	Penukal Abab Lematang Ilir	63,49	64,33	64,70	64,88	65,75
Provinsi Sumatera Selatan		68,86	70,02	70,01	70,24	70,90

Sumber : diolah dari data BPS Kabupaten Muara Enim, 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Muara Enim dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan Kondisi pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi tingkat pengangguran di Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2018, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Muara Enim sebesar 4,27 persen dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 5,03 persen. Sedangkan pada tahun 2022 TPT Kabupaten Muara Enim mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 4,12 persen

Gambar 2.5
Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022



Sumber : diolah dari data BPS Kabupaten Muara Enim, 2023

Angkatan kerja di Kabupaten Muara Enim cenderung meningkat jika melihat tren tahun 2018-2022. Pada tahun 2022 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Muara Enim sebanyak 349.329 jiwa, dimana 14.387 jiwa diantaranya menganggur. Sedangkan penduduk bukan angkatan kerja pada tahun 2022 sebanyak 132.279 ribu jiwa yang didominasi penduduk dengan kegiatan mengurus rumah tangga sebanyak 81.651 ribu jiwa dan masih sekolah sebanyak 33.027 ribu jiwa.

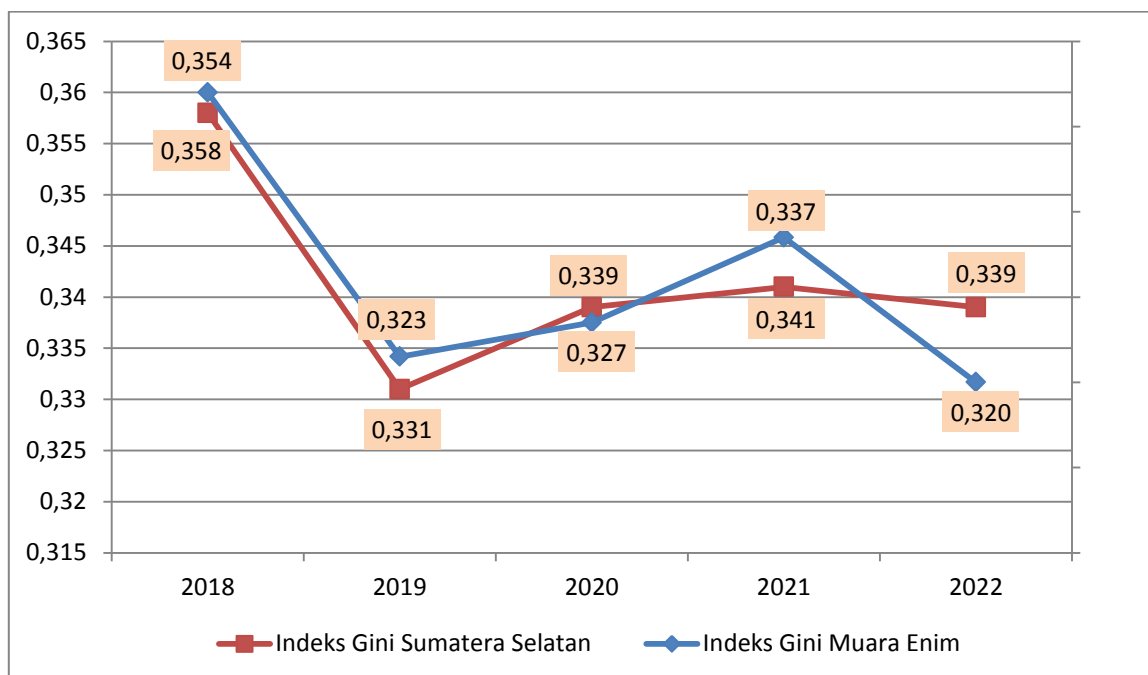
Tabel 2.6
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja	323.200	318.922	319.297	329.810	349.329
Bekerja	309.408	303.675	303.651	313.222	334.942
Menganggur	13.792	15.247	15.646	16.588	14.387
Bukan Angkatan Kerja	121.634	133.952	147.141	144.262	132.279
Sekolah	28.093	32.102	37.220	31.497	33.027
Mengurus Rumah Tangga	75.369	82.055	83.694	85.429	81.651
Lainnya	18.172	19.795	26.227	27.336	17.601
Jumlah	444.834	452.874	466.438	474.072	481.608
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,66%	70,42%	68,45%	69,57%	72,53%
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,27%	4,78%	4,90%	5,03%	4,12%

Sumber : diolah dari data BPS Kabupaten Muara Enim, 2023

Indeks Gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan di Kabupaten Muara Enim cenderung mengalami penurunan setiap tahun dan pada masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan. Indeks Gini Kabupaten Muara Enim pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 0,354 dan 0,323. Pada tahun 2020 menjadi sebesar 0,327, sedangkan pada tahun 2021 meningkat sebesar 0,337 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,320.

Gambar 2.6
Grafik Perkembangan Indeks Gini
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022



Sumber : diolah dari data BPS Provinsi Sumatera Selatan, 2023

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

Dalam upaya pencapaian tujuan otonomi daerah, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, hendaknya aparat pemerintah memberikan pelayanan yang optimal dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Aspek pelayanan umum menyajikan gambaran kinerja pemerintah daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

a) Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Urusan Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu tanpa memandang usia dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. APK Kabupaten Muara Enim dari tahun 2018-2022 berfluktuatif. Pada tahun 2022 APK Kabupaten Muara Enim secara berjenjang tingkat pendidikan nilainya

menurun dari tahun 2022. APK PAUD pada tahun 2022 sebesar 57,10, APK SD/MI sebesar 100,64%, APK SMP/MTs sebesar 87,20%.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara siswa sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APM Kabupaten Muara Enim tahun 2022 secara berjenjang tingkat pendidikan nilainya menurun untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs yaitu sebesar 92,23% untuk SD/MI dan sebesar 73,27% untuk SMP/MTs.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APS Kabupaten Muara Enim pada tahun 2022 sebesar 92,38% untuk umur 7-12 tahun, 73,41% untuk umur 13-15 tahun.

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin maupun huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Melek Huruf Kabupaten Muara Enim tahun 2022 sebesar 98,80%.

Tabel 2.7
Kinerja Bidang Pendidikan
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Partisipasi Kasar (%)					
- PAUD	24,86	24,86	40,10	35,53	57,10
- SD/MI	115,14	119,35	117,92	114,65	100,64
- SMP/MTs	76,75	77,60	77,31	79,08	87,20
- SMA/MA	83,73	93,13	93,86	91,94	-
Angka Partisipasi Murni (%)					
- SD/MI	99,58	98,66	98,41	98,44	92,23
- SMP/MTs	75,69	75,31	75,25	75,72	73,27
- SMA/MA	64,92	65,83	67,83	67,80	-
Angka Partisipasi Sekolah (%)					
- 7 - 12 tahun	99,58	99,62	99,49	99,43	92,38
- 13 - 15 tahun	95,22	95	96,61	96,31	73,41
- 16 - 18 tahun	65,39	66,61	67,83	67,8	-
Angka Melek Huruf (%)	99,89	98,32	98,80	98,85	98,80

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim, 2023

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kabupaten Muara Enim dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim sebagai implementasi dari strategi mewujudkan wajib belajar pendidikan secara maksimal, sehingga setiap anak usia sekolah mendapatkan kemudahan akses pendidikan, baik formal atau informal.

2) Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan Kabupaten Muara Enim dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, RSUD H.M. Rabain dan Fasilitas Kesehatan lainnya yang ada di Kabupaten Muara Enim. Jumlah Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Klinik dan Puskesmas Pembantu) di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2022 sebanyak 135 Fasilitas Kesehatan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim sebanyak 624.019 ribu jiwa maka rasio ketersediaan Fasilitas Kesehatan terhadap jumlah penduduk sebesar 1:4.622.

Tabel 2.8
Rasio Puskesmas, Klinik dan Puskesmas Pembantu
di Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Puskesmas, Klinik dan Puskesmas Pembantu	122	134	136	135	134
Jumlah Penduduk	627.818	636.815	612.900	617.870	572.050
Rasio	1 : 5.146	1 : 4.752	1 : 4.507	1 : 4.577	1 : 4.269

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, 2023

Urusan Kesehatan Kabupaten Muara Enim juga fokus terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sebagai wujud pemenuhan hak dan pelayanan kepada masyarakat. Urusan Kesehatan mengampu 12 (dua belas) indikator SPM yang merujuk kepada 12 (dua belas) jenis pelayanan kepada masyarakat, diantaranya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan

Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, dan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar.

Tabel 2.9
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

No	Indikator SPM	2019		2020		2021		2022	
		Target (%)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	94,53	100	98	100	81	100	89.87
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	95,12	100	92	100	94	100	95.21
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	97,21	100	94	100	94	100	95.6
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	95	100	87	100	86	100	96
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100	98,88	100	15	100	85	100	100
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100	73,33	100	90	100	66	100	88.74
7	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	100	29,94	100	50	100	75	100	93.75
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	75,72	100	98	100	76	100	92.09
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	100	67,01	100	82	100	62	100	87.30
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	58,87	100	68	100	84	100	79.23
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	100	100	46	100	100	100	100

No	Indikator SPM	2019		2020		2021		2022	
		Target (%)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus HIV	100	68,34	100	93	100	93	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, 2023

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan di Kabupaten Muara Enim terbagi menjadi 3 (tiga) kewenangan, yaitu Kewenangan Pusat (Jalan Nasional), Kewenangan Provinsi (Jalan Provinsi), Kewenangan Kabupaten (Jalan Kabupaten). Jalan yang berstatus jalan nasional di Kabupaten Muara Enim sepanjang 212,30 km, jalan provinsi sepanjang 184,17 km, sedangkan jalan kabupaten sepanjang 1.407,15 km dengan kondisi jalan baik sepanjang 1.305,70 km atau 92,79 %.

Tabel 2.10
Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	998,12	1.211,16	1.248,19	1.277,70	1.305,70
2	Panjang seluruh jalan kabupaten	1.386,4	1.395,31	1.396,51	1.400,68	1.407,15
3	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	71,99	86,80	89,38	91,22	92,79
4	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	72,66	75,87	77,08	83,03	61,87 (IKSI)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim, 2023

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat mencakup Urusan Pekerjaan Umum merupakan tolak ukur kinerja pelayanan di bidang perumahan rakyat yang ingin dicapai dan dipenuhi, sebagai ukuran pelayanan minimal yang dilakukan terhadap masyarakat.

Terdapat 4 (empat) jenis pelayanan dasar untuk urusan perumahan rakyat, yaitu 1) penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; 2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik; 3) penyediaan dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi korban bencana kabupaten; dan 4) fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten.

Tabel 2.11
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Kabupaten Muara Enim
Tahun 2020-2022

NO	JENIS LAYANAN DAN INDIKATOR	Target (%)			Realisasi (%)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari						
	<i>Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.</i>	100	100	100	63	82	82
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik						
	<i>Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah</i>	100	100	100	74	82	82
3	Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi korban bencana kabupaten						
	<i>Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni</i>	100	100	100	0	0	0
4	Fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten						
	<i>Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni</i>	100	100	100	0	0	0

Sumber : Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023

4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muara Enim dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

bertujuan untuk memberikan hak dasar masyarakat Kabupaten Muara Enim diantaranya air bersih, listrik dan sanitasi. Pada tahun 2022 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih sebesar 68,30%, Rumah Tangga Pengguna Air Leding dan Kemasan sebesar 28,90%, Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik sebesar 99,49%, dan Persentase Rumah Tangga Mempunyai Jamban Sendiri dengan Tangki Septik sebesar 76,22%.

Tabel 2.12
Kinerja Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	65,63	61,82	62,56	69,57	71,36
2.	Rumah Tangga Pengguna Air Leding dan Kemasan	31,28	28,06	23,75	28,90	19,32*
3.	Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik	99,46	98,54	99,65	99,49	99,49*
4.	Persentase Rumah Tangga Mempunyai Jamban Sendiri dengan Tangki Septik	70,82	71,12	86,83	87,56	87,82
5.	Tanah milik pemerintah bersertifikat yang tercatat pada KIB	10	21	26	32	51

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muara Enim, 2023

5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan, rasa aman dan tentram kepada masyarakat. Adapun kinerja bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat diantaranya rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk sebesar 6,76% pada tahun 2022 dan rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk sebesar 69,85% pada tahun 2022.

Tabel 2.13
Kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	342	422	422	418	418
2.	Jumlah Penduduk (000 jiwa)	627,82	636,82	612,90	617,87	617,85
3.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk (%)	5,45	6,63	6,89	6,76	6,76
4.	Jumlah Linmas	4.211	4.211	4.211	4.211	4.316
5.	Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk (%)	67,07	66,13	68,71	68,15	69,85
5.	Jumlah PPNS yang tersedia	2	3	4	4	4

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim, 2023

Berdasarkan data kualifikasi pendidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim, jumlah pegawai ASN cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jumlah pegawai ASN lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah Non ASN yang berjumlah sebanyak 393 pegawai pada tahun 2022. Komposisi pegawai dengan pegawai Non ASN yang lebih banyak dibandingkan dengan Non ASN yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja, hal tersebut harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Komposisi pegawai yang kurang ideal, dapat mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta menjadi hambatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan kualifikasi dan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 2.14
Kualifikasi Pendidikan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2018-2022

Kualifikasi Pendidikan	Jumlah ASN (Orang)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Strata-2	2	2	2	1	1
Strata-1	16	19	16	16	16
SLTA	15	13	9	8	8
SLTP	1	0	0	0	0
SD	2	1	1	1	1

Kualifikasi Pendidikan	Jumlah ASN (Orang)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah	36	36	28	25	25
Non ASN	323	393	393	393	393

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim, 2023

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Target pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja telah diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.15

Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim Tahun 2020-2022

No	Program Dan Indikator	Target			Realisasi		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (Satu) daerah kabupaten/kota						
	<i>Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada</i>	100	100	100	84	98	100
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota						
	<i>Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada</i>	100	100	100	84	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim, 2023

SPM urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah, diantaranya dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebaran dan Penyelamatan. SPM sub urusan kebakaran diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

6) Urusan Sosial

Urusan Sosial merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Sosial. Urusan Sosial diselenggarakan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dengan meningkatkan pembangunan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial masyarakat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Muara Enim. Urusan Sosial melaksanakan program pembangunan dengan 5 (lima) indikator kinerja tahunan yaitu Jumlah anak terlantar dan orang terlantar/tidak mampu yang mendapatkan perlindungan (berupa bantuan transport kembali ke daerah asal) dengan capaian tahun 2022 sebanyak 0 orang, Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diberikan bantuan) dengan capaian tahun 2022 sebanyak 52.337 KPM, Jumlah penyandang cacat dan trauma yang diberdayakan) dengan capaian tahun 2022 sebanyak 25 orang, Jumlah kelembagaan sosial yang diberdayakan) dengan capaian tahun 2022 sebanyak 2 lembaga sosial, Jumlah Fakir Miskin, KAT dan PMKS yang diberdayakan dengan capaian tahun 2022 sebanyak 10 KUBE.

Tabel 2.16
Kinerja Bidang Sosial
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah anak terlantar dan orang terlantar/tidak mampu yang mendapatkan perlindungan (berupa bantuan transport kembali ke daerah asal)	18 Orang	28 Orang	31 Orang	15 Orang	0 Orang
2	Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diberikan bantuan	769 KPM	37.827 KPM	50.142 KPM	2.261 KPM	52.337 KPM
3	Jumlah penyandang cacat dan trauma yang diberdayakan	184 Orang	114 Orang	184 Orang	58 Orang	25 Orang
4	Jumlah kelembagaan	2	2	2	2	2

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	sosial yang diberdayakan	lembaga	lembaga	lembaga	lembaga	lembaga
5	Jumlah Fakir Miskin, KAT dan PMKS yang diberdayakan	20 KUBE 97 KAT	20 KUBE	10 KUBE	15 KUBE	10 KUBE

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim, 2023

SPM Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim, dengan mempedomani Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. SPM urusan Sosial dilaksanakan dalam rangka penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial di masyarakat

Tabel 2.17
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2022

No	Program Dan Indikator	Target				Realisasi			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Skala Kab/Kota								
	<i>Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti</i>	100	85	85	100	100	9,5	100	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Skala Kab/Kota								
	<i>Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti</i>	100	0	85	87	100	0	100	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Skala Kab/Kota								
	<i>Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti</i>	100	85	85	60	100	100	100	100
4	Rehabilitasi Sosial								

No	Program Dan Indikator	Target				Realisasi			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
	Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti Skala Kab/Kota								
	<i>Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di LuarPanti</i>	0	0	85	33	0	0	45	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tangap darurat bencana alam dan sosial								
	<i>Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana alam dan sosial</i>	100	85	85	94,2	100	100	100	100

b) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan. Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan untuk mewujudkan tenaga kerja yang produktif, kompetitif dan sejahtera. Urusan Tenaga Kerja diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang capaiannya pada tahun 2022 sebesar 4,12%, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang capaiannya pada tahun 2022 sebesar 72,53%, dan Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 73,91%.

Terkait dengan prasarana dan sarana untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, Kabupaten Muara Enim telah memiliki Balai Latihan Kerja dan Workshop sebanyak 1 unit yang berlokasi di Dinas Ketenagakerjaan.

Tabel 2.18
Kinerja Bidang Tenaga Kerja
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,27%	4,78%	4,90%	5,03%	4,12 %
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,66%	70,42%	68,45%	69,57%	72,53%
3.	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	74,77%	73,28%	74,52%	69,43%	73,91%

Sumber : diolah dari data BPS Kabupaten Muara Enim, 2022

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertujuan peran serta perempuan di dalam pembangunan daerah serta melindungi hak-hak perempuan dan anak. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang capaiannya pada tahun 2021 sebesar 89,67%, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang capaiannya pada tahun 2021 sebesar 71,65%, dan Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tahun 2022 sebesar 25 kasus.

Tabel 2.19
Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Pembangunan Gender	89.76	89.69	89.64	89.67	N/A
2.	Indeks Pemberdayaan Gender	61.55	71.07	68.65	71.65	N/A
3.	Jumlah KDRT	-	2	6	14	25

Sumber : Dinas PPPA Kabupaten Muara Enim, 2022

3) Urusan Pangan

Urusan Pangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, dan Dinas Ketahanan Pangan. Urusan Pangan bertujuan untuk menciptakan kedaulatan pangan, ketahanan pangan dan kemandirian pangan bagi daerah serta peningkatan ekonomi masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian. Beras sebagai komoditi utama pangan pada tahun 2022 dengan jumlah produksi 70.916 ton dan konsumsi sebesar 56.867 ton.

Tabel 2.20
Kinerja Bidang Pangan
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

Tahun		Komoditi Beras
2018	Produksi	109.099
	Konsumsi	71.923
	(+/-)	37.176
	Skor pola pangan harapan	87
2019	Produksi	112.372
	Konsumsi	72.954
	(+/-)	39.418
	Skor pola pangan harapan	82
2020	Produksi	115.743
	Konsumsi	62.569
	(+/-)	53.174
	Skor pola pangan harapan	84,2
2021	Produksi	117.597
	Konsumsi	60.066
	(+/-)	57.531
	Skor pola pangan harapan	87,5
2022	Produksi	70.916
	Konsumsi	56.867
	(+/-)	14.049
	Skor pola pangan harapan	85,4

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim, 2023

4) Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Lingkungan Hidup. Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Terdapat 4 (empat) indikator kinerja urusan Lingkungan Hidup, yaitu Indeks Kualitas Air yang capaian pada tahun 2022 sebesar 57,01, Indeks Kualitas Udara yang capaian pada tahun 2022 sebesar 79,98, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang capaian pada tahun 2022 sebesar 61,74, Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang capaian pada tahun 2022 sebesar 36,13.

Tabel 2.21
Kinerja Bidang Lingkungan Hidup
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Kualitas Air	57.01	72.92	87.63	86.11	57,01
2.	Indeks Kualitas Udara	92.93	92.15	95.39	96.81	79,98
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	73.03	73.03	73.29	87.02	36,13
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74.19	74.59	80.84	89.94	61,74

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, 2022

5) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Urusan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga perangkat daerah kecamatan sebagai instansi yang menerima sebagian kewenangan Kepala Daerah di tingkat kecamatan. Adapun indikator kinerja urusan ini, yaitu Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk sebesar 0,99% persen dan Rasio Bayi Berakte Kelahiran sebesar 0,95 %.

Tabel 2.22
Kinerja Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	0,88	0,94	0,94	0.99	0.99
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	0,96	0,89	0,88	0.92	0.95

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Muara Enim, 2022

6) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan tugas umum pemerintahan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, dan pendidikan untuk kemajuan desa. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun indikator kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain, yaitu Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pada tahun 2022 sebesar 245 lembaga, Persentase Desa yang Mampu Menyampaikan RPJMDes Tepat Waktu pada tahun 2022 sebesar 100%, dan Persentase Desa yang Mampu Menyusun Peraturan Desa sebesar 100%.

Tabel 2.23
Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	255	245	245	245	245
2.	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	255	255	255	255	255
3.	Persentase PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Posyandu Aktif	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
5.	Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	74,42%	77,72%	74,21%	81,51%	81,31%
6.	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	75,77%	65,67%	71,21%	75,31%	75,31%
7.	Persentase Desa yang Mampu Menyampaikan RPJMDes Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase Desa yang Mampu Menyusun Peraturan Desa	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim, 2023

7) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan tugas umum pemerintahan dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun indikator kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2022 antara lain Rata-Rata Usia Kawin Pertama pada tahun 2022 sebesar 20 tahun, Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total 2,40, dan Cakupan Peserta KB Aktif 68,20%.

Tabel 2.24
Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rata-rata usia kawin pertama	20 tahun	20,03 tahun	20,06 tahun	23 tahun	20 tahun
2.	<i>Total Fertility Rate/</i> Angka Kelahiran Total	-	2,31	2,31	2,70	2,40
3.	Laju pertumbuhan penduduk	1,46	1,41	1,38	1,34	1,33
4.	Jumlah peserta program KB Aktif	96.568	104.902	106.374	113.592	68.186

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
5.	Jumlah pasangan usia subur	118.563	127.666	125.793	135.094	104.500
6.	Cakupan Peserta KB Aktif	81,48	82,17	84,56	84,08	68,20

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Muara Enim, 2023

8) Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan merupakan urusan pemerintahan daerah yang meliputi pengelolaan dan pengembangan aksesibilitas dan konektivitas yang handal dan berkualitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di daerah. Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Perhubungan. Adapun indikator kinerja di bidang perhubungan, yaitu Jumlah Uji KIR Angkutan Umum yang capaiannya pada tahun 2022 sebanyak 2.616 unit, Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan yang capaiannya pada tahun 2022 sebesar 0,00672, Jumlah Orang yang terangkut Angkutan Umum yang capaiannya pada tahun 2022 sebanyak 1.041.858 orang, Jumlah Orang Melalui Terminal Pertahun yang capaiannya pada tahun 2022 sebanyak 185.239 orang.

Tabel 2.25
Kinerja Bidang Perhubungan
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	6.934	7.265	6.969	2.723	2.616
2.	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0,00592	0,00520	0,00617	0,00592	0,00672
3.	Jumlah Orang yang terangkut Angkutan Umum	1.072.400	1.283.447	849.994	889.398	1.041.858
4.	Jumlah Orang Melalui Terminal Pertahun	2.735	331.601	130.715	144.251	185.239

Sumber : Dinas Perhubungan, 2023

9) Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan persandian. Urusan bidang Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun indikator kinerja dari Urusan Komunikasi dan Informatika, yaitu Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang capaian pada tahun 2022 sebesar 54%, Cakupan Layanan Telekomunikasi yang capaian pada tahun 2022 sebesar 78,78%, Persentase Desa dengan Akses Internet yang capaian pada tahun 2022 sebesar 100%, Indeks SPBE yang capaian pada tahun 2022 sebesar 2,91.

Tabel 2.26
Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

No	Persentase Rumah Tangga	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	54,55%	54,55%	54,55%	54,55%	54,00%
2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	78,77%	78,77%	78,77%	78,77%	78,78%
3.	Persentase Desa dengan Akses Internet	97,15%	100%	97,15%	100%	100%
4.	Indeks SPBE	3,27	2,73	3,27	2,73	2,91

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim, 2023

10) Urusan Koperasi dan UKM

Urusan Koperasi dan UKM merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Koperasi dan UKM. Urusan bidang Koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Adapun indikator kinerja dari Urusan Koperasi dan UKM, yaitu Jumlah Koperasi yang capaian pada tahun 2022 sebanyak 509 koperasi, Jumlah Koperasi Aktif yang capaian pada tahun 2022

sebanyak 377 koperasi, dan Jumlah UMKM yang capaian pada tahun 2022 sebanyak 13.727 UMKM.

Tabel 2.27
Kinerja Bidang Koperasi dan UKM
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Koperasi	Unit	492	497	498	507	509
Koperasi Aktif	Unit	333	347	348	418	377
Jumlah UMKM	Unit	5.818	7.535	9.210	9.543	13.727

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muara Enim, 2023

11) Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Penanaman Modal. Urusan bidang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Adapun indikator kinerja dari Urusan Koperasi dan UKM, yaitu Jumlah Investor PMDN yang capaian tahun 2022 sebanyak 97 investor, Jumlah Investor PMA yang capaian tahun 2022 sebanyak 18 investor, Nilai Realisasi PMDN yang capaian tahun 2022 sebanyak 3,756 Triliun Rupiah, dan Nilai Realisasi PMA yang capaian tahun 2022 sebanyak 13,177 Triliun Rupiah.

Tabel 2.28
Kinerja Bidang Penanaman Modal
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Investor PMDN	28	36	16	59	97
Jumlah Investor PMA	9	9	41	14	18
Nilai Realisasi PMDN (dalam juta)	984.704	847.178	1.137.081	3.116.006	3.756.985
Nilai Realisasi PMA (dalam juta)	5.617.708	8.183.224	8.850.965	9.109.493	13.177.867

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muara Enim, 2023

12) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Kepemudaan dan Olahraga. Urusan bidang bidang Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Adapun indikator kinerja dari Urusan Kepemudaan dan Olahraga, yaitu Jumlah Organisasi Pemuda dengan capaian pada tahun 2022 sebanyak 101 organisasi, dan Jumlah Organisasi Olahraga dengan capaian pada tahun 2022 sebanyak 26 organisasi

Tabel 2.29
Kinerja Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Organisasi Pemuda	51	103	103	103	101
Jumlah Organisasi Olahraga	26	26	26	26	26
Jumlah atlet berprestasi	18	78	7	na	15

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muara Enim, 2023

13) Urusan Statistik

Urusan Statistik merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Statistik. Urusan bidang Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun indikator kinerja dari Urusan Statistik, yaitu Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi, Tersedianya Buku “Kabupaten Dalam Angka”, dan Tersedianya Buku “PDRB”.

Tabel 2.30
Kinerja Bidang Statistik
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	ada	ada	ada	ada	ada
2.	Buku “Kabupaten Dalam Angka”	ada	ada	ada	ada	ada

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
3.	Buku “PDRB”	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim, 2023

14) Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Kebudayaan. Urusan bidang Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun indikator kinerja dari Urusan Kebudayaan, yaitu Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya yang capaian pada tahun 2022 sebanyak 3 kegiatan, Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan sebanyak 13 buah pada tahun 2022, Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasikan dan Diinventarisasi sebanyak 4 karya pada tahun 2022, dan Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola secara Terpadu sebanyak 22 cagar budaya pada tahun 2022.

Tabel 2.31
Kinerja Bidang Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	2	5	0	2	3
2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	22	23	23	23	13
3.	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasikan dan Diinventarisasi	0	2	0	4	4
4.	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola secara Terpadu	15	20	25	30	22

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, 2023

15) Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Urusan Perpustakaan dan Kearsipan merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Urusan bidang Perpustakaan dan Kearsipan

dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Adapun indikator kinerja dari Urusan Perpustakaan dan Kearsipan diantaranya, yaitu Jumlah Perpustakaan yang pada tahun 2022 sebanyak 30 Perpustakaan dan 176 pojok baca, Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahunan pada tahun 2022 sebanyak 12.869 pengunjung, dan Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku sebanyak 75% pada tahun 2022.

Tabel 2.32
Kinerja Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Perpustakaan	22 Perpustakaan dan 58 Pojok Baca	22 Perpustakaan dan 58 Pojok Baca	22 Perpustakaan dan 58 Pojok Baca	26 Perpustakaan dan 104 Pojok Baca	30 Perpustakaan dan 176 Pojok Baca
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahunan	4.538 orang	6.354 orang	7.764 orang	19.053 orang	293.183 orang
3	Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	16.778 judul dan 54.193 eksemplar	17.057 judul dan 56.574 eksemplar	16.987 judul dan 56.504 eksemplar	18.287 judul dan 56.504 eksemplar	410.966 judul dan 1.378.584 eksemplar
4	Jumlah Peminjam Koleksi Bahan Pustaka di Perpustakaan Daerah	2.520 orang	4.150 orang	3.984 orang	7.554 orang	12.869 orang
5	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	10,52 %	17,54 %	33,33 %	65 %	75 %

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim, 2023

c) Urusan Pilihan

1) Urusan Perikanan

Urusan Perikanan merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perikanan. Urusan bidang Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan. Adapun indikator kinerja dari Urusan Perikanan, yaitu Produksi Perikanan Budidaya sebanyak 8.268,72 ton pada tahun 2022, Konsumsi Ikan sebanyak 23,5 kg/kapita, dan Produksi Produk Hasil Olahan Perikanan sebanyak 908,07 ton pada tahun 2022.

Tabel 2.33
Kinerja Bidang Perikanan
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi perikanan budidaya (ton)	6.971,75	7.350,86	7.652,48	7.958.58	8.268.72
Konsumsi ikan (kg/kapita)	40,25	38,86	38,86	39.05	23,5
Produksi produk hasil olahan perikanan (ton)	693,79	742,21	793,21	856.67	908,07

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Muara Enim, 2023

2) Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Pariwisata. Urusan bidang Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Adapun Wisatawan Domestik pada tahun 2022 sebanyak 99.451 orang dan untuk Persentase Kunjungan Wisatawan tahun 2022 sebesar 100%.

Tabel 2.34
Kinerja Bidang Pariwisata
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Wisatawan Domestik	31.508	28.371	9.244	15.000	99.451
Wisatawan Mancanegara	-	-	-	-	-

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Kunjungan wisatawan	31.4%	28.3%	9.14%	14.9%	100%

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim, 2023

3) Urusan Pertanian

Urusan Pertanian merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pertanian. Urusan bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Adapun indikator kinerja bidang Pertanian, yaitu Peningkatan Produksi Padi yang capaiannya pada tahun 2022 sebesar 1,50%, Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB yang capaiannya pada tahun 2022 sebesar 5,68%, dan Persentase Lembaga Tani yang Menerapkan Teknologi Pertanian yang capaiannya pada tahun 2022 sebesar 80,18%.

Tabel 2.35
Kinerja Bidang Pertanian
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Peningkatan produksi padi (persen)	5,03	4,72	5,01	1,51	1,50
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (persen)	9,86	9,45	10,10	8,73	5,68
Persentase lembaga tani yang menerapkan teknologi pertanian (persen)	75,12	77,5	77,99	80,14	80,18

Sumber : Dinas TPHP Kabupaten Muara Enim, 2023

4) Urusan Perkebunan

Urusan Perkebunan merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perkebunan. Urusan bidang Perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan. Adapun indikator kinerja bidang Perkebunan, yaitu Peningkatan Produksi Kopi yang capaiannya pada tahun 2022 sebesar 162,81 ton atau sebesar 2,59%, Peningkatan Produksi Karet yang capaiannya pada tahun 2022 sebesar 985,76 ton

atau sebesar 2,57%, dan Peningkatan Produksi Sawit yang capaiannya pada tahun 2022 sebesar 350,08 ton atau sebesar 0,77%.

Tabel 2.36
Kinerja Bidang Perkebunan
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun									
	2018		2019		2020		2021		2022	
	Ton	%	Ton	%	Ton	%	Ton	%	Ton	%
Peningkatan produksi kopi	1.103	3,92	328	1,2	409,67	1,52	232,57	2,17	162,81	2,59
Peningkatan produksi karet	6.716	3,91	2.011,87	1,2	2.240,49	1,51	1.031,45	2,12	985,76	2,57
Peningkatan produksi sawit	734	1,7	90,17	0,2	139,95	0,31	181,14	0,52	350,08	0,77

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim, 2023

5) Urusan Perdagangan dan Perindustrian

Urusan Perdagangan dan Perindustrian merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perdagangan dan Perindustrian. Urusan bidang Perdagangan dan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan. Adapun indikator kinerja bidang Perdagangan dan Perindustrian, yaitu Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB yang capaiannya pada tahun 2022 sebesar 9,07%, Pertumbuhan Industri Kecil dan Rumah Tangga yang capaiannya pada tahun 2022 sebesar 3,55%, dan Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan sebesar 5,00%.

Tabel 2.37
Kinerja Bidang Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB	14,09	14,18	16,21	15,15	9.07
Pertumbuhan Industri Kecil dan Rumah tangga	18,02	10,08	10,04	9,00	3.55
Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan	7,68	8,02	8,45	8,12	5.00

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Muara Enim, 2023

d) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Urusan Perencanaan

Urusan Perencanaan merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perencanaan. Urusan bidang Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun indikator kinerja bidang Perencanaan, diantaranya yaitu Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD dan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA.

Tabel 2.38
Kinerja Bidang Perencanaan
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah Ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah Ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
4.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RTRW yang telah Ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD	87,98%	94,24%	97,91%	98,43%	98,43%
6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD	87,98%	94,24%	97,91%	98,43%	98,43%

Sumber : Bappeda Kabupaten Muara Enim, 2023

2) Urusan Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Penelitian dan Pengembangan. Urusan bidang Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Adapun indikator kinerja bidang Penelitian dan Pengembangan, diantaranya yaitu Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan dengan capaian 100% pada tahun 2022, Persentase Pemanfaatan Kelitbangan dengan capaian 100% pada tahun 2022, dan Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah dengan capaian 100% pada tahun 2022.

Tabel 2.39
Kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	n/a	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Pemanfaatan Kelitbangan	n/a	80%	100%	80%	100%
3.	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	n/a	71%	96,55%	100%	100%
4.	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	n/a	100%	100%	100%	100%

Sumber : Balibangda Kabupaten Muara Enim, 2023

3) Urusan Keuangan

Urusan Keuangan merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Keuangan. Urusan bidang Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun indikator kinerja bidang Keuangan, yaitu Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan yang berpredikat WTP dari tahun 2018-2022.

Tabel 2.40
Kinerja Bidang Keuangan
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	N/A

Sumber : BPKAD Kabupaten Muara Enim, 2023

4) Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan. Urusan bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Adapun indikator kinerja bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, diantaranya yaitu Rata-Rata Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan dengan capaian 448 orang pada tahun 2022, Jumlah Jabatan Pimpinan tinggi pada Instansi Pemerintah sebanyak 41 orang pada tahun 2022, dan Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah sebanyak 1.455 orang pada tahun 2022.

Tabel 2.41
Kinerja Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rata-Rata Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	1.096	1.040	77	354	448
2.	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	85,73%	-	-	-	-
3.	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	31,89%	36,02%	36,02%	36,02%	36,05%
4.	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	34	34	39	40	41
5.	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	2.425	2.430	2.483	2.544	1.455
6.	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	3.927	4.125	4.324	4.254	4.508

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
7.	Indeks Profesionalitas Aparatur	-	-	57,6	54,3	53,6

Sumber : BKPSDM Kabupaten Muara Enim, 2023

e) Fungsi Penunjang Lainnya

1) Sekretariat DPRD

Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD merupakan fungsi penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD dilaksanakan oleh perangkat daerah Sekretariat DPRD. Adapun indikator kinerja Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD, yaitu Persentase Perundang-Undangan yang Disahkan sebanyak 75% pada tahun 2022, dan Persentase Keputusan Dewan yang Disahkan sebanyak 100% pada tahun 2022.

Tabel 2.42
Kinerja Bidang Sekretariat DPRD
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase Perundang-Undangan yang Disahkan	69,42%	55,55%	66,66%	75%	100%
2.	Persentase Keputusan Dewan yang Disahkan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim, 2023

2) Sekretariat Daerah

Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah merupakan fungsi penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah Sekretariat Daerah. Adapun indikator kinerja Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang capaiannya pada tahun 2022 berpredikat Baik, SAKIP dengan nilai BB pada tahun 2022, dan Konflik Bernuansa SARA sebanyak 0 konflik dari tahun 2018-2022.

Tabel 2.43
Kinerja Bidang Sekretariat Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2.	SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB
3.	Konflik Bernuansa SARA	0	0	0	0	0

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim, 2023

3) Kecamatan

Fungsi Penunjang Kecamatan merupakan fungsi penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Fungsi Penunjang Kecamatan dilaksanakan oleh perangkat daerah Kecamatan. Adapun indikator kinerja Fungsi Penunjang Kecamatan, yaitu Tingkat Kepuasan Masyarakat yang capaiannya pada tahun 2018-2022 berpredikat Baik, dan Tingkat Penyelesaian K3 dari tahun 2018-2022 telah 100% diselesaikan.

Tabel 2.44
Kinerja Bidang Kecamatan
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat	baik	baik	baik	baik	baik
2.	Tingkat Penyelesaian K3	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : PD Kecamatan Kabupaten Muara Enim, 2023

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Pada aspek daya saing daerah akan dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Aspek daya saing daerah terdiri dari 4 (empat) fokus, meliputi kemampuan keuangan daerah, fasilitasi wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

1) Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Tingkat konsumsi masyarakat dapat menggambarkan karakteristik masyarakat. Pada masyarakat yang tingkat ekonominya belum mapan biasanya sebagian besar pendapatan akan dialokasikan kepada kebutuhan pokok. Sedangkan masyarakat yang kondisi ekonominya relatif mapan cenderung lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan sekunder dan tersier. Berdasarkan analisis pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat diketahui perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk dalam suatu wilayah.

Tabel 2.45
Persentase Pengeluaran Masyarakat
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 - 2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Makanan	53,94	52,95	51,59	50,89	55,65
Non-Makanan	46,06	47,05	48,41	49,11	44,35
Total	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim, 2023

Semakin tinggi proporsi pengeluaran untuk kebutuhan non makanan semakin sejahtera penduduk di wilayah tersebut. Dari data sampai dengan tahun 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen rata-rata pengeluaran masyarakat Kabupaten Muara Enim dialokasikan untuk kebutuhan makanan, tetapi persentase ini menurun dimana pada tahun 2018 persentase pengeluaran makanan sebesar 53,94 persen dan menaik pada tahun 2022 menjadi 55,65 persen. Artinya terdapat peningkatan pengeluaran masyarakat Kabupaten Muara Enim pada konsumsi non makanan.

2) Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Dukungan prasarana dan sarana infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dan vital dalam proses percepatan pembangunan daerah. Dukungan infrastruktur

yang memadai dapat dijadikan sebagai keunggulan daya saing daerah dengan daerah lainnya.

Tabel 2.46
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
di Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 – 2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Panjang Jalan	1.775,57	1.790,16	1.791,36	1.797,15	1.407,15
Jumlah Kendaraan	61.648	56.998	48.091	2.723	3.644
Rasio (1/2)	0,03	0,03	0,04	0,66	0,39

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, 2023

Pembangunan prasarana dan sarana pendukung perekonomian tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah semata, akan tetapi kemajuan perekonomian juga sangat ditentukan oleh gerak dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah. Keterlibatan dunia usaha dalam bentuk investasi di daerah, dapat menciptakan percepatan dan pemerataan pembangunan.

Tabel 2.47
Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
di Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik	70.018	73.630	77.465	81.749	85.646

Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim, 2023

3) Fokus Iklim Berinvestasi

Pertumbuhan suatu daerah tidak terlepas dari investasi. Upaya memotivasi masuknya investasi sangat diperlukan. Dukungan *good will* dan *political will* untuk meningkatkan investasi di bidang pelayanan jasa tidak terlepas dari *image* pelayanan Perangkat Daerah.

Mengingat begitu besarnya manfaat investasi bagi peningkatan perekonomian, iklim investasi yang kondusif sangat diperlukan agar dapat

memberikan manfaat luas bagi masyarakat, tidak hanya berdampak terciptanya lapangan kerja melainkan juga stabilitas harga dan peningkatan pajak sebagai pendapatan pemerintah. Pemerintah harus mampu memberikan ketenangan bagi para investor serta terus menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga para investor secara berkelanjutan menanamkan investasinya di Kabupaten Muara Enim.

Tabel 2.48
Angka Kriminalitas
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kasus Narkoba	20	66	44	0	124
2	Jumlah kasus Pembunuhan	8	5	9	8	3
3	Jumlah kasus Kejahatan Seksual (Pemeriksaan)	2	3	4	18	4
4	Jumlah kasus Penganiayaan	16	19	18	40	33
5	Jumlah kasus Pencurian (Curat, Curas, Curanmor)	480	437	317	49	155
6	Jumlah kasus Penipuan	53	42	32	12	0
7	Jumlah kasus Pemalsuan Uang	0	0	1	1	0
8	Jumlah kasus Penculikan	0	0	0	0	1
9	Jumlah kasus Pemerasan	7	4	6	7	2
10	Jumlah kasus Senjata Api/Bahan Peledak	15	17	19	0	17
11	Jumlah kasus Perjudian	76	92	98	6	3
12	Jumlah kasus Lain-Lain (Demonstrasi, Pembakaran, Illegal Mining, Illegal Logging, Korupsi, Sajak)	9	7	5	141	105
13	Total Jumlah tindak kriminal selama satu tahun	686	692	553	282	447
14	Jumlah Penduduk (000)	627,82	636,82	612,90	617,85	624.019
15	Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk (13/14) (%)	10,93	10,87	9,02	4,56	7,16

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim, 2023

4) Fokus Kemudahan Perizinan

Kemudahan prosedur dan tata cara memperoleh perizinan atau pengurusan ijin untuk berinvestasi merupakan salah satu faktor pendukung minat investor untuk berinvestasi. Pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang telah dibentuk di Kabupaten Muara Enim,

merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat dan prima. Percepatan dan perbaikan dalam sistem pelayanan perizinan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi di Kabupaten Muara Enim yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan luar negeri.

Jenis perizinan yang paling banyak diterbitkan oleh Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2022 diantaranya yaitu Izin Praktek Keperawatan sebanyak 482, Izin Praktek Kebidanan sebanyak 433 dan Izin Praktek Dokter Umum sebanyak 106.

Tabel 2.49
Perizinan yang Diterbitkan di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Izin Undang-Undang Gangguan (HO)	0	0	0	0	0
2	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	200	0	0	0	0
	- Mikro	0	0	0	0	0
	- Kecil	140	0	0	0	0
	- Menengah	56	0	0	0	0
	- Besar	4	0	0	0	0
3	Wajib Daftar Perusahaan (TDP)	214	0	0	0	0
	- TDP Perorangan	57	0	0	0	0
	- TDP CV	92	0	0	0	0
	- TDP PT	61	0	0	0	0
	- TDP Koperasi	4	0	0	0	0
4	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	0	0	0	0	0
5	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	57	72	51	50	0
	- Tower	7	3	5	7	0
	- Ruko	9	32	16	23	0
	- RTT	26	16	11	5	0
	- Pemerintah	1	0	2	0	0
	- Industri/Skala Besar	8	11	5	2	0
	- Lainnya	6	10	12	13	0
6	Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional (IUJKN)	33	75	68	11	0
7	Izin Pengelolaan Sarang Walet	0	0	0	0	0
8	Izin Trayek	0	0	0	0	0
9	Izin Usaha Angkutan	0	0	0	0	0
10	Izin Pemantauan Kayu Pada Hutan Rakyat atau Tanah Milik	0	0	0	0	0
11	Izin Lembaga Kursus	0	0	0	0	0
12	Izin Penyelenggaraan Sekolah	0	0	0	0	0

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Swasta					
13	Izin Pendirian satuan PAUD	21	0	0	0	0
14	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah	2	0	0	0	4
15	Izin Pemasangan Reklame	0	0	0	0	0
16	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	5	7	4	3	0
17	Izin Toko Obat	2	0	1	3	1
18	Izin Optik	1	1	1	0	0
19	Izin Depot Isi Ulang Air Mineral	0	1	1	0	0
20	Penyelenggaraan Radio Siaran Non Pemerintah	0	0	0	0	0
21	Izin Usaha Perkebunan (IUP)	0	0	1	0	0
	- Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)	0	1	0	0	0
	- Izin Usaha Perkebunan Pengelolaan (IUP-P)	0	0	0	0	0
22	Izin Praktek Dokter Spesialis	12	18	25	31	53
23	Izin Praktek Dokter Umum	39	40	51	75	106
24	Izin Praktek Dokter Gigi	4	3	17	32	28
25	Izin Praktek Keperawatan	4	151	161	180	482
26	Izin Praktek Bidan	31	200	303	122	433
27	Izin Praktek Operasional Rumah Sakit	0	0	0	0	0
28	Izin Praktek Operasional Puskesmas	0	0	0	0	22
29	Izin Operasional Klinik	5	5	4	9	4
30	Izin Mendirikan Klinik	1	10	0	5	4
31	Izin Fisioterapi	0	0	0	3	9
32	Izin Pengobatan Tradisional	1	0	0	1	1
33	Izin Apotik	7	7	10	23	4
34	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	0	0	0	0	1
35	Tanda Daftar Industri (TDI)	0	0	0	0	0
36	Izin Usaha Industri (IUI)	0	0	0	0	0
37	Tanda Daftar Gudang(TDG)	0	3	1	0	0
38	Izin Lokasi	2	8	5	2	0
	Jumlah	641	670	704	550	1.152

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muara Enim, 2023

Selanjutnya, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 telah terdapat 2 Peraturan Daerah lagi yang turut mendukung iklim usaha di Kabupaten Muara Enim, yaitu :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

2. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Jaringan Elektronik melalui pelayanan *Online* di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

5) Fokus Sumber Daya Manusia

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban tanggungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang termasuk dalam usia tidak produktif (0-14 tahun/penduduk usia muda dan 65 tahun keatas/penduduk usia tua) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Pada tahun 2018 rasio ketergantungan Kabupaten Muara Enim sebesar 0,52 dan menurun pada tahun 2022 menjadi sebesar 0,48.

Tabel 2.50
Rasio Ketergantungan Kabupaten Muara Enim
Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Penduduk usia <15 tahun + usia >65 tahun	206,67	214,29	200,52	205,47	204,16
Penduduk usia 15-65 tahun	402,94	422,53	412,38	412,38	419,86
Rasio ketergantungan	0,52	0,50	0,48	0,49	0,48

Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim, 2023

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah, sehingga kualitas SDM suatu daerah sangat menentukan kualitas pembangunan di daerah tersebut. Kualitas SDM

dapat diukur antara lain melalui tingkat pendidikan. Korelasinya adalah semakin tinggi tingkat pendidikan SDM maka semakin tinggi pula kualitas SDM di suatu wilayah, sehingga semakin berkualitas tenaga kerja di wilayah tersebut.

Tabel 2.51
Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

Tingkat Pendidikan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022*
Belum Tamat SD	1	0	69	816	419
SD Sederajat	6	5	15	2	21
SLTP	166	30	43	11	69
SLTA	1.263	1.188	960	2930	2802
Diploma	103	107	114	120	401
Sarjana	126	177	240	171	711

Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim, 2023

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	GAMBARAN UMUM
BAB	III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB	IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB	V	TUJUAN DAN SASARAN
BAB	VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS
BAB	VII	KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB	VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB	IX	PENUTUP

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah, yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam pengelolaan keuangan daerah, hal tersebut diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam penyusunan APBD sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah harus mempedomani dokumen perencanaan pembangunan daerah, diantaranya yaitu RKPD dan RPJMD. Program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD harus sesuai dan konsisten dengan program yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Gambaran keuangan daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026, memuat kinerja keuangan daerah pada tahun sebelumnya dan proyeksi keuangan daerah di masa mendatang. Gambaran keuangan ini merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang akan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Kinerja keuangan periode sebelumnya merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dalam memproyeksikan pembiayaan pembangunan daerah di masa mendatang. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan tahun sebelumnya, dapat diketahui berapa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan target kinerja keuangan Kabupaten Muara Enim di masa mendatang.

Analisis kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja neraca daerah dan pelaksanaan APBD. Neraca daerah menjelaskan tentang perkembangan neraca daerah yang terdiri dari perkembangan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Sedangkan kinerja pelaksanaan APBD menjelaskan perkembangan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Selain itu, analisis kinerja pelaksanaan APBD juga menjelaskan proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah, serta realisasi pembiayaan daerah.

3.1.1 Neraca Daerah

Neraca daerah memberikan informasi tentang posisi keuangan daerah dari sisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana. Informasi dari neraca ini menjadi salah satu bahan bagi Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki.

Berdasarkan neraca Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022, aset daerah Kabupaten Muara Enim tumbuh rata-rata pertahun sebesar 10,29 persen, kewajiban mengalami penurunan rata-rata pertahun sebesar 7,15 persen, dan ekuitas dana mengalami peningkatan sebesar 10,62 persen.

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

(dalam juta rupiah)

URAIAN	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	Rata- Rata Pertum b (%)
ASET						
ASET LANCAR	502,480	725,771	686,517	788,562	1,168,494	34.14
Kas dan Setara Kas	283,267	327,467	265,059	572,514	879,326	58.48
Piutang	135,143	241,728	258,508	42,408	93,779	23.45
Beban Dibayar Dimuka	970	4,106	4,165	6,650	6,519	80.06
Persediaan	83,101	152,471	158,784	166,990	188,870	60.42
INVESTASI JANGKA PANJANG	335,239	333,066	313,530	320,666	350,272	0.16
Investasi Non Permanen	0	0	0	0	0	0.00
Investasi Permanen	335,239	333,066	313,530	320,666	350,272	0.16
ASET TETAP	4,172,014	4,814,532	5,001,152	5,765,102	6,151,680	9.02
Tanah	187,925	292,428	313,686	1,027,053	1,048,334	58.25
Peralatan dan Mesin	690,496	791,485	917,780	994,642	1,088,706	11.75
Gedung dan Bangunan	1,642,270	1,752,721	1,806,150	1,886,922	2,052,884	5.19
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3,482,501	4,100,416	4,419,154	4,645,334	5,058,807	10.00
Aset Tetap Lainnya	54,816	91,155	112,871	138,103	139,397	26.58
Konstruksi dalam Pengerjaan	15,574	23,783	48,281	88,238	198,212	73.79
Akumulasi Penyusutan	1,901,568	2,237,455	2,616,768	3,015,192	3,434,660	16.42
DANA CADANGAN	0	0	0	0	70,012	20.00
Dana Cadangan	0	0	0	0	70,012	20.00
ASET LAINNYA	68,334	69,120	74,004	70,865	70,545	-0.26
Tagihan Penjualan Angsuran	1,438	1,132	892	654	415	-22.60
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0	0	0	0	0.00
Kemitraan Dengan Pihak Kedua	0	0	0	0	0	0.00
Aset Tak Berwujud	17,367	17,406	18,786	19,150	19,759	3.01
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-15,053	-14,334	-15,442	-16,547	-17,500	5.88
Aset Lain-Lain	64,583	68,017	72,869	74,416	67,909	0.34
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0	-3,100	-3,100	-6,808	-38	4.03
JUMLAH ASET DAERAH	5,078,068	5,942,488	6,075,204	6,945,195	7,811,002	10.29
KEWAJIBAN	118,357	118,750	105,538	98,556	81,541	-7.15
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	24,348	31,019	30,365	29,661	18,924	-0.99
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0	1	32	0	430.40

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata Pertum b (%)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Uang Muka Dari Kas Daerah	0	0	0	0	0	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	351	364	468	482	443	2.94
Utang Bunga	1,575	1,227	730	812	913	0.78
Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga	7	2,187	7	54	169	6346.78
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0	6,279	6,279	6,279	20.00
Utang Pengadaan Aset Tetap/Kepada Pihak Ketiga	0	2,240	10,390	4,515	7,083	20.07
Utang Jangka Pendek Lainnya	22,414	25,001	12,490	17,487	4,038	12.62
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	94,009	87,731	75,174	68,895	62,617	-8.34
Utang Dalam Negeri	94,009	87,731	75,174	68,895	62,617	-8.34
Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0	0	0	0.00
EKUITAS DANA	4,959,711	5,823,739	5,969,665	6,846,639	7,729,461	10.62
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	5,078,068	5,942,488	6,075,204	6,945,195	7,811,002	10.29

Sumber : diolah dari LKPD Kabupaten Muara Enim

a) Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset yaitu potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan maupun penghematan belanja bagi pemerintah.

Berdasarkan Neraca Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022, nilai aset Kabupaten Muara Enim mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,29 persen pertahun. Aset lancar merupakan komponen aset yang mengalami pertumbuhan rata-rata yang cukup dominan, yaitu sebesar 34,14 per tahun.

b) Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewajiban timbul dikarenakan penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau dari lembaga internasional.

Kewajiban pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang merupakan kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang terdiri dari kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, dalam Neraca Daerah cenderung mengalami penurunan rata-rata pertahun sebesar 7,15 persen. Kewajiban jangka pendek cenderung mengalami penurunan rata-rata pertahun sebesar 0,99 persen, dan kewajiban jangka panjang juga cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata pertahun sebesar 8,34 persen.

c) Ekuitas Dana

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Berdasarkan Neraca Daerah Kabupaten Muara Enim dalam 5 (lima) tahun terakhir, Ekuitas Dana Kabupaten Muara Enim mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,62 persen per tahun. Jumlah kewajiban dan ekuitas dana Kabupaten Muara Enim dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 10,29 persen.

3.1.2 Kinerja Pelaksanaan APBD

a) Pendapatan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah selaku Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku Legislatif, dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dengan menggunakan pendekatan kinerja.

Pendekatan kinerja dalam perencanaan dan penganggaran berfokus kepada kinerja yang terukur dari aktivitas program dan kegiatan. Terdapat tolak ukur yang ditetapkan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan pelaksanaan suatu program dan kegiatan, yang akan mempermudah Pemerintah Daerah untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Struktur APBD diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan.

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

(dalam juta rupiah)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	Rata- Rata Pertumb (%)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
PENDAPATAN DAERAH	2,525,584	3,072,025	2,460,177	2,739,438	3,274,039	7.54
PENDAPATAN ASLI DAERAH	232,469	303,296	248,525	240,473	251,758	3.26
Pajak Daerah	69,038	139,779	81,431	83,461	89,016	15.99
Retribusi Daerah	24,516	8,414	7,847	7,598	4,655	3.83
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	17,161	18,458	19,194	11,216	33,936	55.42
Lain-Lain PAD yang sah	121,754	136,646	140,053	138,198	124,152	-2.60
PENDAPATAN TRANSFER	2,182,846	2,640,603	2,096,643	2,392,310	2,990,914	9.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	2,044,171	2,428,205	1,928,023	2,236,607	2,736,661	8.28
Pendapatan Transfer Antar Daerah	138,675	212,399	168,620	155,703	254,252	20.76
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	110,269	128,126	115,009	106,656	31,366	-13.62
Pendapatan Hibah	106,587	123,351	113,332	13,021	23,150	-0.14
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	3,682	4,775	1,677	93,635	8,216	1085.19

Sumber : diolah dari LKPD Kabupaten Muara Enim

Pada aspek pendapatan daerah, dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 7,54 persen. Pendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 3,26 persen, Pendapatan Transfer mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 9,00 persen, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah cenderung mengalami penurunan rata-rata pertahun sebesar 13,62 persen.

b) Belanja Daerah

Belanja daerah mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 5,94 persen, dengan rincian belanja operasi mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 4,50 persen, belanja modal sebesar 16,59 persen, belanja tidak terduga sebesar 199,05 persen, dan belanja transfer sebesar 3,58 persen.

Alokasi dan realisasi belanja daerah Kabupaten Muara Enim tertinggi pada Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Tabel 3.3
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

(dalam juta rupiah)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata Pertumb (%)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
BELANJA	2,434,360	2,992,194	2,511,882	2,406,931	2,860,522	5.94
BELANJA OPERASI	1,466,820	1,642,749	1,501,902	1,555,616	1,678,255	4.50
Belanja Pegawai	739,817	762,269	754,378	798,589	841,936	3.23
Belanja Barang dan Jasa	629,124	827,968	710,282	717,341	783,817	7.20
Belanja Bunga	6,800	8,010	6,159	4,624	4,891	-3.81
Belanja Subsidi	4,816	4,443	3,073	477	81	-26.10
Belanja Hibah	86,262	38,681	25,676	31,981	44,940	7.20
Belanja Bantuan Sosial	0	1,378	2,333	2,604	2,591	36.09
BELANJA MODAL	556,629	888,469	541,986	431,576	767,192	16.59
Belanja Modal Tanah	6,000	9,080	5,076	5,180	2,496	58.59
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66,880	104,639	121,893	83,807	98,459	6.78
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128,872	135,461	75,573	93,440	182,055	13.06
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	333,550	618,017	323,497	237,037	474,677	28.54
Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0	0	0	0.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21,328	21,271	15,948	12,112	9,505	-22.29
BELANJA TIDAK TERDUGA	1,444	3,025	36,636	7,533	1,065	199.05

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata Pertumb (%)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Belanja Tidak Terduga	1,444	3,025	36,636	7,533	1,065	199.05
BELANJA TRANSFER	409,467	457,950	431,357	412,205	414,011	3.58
Belanja Bagi Hasil Pendapatan	10,555	12,668	6,982	9,597	8,690	0.63
Belanja Bantuan Keuangan	398,913	445,282	424,376	402,608	405,321	3.07

Sumber : diolah dari LKPD Kabupaten Muara Enim

c) Pembiayaan Daerah

Selain Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, terdapat pos Pembiayaan Daerah yang merupakan bagian dari Struktur APBD. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pada aspek pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan daerah setiap tahun cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, realisasi penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2018 sebesar Rp195,173 Milyar dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi Rp 572,482 Milyar. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah cukup berfluktuatif, dari Rp3,139 Milyar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp106,672 Milyar pada tahun 2022.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada APBD dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan, realisasi SILPA pada tahun 2018 sebesar Rp283,257 Milyar dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp879,326 Milyar.

Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

(dalam juta rupiah)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata Pertumb (%)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
PEMBIAYAAN						
Penerimaan Pembiayaan	195,173	283,257	327,460	265,057	572,482	173.88
Pengeluaran Pembiayaan	3,139	35,624	10,698	25,083	106,672	266.15
Pembiayaan Netto	192,034	247,633	316,762	239,974	465,810	-138.78
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	283,257	327,465	265,057	572,482	879,326	58.48

Sumber : diolah dari LKPD Kabupaten Muara Enim

3.1.3 Analisis Rasio Keuangan Daerah

a) Analisis Rasio Likuiditas

Analisis rasio keuangan daerah dilakukan untuk mengetahui kondisi atau kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, melalui perbandingan data keuangan yang ada di setiap pos laporan keuangan. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menilai kinerja keuangan daerah, diantaranya yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas.

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan daerah untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Adapun rasio yang digunakan dalam analisis ini adalah :

1. *Current Ratio* (rasio lancar), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan daerah untuk melunasi utang lancarnya (kewajiban jangka pendek) menggunakan aset lancar yang dimiliki. Suatu daerah dinilai mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya apabila hasil dari rasio lancar lebih dari satu.

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan dalam tabel, dapat diketahui bahwa kemampuan Kabupaten Muara Enim sangat baik

untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui aset lancar yang dimiliki. Rata-rata rasio lancar Kabupaten Muara Enim selama tahun 2018-2022 adalah sebesar 31,00.

2. *Quick Acid Ratio* (rasio cepat), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang paling likuid, dimana persediaan dikeluarkan dari perhitungan aset lancar karena merupakan komponen dari aset lancar yang paling tidak likuid. Daerah dianggap mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya apabila hasil dari rasio cepatnya lebih dari satu.

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan dalam tabel, rasio cepat Kabupaten Muara Enim sangat baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya apabila menggunakan aset lancarnya yang paling likuid. Rata-rata rasio cepat Kabupaten Muara Enim selama tahun 2018-2022 adalah sebesar 25,16.

Tabel 3.5
Hasil Analisis Rasio Likuiditas
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
1)	<i>Current Ratio</i> (Rasio Lancar)	20,64	23,40	22,61	26,59	61,75	31,00
2)	<i>Quick Acid Ratio</i> (Ratio Cepat)	17,22	18,48	17,38	20,96	51,77	25,16

Sumber : diolah dari LKPD Kabupaten Muara Enim

b) Analisis Rasio Solvabilitas

Selanjutnya untuk mengukur kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiaban jangka panjangnya perlu adanya perhitungan Rasio Solvabilitas. Selain itu, rasio solvabilitas juga digunakan sebagai indikator tingkat keamanan dari sisi kreditur.

1. *Debt to equity ratio* (rasio utang terhadap modal), merupakan salah satu alat analisis rasio solvabilitas. Rasio ini membandingkan total utang yang dimiliki dengan nilai kekayaan bersih dari suatu entitas. Nilai rasio utang terhadap modal yang tidak melebihi satu menunjukkan bahwa entitas tersebut mandiri secara finansial atau tidak bergantung kepada kreditur dalam hal pembiayaan.

Berdasarkan hasil perhitungan, Kabupaten Muara Enim memiliki rasio utang terhadap modal yang sangat baik. Sepanjang periode tahun 2018-2022 rasio rata-rata utang terhadap modal tercatat sebesar 0,02 dimana rasio terbaik dicapai pada tahun 2021 dan 2022 serta yang terendah pada tahun 2017, 2018, dan 2019.

2. *Debt to Asset Ratio* (rasio utang terhadap aset), Rasio total hutang terhadap total aset, adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya menggunakan aset yang dimilikinya, yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan informasi semakin besar resiko yang dihadapi oleh kreditur. Sama seperti rasio utang terhadap modal, kemampuan Kabupaten Muara Enim untuk memenuhi kewajiban jangka panjang menggunakan asetnya tergolong sangat baik. Sepanjang periode tahun 2018-2022 berdasarkan tabel di atas, rata-rata rasio utang terhadap aset adalah sebesar 0,02. Rasio utang terhadap aset terbaik dicapai pada tahun 2021 dan 2022.

Tabel 3.6
Hasil Analisis Rasio Solvabilitas
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
1)	<i>Debt to Equity Ratio</i> (Rasio Utang terhadap Ekuitas)	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02
2)	<i>Debt to Asset Ratio</i> (Rasio Utang terhadap Aset)	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02

Sumber : diolah dari LKPD Kabupaten Muara Enim

Hasil analisis terhadap *current ratio* dan *quick acid ratio* atas keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim menunjukkan kekuatan kemampuan keuangan yang baik. Demikian halnya dengan rasio total hutang terhadap ekuitas dan aset yang rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan kapasitas keuangannya relatif cukup besar bila terdapat rencana peminjaman dana untuk pembangunan-pembangunan, terlebih yang bersifat jangka menengah maupun jangka panjang. Hal ini merupakan opsi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam rangka lebih mendorong pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada publik.

c) Analisis Rasio Aktivitas

Analisis rasio aktivitas merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa efisien penggunaan aset daerah dalam melaksanakan operasinya. Salah satu rasio yang digunakan dalam analisis ini adalah *Account Receivable Turnover* (perputaran piutang). Perputaran piutang mengukur berapa kali piutang dapat dirubah menjadi uang tunai dalam satu periode. Semakin besar hasil perhitungan perputaran piutang mengindikasikan suatu daerah sudah efisien dan efektif dalam menagih piutangnya.

Tabel 3.7
Hasil Analisis Rasio Aktivitas
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

(dalam juta rupiah)

NO	TAHUN	PENDAPATAN DAERAH	PIUTANG DAERAH	PERPUTARAN PIUTANG
1.	2018	2.525.584	135.143	18,69
2.	2019	3.072.025	241.728	12,71
3.	2020	2.460.177	258.508	9,52
4.	2021	2.739.438	42.408	64,60
5.	2022	3.274.039	93.779	34,91

Sumber : diolah dari LKPD Kabupaten Muara Enim

Berdasarkan tabel di atas, perputaran piutang Kabupaten Muara Enim sepanjang periode tahun 2018-2022 sangat berfluktuasi. Di mana tahun 2020 merupakan capaian terendah daerah dalam menagih piutangnya dengan perputaran piutang sebesar 9,52. Sedangkan capaian tertinggi daerah dalam menagih piutangnya yaitu pada tahun 2021 dengan perputaran piutang sebesar 64,60.

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah selama periode 2018-2022, dapat diuraikan sebagai berikut :

- (1) Pendapatan Daerah dari Pemerintah Pusat yang diperoleh dari bagian daerah atas Dana Transfer merupakan sumber utama Pendapatan Daerah, dengan tetap berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah.
- (2) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan, harus ditetapkan dalam APBD Kabupaten Muara Enim.

- (3) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- (4) Komposisi belanja daerah, didasarkan pada kebutuhan objektif, efektif dan efisien, dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kinerja untuk memperoleh hasil optimal, sesuai prinsip anggaran yang berbasis kinerja.
- (5) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD / Perubahan APBD.
- (6) Pengelolaan keuangan daerah wajib mempedomani azas umum yaitu:
 - a. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - b. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD dan ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Daerah.
 - c. Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
 - d. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan tugas desentralisasi, didanai oleh APBD.
 - e. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah, yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan negara dan daerah.

- f. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- g. Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
- h. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, yang dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan.
- i. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah, yang dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja.
- j. Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pembiayaan.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menggambarkan komposisi anggaran pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Belanja daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022 didominasi oleh belanja operasi. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa,

belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Realisasi belanja operasi pada tahun 2018 sebesar Rp1,466,820 Triliun dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi Rp 1,678,255 Triliun.

Sedangkan realisasi belanja modal mengalami fluktuatif, realisasi belanja modal pada tahun 2018 sebesar Rp556,629 Milyar. Jika melihat realisasi dalam 5 (lima) tahun terakhir, realisasi belanja modal tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp888,469 Milyar. Sedangkan pada tahun 2022, realiasi belanja modal menjadi sebesar Rp767,192 Milyar.

Tabel 3.8
Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

(dalam juta rupiah)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
BELANJA	2,434,360	2,992,194	2,511,882	2,406,931	2,860,522
BELANJA OPERASI	1,466,820	1,642,749	1,501,902	1,555,616	1,678,255
Belanja Pegawai	739,817	762,269	754,378	798,589	841,936
Belanja Barang dan Jasa	629,124	827,968	710,282	717,341	783,817
Belanja Bunga	6,800	8,010	6,159	4,624	4,891
Belanja Subsidi	4,816	4,443	3,073	477	81
Belanja Hibah	86,262	38,681	25,676	31,981	44,940
Belanja Bantuan Sosial	0	1,378	2,333	2,604	2,591
BELANJA MODAL	556,629	888,469	541,986	431,576	767,192
Belanja Modal Tanah	6,000	9,080	5,076	5,180	2,496
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66,880	104,639	121,893	83,807	98,459
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128,872	135,461	75,573	93,440	182,055
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	333,550	618,017	323,497	237,037	474,677
Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0	0	0
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21,328	21,271	15,948	12,112	9,505
BELANJA TIDAK TERDUGA	1,444	3,025	36,636	7,533	1,065
Belanja Tidak Terduga	1,444	3,025	36,636	7,533	1,065
BELANJA TRANSFER	409,467	457,950	431,357	412,205	414,011
Belanja Bagi Hasil Pendapatan	10,555	12,668	6,982	9,597	8,690
Belanja Bantuan Keuangan	398,913	445,282	424,376	402,608	405,321

Sumber : diolah dari LKPD Kabupaten Muara Enim

Pada aspek proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur selama tahun 2018-2022 cukup berfluktuatif, proporsi kebutuhan belanja aparatur paling rendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 25,18 persen dan tertinggi terjadi pada tahun 2021 menjadi sebesar 32,84 persen.

Tabel 3.9
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

(dalam juta rupiah)

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja+Pengeluaran Pembiayaan (Rp)	%
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	Tahun anggaran 2018	739,817	2,437,499	30.35
2	Tahun anggaran 2019	762,269	3,027,817	25.18
3	Tahun anggaran 2020	754,378	2,522,579	29.91
4	Tahun anggaran 2021	798,589	2,432,014	32.84
5	Tahun anggaran 2022	841,936	2,967,194	28,37

Sumber : diolah dari LKPD Kabupaten Muara Enim

3.2.1 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran.

Defisit riil keuangan Kabupaten Muara Enim terjadi jika realisasi pendapatan daerah Kabupaten Muara Enim lebih kecil dibandingkan dengan realisasi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Tabel 3.10
Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

(dalam juta rupiah)

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2,525,584	3,072,025	2,460,177	2,739,438	3,274,039
	<i>Dikurangi realisasi :</i>					
2	Belanja Daerah	2,434,360	2,992,194	2,511,882	2,406,931	2,860,522
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3,139	35,624	10,698	25,083	106,672
	Defisit riil	88,084	44,208	-62,403	307,424	306,844

Sumber : diolah dari LKPD Kabupaten Muara Enim

Defisit riil terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp62,403 Milyar, sedangkan pada tahun 2018, 2019, dan 2022 mengalami surplus. Defisit riil tersebut ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya.

Tabel 3.11
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

(dalam juta rupiah)

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	125,173	283,257	327,460	265,057	572,482
2	Pencairan Dana Cadangan	70,000	0	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0

Sumber : diolah dari LKPD Kabupaten Muara Enim

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Muara Enim bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana transfer atau dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan sisa penghematan belanja daerah.

Tabel 3.12

Relisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

(dalam juta rupiah)

No	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	283,257		327,465		265,057		572,482		879,326	
2	Pelampauan penerimaan PAD	4,879	1.72	-31,456	(9.61)	13,096	4.94	-2,407	(0.42)	-4,908	(0.56)
3	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	74,728	26.38	79,759	24.36	-11,337	(4.28)	233,823	40.84	493,552	56.13
4	Pelampauan penerimaan lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-77,572	(27.4)	6,777	2.07	-1,303	(0.49)	-17,994	(3.14)	6,791	0.77
5	Sisa penghambatan belanja atau akibat lainnya	282,147	99.61	271,627	82.95	264,600	99.83	339,535	59.31	383,891	43.66
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0.00	0	0.00	7	0.00	0	0.00	169	0.02
7	Kegiatan lanjutan	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

Sumber : diolah dari LKPD Kabupaten Muara Enim

3.3 KERANGKA PENDANAAN DAERAH

Pencapaian kinerja pembangunan daerah ke depan, harus didukung dengan pendanaan yang memadai, agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Proyeksi kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kemampuan keuangan atau kapasitas riil keuangan Kabupaten Muara Enim dalam melaksanakan program pembangunan daerah, sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

a) Pendapatan Daerah

Berdasarkan pertimbangan perkembangan keuangan daerah, maka kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Muara Enim selama tahun 2024-2026 diarahkan pada hal-hal berikut, yaitu :

- (1) Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut :
 - a. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
 - c. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
 - d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan pajak dan retribusi daerah;

- e. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah melalui pengawasan di lapangan secara terus-menerus, menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif, yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset produktif lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari pengelolaan aset tersebut;
 - g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah termasuk meningkatkan bagian laba BUMD; dan
 - h. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan berbagai pihak termasuk dunia usaha, dalam pemungutan, pencatatan, dan pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Mengupayakan peningkatan penerimaan dari Dana Transfer terutama dana bagi hasil pengelolaan sumber daya alam secara lebih adil dan dana bagi hasil Pajak Daerah Provinsi antara lain :
- a. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
 - b. Mengikuti rapat koordinasi dan rekonsiliasi pelaksanaan kegiatan *Lifting* Migas dan Minerba, serta mengikuti rapat rekonsiliasi perhitungan Minerba dan perhitungan Migas dengan Pemerintah Pusat;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pengalokasian dan pengelolaan Dana Perimbangan/ Transfer dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi;
 - d. Mengupayakan peningkatan Dana Alokasi Khusus;

- (3) Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan perangkat daerah dalam pengelolaan berbagai aset daerah;
- (4) Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru dan sah menurut peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari pendanaan peran serta dunia usaha dalam pembangunan daerah, dengan mempedomani Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Peran Serta Badan Usaha, Masyarakat, dan Luar Negeri Untuk Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Muara Enim.

Tabel 3.13

Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026

(dalam juta rupiah)

URAIAN	PROYEKSI (Rp)			Rata-Rata Pertumb (%)
	2024	2025	2026	
PENDAPATAN DAERAH	2,760,235	2,942,134	3,136,021	6.59
PENDAPATAN ASLI DAERAH	261,690	278,936	297,318	6.59
Pajak Daerah	89,443	95,338	101,620	6.59
Retribusi Daerah	12,699	13,536	14,428	6.59
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	15,467	16,486	17,573	6.59
Lain-Lain PAD yang sah	144,080	153,575	163,696	6.59
PENDAPATAN TRANSFER	2,379,702	2,536,525	2,703,682	6.59
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	2,214,346	2,360,271	2,515,813	6.59
Pendapatan Transfer Antar Daerah	165,357	176,254	187,869	6.59
LAIN-LAIN PD YANG SAH	118,842	126,674	135,022	6.59
Pendapatan Hibah	95,462	101,753	108,458	6.59
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	23,381	24,921	26,564	6.59

Pada tahun 2024-2026, Pendapatan Daerah diproyeksikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,59 persen per tahun. Pendapatan Daerah diproyeksikan masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat. Pendapatan Transfer diharapkan mampu ditingkatkan setiap tahunnya. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, diharapkan mampu ditingkatkan di masa mendatang.

b) Belanja dan Pembiayaan Daerah

Kebijakan belanja daerah merupakan upaya mewujudkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan partisipatif dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal dan berorientasi pada pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Selain itu, kebijakan belanja daerah tersebut merupakan bagian dari upaya dan tekad yang kuat Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk mendorong pengelolaan anggaran daerah yang lebih berpihak kepada masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024-2026, diantaranya adalah sebagai berikut :

- (1) Menerapkan manajemen perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan konsisten dan berkesinambungan, sehingga setiap belanja daerah yang dilakukan seluruh perangkat daerah harus dapat menjamin terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- (2) Menggunakan sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terpadu atau terintegrasi, sehingga seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim menyusun dan menetapkan belanja dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara konsisten sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini dilakukan untuk mencegah inefisiensi alokasi yang disebabkan oleh program dan kegiatan yang tumpang tindih, tidak terarah, tidak konsisten dengan perencanaan tugas pokok dan fungsi, serta tidak memberikan sumbangan nyata bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan; dan

- (3) Meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah agar mampu merencanakan kegiatan secara cermat, akurat dan terukur disertai dengan indikator kinerja yang jelas, spesifik, dan terukur, sehingga dapat dicapai agar belanja daerah menghasilkan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara nyata.

Tabel 3.14

Proyeksi Anggaran Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026

(dalam juta rupiah)

Uraian	Proyeksi (Rp)			Rata-rata Pertumb (%)
	2024	2025	2026	
BELANJA	3,127,261	3,312,413	3,483,655	5.92
BELANJA OPERASI	1,877,283	1,988,429	2,091,225	5.92
Belanja Pegawai	943,053	998,887	1,050,527	5.92
Belanja Barang dan Jasa	860,875	911,844	958,984	5.92
Belanja Bunga	8,004	8,477	8,916	5.92
Belanja Subsidi	3,887	4,117	4,330	5.92
Belanja Hibah	59,937	63,486	66,768	5.92
Belanja Bantuan Sosial	1,526	1,617	1,700	5.92
BELANJA MODAL	723,218	766,037	805,639	5.92
Belanja Modal Tanah	6,504	6,889	7,245	5.92
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119,453	126,525	133,066	5.92
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	147,939	156,698	164,799	5.92
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	422,211	447,208	470,328	5.92
Belanja Modal Aset Lainnya				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27,112	28,717	30,202	5.92
BELANJA TIDAK TERDUGA	13,085	13,859	14,576	5.92

Uraian	Proyeksi (Rp)			Rata-rata Pertumb (%)
	2024	2025	2026	
Belanja Tidak Terduga	13,085	13,859	14,576	5.92
BELANJA TRANSFER	513,675	544,088	572,216	5.92
Belanja Bagi Hasil Pendapatan	9,545	10,110	10,633	5.92
Belanja Bantuan Keuangan	504,130	533,978	561,583	5.92
Surplus/(Defisit)	-367,026	-370,279	-347,634	0.89
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	378,304	381,557	358,912	0.86
Pengeluaran Pembiayaan	11,279	11,279	11,279	0.00
Pembiayaan Netto	367,025	370,278	347,633	0.89
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0

Berdasarkan data proyeksi Belanja dan Pembiayaan Daerah pada tahun 2024-2026 diproyeksikan mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Proyeksi Belanja Daerah diharapkan dapat tumbuh rata-rata sebesar 5,92 persen pertahun. Sedangkan proyeksi pembiayaan daerah diharapkan mampu menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Pembiayaan daerah terdiri dari dua komponen yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Proyeksi penerimaan pembiayaan pada tahun 2024-2026 didasari dengan asumsi yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada tahun anggaran sebelumnya, dan diharapkan proyeksi tersebut tidak akan tercapai dengan meningkatkan pos-pos penerimaan pendapatan daerah. Sedangkan proyeksi pengeluaran pembiayaan pada tahun 2024-2026 didasari dengan asumsi yaitu pembayaran pinjaman daerah dari Pemerintah Pusat atau pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo dan penyertaan modal daerah.

Terhadap pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim, Pemerintah Kabupaten Muara Enim mendorong peran serta dunia usaha, khususnya yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muara Enim, untuk dapat memperhatikan pembangunan di wilayah operasi perusahaan dan ikut serta dalam percepatan pembangunan daerah, hal ini dilakukan diantaranya melalui Forum *Corporate Social Responsibility*-Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR-PKBL) Kabupaten Muara Enim.

Sampai dengan saat ini, peran Forum *Corporate Social Responsibility*-Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR-PKBL) Kabupaten Muara Enim sangat efektif dalam mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Faktor keterbatasan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim, diharapkan mampu diakomodir dan didanai oleh pendanaan Non APBD melalui peran perusahaan dalam pendanaan pembangunan yang bersumber dari dana CSR-PKBL.

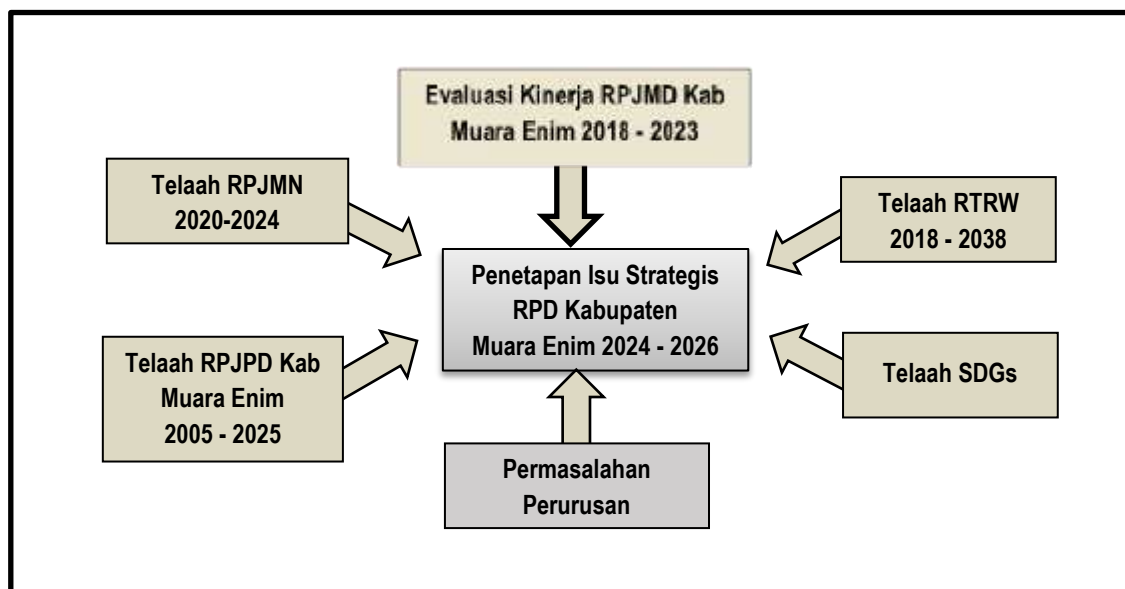
BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	GAMBARAN UMUM
BAB	III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB	IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB	V	TUJUAN DAN SASARAN
BAB	VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS
BAB	VII	KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB	VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB	IX	PENUTUP

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Muara Enim diidentifikasi melalui permasalahan pembangunan pada masing-masing urusan pembangunan daerah. Sedangkan isu strategis merupakan rumusan dari berbagai permasalahan yang perlu diatasi melalui berbagai strategi dan kebijakan pembangunan daerah. Analisis terhadap permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Muara Enim, diidentifikasi melalui serangkaian proses yang dimulai dari identifikasi permasalahan menurut urusan pemerintahan dan analisis lingkungan strategis sampai dengan penentuan dan penetapan permasalahan dan isu-isu strategis yang dituangkan dalam RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026. Adapun penjelasannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.1
Komponen Pembentuk Isu Strategis Kabupaten Muara Enim



4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak bisa terlepas dari segala perubahan tata kehidupan nasional dalam berbagai aspek. Tiap aspek dalam tata kehidupan nasional maupun skala daerah relatif berubah menurut waktu, ruang dan lingkungan terutama pada aspek-aspek dinamis. Respon yang efektif terhadap dinamika perubahan terutama untuk menghadapi tantangan potensial dan menangkap peluang sangat penting agar cita-cita dan harapan bersama untuk mewujudkan masa depan lebih baik bagi Kabupaten Muara Enim dalam kurun waktu lima tahun kedepan dapat terwujud.

Tantangan dan ancaman sebagai permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Oleh karena itu tahap Identifikasi Masalah sangat berperan penting dalam proses perencanaan sebelum melakukan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama dalam rangka penyelesaian masalah tersebut.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/hambatan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

4.1.1 Telaahan RPJPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025

RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025. Dalam RPJPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 dinyatakan bahwa visi yang ingin dicapai oleh Kabupaten Muara Enim pada tahun 2025 adalah : “Kabupaten Muara Enim Yang Sehat, Mandiri, dan Sejahtera”.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut pada saat ini berada pada Tahap 4 (empat) RPJPD IV 2021-2025 yaitu Memprioritaskan Pembangunan Pada Aspek Pemantapan Ekonomi Lokal, sehingga memiliki daya saing Melalui Pengembangan Kerjasama Antar Lembaga, Antar Wilayah, Peningkatan Kualitas SDM Dan IPTEK, Peningkatan Infrastruktur, Kelembagaan, Sumber Penerimaan Daerah, Pendapatan Masyarakat.

Tabel 4.1

Arah dan Tahap Pembangunan RPJPD
Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025

NO	ARAH PEMBANGUNAN	TAHAP PEMBANGUNAN
1.	ARAH PEMBANGUNAN SEHAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT : a. Meningkatkan penyediaan kebutuhan sandang, pangan dan papan b. Mendorong terciptanya masyarakat yang bermoral, berbudi luhur dan berakhlak mulia c. Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan d. Mendorong peran serta masyarakat untuk berperilaku sehat dan menciptakan lingkungan yang sehat	Tahap 4 RPJM IV 2021-2025, yaitu : Memprioritaskan Pembangunan Pada Aspek Pemantapan Ekonomi Lokal, sehingga memiliki daya saing Melalui Pengembangan Kerjasama Antar Lembaga, Antar Wilayah, Peningkatan Kualitas Sdm Dan Iptek, Peningkatan Infrastruktur, Kelembagaan, Sumber Penerimaan Daerah, Pendapatan Masyarakat.
2	ARAH PEMBANGUNAN MANDIRI ADALAH SEBAGAI BERIKUT : a. Mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal (pertanian dan pertambangan) secara berkelanjutan b. Mendorong terwujudnya pengembangan industri pengolahan yang berbasis pertanian c. Mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan d. Mendorong berkembangnya ekonomi	

NO	ARAH PEMBANGUNAN	TAHAP PEMBANGUNAN
	sektoral yang lebih proporsional e. Mengendalikan kegiatan pembangunan sesuai dengan RTRW f. Mendorong perekonomian daerah yang memiliki keunggulan kompetitif g. Mendorong terciptanya sinergi antar lembaga, wilayah, daerah dan antar negara dengan perekonomian lokal h. Mendorong tumbuh dan berkembangnya SDM yang berkualitas dan menguasai IPTEK i. Menyediakan dana pembangunan yang bersumber dari penerimaan lokal (intensifikasi dan ekstensifikasi PADS) j. Menyediakan infrastruktur yang berkualitas dan memadai k. Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah l. Mendorong terciptanya pemerintahan yang baik m. Mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN n. Mendorong terlaksananya kepastian hukum o. Mendorong kehidupan yang lebih demokratis	
3	ARAH PEMBANGUNAN SEJAHTERA ADALAH SEBAGAI BERIKUT : a. Mewujudkan masyarakat yang memiliki ketahanan pangan dan kelayakan sandang serta papan b. Meningkatkan kualitas kesehatan (peningkatan sarana dan prasarana kesehatan) c. Meningkatkan kualitas pendidikan (peningkatan sarana dan prasarana	

NO	ARAH PEMBANGUNAN	TAHAP PEMBANGUNAN
	pendidikan) d. Mendorong peningkatan daya beli masyarakat e. Menyediakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat f. Menyediakan lingkungan yang bersih g. Terwujudnya masyarakat yang sadar berpolitik h. Membangun masyarakat yang taat menjalankan syariat agama i. Meningkatkan kualitas keamanan dalam masyarakat j. Membentuk masyarakat yang semakin dapat mengaktualisasikan diri	

4.1.2 Telahaan RPJMN 2020 – 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019. Pembangunan RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pada RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan visi dan Misi yang disusun berdasarkan arahan RPJPD 2020-2025. Visi RPJMN 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua, yaitu :

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat lima (5) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawa Cita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. Pertama, UU Cipta Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi.

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4.1.3 Telaah RTRW Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2038

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muara Enim telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2038. RTRW tersebut merupakan pedoman dan arahan bagi pembangunan di Kabupaten Muara Enim dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya, dan berkelanjutan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Muatan RTRW Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2038 meliputi :

- 1) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;
- 2) Rencana struktur ruang;
- 3) Rencana pola ruang;
- 4) Penetapan kawasan strategis;
- 5) Arahan pemanfaatan ruang; dan
- 6) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 – 2038, Indikasi Program Utama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Indikasi Program Utama

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana								
					I					II	III	IV	
					1	2	3	4	5				
A	Perwujudan Struktur Ruang												
I	Perwujudan Pusat Kegiatan												
1.1	Pengembangan dan penataan Kawasan Perkotaan Muara Enim sebagai PKW												
	a. Peningkatan fasilitas terminal tipe A	Kec. Muara Enim	APBN APBD Prov.	Dinas Perhubungan						v	v	v	
	b. Pembangunan dan peningkatan pelayanan terminal tipe B	Kec. Muara Enim	APBD Prov APBD Kab.	Dinas Perhubungan Dinas PUPR	v	v	v	v	v	v	v		
	c. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Muara Enim	Kec. Muara Enim	APBD Kab.	Dinas PUPR	v					v	v	v	
	d. Peningkatan fungsi/Pembangunan pasar regional	Kec. Muara Enim		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan, Dinas PUPR	v	v	v	v	v				
	e. Pembangunan rumah sakit umum tipe B	Kec. Muara Enim	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Kesehatan	v	v	v	v	v	v			
	f. Pembangunan rumah sakit umum tipe C	Kec. Muara Enim	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Kesehatan	v	v	v	v	v	v			
	g. Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan	Kec. Muara Enim	APBD Kab., Investor	Dinas PUPR PDAM Swasta	v	v	v	v	v	v	v	v	
	h. Peningkatan TPA serta prasarana dan sarana persampahan	Kec. Muara Enim	APBD Kab.	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup	v	v	v	v	v	v	v	v	
	i. Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana permukiman	Kec. Muara Enim	APBD Kab., Investor	Dinas Perkim, Swasta	v	v	v	v	v	v	v	v	

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana							
					I					II	III	IV
					1	2	3	4	5			
1.2	Pengembangan dan penataan perkotaan Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut, perkotaan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul, perkotaan Cinta Kasih Kecamatan Belimbing, perkotaan Sugih Waras Kecamatan Rambang, Perkotaan Karang Agung Kecamatan Lubai Ulu, dan perkotaan Gelumbang Kecamatan Gelumbang sebagai PPK.											
	a. Pembangunan dan Peningkatan pelayanan rumah sakit.	Kec. Gelumbang, Kec. Lubai Ulu, dan Kecamatan Semende Darat Laut.	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Kesehatan	v	v	v	v	v	v	v	
	b. Peningkatan sarana pasar	Seluruh PPK	APBD Kab.	Dinas Koperasi, UKM Dinas Perdagangan, Dinas PUPR	v	v	v	v	v	v		
	c. Pembangunan dan peningkatan pelayanan terminal tipe C	Seluruh PPK	APBD Kab.	Dinas Perhubungan, Dinas PUPR	v	v	v	v	v	v	v	v
	d. Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan.	Seluruh PPK	APBD Kab.	Dinas PUPR PDAM	v	v	v	v	v	v	v	v
	e. Pengembangan prasarana dan sarana permukiman	Seluruh PPK	APBD Kab. Investor	Dinas Perkim, Swasta	v	v	v	v	v	v	v	v
	f. Pembangunan dan Peningkatan pelayanan Puskesmas Rawat Inap	Kecamatan Rambang.	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Kesehatan			v	v	v	v	v	v
	g. Pembangunan dan Peningkatan pelayanan Puskesmas	Kec. Ujan Mas, Kecamatan Belimbing.	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Kesehatan	v	v	v	v	v	v	v	v
	i. Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan	Seluruh PPK	APBD Kab.	Dinas PUPR	v	v	v	v				

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana								
					I					II	III	IV	
					1	2	3	4	5				
1.3	Pengembangan dan penataan perkotaan Aremantai Kecamatan Semende Darat Ulu, perkotaan Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah, perkotaan Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung, perkotaan Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas, perkotaan Padang Bindu Kecamatan Benakat,; perkotaan Gunung Megang Kecamatan Gunung Megang, perkotaan Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru, perkotaan Beringin Kecamatan Lubai, perkotaan Lembak Kecamatan Lembak, perkotaan Sukarami Kecamatan Sungai Rotan, perkotaan Tanjung Bunut Kecamatan Belida Darat, perkotaan Menanti Kecamatan Kelekar, perkotaan Patra Tani Kecamatan Muara Belida, perkotaan Lebak Budi Kecamatan Panang Enim, dan perkotaan Dangku Kecamatan Empat Petulai Dangku sebagai PPL												
	a. Pembangunan dan Peningkatan pelayanan Puskesmas	Seluruh PPL	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Kesehatan	v	v	v	v	v	v	v	v	
	b. Pembangunan dan Peningkatan pelayanan Puskesmas Rawat Inap	Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Lubai, dan kecamatan Sungai Rotan	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Kesehatan	v	v	v	v	v	v	v	v	
	c. Peningkatan sarana pasar lingkungan	Seluruh PPL	APBD Kab.	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan	v	v	v	v	v	v	v	v	
	d. Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di pedesaan	Seluruh PPL	APBD Kab.	Dinas PUPR PDAM	v	v	v	v	v	v	v	v	
	e. Pengembangan prasarana dan sarana permukiman	Seluruh PPL	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Perkim	v	v	v	v	v	v	v	v	
II	Program Perwujudan Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana												
2.1	Perwujudan Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi												
2.1.1	Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan arteri primer												
	a. Batas Kota Lahat – Muara Enim	Kecamatan Muara Enim	APBN, APBD Prov.	Kemen PUPR, Dinas PUBMTR Prov., Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v	

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana							
					I					II	III	IV
					1	2	3	4	5			
	b. Batas Kota Muara Enim – Simpang Sugih Waras	Kec. Muara Enim, Kec. Lawang Kidul, Kec. Tanjung Agung, Kec. Panang Enim	APBN, APBD Prov.	Kemen PUPR, Dinas PUBMTR Prov., Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v
	c. Simpang Sugih Waras – Batas Kota Baturaja	Kec. Panang Enim	APBN, APBD Prov.	Kemen PUPR, Dinas PUBMTR Prov., Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v
	d. Simpang Indralaya – Batas Prabumulih	Kec. Gelumbang, Kec. Lembak.	APBN, APBD Prov.	Kemen PUPR, Dinas PUBMTR Prov., Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v
	e. Batas Prabumulih – Simpang Belimbing	Kec. Rambang Niru, Kec. Belimbing	APBN, APBD Prov.	Kemen PUPR, Dinas PUBMTR Prov., Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v
	f. Simpang Belimbing – Batas Kota Muara Enim	Kec. Belimbing, Kec. Gunung Megang, Kec. Ujan Mas, Kec. Muara Enim	APBN, APBD Prov.	Kemen PUPR, Dinas PUBMTR Prov., Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v
	g. Ruas dalam Kota Muara Enim - Jalan Jendral Sudirman, - Jalan A. Yani - Jalan Sultan Mahmud - Badaruddin II	Kec. Muara Enim	APBN, APBD Prov.	Kemen PUPR, Dinas PUBMTR Prov., Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana									
					I					II	III	IV		
					1	2	3	4	5					
2.1.2	Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan kolektor primer 1													
	a. Prabumulih – Beringin – Batas Kabupaten OKU	Kec. Lubai, Kec. Lubai Ulu	APBN, APBD Prov.	Kemen PUPR, Dinas PUBMTR Prov., Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v		
2.1.3	Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan kolektor primer 2													
	a. Ruas Jalan Simpang Sugih Waras – Batas Kabupaten Lahat	Kec. Pangan Enim, Kec. SDL	APBD Prov.	Dinas PUBMTR Prov., Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v		
	b. Ruas Jalan Simpang Belimbing – Pendopo Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Kec. Belimbing	APBD Prov.	Dinas PUBMTR Prov., Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v		
	c. Ruas Jalan Prabumulih – Simpang Meo	Kec. Rambang, Kec. Rambang Niru, Kec. Lawang Kidul, Kec. Tanjung Agung, Kec. Panang Enim.	APBD Prov.	Dinas PUBMTR Prov., Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v		
	d. Ruas Jalan Lembak – Batas Kabupaten Ogan Ilir	Kec. Lebak, Kec. Kelekar	APBD Prov.	Dinas PUBMTR Prov., Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v		
	e. Ruas Jalan Simpang Patra Tani – Kebun Raya – Batas Kabupaten Ogan Ilir	Kec. Gelumbang	APBD Prov.	Dinas PUBMTR Prov., Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v		
	f. Ruas Jalan Batas Kabupaten Ogan Ilir – Beringin	Kec. Lubai	APBD Prov.	Dinas PUBMTR Prov., Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v		

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana							
					I					II	III	IV
					1	2	3	4	5			
	g. Ruas Jalan Simpang Gelumbang – Sukarame – Batas Kab. Banyuasin	Kec. Gelumbang, Kec. Sungai Rotan	APBD Prov. APBD Kab.	Dinas PUBMTR Prov., Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v
	h. Ruang Jalan Lembak – Modong – Batas Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Kec. Lebak	APBD Prov.	Dinas PUBMTR Prov., Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v
	i. Ruas Jalan Simpang Kepur – Muara Lawai – Batas Kabupaten Lahat.	Kec. Muara Enim	APBD Prov. APBD Kab.	Dinas PUBMTR Prov., Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v
	j. Ruas Jalan Sp. Tugu Batas Kab. Ogan Ilir – Kantor Camat Muara Belida/Batas Kabupaten Ogan Ilir	Kec. Gelumbang, Kec. Muara Belida	APBD Prov. APBD Kab.	Dinas PUBMTR Prov., Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v
2.1.4	Pengembangan jalan bebas hambatan											
	a. Ruas Simpang Indralaya – Muara Enim	Di Wilayah Kabupaten	APBN Investor	Kemen PUPR Swasta	v	v	v	v	v			
	b. Ruas Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau	Di Wilayah Kabupaten	APBN Investor	Kemen PUPR Swasta	v	v	v	v	v			
	c. Ruas Kotabumi Provinsi Lampung – PKW Martapura – PKW Baturaja – PKW Muara Enim – PKW Lahat – PKW Lubuk Linggau – PKW Sarolangun (Provinsi Jambi)	Di Wilayah Kabupaten	APBN Investor	Kemen PUPR, swasta					v	v	v	v

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana							
					I					II	III	IV
					1	2	3	4	5			
2.1.5	Pengembangan dan peningkatan jalan lingkar di wilayah kabupaten.	PKW - PPK - PPL	APBN, APBD Prov.	Kemen PUPR, Dinas PUBMTR Prov., Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v
2.1.6	Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lokal primer dan sekunder	Di seluruh Kecamatan dan Desa	APBD Kab.	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v
2.1.7	Pengembangan dan Pembangunan Jembatan	Di seluruh Kecamatan dan Desa	APBN, APBD Prov. APBD Kab.	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v
2.1.8	Pengembangan Jembatan Layang (<i>Fly Over</i>) dan Under Pass	Perlintasan sebidang antar moda transportasi	APBN, APBD Prov. APBD Kab.	Kemen PUPR, Dinas PUBMTR Prov., Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v
2.1.9	Pengembangan Jaringan Jalan Khusus Batubara	Di Wilayah Kabupaten	Investor	Swasta	v	v	v	v	v	v	v	v
2.1.10	Pengembangan jalan bebas hambatan											
	a. Pengembangan jalur ganda Tanjung Enim – Prabumulih	Di Wilayah Kabupaten	PT. KAI APBD Prov. APBD Kab.	PT. KAI Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v		
	b. Pengembangan jalur ganda Prabumulih – Muara Enim – Simpang	Di Wilayah Kabupaten	PT. KAI APBD Prov. APBD Kab.	PT. KAI Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v		
	c. Pengembangan jalur ganda Muara Enim – Lahat	Di Wilayah Kabupaten	PT. KAI APBD Prov. APBD Kab.	PT. KAI Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v		

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana							
					I					II	III	IV
					1	2	3	4	5			
	d. Pengembangan jalur Muara Enim – Baturaja	Di Wilayah Kabupaten	PT. KAI APBD Prov. APBD Kab.	PT. KAI Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v		
	e. Rehabilitasi jalur Lubuk Linggau – Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Baturaja.	Di Wilayah Kabupaten	PT. KAI APBD Prov. APBD Kab.	PT. KAI Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v
	f. Peningkatan <i>spoor emplacement</i> lintas Muara Enim – Lahat, Martapura – Prabumulih	Di Wilayah Kabupaten	PT. KAI APBD Prov. APBD Kab.	PT. KAI Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v
	g. Pengembangan jalur Tanjung Enim – Kota Padang (Provinsi Bengkulu)	Di Wilayah Kabupaten	PT. KAI APBD Prov. APBD Kab.	PT. KAI Dinas PUPR, Dinas Perhubungan					v	v		
	h. Pembangunan jalur kereta api Muara Enim – Pulau Baai (Provinsi Bengkulu)	Di Wilayah Kabupaten	PT. KAI Investor	PT. KAI Swasta					v	v	v	v
	i. Pembangunan jalur Tanjung Enim – Tanjung Api-api	Di Wilayah Kabupaten	PT. KAI Investor	PT. KAI Swasta	v	v	v	v	v	v	v	v
2.1.11	Pembangunan dan peningkatan jalur kereta api khusus											
	a. Pembangunan jalur kereta api khusus	Di Wilayah Kabupaten	PT. KAI Investor	PT. KAI Swasta	v	v	v	v	v	v	v	v
2.1.12	Pengembangan Prasarana Sinyal Kereta Api (FO)											
	a Jalan Prabumulih – Muara Enim – Lahat	Di Wilayah Kabupaten	PT. KAI Investor	PT. KAI Swasta	v	v	v	v	v	v	v	v
	b Jalur Muara Enim – Tanjung Enim Baru	Di Wilayah Kabupaten	PT. KAI Investor	PT. KAI Swasta	v	v	v	v	v	v	v	v

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana							
					I					II	III	IV
					1	2	3	4	5			
	c Jalur Tanjung Enim – Tanjung Api-api	Di Wilayah Kabupaten	PT. KAI Investor	PT. KAI Swasta	v	v	v	v	v	v	v	v
	d Jalur Prabumulih – Beringin – Baturaja	Di Wilayah Kabupaten	PT. KAI Investor	PT. KAI Swasta	v	v	v	v	v	v	v	v
2.1.13	Jaringan prasarana lalu lintas											
	a. Terminal Tipe A	Muara Enim	APBN	Dinas Perhubungan						v		
	b. Terminal Tipe B	Muara Enim	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v		
	c. Terminal Tipe C	Kec. Semende Darat Laut, Kec. Tanjung Agung, Kec. Lawang Kidul, Kec. Muara Enim, Kec. Gunung Megang, Kec. Belimbing, Kec. Rambang Niru, Kec. Lubai Ulu, dan Kec. Gelumbang	APBD Kab.	Dinas Perhubungan								
	d. Terminal barang	Kec. Muara Enim, Kec. Lubai Ulu, dan Kec. Gelumbang	APBD Kab. Investor	Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Swasta					v	v	v	v
	e. Unit pengujian kendaraan bermotor	Kecamatan Muara Enim	APBD Kab. Investor	Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Swasta	v	v	v	v	v	v	v	v
2.1.14	Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan transportasi udara											
	a. Bandar udara khusus	Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Lawang Kidul	BUMN	BUMN		v	v	v	v	v	v	

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana									
					I					II	III	IV		
					1	2	3	4	5					
2.1.15	Pembangunan dan peningkatan jaringan sungai.													
	a. Pelabuhan/dermaga umum sungai	Kec. Muara Enim, Kec. Ujan Mas, Kec. Gunung Megang, Kec. Belimbing, Kec. Empat Petulai Dangku, Kec. Kelekar, Kec. Lembak, Kec, Sungai Rotan, dan Kec. Muara Belida	APBD Kab.	Dinas Perhubungan, Dinas PUPR	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
	b. Pelabuhan/terminal khusus sungai	Kec. Belimbing, Kec. Empat Petulai Dangku, Kec. Lembak, Kec. Sungai Rotan dan Kec. Muara Belida	Investor	Swasta	v	v	v	v	v	v				
2.2	Perwujudan pengembangan sistem jaringan energi													
2.2.1	Pembangunan jaringan pipa transmisi	Kec. Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah, Semende Darat Laut, Lawang Kidul, Muara Enim, Ujan Mas, Benakat, Gunung Megang, Belimbing, Rambang Niru, Empat Petulai Dangku, Rambang, Lubai, Lubai Ulu, Lembak, Belida Darat, Gelumbang, dan Sungai Rotan	Investor	Swasta	v	v	v	v	v	v				

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana							
					I					II	III	IV
					1	2	3	4	5			
2.2.2	Pembangunan jaringan pipa distribusi gas bumi untuk rumah tangga	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Investor	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, Dinas Perdagangan, Swasta	v	v	v	v	v	v		
2.2.3	Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar (SPBU/SPBG)	Seluruh Kecamatan	Investor	Swasta	v	v	v	v	v	v		
2.2.4	Pembangunan PLTA	Kecamatan Semende Darat Laut dan Kecamatan Panang Enim	PT. PLN Investor	PT. PLN Swasta	v	v	v	v	v	v		
2.2.5	Pengembangan dan Pembangunan PLTU	PLTU Bukit Asam, PLTU Simpang Belimbing, PLTU PT. BA Bangko Barat, PLTU Mulut Tambang Sumsel-1, 6, 6B , 8, 9A, 9B, dan 10	PT PLN BUMN Invenstor	PT PLN BUMN Swasta	v	v	v	v	v	v		
2.2.6	Pengembangan dan Pembangunan PLTG/PLTGU	PLTG/PLTGU Gunung Megang	PT PLN Investor	PT PLN Swasta	v	v	v	v	v	v		
2.2.7	Pembangunan PLTM	PLTM Karya Nyata, PLTM Babatan, PLTM Tanjung Tiga, PLTM Pulau Panggung (Semendo), PLTM Pulau Panggung (Semendo 2) PLTM Bindu 1, dan PLTM Bindu 2,	PT PLN Investor	PT PLN Swasta		v	v	v	v	v		
2.2.8	Pengembangan dan Pembangunan PLTMH	PLTMH Rekimai Jaya, PLTMH Tanjung Tiga, PLTMH Cahaya Alam, PLTMH Plakat, dan PLTMH Babatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Investor	Dinas Perdagangan, PT PLN, Swasta		v	v	v	v	v		

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana							
					I					II	III	IV
					1	2	3	4	5			
2.2.9	Pengembangan dan Pembangunan PLTP	PLTP Lumut Balai, PLTP Rantau Dedap, PLTP Lumut Balai Small Scale	APBN Investor	PT PLN Swasta		v	v	v	v	v		
2.2.10	Pembangunan PLTB	Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim, Ujan Mas, Gunung Megang, Lubai, Gelumbang, Sungai Rotan, Rambang Niru	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Investor	Dinas Perdagangan, PT PLN, Swasta			v	v	v	v		
2.2.11	Pembangunan PLTS	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Investor	Dinas Perdagangan, PT PLN, Swasta	v	v	v	v	v	v		
2.2.12	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah	Setiap lokasi TPA Sampah	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Investor	Dinas Perdagangan, PT PLN, Swasta			v	v	v	v		
2.2.13	Pembangkit Listrik Tenaga Bio Gas (PLTBg)	Di Wilayah Kabupaten	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Investor	Dinas Perdagangan, PT PLN, Swasta					v	v		
2.2.14	Pengembangan jaringan prasarana listrik (GI, GH, Stasiun elektroda, stasiun <i>converter</i> , SUTET, SUTT, SUTTAS)	Seluruh Kecamatan	APBN PT PLN Investor	Dinas Perdagangan, PT PLN, Swasta	v	v	v	v	v	v		
2.2.15	Pembangunan jaringan listrik tegangan menengah dan rendah (SUTM, SUTR dan SKTM)	Seluruh Kecamatan	APBN Prov. PLN	Dinas ESDM Prov. PLN	v	v	v	v	v	v		
2.3	Perwujudan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi											
	a. Sistem jaringan tetap	Seluruh Kecamatan	APBN Investor	Dinas Kominfo, Swasta	v	v	v	v	v	v	v	v
	b. Sistem jaringan bergerak	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dinas Kominfo,	v	v	v	v	v	v		

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana							
					I					II	III	IV
					1	2	3	4	5			
			Investor	Swasta								
2.4	Perwujudan pengembangan sistem jaringan sumber daya air											
	a. Normalisasi sungai	Wilayah Sungai	APBD Prov. APBD Kab.	Dinas PUPR	v	v	v	v	v	v		
	b. Pengembangan daerah irigasi	Kec. Semende Darat Laut, Kec. Semende Darat Tengah, Kec. Semende Darat Ulu, Kec. Panang Enim, Kec. Tanjung Agung, Kec. Muara Enim, Kec. Ujan Mas, Kec. Benakat, Kec. Gunung Megang, Kec. Belimbing, Empat Petulai Dangku, Kec. Lembak, Kec. Lubai, Kec. Gelumbang, Kec. Sungai Rotan, dan Kec. Muara Belida.	APBN, APBD Prov. APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas TPHP	v	v	v	v	v	v	v	v
	c. Sistem pengendalian banjir	Wilayah sungai	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Perkim	v	v	v	v	v	v		
2.5	Perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana lingkungan											
	a. Penyediaan air minum	Seluruh Kecamatan	APBD Kab. Investor	Dinas PUPR, Dinas Perkim, PDAM	v	v	v	v	v	v	v	v
	b. Pengelolaan air limbah	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup	v	v	v	v	v	v	v	v
	c. Pengelolaan persampahan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup	v	v	v	v	v	v	v	v

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana							
					I					II	III	IV
					1	2	3	4	5			
	d. Peningkatan TPA serta prasarana dan sarana persampahan	Kec. Gelumbang, Kec. Gunung Megang, Kec. Lubai, Kec. Tanjung Agung, dan Kec. Lawang Kidul	APBD Kab.	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup	v	v	v	v	v	v	v	v
	e. Pengelolaan dan pembangunan sistem drainase	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dinas PUPR, Dinas Perkim	v	v	v	v	v	v	v	v
	f. Pengelolaan dan pembangunan sistem pedestrian	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dinas PUPR, Dinas Perkim	v	v	v	v	v	v	v	v
	g. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam atau Jalur evakuasi bencana	Seluruh Kecamatan Rawan Bencana	APBD Kab.	BPBD, Dinas PKP	v	v	v	v	v	v	v	v
B	Perwujudan Pola Ruang											
I	Indikasi Program Perwujudan Kawasan Lindung											
1.1	Pemantapan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya											
	a. Evaluasi Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan Lindung	Seluruh Kawasan Hutan Lindung	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup	v	v	v	v	v	v	v	v
	b. Evaluasi dan Pemantapan Kawasan Resapan Air dan Kawasan Bergambut	Seluruh Daerah Tangkapan Air	APBN, APBD Prov., APBD Kab	Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup	v	v	v	v	v	v	v	v
	c. Rehabilitasi dan Pemantapan Kawasan Hutan Lindung	Seluruh Kawasan Hutan Lindung	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas/Instansi Terkait	v	v	v	v	v	v	v	v

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana							
					I					II	III	IV
					1	2	3	4	5			
	d. Rehabilitasi dan Pemantapan Kawasan Resapan Air dan Kawasan Bergambut	Seluruh Daerah Tangkapan Air	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup	v	v	v	v	v	v	v	v
	e. Pengendalian, Pengamanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung	Seluruh Kawasan Hutan Lindung	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Kehutanan Provinsi, BPBD, Dinas PKP	v	v	v	v	v	v	v	v
1.2	Pemantapan kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, kawasan sekitar waduk atau danau, lindung spiritual dan kearifan lokal)											
	a. Rehabilitasi dan Pengamanan sempadan sungai	Seluruh DAS	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup	v	v	v	v	v	v	v	v
	b. Pemantapan Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	Danau Segayam, Danau Anyar, Danau Deduhuk	APBD Kab.	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kepemudaan dan Olahraga	v	v	v	v	v	v	v	v
	c. Penetapan kawasan rawan, kawasan waspada dan kawasan berpotensi banjir	Seluruh Kawasan Rawan Bencana	APBD Kab.	Dinas PUPR ,BPBD, Dinas Lingkungan Hidup	v	v	v	v	v	v	v	v
	d. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada kawasan rawan bencana longsor	Seluruh Kawasan Rawan Bencana	APBD Kab.	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup	v	v	v	v	v	v	v	v
1.3	Pemantapan, pengembangan dan pemanfaatan RTH	Seluruh Kawasan Perkotaan	APBD Kab.	Dinas PUPR,Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup	v	v	v	v	v	v	v	v

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana							
					I					II	III	IV
					1	2	3	4	5			
1.4	Pemantapan kawasan konservasi (kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam)	Kawasan Suaka Margasatwa Isau-Isau Pasemah, Tahura, Kawasan Arboretum Dan Keanekaragaman Hayati.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	BKSDA, Dinas Kehutanan Prov, Dinas Lingkungan Hidup	v	v	v	v	v	v	v	v
1.5	Pemantapan kawasan lindung geologi	Kec. Semende Darat Ulu, Kec. Semende Darat Tengah, Kec. Semende Darat Laut	APBD Kab.	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup,	v	v	v	v	v	v	v	v
1.6	Pemantapan kawasan rawan bencana alam	Seluruh Kawasan Rawan Bencana Alam	APBD Kab.	BPBD	v	v	v	v	v	v	v	v
1.7	Pemantapan kawasan cagar budaya	Kec. Semende Darat Laut, Dan Kec. Tanjung Agung	APBD Kab.	Dinas PUPR, Dinas Dikbud	v	v	v	v	v	v	v	v
II	Indikasi Program Perwujudan Kawasan Budi Daya											
2.1	Pengembangan Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Rakyat											
	a. Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan hutan produksi	Seluruh Kawasan Hutan Produksi	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Kehutanan Prov, Dinas/ Instansi Terkait	v	v	v	v	v	v	v	v
	b. Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan hutan rakyat	Seluruh Kawasan Hutan Rakyat	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Kehutanan Prov, Dinas/ Instansi Terkait	v	v	v	v	v	v	v	v

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana							
					I					II	III	IV
					1	2	3	4	5			
	c. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Seluruh Kawasan Hutan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Kehutanan Provinsi, DPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	v	v	v	v	v	v	v	v
	d. Pemanfaatan Jasa Lingkungan	Seluruh Kawasan Hutan	APBD Prov.	Dinas Kehutanan Prov, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup	v	v	v	v	v	v	v	v
	e. Promosi dan pemasaran produk Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan.	Seluruh Kawasan Hutan	APBD Kab.	Dinas Kehutanan Prov, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan	v	v	v	v	v	v	v	v
	f. Pengembangan Tanaman perkebunan di sekitar kawasan hutan	Di Luar Kawasan Hutan	APBN	Dinas Kehutanan Prov, Dinas Perkebunan, Dinas Perdagangan	v	v	v	v	v	v	v	v
	g. Pengkayaan tanaman pada hutan kota dan taman Kahati	Seluruh Kecamatan	APBD Prov.	Dinas Kehutanan Prov, BPDAS HL Musi, Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wil II, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas TPHP	v	v	v	v	v	v	v	v
2.2	Pengembangan Kawasan Pertanian											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana							
					I					II	III	IV
					1	2	3	4	5			
	a. Penyusunan <i>database</i> bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Seluruh Kawasan Budidaya	APBD Kabupaten	Dinas TPHP, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan	v	v	v	v	v	v	v	v
	b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Seluruh Kawasan Pertanian	APBD Kabupaten	Dinas TPHP, Dinas Perkebunan	v	v	v	v	v	v	v	v
	c. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Seluruh Kawasan Pertanian	APBD Kabupaten	Dinas TPHP, Dinas Perkebunan	v	v	v	v	v	v	v	v
	d. Peningkatan ketahanan pangan (pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan)	Seluruh Kawasan Budidaya	APBD Kabupaten	Dinas TPHP, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan	v	v	v	v	v	v	v	v
	e. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Seluruh Kawasan Pertanian	APBD Kabupaten	Dinas TPHP, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan	v	v	v	v	v	v	v	v
	f. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Seluruh Kawasan Pertanian	APBD Kabupaten	Dinas TPHP, Dinas PUPR, Dinas Perkebunan	v	v	v	v	v	v	v	v
	g. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Perikanan	Seluruh Kawasan Pertanian	APBD Kabupaten	Dinas TPHP, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan	v	v	v	v	v	v	v	v
	h. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Seluruh Kawasan Pertanian	APBD Kabupaten	Dinas TPHP, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan	v	v	v	v	v	v	v	v

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana							
					I					II	III	IV
					1	2	3	4	5			
	i. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas TPHP	v	v	v	v	v	v	v	v
	j. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas TPHP, Dinas Perkebunan	v	v	v	v	v	v	v	v
	k. Penerapan dan peningkatan teknologi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perternakan)	Seluruh Kawasan Pertanian	APBD Kabupaten	Dinas TPHP, Dinas Perkebunan	v	v	v	v	v	v	v	v
	l. Peningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi petani tradisional sektor perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dinas Perkebunan, Dinas Ketenagakerjaan	v	v	v	v	v	v	v	v
	m. Penyediaan sarana, prasarana sektor perkebunan	Seluruh Kawasan Perkebunan	APBD Kab.	Dinas Perkebunan	v	v	v	v	v	v	v	v
	n. Peningkatan kemampuan kelembagaan ekonomi pada tingkat petani tradisional sektor perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dinas Perkebunan, Dinas Koperasi, UKM	v	v	v	v	v	v	v	v
	o. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Seluruh Kawasan Pertanian	APBD Kab.	Dinas TPHP	v	v	v	v	v	v	v	v
2.3	Pengembangan Kawasan Perikanan											
	a. Penyusunan <i>database</i> bidang perikanan	Kawasan Perikanan	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan	v	v	v	v	v	v	v	v

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana							
					I					II	III	IV
					1	2	3	4	5			
	b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Kawasan Perikanan	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan	v	v	v	v	v	v	v	v
	c. Peningkatan ketahanan pangan (perikanan)	Kawasan Perikanan	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan	v	v	v	v	v	v	v	v
	d. Program Peningkatan Produksi Hasil Perikanan	Kawasan Perikanan	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan	v	v	v	v	v	v	v	v
	e. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	Kawasan Perikanan	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan	v	v	v	v	v	v	v	v
	f. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan	Kawasan Perikanan	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan	v	v	v	v	v	v	v	v
2.4	Pengembangan Kawasan Pertambangan											
	a. Rehabilitasi dan Penghijauan lahan-lahan eks tambang	Seluruh Wilayah Eks Tambang	APBD Prov., APBD Kab., Investor	Dinas ESDM Prov, Dinas Lingkungan Hidup, Swasta	v	v	v	v	v	v	v	v
2.5	Pengembangan Kawasan Industri											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana							
					I					II	III	IV
					1	2	3	4	5			
	a Peningkatan dan Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri	Kec. Gelumbang, Kec. Lembak, Kec. Lubai, Kec. Rambang Dangku, Kec. Muara Belida, Kec. Belimbing, Kec. Gunung Megang, Kec. Lawang Kidul, Dan Kec. Kelekar	APBN APBD Prov., APBD Kab., Investor	Dinas Perdagangan, Dinas PUPR	v	v	v	v	v	v	v	v
2.6	Pengembangan Kawasan Pariwisata											
	a Peningkatan dan Pemeliharaan Kawasan Wisata Sejarah dan Budaya	Kec. Tanjung Agung, Semende Darat Laut, Semende Darat Tengah, Semende Darat Ulu	APBD Kab.	Dinas Dikbud	v	v	v	v	v	v	v	v
	b Program peningkatan dan pengembangan wisata buatan	Di Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab., BUMN, Investor	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas PUPR, Dinas Perkim, BUMN, Swasta	v	v	v	v	v	v	v	v
	c Peningkatan dan Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan pariwisata	Danau Deduhuk, Air Panas Gemuhak, Air Terjun Curug Tenang Bedegung, Air Terjun Curug Ayun, Air Terjun Napal Carik, Dan Danau Segayam.	APBD Kab.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga,Dinas PUPR	v	v	v	v	v	v		
2.7	Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana							
					I					II	III	IV
					1	2	3	4	5			
	a Percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan : Penyediaan KPR bersubsidi, Pengembangan perumahan swadaya dan Pengembangan Kasiba/Lisiba	Seluruh Kecamatan	APBD Kab. Investor	Dinas Perkim, Swasta	v	v	v	v	v	v		
	b Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dinas Perkim	v	v	v	v	v	v		
2.8	Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan											
	a Penyediaan prasarana dan sarana kawasan perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dinas PMD, Dinas Perkim, Dinas Ketenagakerjaan	v	v	v	v	v	v	v	v
	b Pengembangan sistem jaringan transportasi yang mendukung alur produksi kaw. Perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab.	Dinas PMD, Dinas Perkim, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	v	v	v	v	v	v	v	v
C	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten											
I	Indikasi Program Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi											
1.1	Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa											
	a. Penyusunan RTR Kawasan sentra Industri	Kecamatan Lembak	APBD Kab.	Dinas PUPR		v						
	b. Peningkatan sarana dan prasarana pengembangan kawasan	Kecamatan Lembak	APBD Kab.	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Dnas Perkebunan				v	v	v	v	v
1.2	Pengembangan Kawasan Agropolitan											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana							
					I					II	III	IV
					1	2	3	4	5			
	a. Penyusunan RTR Kawasan Agropolitan	Kec. Tanjung Agung, Semende Darat Laut, Semende Darat Tengah, Semende Darat Ulu	APBD Kab.	Dinas PUPR		v	v	v				
	b. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan agropolitan	Seluruh Kawasan Agropolitan	APBD Kab.	Dinas PUPR Dinas TPHP, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan				v	v	v	v	v
1.3	Pengembangan Kawasan Ekowisata											
	a. Program peningkatan dan pengembangan ekowisata	Tanjung Tiga	APBN, APBD Prov, APBD Kab., BUMN, BUMS dan Swasta	BAPPEDA, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas PUPR, Dinas Perkim, OPD Terkait			v	v	v	v	v	v
1.4	Pengembangan Kawasan Bukit Asam											
	a. Penyusunan RTR kawasan penyangga KEK Bukit Asam	Kec. Lawang Kidul Dan Tanjung Agung	APBD Kab. BUMN	Dinas PUPR BUMN			v					
	b. KEK Bukit Asam	Kecamatan Lawang Kidul Dan Kecamatan Tanjung Agung	BUMN Investor	BUMN Swasta, OPD terkait.		v						
II	Indikasi Program Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya											
	a. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan situs	Kecamatan Semende Darat Laut	APBD Prov. APBD Kab.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan								

4.1.4 Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Kabupaten Muara Enim

Komitmen Indonesia untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) secara inklusif, sistematis dan transparan telah diwujudkan dengan ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat yang mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Kabupaten Muara Enim secara aktif telah mengarusutamakan SDGs dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menunaikan amanat Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Kabupaten Muara Enim.

Terhadap pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian target SDGs. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait dengan bagaimana progres pelaksanaan SDGs di Kabupaten Muara Enim sekaligus saran dan masukan bagi kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Muara Enim.

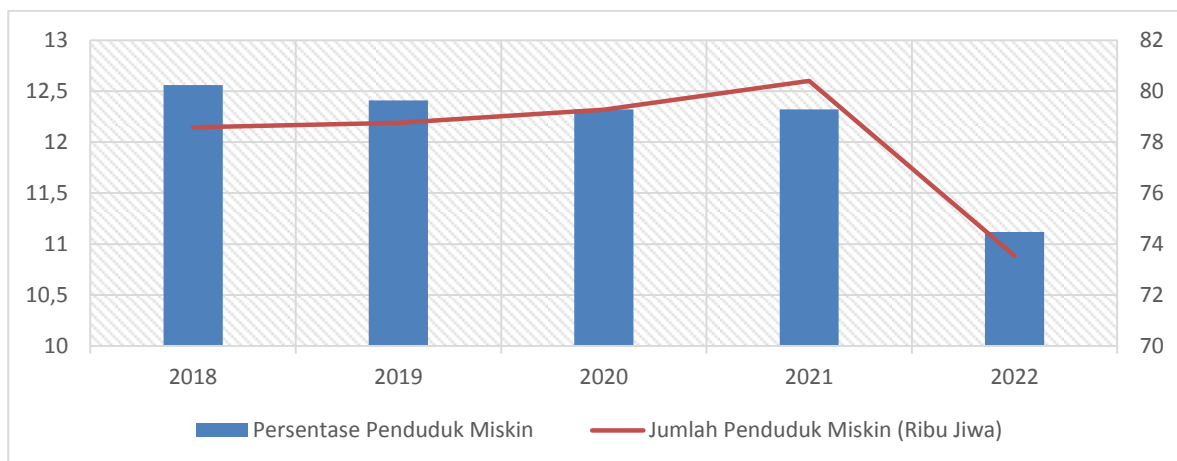


1-Tanpa Kemiskinan

Target Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Gambar 4.2
Grafik Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022



Sumber: BPS (diolah)

Pasca pandemi Covid-19, persentase penduduk miskin di Kabupaten Muara Enim menunjukkan penurunan. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 12,32 persen dan pada tahun 2022 menurun menjadi 11,12 persen. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebanyak 73,53 ribu jiwa menurun 6,87 ribu jiwa dari tahun 2021.



2-Tanpa Kelaparan

Target Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

Cakupan Bayi < 6 Bulan Mendapatkan ASI Eksklusif di Kabupaten Muara Enim masih di bawah 70 persen. Pada tahun 2019 tercatat sebesar 63,1 persen, menurun menjadi 62,2 persen pada tahun 2020 dan kembali meningkat menjadi 67,7 persen pada tahun 2021.

Pemberian imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat yang terbukti paling *cost-effective* serta berdampak positif untuk mewujudkan derajat kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Imunisasi tidak hanya melindungi seseorang tetapi juga masyarakat dengan memberikan perlindungan komunitas atau yang disebut dengan *herd immunity*. Arah pembangunan kesehatan saat ini menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif tanpa meninggalkan aspek kuratif dan rehabilitatif. Salah satu upaya preventif adalah dilaksanakannya program imunisasi.

Cakupan imunisasi dasar pada bayi di Kabupaten Muara Enim terus menunjukkan penurunan pada tiga tahun terakhir. Pada tahun 2019 tercatat sebesar 101,6 persen menurun menjadi 93,6 persen pada tahun 2020 dan 85,4 persen pada tahun 2021.

Tabel 4.3
Capaian Layanan Bagi Bayi di Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2021

Keterangan	Tahun		
	2019	2020	2021
Cakupan Bayi < 6 Bulan Mendapatkan ASI Eksklusif	63,1	62,2	67,6
Cakupan Imunisasi Dasar pada Bayi	101,6	93,6	85,4
Persentase Desa yang Mencapai Universal Child Immunization (UCI)	88,3	89,8	89,1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim



3-Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Target Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.

Jumlah kematian ibu yang terdata menunjukkan adanya fluktuasi, pada tahun 2019 jumlah kematian ibu tercatat sebanyak 12 orang, kemudian menurun menjadi 3 kasus kematian pada tahun 2020 dan meningkat tajam menjadi 15 kasus kematian pada tahun 2021.

Tabel 4.4
Perkembangan Kondisi Layanan Kesehatan Bagi Ibu
di Kabupaten Muara Enim Tahun 2019-2021

Keterangan	Tahun		
	2019	2020	2021
Jumlah Kematian Ibu yang terdata (terlaporkan)	12	3	15
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	95,1	87,7	94,6

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim

Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih berfluktuasi, pada tahun 2019 mencapai angka 95,1 persen kemudian menurun menjadi 87,7 persen pada tahun 2020 dan meningkat di tahun 2021 menjadi 94,6 persen.



4-Pendidikan Berkualitas

Target Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

APK merupakan Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan

ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.

Tabel 4.5
Perkembangan APK Kabupaten Muara Enim
Menurut Jenjang Tahun 2017-2021

Keterangan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	110,30	115,14	119,35	117,92	114,65
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	82,11	76,75	77,6	77,31	79,08
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	23,30	23,30	17,87	17,88	18,27

Sumber: BPS Provinsi Sumsel

Angka APK jenjang SD/MI menunjukkan tren menurun dalam tiga tahun terakhir, meskipun demikian angka capaian sudah di atas 100 persen. Sedangkan pada jenjang SMP Sederajat pada tahun 2021 sebesar 79,08 persen artinya persentase penduduk berusia 13-15 tahun di Kabupaten Muara Enim yang bersekolah di tingkat SMP sekitar 79 persen. Pada jenjang PAUD nilai capaian masih di bawah 20 persen, pada tahun 2019 tercatat sebesar 17,87 persen meningkat menjadi 18, 88 pada tahun 2020 dan menurun kembali menjadi 18,27 persen pada tahun 2021.

	5-Kesetaraan Gender Target Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun
---	---

Kesenjangan gender secara statistik ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dari perspektif gender.

Tabel 4.6
Perkembangan IPG Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan
dan Indonesia Tahun 2017-2021

Keterangan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Muara Enim	89,32	89,76	89,69	89,64	89,67
Provinsi Sumatera Selatan	92,43	92,62	92,4	92,38	92,35
Indonesia	90,96	90,99	91,07	91,06	91,27

Sumber: Badan Pusat Statistik

IPG Kabupaten Muara Enim pada tahun 2021 sebesar 89,67 poin tertinggal dari IPG Provinsi Sumatera Selatan dengan 92,35 poin dan Indonesia dengan nilai 91,27 poin. Secara posisi, pada tahun 2021 IPG Kabupaten Muara Enim masih berada di bawah IPG Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional. Kabupaten Muara Enim menempati peringkat ke-4 dengan IPG terendah di Provinsi Sumatera Selatan.

	6-Air Bersih dan Sanitasi Layak Target Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
---	--

Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak di Kabupaten Muara Enim menunjukkan kondisi yang terus membaik, dari 72,22 persen pada tahun 2017 menjadi 84,80 persen pada tahun 2021. Kondisi ini sudah lebih baik dari capaian Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 4.7
Perkembangan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap
Sanitasi Layak Kabupaten Muara Enim Tahun 2017-2021

Keterangan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Muara Enim	72,22	74,87	77,37	84,99	84,80
Provinsi Sumatera Selatan	66,36	68,99	74,67	76,94	78,08

Sumber: Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Secara posisi, Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 sudah berada di atas nilai capaian Provinsi Sumatera Selatan dan menempati peringkat ke-5 dengan nilai capaian tertinggi. Pada tahun 2021 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak Kabupaten Muara Enim tercatat sebesar 89,48 persen angka ini lebih baik dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Selatan dengan 84,70 persen.

Tabel 4.8
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak Kabupaten Muara Enim dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021

Keterangan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Muara Enim	60,47	64,78	85,74	82,15	89,48
Provinsi Sumatera Selatan	64,02	65,31	80,37	80,78	84,70

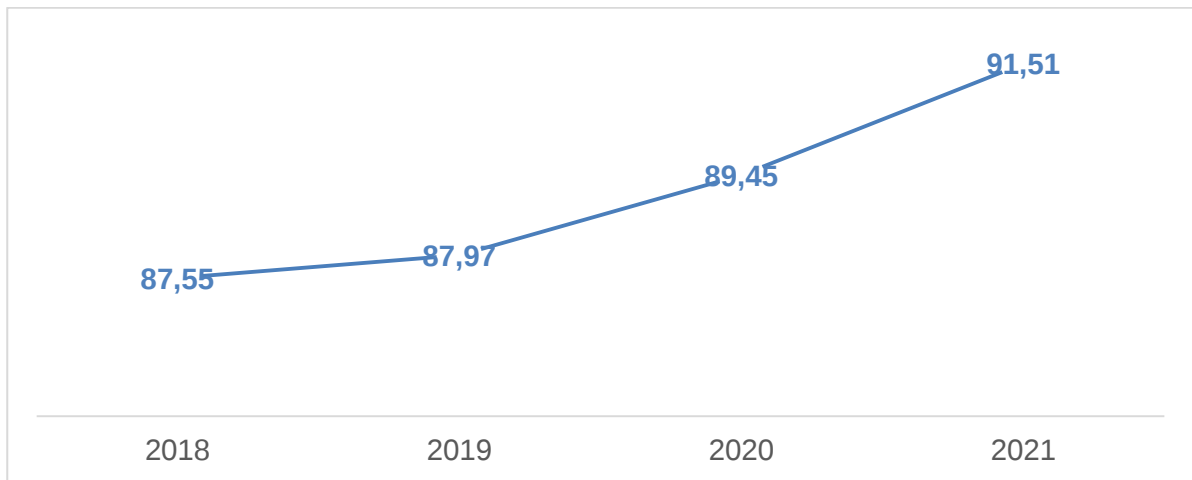
Sumber: Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Secara posisi nilai capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak Kabupaten Muara tahun 2021 sudah berada di atas capaian provinsi dan menempati peringkat ke-6 dengan nilai capaian tertinggi.

	7-Energi Bersih dan Terjangkau Target Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.
---	--

Menjamin Akses Universal Layanan Energi yang Terjangkau, Andal dan Modern. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan pada tahun 2016 sebesar 99,22 persen dengan jumlah desa dan kelurahan yang telah mendapat aliran listrik sebanyak 253 desa/kelurahan. Rasio elektrifikasi menandakan tingkat perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dengan jumlah penduduk di suatu wilayah.

Gambar 4.3
Grafik Perkembangan Rasio Elektrifikasi
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2021



Sumber: Bappeda Kabupaten Muara Enim

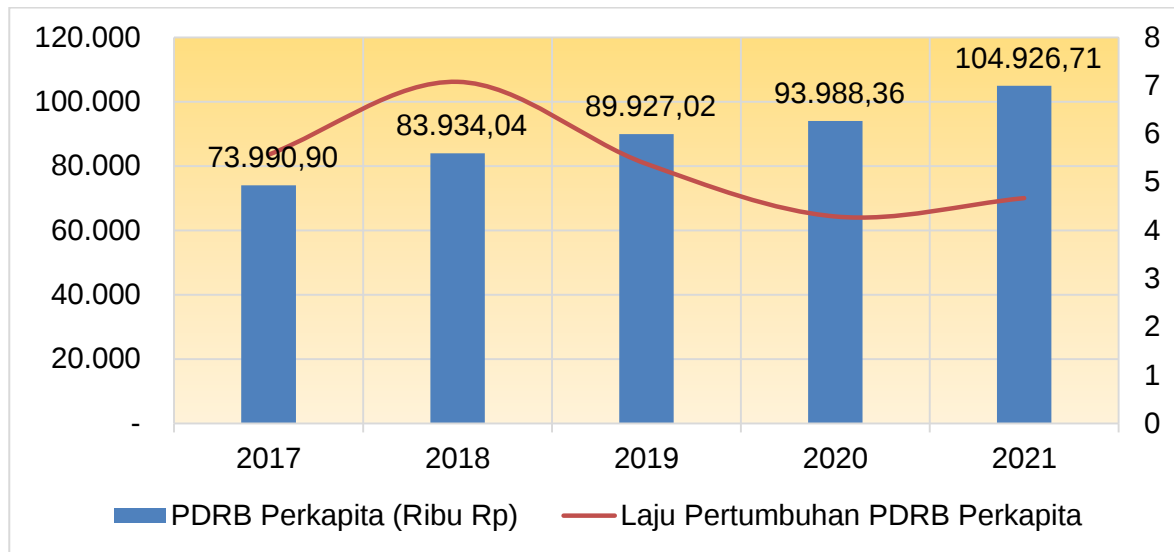
Rasio elektrifikasi di Kabupaten Muara Enim terus meningkat dalam empat tahun terakhir, pada tahun 2018 rasio baru mencapai 87,55 persen kemudian terus meningkat hingga menjadi 91,51 persen pada tahun 2021.

	8-Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Target Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang
---	--

PDRB per kapita Kabupaten Muara Enim mengalami peningkatan secara presisten pada tahun 2017-2021, pada tahun 2017 nilai PDRB Perkapita Kabupaten Muara Enim atas dasar harga berlaku sebesar 73.990,90 ribu rupiah kemudian terus meningkat hingga menjadi 104.926,71 ribu rupiah pada tahun 2021.

Gambar 4.4

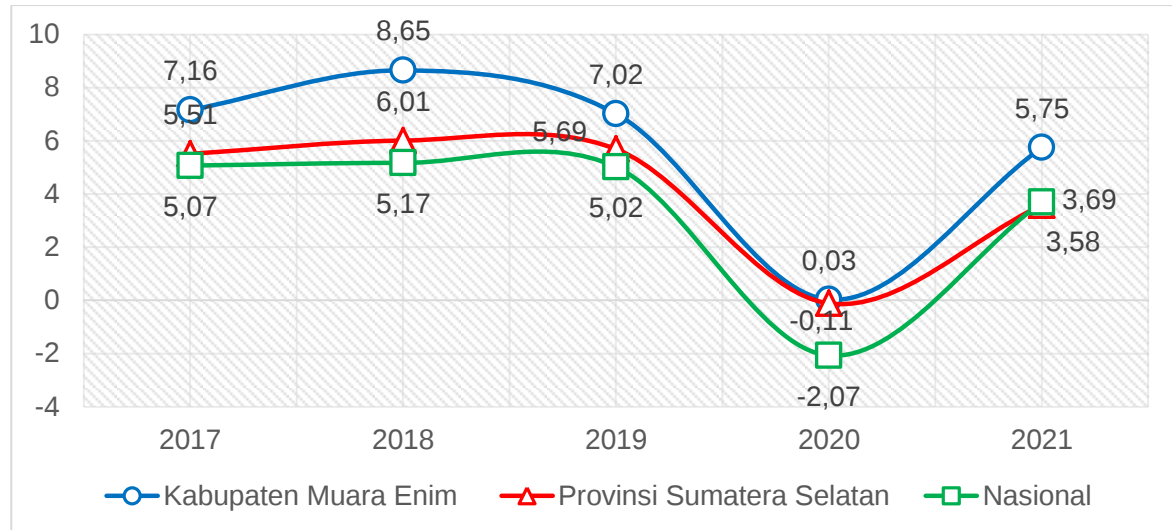
Grafik Perkembangan PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhan PRDB Perkapita Kabupaten Muara Enim Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Sumatera Selatan

Secara tren terlihat bahwa PDRB Perkapita Kabupaten Muara Enim berfluktuasi dengan kecenderungan menurun, hal ini tidak bisa dilapaskan dari pengaruh pandemi covid-19 yang berdampak pada pelambatan ekonomi pada tahun 2020. Meskipun demikian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Muara Enim pada tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan penurunan, dari 7,16% menjadi 5,75% ditahun 2021. Ditahun 2020 mengalami kontruksi sebesar 0,03 dikarenakan Covid-19. Kondisi tersebut sama halnya dengan Provinsi dan Nasional. Dimana Provinsi Sumatera Selatan tahun tahun 2021 tercatat sebesar 3,58% setelah tahun sebelumnya mengalami kontraksi sebesar -0,11%. Dilihat dari Nasional tahun 2021 sebesar 3,69% yang juga sempat mengalami kontruksi -2,07%.

Gambar 4.5
Grafik LPE Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan
dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kab. Muara Enim

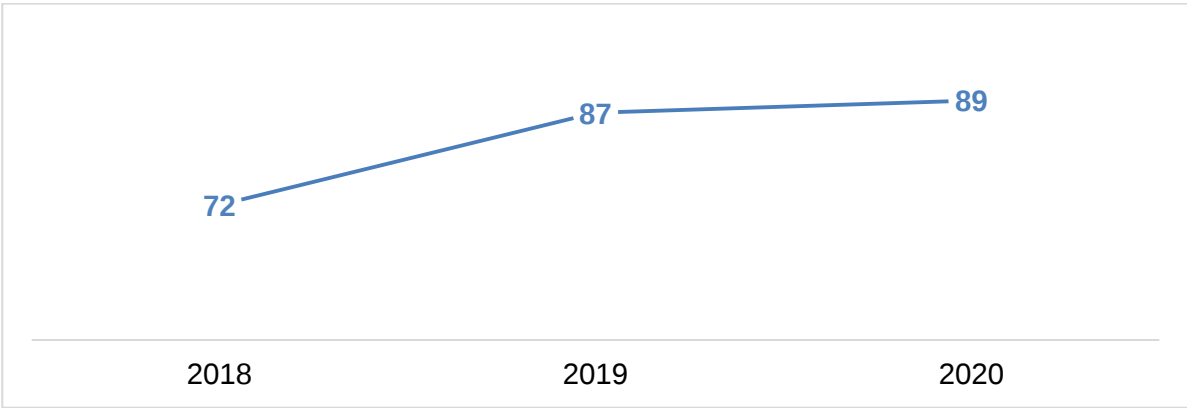
Dari gambar di atas terlihat bahwa LPE Kabupaten Muara Enim memiliki fluktuasi, LPE melambat pada tahun 2020 sebagai akibat dari pandemic Covid-19. Kondisi ini tidak hanya dialami oleh Kabupaten Muara Enim saja namun hampir seluruh daerah di Indonesia. Meskipun demikian, LPE Kabupaten Muara Enim tidak tekontraksi sampai dengan angka negative seperti dialami oleh beberapa daerah lain, hal ini salah satunya disebabkan karena perekonomian yang masih sangat ditopang oleh sektor primer.

	9-Industri, Inovasi dan Infrastruktur Target Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.
---	---

Total panjang jalan pada tahun 2020 di Kabupaten Muara Enim mencapai 1.791,36 km, meningkat dari tahun 2019 yang mencapai 1.790,16 km. Dari total keseluruhan panjang jalan yang ada, 212,30 km jalan berada di bawah

wewenang negara, sepanjang 182,55 km di bawah wewenang pemerintah provinsi dan selebihnya 1.396,51 km di bawah wewenang pemerintah Kabupaten Muara Enim

Gambar 4.6
Grafik Perkembangan Persentase Jalan Kondisi mantap
jalan nasional di Kabupaten



Sumber: Bappeda Kab Muara Enim

Kondisi mantap jalan nasional di Kabupaten (Kondisi Jalan Kabupaten dalam kondisi baik) di Kabupaten Muara Enim terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2018 persentase jalan dalam kondisi baik sebesar 72 persen meningkat menjadi 87 persen pada tahun 2019 dan menjadi 89 persen pada tahun 2020.

Tabel 4.9
Proporsi individu terhadap Telpn Genggam dan Menggunakan Internet
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2021

Indikator	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	57,72	60,23	61,79	62,21
Proporsi individu yang menggunakan Internet	30,06	36,63	44,84	54,35

Sumber: BPS Sumatera Selatan

Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam dan Proporsi individu yang menggunakan Internet di Kabupaten Muara Enim terus meningkat secara presisten setiap tahunnya. Artinya akses informasi terhadap penduduk sudah semakin deras.



10-Berkurangnya Kesenjangan

Target Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Tabel 4.10
Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan dan Indonesia Tahun 2017-2021

Keterangan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Muara Enim	0,380	0,350	0,320	0,330	0,340
Sumatera Selatan	0,360	0,360	0,330	0,340	0,340
Indonesia	0,391	0,384	0,380	0,385	0,381

Sumber: BPS (diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat gini ratio Kabupaten Muara Enim masih masuk dalam kategori moderat, kondisinya relatif sama dengan kondisi gini ratio Provinsi Sumatera Selatan. Nilai capaian ini masih lebih baik bila dibandingkan dengan gini ratio nasional. Pada tahun 2016 jumlah desa tertinggal di Kabupaten Muara Enim berjumlah 1 desa, kemudian setelah tahun 2017 tidak ada desa tertinggal di Kabupaten Muara Enim.

Tabel 4.11
Jumlah Desa Tertinggal dan Desa Mandiri
di Kabupaten Muara Enim Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Desa Tertinggal.	0	0	0	0	0
Jumlah Desa Mandiri.	0	0	0	0	0

Sumber: Bappeda Kabupaten Muara Enim

Desa merupakan entitas yang memiliki otonomi daerah terkecil, melalui penetapan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki potensi untuk dapat berperan serta dalam pembangunan. Pada tahun 2021 tidak ada satupun desa di Kabupaten Muara Enim yang masuk dalam kategori tertinggal. Meskipun demikian belum ada satupun desa yang masuk dalam katgeori mandiri. Seluruh desa masih masuk dalam kategori berkembang.

	11-Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan Target Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan
---	--

Sejalan dengan penambahan jumlah penduduk, maka jumlah total rumah di Kabupaten Muara Enim terus mengalami peningkatan. Persentase rumah layak huni pada tahun 2016 sebesar 88,68 persen dan meningkat sebesar 93,49 persen pada tahun 2017. Sedangkan untuk rumah tidak layak huni bila dilihat dari data tahun 2016 sebesar 11,32 persen mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 6,51 persen dan 6,50 persen pada tahun 2018. Tetapi persentase rumah tidak layak huni ini mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan tahun 2020 yang masing-masing sebesar 8,84 persen dan 8,12 persen.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten Muara Enim pada periode 2019-2021 memiliki skor 155,20 atau masuk dalam kategori tinggi.

Tabel 4.12
Jenis dan Skor serta Kategori Bencana
Kabupaten Muara Enim Tahun 2021

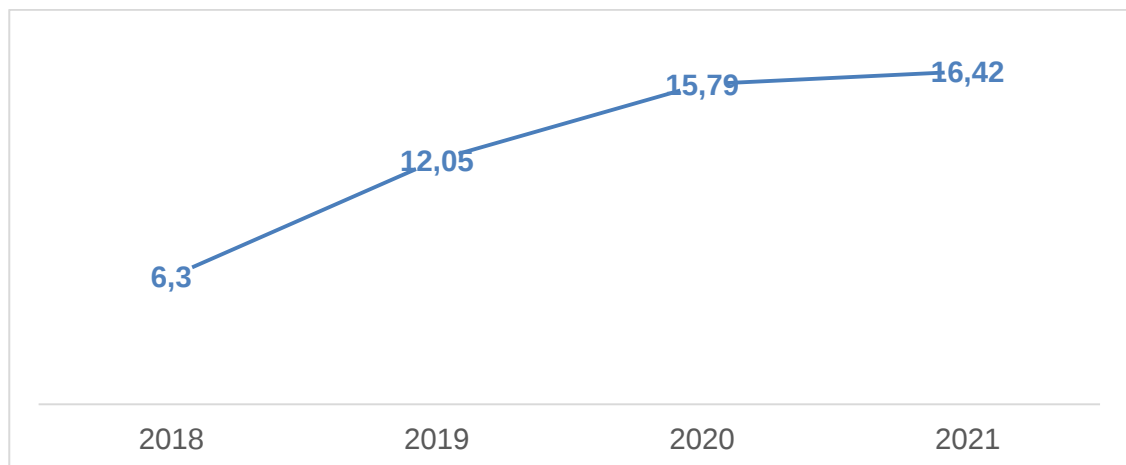
No	Jenis Bencana	Skor	Kategori
1	Banjir	36	Tinggi
2	Gempa Bumi	21,6	Tinggi
3	Kebakaran Hutan dan Lahan	36	Tinggi
4	Tanah Longsor	24	Tinggi
5	Kekeringan	24	Tinggi
6	Cuaca Ekstrim	13,6	Tinggi

Sumber: IRBI, BNPB 2021

Berdasarkan data yang dipublikasikan BNPB, Kabupaten Muara Enim masuk kedalam kategori risiko tinggi beberapa jenis bencana yaitu Banjir, Gempa Bumi, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor, Kekeringan dan Cuaca Ekstrim.

Layanan persampahan terus menunjukkan peningkatan dalam empat tahun terakhir. Meskipun demikian persentase layanan masih sangat rendah yaitu masih berada pada angka di bawah 20 persen.

Gambar 4.7
Grafik Perkembangan Persentase sampah perkotaan yang tertangani
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2021



Sumber: Bappeda Kabupaten Muara Enim

	12-Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab Target Pada tahun 2030 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
---	---

Sejak dicetuskan pada tahun 1995 oleh KLH, PROPER dimanfaatkan untuk mendorong perusahaan agar meningkatkan pengelolaan lingkungannya. PROPER telah diakui oleh berbagai pihak termasuk Bank Dunia. Program ini bahkan menjadi salah satu bahan studi kasus di *Harvard Institute for International Development*. Ada beberapa jenis proper yang dibedakan menjadi warna, seperti proper emas, proper hijau, proper biru, proper merah dan proper hitam.

Proper biru diperuntukkan bagi perusahaan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari KLHK. Peringkat tengah ini merupakan nilai minimal yang harus dicapai oleh semua perusahaan dalam bidang: penilaian tata kelola air, penilaian kerusakan lahan, pengendalian pencemaran laut, pengelolaan limbah B3, pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran air, dan implementasi AMDAL.

Tabel 4.13
Perkembangan Nilai Capaian Indikator Tahun 2018-2020

Keterangan	Tahun		
	2018	2019	2020
Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.	18	20	21
Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	5	5	5

Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2018 sebanyak 16 perusahaan kemudian naik menjadi 20 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menjadi 21 perusahaan.

SNI ISO 14001 adalah standar yang disepakati secara internasional dalam menerapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan (SML). ISO 14001 merupakan sistem manajemen lingkungan yang mengendalikan seluruh aspek dampak lingkungan dengan mengacu pada batas baku mutu yang telah ditetapkan. Pencapaian ISO 14001 dilaksanakan dengan memonitor dan mengukur terus menerus perubahan lingkungan dan dampaknya dalam area kerja perusahaan dengan melibatkan seluruh pelaku internal maupun eksternal perusahaan. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 adalah jumlah perusahaan yang mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan mengelola aspek lingkungan berdasarkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang mengacu pada standar nasional dan internasional. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 baru 5 perusahaan.

	13-Penanganan Perubahan Iklim Target Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.
---	--

Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menyusun satu dokumen terkait dengan penanganann lingkungan berupa Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muara Enim, dalam empat tahun terakhir tidak tercatat adanya jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Dalam empat tahun terakhir tidak ada bencana yang menyebabkan adanya korban jiwa di Kabupaten Muara Enim.

	14-Ekosistem Laut Target Pada tahun 2030, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.
---	---

Target pada *goals* ini yaitu pada tahun 2030, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional serta berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.

	15- Ekosistem Daratan Target Pada tahun 2030, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional
---	---

Ada dua target yang diusung pada *goals* ini yaitu: (1) Pada tahun 2030, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional; (2) Pada tahun 2030, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global; dan (3) Pada tahun 2030, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.



16-Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Target Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.

Target Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparansi di semua tingkat menunjukkan kondisi yang cukup baik. Kualitas pengelolaan keuangan tercermin dari opini atas laporan keuangan dari BPK. Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan untuk Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi; Kabupaten/Kota).

Dalam lima tahun terakhir, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Artinya LK telah bebas dari salah saji material

Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Nilai SAKIP Kabupaten Muara Enim sudah masuk dalam kategori BB atau baik sekali pada rentang nilai >70-80 terjadi peningkatan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Persentase penggunaan *E- procurement* terhadap belanja pengadaan. Seluruh perangkat daerah di Kabupaten Muara Enim telah menggunakan *e-procurement* dalam belanja pengadaan atau dengan capaian 100%.



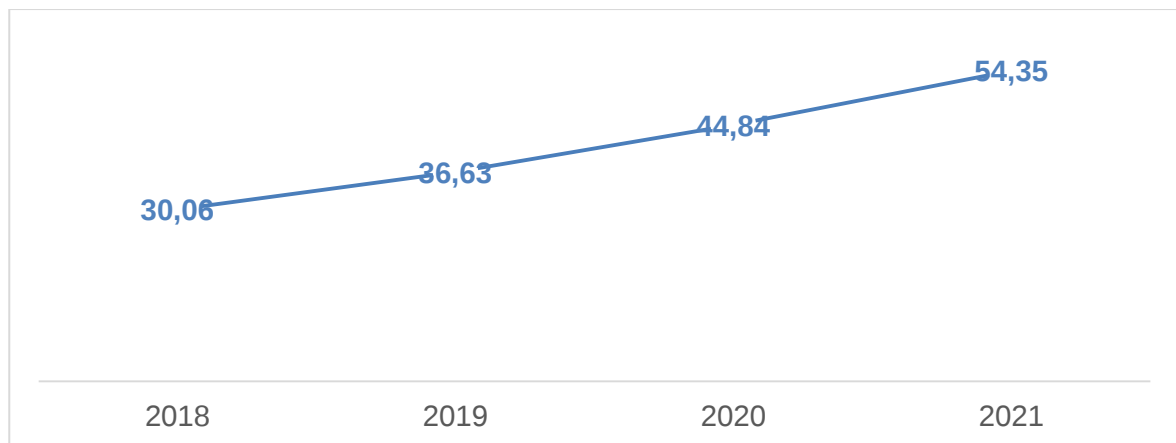
17- Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Target Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.

Salah satu target pada goals ini yaitu Mengoperasionalkan secara penuh teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan

penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.

Gambar 4.8
Grafik Perkembangan Persentase Pengguna Internet
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2021



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

Dari gambar di atas terlihat bahwa persentase individu yang menggunakan internet di Kabupaten Muara Enim terus meningkat dalam empat tahun terakhir. Kebutuhan akan internet terus meningkat terutama pada saat pandemi covid-19 dimana hampir seluruh bidang menerapkan *work from home* dimana internet menjadi kebutuhan utama.

Tabel 4.14
Indikator Akses Informasi Melalui BPS Tahun 2018-2020

Indikator	Tahun		
	2018	2019	2020
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	5.773	12.076	22.401
Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	98,81	100,00	98,82
Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional/daerah	98,96	100,00	98,91

Sumber: BPS Kab Muara Enim

Dari tabel di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan akses masyarakat akan data serta informasi melalui website BPS, selain itu Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka yang

sangat baik, artinya pengguna merasa puas akan layanan yang diberikan. Sebagai data yang diakui oleh undang-undang, Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional/daerah menunjukkan angka sangat tinggi yaitu di atas 98 persen.

4.1.5 Evaluasi Kinerja RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023

Untuk mengetahui capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2021 dapat dilihat berdasarkan hasil capaian indikator pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023. Capaian tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan gambaran kondisi atau kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Muara Enim yang diukur melalui komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran untuk menilai kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.

Tabel 4.15
Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Manusia	68,28	68,88	68,74	68,86	69,43

Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim (diolah), 2023

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Muara Enim pada tahun 2018-2022 mengalami peningkatan dari 68,28 pada tahun 2018 menjadi 68,88 pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 68,74 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 69,43. IPM Kabupaten Muara Enim pada tahun 2022

berada pada peringkat 7 (tujuh) dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 4.16
Indeks Pembangunan Manusia per Kabupaten
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2022

No	Kabupaten	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Palembang	77,89	78,44	78,33	78,72	79,42
2	Lubuk Linggau	74,09	74,81	74,78	74,89	75,53
3	Prabumulih	74,04	74,40	74,55	74,67	75,52
4	Ogan Komering Ulu	69,01	69,45	69,32	69,60	70,24
5	Ogan Komering Ulu Timur	68,58	69,34	69,28	69,58	70,23
6	Pagar Alam	67,62	68,44	68,31	68,68	69,60
7	Muara Enim	68,28	68,88	68,74	68,86	69,43
8	Musi Banyuasin	67,57	67,83	67,69	68,10	68,60
9	Lahat	66,99	67,62	67,44	67,58	68,40
10	Ogan Komering Ilir	66,57	66,96	66,82	67,17	68,02
11	Ogan Ilir	66,43	67,22	67,06	67,17	67,96
12	Banyuasin	66,40	66,90	66,74	67,13	67,93
13	Musi Rawas	66,18	66,92	66,79	67,01	67,78
14	Empat Lawang	64,81	65,10	65,25	65,39	66,00
15	Ogan Komering Ulu Selatan	64,84	65,43	65,30	65,34	65,87
16	Penukal Abab Lematang Ilir	63,49	64,33	64,70	64,88	65,75
17	Musi Rawas Utara	63,75	64,32	64,49	64,93	65,74
Provinsi Sumatera Selatan		68,86	70,02	70,01	70,24	70,90

Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim (diolah), 2023

b. Indeks Kota Toleran

Indeks Kota Toleran merupakan indikator yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023, yang digunakan untuk mengukur sikap dan upaya Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam pemajuan toleransi di masyarakat. Nilai indeks kota toleran mencerminkan seberapa besar kebebasan beragama/berkeyakinan dijamin dan dilindungi oleh regulasi dan tindakan disatu sisi serta menyandingkan dengan perilaku

sosial kemasyarakatan dalam tata kelola keberagaman di Kabupaten Muara Enim.

Toleransi adalah salah satu unsur dalam membina dan mewujudkan kerukunan masyarakat di suatu daerah. Indeks Kota Toleran Kabupaten Muara Enim terus meningkat di setiap tahunnya dengan heterogenitas masyarakat di Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2019 Indeks Kota Toleran Kabupaten Muara Enim sebesar 4,65, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 4,66. Selanjutnya, pada tahun 2021 Indeks Kota Toleran Kabupaten Muara Enim sebesar 4,88.

Tabel 4.17
Capaian Indikator Indeks Kota Toleran

Indikator Kinerja	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Indeks Kota Toleran	n/a	4,65	4,66	4,88

c. Penurunan Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kabupaten Muara Enim dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2018, angka kemiskinan Kabupaten Muara Enim sebesar 12,56 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2019, dan 2020 menjadi sebesar 12,41 persen, dan 12,32 persen. Angka kemiskinan Kabupaten Muara Enim pada tahun 2021 mengalami stagnan pada angka 12,32 persen. Pada tahun 2022, angka kemiskinan Kabupaten Muara Enim kembali turun menjadi 11,12 persen atau mengalami penurunan sebesar 1,20 persen.

Tabel 4.18
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	628.818	636.815	612.900	617.870	624.019
2	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	77.730	78.750	79.270	80.400	73.530

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
3	Tingkat Kemiskinan	12,56	12,41	12,32	12,32	11,12

Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim (diolah), 2023

Tabel 4.19
Capaian Indikator Kinerja Penurunan Angka Kemiskinan
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penurunan Angka Kemiskinan	0,63	0,15	0,09	0	1,20

Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim (diolah), 2023

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun pandemi Covid-19 mempengaruhi kinerja ekonomi daerah, akan tetapi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim tumbuh positif, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim pada tahun 2020 tumbuh sebesar 0,03 persen dan pada tahun 2021 dan 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 6,40 persen dan 8,39 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim mulai pulih dan bangkit pasca pandemi Covid-19.

Tabel 4.20
Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan Ekonomi	8,05	7,02	0,03	6,40	8,39

Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim (diolah), 2022

Pada tahun 2022 sektor PDRB yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 12,35% dari total PDRB dan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 11,13% dari total PDRB.

Tabel 4.21
Pertumbuhan PDRB
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	2	2,51	2,45	2	3,02
2	Pertambangan & Penggalian	11,17	7,93	-2,8	8,86	12,35
3	Industri Pengolahan	6,36	7,68	9,42	3,05	0,36
4	Pengadaan Listrik dan Gas	15,58	9,77	15,71	6,11	2,78
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,18	6,79	5,12	-1,59	2,14
6	Konstruksi	5,44	4,95	2,18	-0,17	1,82
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	8,87	8,99	-0,28	6,51	5,43
8	Transportasi dan Pergudangan	7,98	8,43	-1,22	2,58	11,13
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10	11,98	-2,14	6,1	5,13
10	Informasi dan Komunikasi	7,33	6,78	14,78	6,31	4,17
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,33	-0,03	1,01	2,75	0,29
12	Real Estat	6,83	7,72	4,47	3,72	2,18
13	Jasa Perusahaan	8,07	7,16	-0,05	1,47	4,27
14	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos wajib	3,36	2,56	2,72	4,28	3,12
15	Jasa Pendidikan	2,89	3,46	-0,32	3,64	2,78
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,27	4,86	11,45	2,39	3,22
17	Jasa Lainnya	6,47	5,12	4,56	0,07	2,06
	PDRB dengan Migas	8,64	7,02	0,03	6,40	8,39

Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim (diolah), 2023

e. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur usia sekolah di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Muara Enim dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu

pada tahun 2018 sebesar sebesar 11,94 dan tahun 2021 sebesar 11,98, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebesar 11,90.

Tabel 4.22
Capaian Indikator Kinerja Angka Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Lama Sekolah	11,94	11,96	11,97	11,98	11,90*

Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim (diolah), 2022

f. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang untuk dapat terus hidup pada suatu daerah. Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Muara Enim meningkat dari tahun 2018-2021. Angka Harapan Hidup Kabupaten Muara Enim pada tahun 2018 sebesar 69,03, selanjutnya terus meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebesar 68,63 pada tahun 2019, 69,02 pada tahun 2021, dan 69,38 pada tahun 2022.

Tabel 4.23
Capaian Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup	69,30	68,63	68,90	69,02	69,38

Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim (diolah), 2023

g. Indeks Pelayanan Infrastruktur

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Terdapat 6 (enam) unsur utama terhadap pengukuran Indeks Pelayanan

Infrastruktur, yaitu Ketersediaan Fisik (*Availability*), Kualitas Fisik (*Quality*), Kesesuaian (*Appropriateness*), Efektifitas Pemanfaatan (*Utility*), Penyerapan Tenaga Kerja (*Job Creation*), dan Kontribusi pada Perekonomian. Indeks Pelayanan Infrastruktur Kabupaten Muara Enim dari tahun 2018. Indeks Pelayanan Infrastruktur Kabupaten Muara Enim pada tahun 2018 sebesar 0,7, pada tahun 2019-2021 mengalami peningkatan. Tahun 2019 sebesar 0,9, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 1,00.

Tabel 4.24
Capaian Indeks Pelayanan Infrastruktur
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2021

Indikator Kinerja	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pelayanan Infrastruktur	0,7	0,9	1,00	1,00	N/A

h. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran atau indikasi awal dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 74,19 sampai dengan tahun 2021 sebesar 89,94, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 61,74.

Tabel 4.25
Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,19	74,59	80,84	89,94	61,74

Sumber : DLH Kabupaten Muara Enim (diolah), 2023

Sedangkan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan memiliki nilai yang cukup fluktuatif namun cenderung meningkat dari tahun 2018-2022. Indeks Kualitas Air pada tahun 2018 memiliki nilai sebesar 57,01, tahun 2019 sebesar 72,92, tahun 2020 sebesar 87,63 dan tahun 2021 sebesar 86,11. Indeks Kualitas Udara pada tahun 2018 sebesar 92,93, pada tahun 2019 menurun sebesar 92,15, pada tahun 2020 kembali meningkat sebesar 95,39, dan tahun 2021 meningkat sebesar 96,81. Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2018 sebesar 73,03, tahun 2019 tetap pada angka 73,03, tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 73,29, dan pada tahun 2021 sebesar 87,02.

Tabel 4.26
Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Kualitas Air	57.01	72.92	87.63	86.11	57,01
2.	Indeks Kualitas Udara	92.93	92.15	95.39	96.81	79,98
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	73.03	73.03	73.29	87.02	36,13

Sumber : DLH Kabupaten Muara Enim (diolah), 2023

i. Indeks Reformasi Birokrasi

Kualitas Reformasi Birokrasi dari suatu daerah merupakan cerminan dari upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dengan melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap penyelenggaraan dan ketatalaksanaan pemerintahan, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia aparatur. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim pada tahun 2018 memiliki predikat B, tahun 2019 berpredikat B, tahun 2020 berpredikat CC, dan tahun 2021 berpredikat CC.

Tabel 4.27
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim
Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	CC	CC	B

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (diolah), 2023

4.1.6 Permasalahan Per Urusan

a) Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Urusan Pendidikan

- Indikator kinerja persentase pendidikan anak usia dini APK PAUD dengan capaian kinerja 57,10%. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terutama di daerah pedesaan.
- Indikator kinerja rasio guru sertifikasi per murid jenjang SD dengan capaian kinerja 56,28% dan jenjang SMP sebesar 56,28%, hal ini masih perlu ditingkatkan.
- Prasarana dan sarana sekolah dan penunjang masih perlu ditingkatkan.

2) Urusan Kesehatan

- Prasarana dan sarana pelayanan kesehatan, di berbagai tingkat Fasilitas Kesehatan masih perlu ditingkatkan.
- Pelayanan kesehatan kepada usia produktif 15-59 tahun, pelayanan kesehatan kepada usia lanjut, penderita diabetes militus, hipertensi, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan orang dengan resiko terinfeksi HIV masih perlu ditingkatkan.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Prasarana dan sarana penghubung yang mendukung peningkatan pelayanan publik, diantaranya jalan dan jembatan serta sarana gedung kantor masih perlu ditingkatkan.

- Belum optimalnya pengendalian banjir di beberapa wilayah Kabupaten Muara Enim.
- Fungsi jaringan irigasi dan bangunan pelengkapannya masih perlu ditingkatkan.
- Masih rendahnya Rumah Tangga mempunyai jamban sendiri sebesar 87,82% dan Rumah Tangga pengguna air bersih sebesar 71,36%. Hal ini masih perlu ditingkatkan.
- Masih rendahnya Rumah Tangga Pengguna Air Leding dan Kemasan sebesar 28,90. Hal ini masih perlu ditingkatkan.

4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Belum optimalnya program pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pembangunan Kawasan perumahan dan permukiman.
- Belum akuratnya *database* sektor perumahan dan Kawasan permukiman di Kabupaten Muara Enim.

5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Kualitas sumber daya manusia yang menangani urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat perlu ditingkatkan.
- Prasarana dan sarana pendukung Perangkat Daerah yang menangani urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat perlu ditingkatkan.

6) Urusan Sosial

- Cakupan layanan program kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat masih perlu ditingkatkan.
- Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih perlu dioptimalkan.

b) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Urusan Tenaga Kerja

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2022 sebesar 4,12 dan cenderung menurun dari tahun-tahun sebelumnya, dan ini perlu dipertahankan sehingga TPT di Kabupaten Muara Enim dapat ditekan.
- Masih rendahnya kesadaran perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim untuk mentaati peraturan perundang-undangan di bidang tenaga kerja.
- Prasarana dan sarana workshop dan Balai Latihan Kerja (BLK) masih perlu ditingkatkan.
- Peran petugas mediator hubungan industrial perlu dioptimalkan.

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan belum optimal.
- Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebanyak 14 kasus dan pada tahun 2022 menjadi sebanyak 25 kasus.
- Belum optimalnya upaya pencegahan KDRT.
- Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masih terhambat dikarenakan faktor psikologis keluarga dan budaya masyarakat, sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- Masih rendahnya partisipasi dan keterlibatan Forum Anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa, Kecamatan.

3) Urusan Pangan

- Hasil Pengujian Laboratorium Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan belum mewakili secara keseluruhan Kabupaten Muara Enim karena baru 3 Kecamatan yang sampelnya diujikan melalui Laboratorium mengingat biaya pengujian yang cukup tinggi dan keterbatasan anggaran.
- Masih kurangnya Pelaku Usaha, Kelompok Tani dan Gapoktan yang mengajukan Registrasi dan Sertifikasi Jaminan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan seperti Sertifikasi Buah dan Sayuran dan Registrasi beras.

4) Urusan Pertanahan

- Proses pensertifikatan tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Kabupaten Muara Enim berlangsung lama, serta beberapa permasalahan tanah seringkali membutuhkan intervensi keputusan pemerintah pusat.
- Beberapa Perangkat Daerah belum melakukan perencanaan pengadaan tanah atau menyusun dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk penerbitan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan sebagai dasar pengadaan tanah.

5) Urusan Lingkungan Hidup

- Semakin bertambahnya jumlah Perusahaan terutama di bidang Energi dan Pertambangan serta aktifitas pendukung dan pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional di wilayah Kabupaten Muara Enim yang berpotensi mengakibatkan sumber pencemaran di wilayah Kabupaten Muara Enim.

6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Indikator kinerja Persentase Pasangan Berakta Nikah (Non Muslim) dengan capaian kinerja 102%. Hal ini disebabkan masih banyaknya pasangan nikah non muslim yang belum mendaftarkan pernikahan

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, belum banyaknya kerjasama dengan lembaga atau yayasan yang menaungi tempat ibadah non muslim.

7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Belum terbentuknya lembaga ekonomi secara menyeluruh seperti BUMDes di tiap-tiap desa yang berguna untuk meningkatkan PAD Desa.
- Perlu peningkatan kompetensi aparatur Pemerintah Desa terhadap pemahaman peraturan perundang-undangan.

8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Masih rendahnya usia kawin pertama.
- Masih adanya Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ber-KB.
- Masih tingginya angka Keluarga Pra Sejahtera dan KSI.
- Berkurangnya tenaga Penyuluh KB di Kecamatan.

9) Urusan Perhubungan

- Indikator kinerja Rasio Izin trayek dengan capaian kinerja 50%. Hal ini disebabkan jumlah angkutan umum dalam trayek (angkutan perdesaan) tidak mengalami penambahan bahkan berkurang akibat adanya BUS BRT yang mengalami kerusakan (tidak beroperasi).
- Masih perlunya peningkatan prasana dan sarana perlengkapan jalan.

10) Urusan Komunikasi dan Informatika

- Belum semua desa di Kabupaten Muara Enim terjangkau jaringan internet menggunakan jaringan kabel fiber optik.
- Perlu peningkatan jaringan layanan internet.

11) Urusan Koperasi dan UKM

- Masih perlu peningkatan promosi produk-produk unggulan UMKM
- Perlu penguatan daya saing UMKM agar produk UMKM dapat bersaing di pasaran.

12) Urusan Penanaman Modal

- Sulitnya melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak perusahaan terkait dengan kewajiban perusahaan yang telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- Perlu dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk optimalisasi pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Muara Enim.

13) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

- Perlu dilakukan pembinaan secara kontinyu kepada para atlet serta pemenuhan sarana dan prasarana olahraga yang ada.
- Belum optimalnya pembinaan kepada pemuda dalam upaya peningkatan peran pemuda dalam membangun daerah.
- Masih diperlukan peningkatan prasarana dan sarana olahraga yang merata di setiap daerah.

14) Urusan Perpustakaan dan Kearsipan.

- Belum optimalnya pengelolaan dan prasarana dan sarana pendukung perpustakaan.

c) Urusan Pilihan

1) Urusan Perikanan

- Produksi sektor perikanan masih perlu ditingkatkan jika dibandingkan dengan jumlah konsumsi masyarakat terhadap ikan.
- Perlunya peningkatan prasarana dan sarana pengembangan untuk mendukung peningkatan produksi sektor perikanan.

2) Urusan Pariwisata

- Perlu meningkatkan promosi sektor pariwisata yang ada di setiap daerah Kabupaten Muara Enim.
- Prasarana dan sarana penunjang sektor pariwisata masih perlu ditingkatkan.

3) Urusan Pertanian

- Pengembangan hilirisasi sektor pertanian masih perlu ditingkatkan.
- Prasarana dan sarana sektor pertanian masih perlu ditingkatkan.

4) Urusan Perdagangan dan Perindustrian

- Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM).
- Prasarana dan sarana pasar rakyat masih perlu dilengkapi dan ditingkatkan.

d) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Urusan Perencanaan

- Kinerja perencanaan pembangunan daerah masih perlu dioptimalkan, khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

2) Urusan Penelitian dan Pengembangan

- Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengharuskan organisasi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) di Pusat dan Daerah mengalami transformasi baik dari sisi kelembagaan maupun aparatur kelitbangannya.

3) Urusan Keuangan

- Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
- Kondisi ekonomi masyarakat saat ini, khususnya pasca Pandemi Covid-19 masih belum stabil.

4) Urusan Kepegawaian

- Indeks Profesionalisme ASN yang masih berada pada nilai 53,6, hal ini masih perlu ditingkatkan.

4.2 ISU STRATEGIS

1) Pemerataan dan Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan

Salah satu yang menjadi perhatian dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Muara Enim yaitu pemerataan pendapatan atau dalam hal ini sering kita ukur dengan capaian Indeks Gini (tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu daerah). Indeks gini di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,354 menjadi 0,323, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan menjadi 0,337, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,320. Indeks Gini di Kabupaten Muara Enim sulit untuk diturunkan disebabkan oleh perekonomian di Kabupaten Muara Enim didominasi oleh sektor primer yaitu pertambangan dan penggalian, sedangkan mata pencaharian mayoritas masyarakat pada sektor pertanian dan perkebunan.

Kondisi kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan dari tingkat kemiskinan daerah, hal ini masih menjadi isu pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Persentase masyarakat miskin di Kabupaten Muara Enim cenderung menurun. Pada tahun 2017, persentase masyarakat miskin Kabupaten Muara Enim sebesar 13,19 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sebesar 12,32 persen. Sedangkan pada tahun 2022 persentase penduduk miskin Kabupaten Muara Enim menurun secara signifikan menjadi 11,12 persen. Tingkat kemiskinan akan sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, pada tahun 2022 garis kemiskinan Kabupaten Muara Enim sebesar Rp.426.216 per kapita per bulan angka ini meningkat setiap tahunnya dengan tingkat pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 5,04 persen.

Gambar 4.9
Grafik Persentase Kemiskinan Kabupaten Muara Enim
Tahun 2017-2022



Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim, 2023

Sedangkan untuk kemiskinan ekstrem di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2021 dan 2022 cenderung mengalami peningkatan. Kemiskinan ekstrim merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996).

Pemerintah telah menetapkan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai agenda prioritas dan merupakan tujuan 1 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / SDGs yang harus dicapai pada tahun 2030. Berdasarkan data dari Pemerintah, estimasi Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Muara Enim Tahun 2021 dan 2022 sebesar 1,52 persen dan 2,94 persen. Kemiskinan ekstrem yang cenderung meningkat mendorong Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk bekerja lebih ekstra, dalam upaya menghapuskan kemiskinan eksrem, sesuai dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDGs yang telah ditetapkan.

Tabel 4.28
Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Muara Enim

Uraian	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kemiskinan Ekstrem (Persen)	n/a	n/a	n/a	n/a	1,52	2,94
Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (Ribu/Jiwa)	n/a	n/a	n/a	n/a	9.95	19.43

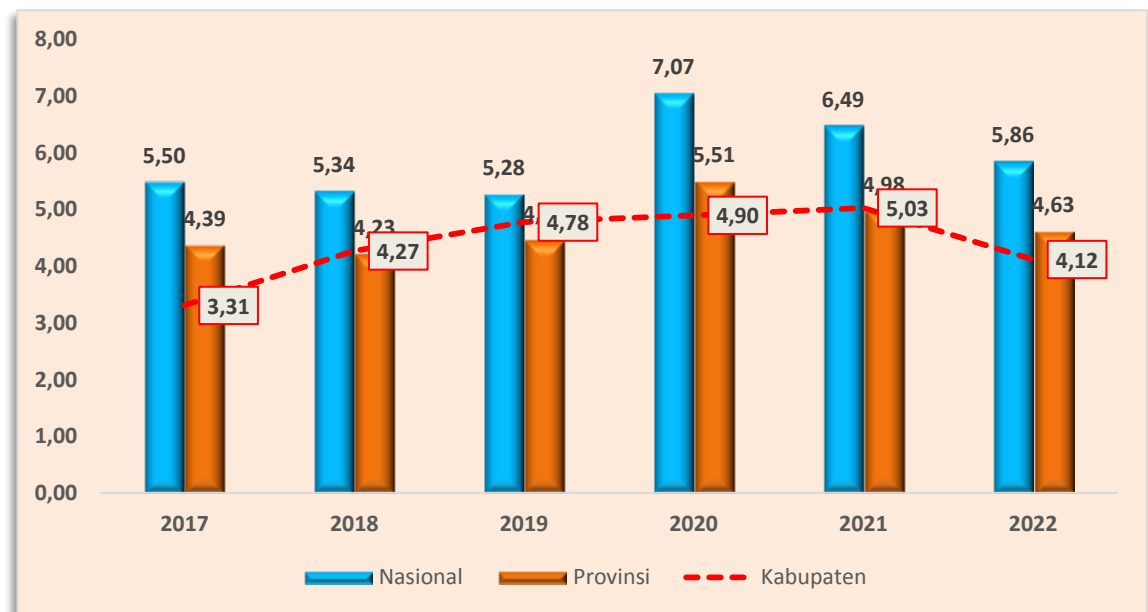
Sumber : Kemeno PMK

Permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan baik konsumsi maupun non konsumsi di Kabupaten Muara Enim (Dokumen RKPD Kabupaten Muara Enim), yaitu : ketimpangan antar kelompok penduduk miskin relatif tinggi; masih terbatasnya akses penduduk miskin terhadap pendidikan dan prasarana dasar; mayoritas pekerja dan pencari kerja di Kabupaten Muara Enim bekerja pada sektor informal dan memiliki pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah; jaminan sosial masih belum optimal masih banyak penduduk yang tidak memiliki jaminan sosial; pengelolaan dan optimalisasi DTKS dalam proses penanggulangan kemiskinan masih belum optimal; belum optimalnya peranan TKPKD sebagai koordinator penanggulangan kemiskinan daerah.

2) Percepatan penurunan tingkat pengangguran

Bekerja merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Sedangkan pengangguran terbuka adalah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja (15 tahun ke atas) yang sedang mencari pekerjaan, penduduk sedang mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum memulai bekerja, serta penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Gambar 4.10
Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Muara Enim
Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Muara Enim selama tahun 2017-2021 cenderung meningkat. Pada tahun 2017 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Muara Enim sebesar 3,31 persen dan pada tahun 2021 menjadi 5,03 persen. Sedangkan pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Muara Enim mengalami penurunan yang signifikan menjadi 4,12 persen, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 349.329 orang. Dari jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 95,88 persen sebagian besar beraktivitas sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 29,32 persen, sementara sisanya penduduk yang berusaha sendiri dan berusaha dibantu, buruh tetap maupun tidak tetap.

Tantangan terbesar menyangkut tingkat pengangguran terbuka baik pada tingkat nasional maupun tingkat Kabupaten Muara Enim sendiri mencakup dua aspek yaitu penciptaan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang belum bekerja dan rendahnya kualitas tenaga kerja.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim perlu untuk melakukan upaya alam mendorong penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, diantaranya yaitu melalui peningkatan peluang kerja yang layak bagi masyarakat, meningkatkan investasi daerah sebagai upaya meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat, meningkatkan keterampilan, dan menumbuhkembangkan jiwa wirausaha dan kemandirian masyarakat.

3) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan Kesehatan

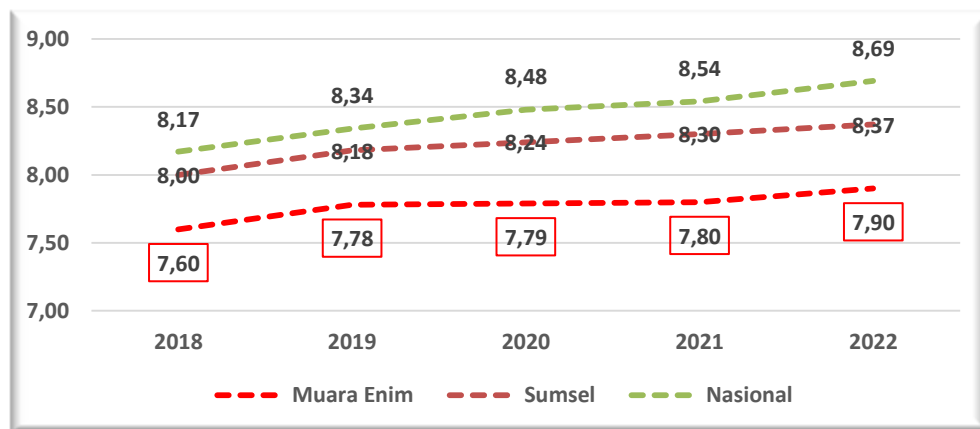
Pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu sektor pelayanan dasar yang harus dipenuhi secara optimal dan menjadi prioritas pembangunan bagi Pemerintah Daerah. Kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan harus selalu ditingkat oleh Pemerintah Daerah, guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Untuk menilai kualitas layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, diantaranya yaitu Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Angka Harapan Hidup.

Jika dilihat kinerja bidang pendidikan dalam 5 (lima) tahun terakhir, yang tertuang dalam capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah, hal tersebut masih perlu ditingkatkan. Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2018 sebesar 7,60 tahun dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 7,90 tahun.

Rata-rata Lama Sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Hal ini masih perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Gambar 4.11
Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2018-2022

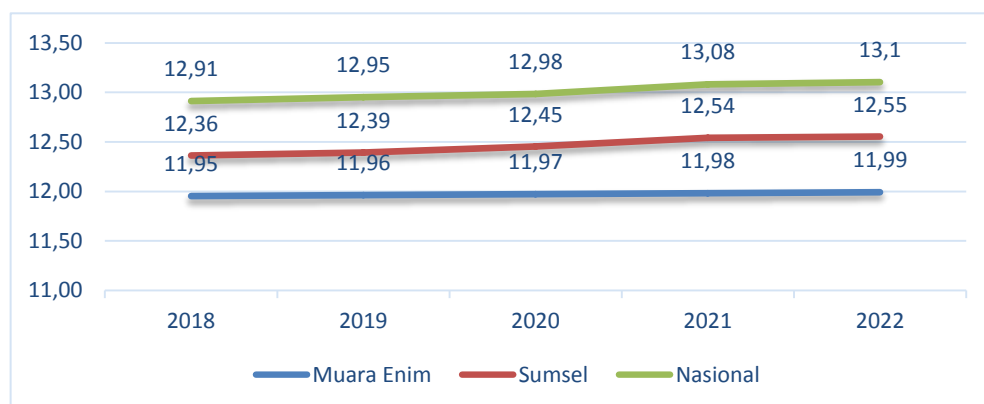


Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

Selain indikator Rata-Rata Lama Sekolah, kinerja bidang pendidikan dapat dilihat dari indikator Harapan Lama Sekolah. Angka Harapan Lama Sekolah menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 sebesar 11,95 tahun dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 11,99. Pemerintah Kabupaten Muara Enim perlu mendorong dan melakukan percepatan peningkatan kualitas layanan di sektor pendidikan untuk meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah yang masih rendah

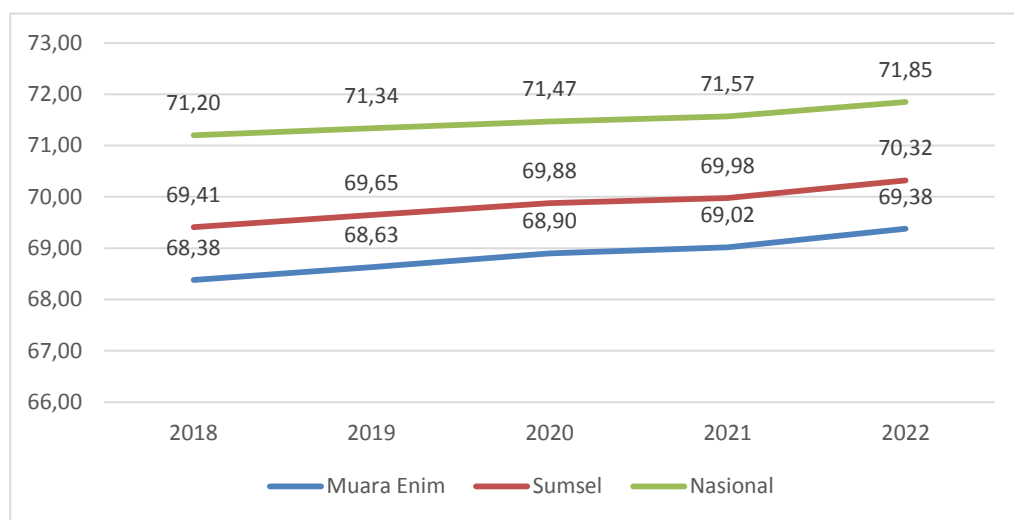
Gambar 4.12
Grafik Harapan Lama Sekolah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

Angka Harapan Hidup merupakan indikator untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, dan untuk menilai kinerja sektor kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Gambar 4.13
Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022



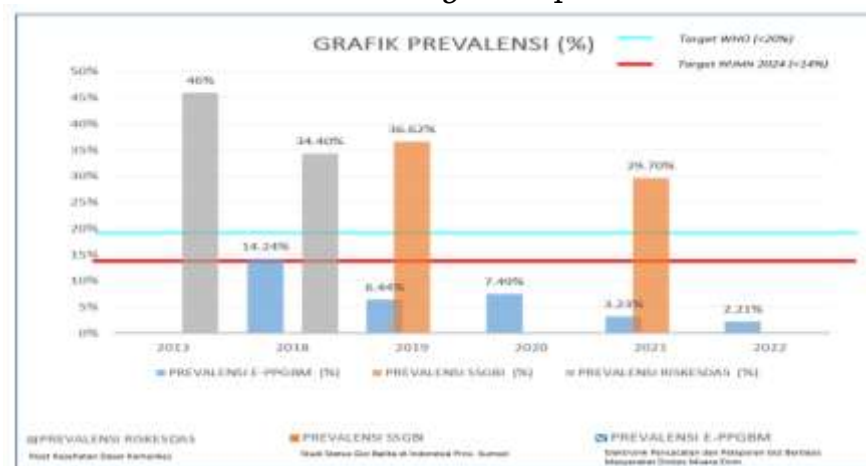
Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

Angka Harapan Hidup Kabupaten Muara Enim cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini mencerminkan bahwa kinerja bidang kesehatan telah berjalan dengan baik. Pada tahun 2018 Angka Harapan Hidup Kabupaten Muara Enim sebesar 68,38 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 69,38. Dalam upaya peningkatan Angka Harapan Hidup Pemerintah Kabupaten Muara Enim fokus pada peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan melalui peningkatan akses kesehatan.

Selain Angka Harapan Hidup, kinerja bidang kesehatan juga dapat dilihat dari kasus *stunting* yang terjadi. Berdasarkan data SSGBI, prevalensi *stunting* Kabupaten Muara Enim cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, pada tahun 2022 sebesar 22,80 persen sedangkan pada tahun 2019 sebesar 36,62 persen. Sedangkan berdasarkan data E-PPGBM, pada tahun

2018 prevalensi *stunting* sebesar 14,24 persen, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 2,21 persen. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim terkait *stunting* antara lain kurangnya pengetahuan ataupun informasi orang tua terkait pola asuh terutama pola makan yang baik untuk anak, kurangnya pengetahuan wanita hamil terkait asupan yang baik dan bergizi untuk kandungan, serta pola hidup yang kurang sehat seperti penggunaan jamban yang tidak layak dan kurangnya akses air bersih. Prevalensi *stunting* diharapkan dapat terus ditekan melalui program pembangunan yang mendukung peningkatan kualitas gizi bagi Balita.

Gambar 4.14
Grafik Prevalensi *Stunting* Kabupaten Muara Enim



4) Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran dari kondisi perekonomian daerah yang terjadi secara berkesinambungan untuk mewujudkan keadaan suatu daerah yang lebih baik dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan merupakan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

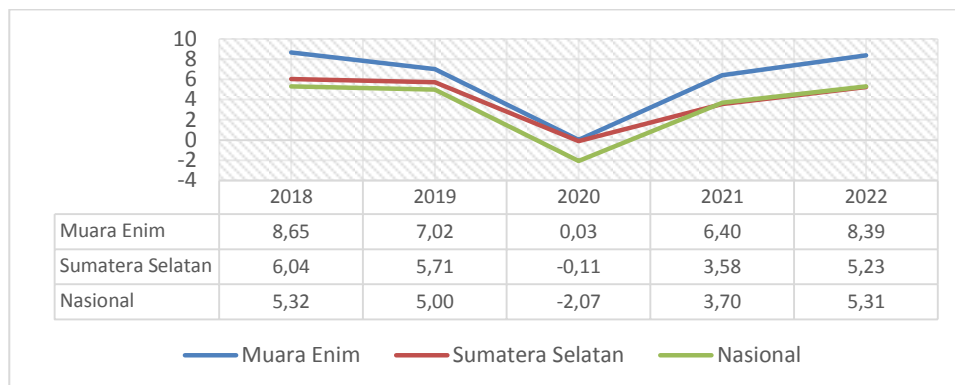
Jika dilihat dari kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim, hal ini memberikan gambaran bahwa pandemi Covid-19 cukup mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim pada tahun 2020 merupakan pertumbuhan ekonomi yang terendah dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 2018-2022 sebesar 6,10 persen. Tren pertumbuhan ekonomi tahun 2018-2020 cenderung menurun dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 8,39 persen. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat, hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat sudah berjalan dengan normal, hal tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim, merupakan salah satu program yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. PSN tersebut diantaranya yaitu pembangunan Kawasan Industri Bukit Asam Tanjung Enim yang berlokasi di Kecamatan Lawang Kidul dan Tanjung Agung. PSN tersebut telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024.

Kawasan Industri Tanjung Enim merupakan kawasan yang diarahkan untuk pengembangan bisnis hilirisasi batubara terintegrasi di mulut tambang atau *raw material-oriented industry*. Kawasan industri berbasis batubara yang terletak di mulut tambang yang dibangun oleh PT. Bukit Asam Tbk merupakan satu-satunya dan yang pertama di Indonesia.

Gambar 4.15
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Muara Enim
Tahun 2018-2022



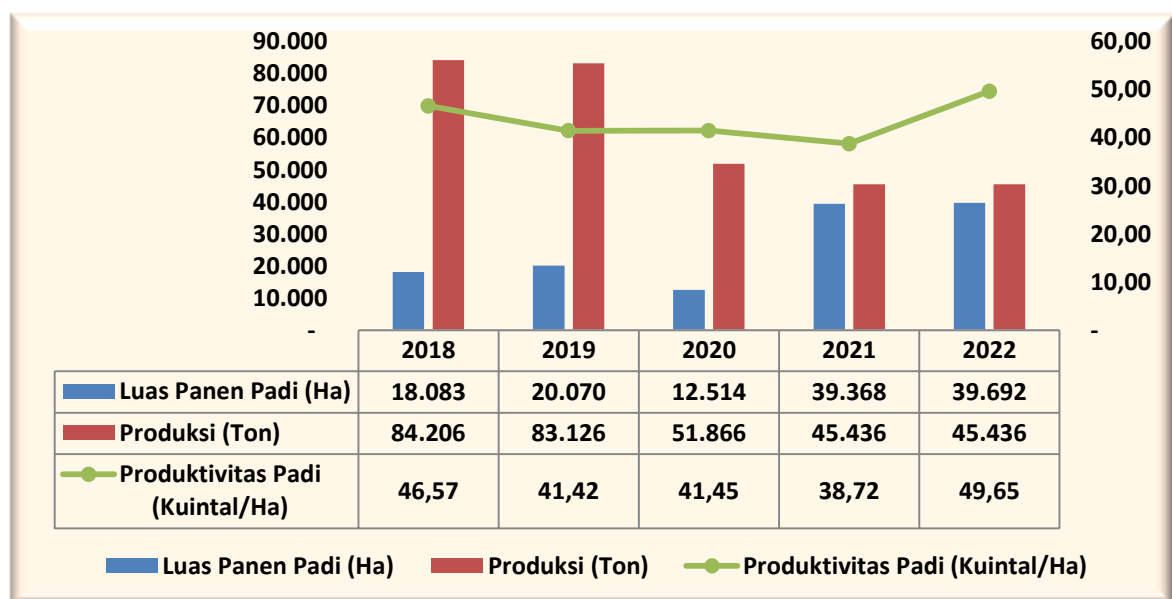
Sumber : BPS Kabupaten Muara Enim

5) Penguatan sektor pertanian

Perekonomian Kabupaten Muara Enim masih didominasi oleh sektor primer, yaitu sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini selaras dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Muara Enim. Produk pertambangan dan pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam perekonomian Kabupaten Muara Enim.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Muara Enim, sektor primer berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang terdiri dari pertambangan dan penggalian sebesar 72,63 persen, industri pengolahan 9,07 persen dan pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 5,68 persen.

Gambar 4.16
Grafik Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022



Sektor pertanian merupakan sektor unggulan Kabupaten Muara Enim, dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB yang cukup besar. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk ditingkatkan.

Tabel 4.29
Jumlah Produksi Sayuran dan Buah-Buahan
Kabupaten Muara Enim Tahun 2017-2021

Produksi (kuintal)	2017	2018	2019	2020	2021
Sayuran					
Bawang Merah	752	625	1,581	1,796	1,671
Cabai	32,108	36,988	46,259	53,286	45,498
Kentang	1,491	1,910	1,164	1,989	3,072
Kubis	1,360	2,034	2,092	2,806	4,995
Buah-Buahan					
Mangga	6,734	9,651	13,017	7,872	12,448
Durian	10,872	34,878	60,336	21,564	6,018
Jeruk	17,561	24,241	29,983	25,694	142,390
Pisang	112,892	100,072	219,986	95,379	291,752
Pepaya	5,970	11,082	219,986	17,003	15,527
Nanas	156,843	114,739	204,707	403,884	475,056

6) Peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah

Pembangunan infrastruktur yang mendukung dan memperlancar aktifitas ekonomi perlu dilakukan. Potensi sumber daya alam yang berlimpah di Kabupaten Muara Enim, dapat dimanfaatkan dengan optimal, apabila didukung dengan sarana transportasi yang memadai. Arus barang dan jasa antar wilayah dapat berjalan dengan lancar, apabila didukung dengan infrastruktur transportasi yang layak.

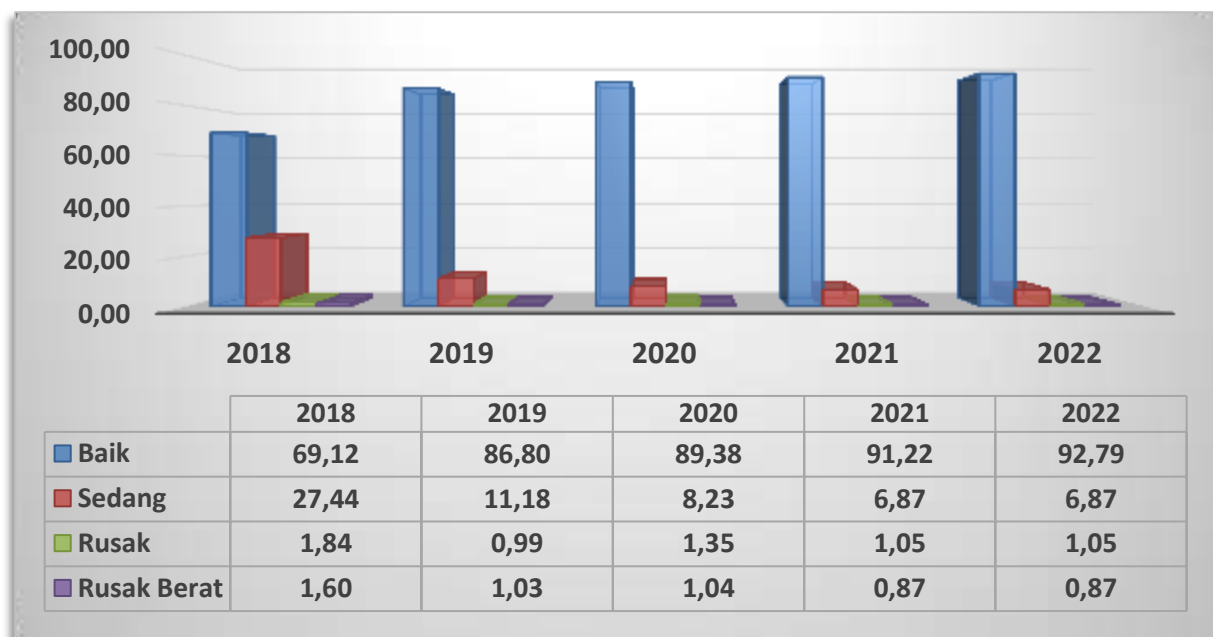
Tabel 4.30
Panjang Jalan Tingkat Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Negara	212,30	212,30	212,30	212,30	212,30
Provinsi	184,17	184,17	184,17	184,17	184,17
Kabupaten	1.386,40	1.395,31	1.396,51	1.400,68	1.407,615

Di bidang jalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim terus melakukan pembangunan dan perbaikan jalan guna mendukung kelancaran transportasi arus barang dan jasa. Pembangunan jalan diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat ke pusat layanan publik.

Selain itu, Pemerintah Pusat telah menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang infrastruktur jalan yang dibangun di Kabupaten Muara Enim, yaitu pembangunan jalan tol Indralaya-Muara Enim dan Muara Enim-Lubuk Linggau. Pembangunan jalan tol dengan panjang $\pm$ 119 Km, diharapkan mampu meningkatkan keterhubungan antar wilayah dan menjadi akses jalan alternatif bagi masyarakat.

Gambar 4.17
Grafik Persentase Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022



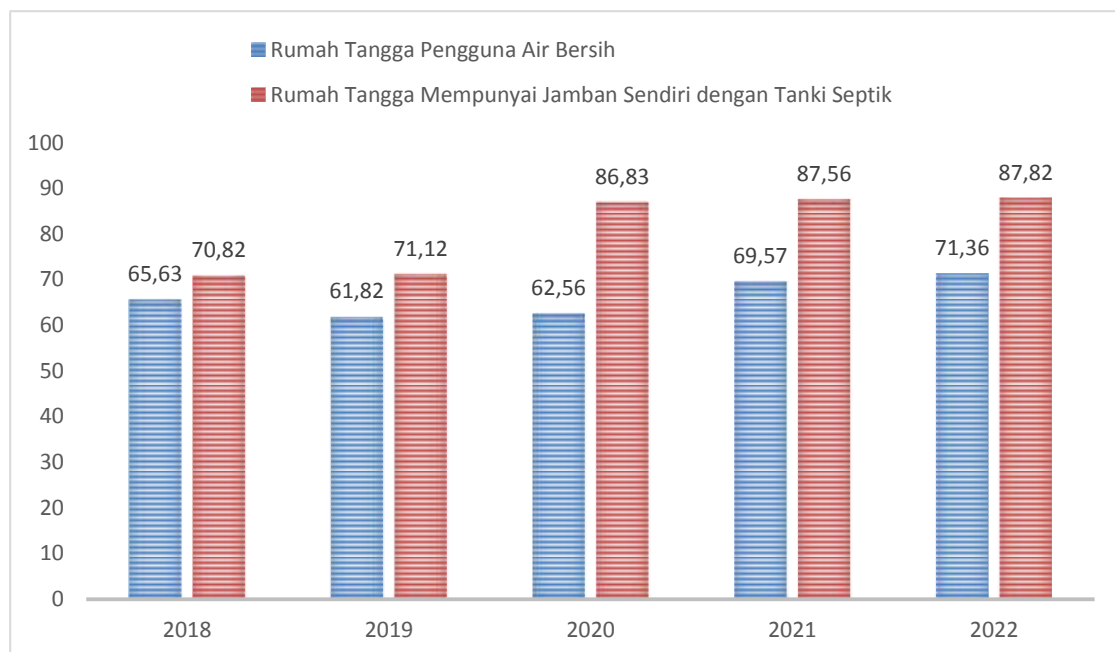
7) Peningkatan pelayanan sanitasi dan air bersih

Sanitasi dan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan masyarakat. Setiap rumah tangga sangat membutuhkan sanitasi dan air bersih dalam kehidupannya sehari-hari yang layak dan aman. Selain itu, sanitasi dan

air bersih sangat berperan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan data Rumah Tangga pengguna air bersih dan jamban, menunjukkan bahwa kinerja bidang sanitasi dan air bersih masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari capaian Rumah Tangga pengguna air bersih yang masih 71,36 persen dan Rumah Tangga yang mempunyai jamban sendiri dengan tangki septik yang masih 87,82 persen.

Gambar 4.18
Grafik Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dan Rumah
Tangga Mempunyai Jamban Sendiri dengan Tanki Septik
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022



Kualitas layanan sanitasi dan air bersih yang masih rendah, merupakan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Muara Enim di masa mendatang, guna mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakat. Dalam upaya melakukan percepatan peningkatan pelayanan sanitasi dan air bersih, Pemerintah Kabupaten Muara Enim, diharapkan mampu menggandeng pemangku kepentingan lainnya, diantaranya yaitu dunia usaha.

8) Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme ASN

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan gambaran sejauh mana organisasi Pemerintah Daerah dapat melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Muara Enim pada tahun 2022 yaitu B. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Kabupaten Muara Enim telah berjalan dengan baik, dan masih perlu ditingkatkan.

Salah satu indikator yang perlu ditingkatkan yaitu profesionalisme ASN. Profesionalisme ASN merupakan suatu kemampuan ASN untuk memiliki keterampilan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang jenjang masing-masing. Salah satu faktor penentu dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu profesionalisme ASN.

Tabel 4.31
Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Reformasi Birokrasi	B	BB	CC	CC	B

Nilai ASN Profesionalitas, yang merupakan salah satu komponen penentu dalam penilaian Reformasi Birokrasi, pada tahun 2022 sebesar 53,6 dari skala 0-100. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme masih perlu ditingkatkan pada tahun mendatang.

9) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pertumbuhan dan perkembangan pusat kota atau kegiatan masyarakat, yang disebabkan oleh peningkatan investasi, aktivitas ekonomi, dan

pertumbuhan penduduk, selain memberikan dampak ekonomi terhadap pertumbuhan daerah, hal tersebut juga memberikan dampak terhadap kualitas lingkungan hidup. Kondisi ekologi dan ekosistem akan terpengaruh oleh kehadiran aktivitas industri dan masyarakat, sehingga apabila tidak ditata dan dikelola dengan baik, hal tersebut dapat mengurangi kualitas lingkungan hidup.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim harus mempertimbangkan dan memperhatikan keberlangsungan dan keseimbangan lingkungan hidup dengan mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muara Enim. Pemerintah Kabupaten Muara Enim tidak hanya mendorong peningkatan eksploitasi dan eksplorasi potensi sumber daya alam yang dimiliki, akan tetapi juga harus memperimbangkan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Muara Enim harus melakukan upaya mitigas potensi bencana dan perubahan iklim yang kemungkinan terjadi di Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dilakukan oleh BNPB RI, Skor IRBI Kabupaten Muara Enim tahun 2022 sebesar 152,86 dengan kelas risiko tinggi. Berbagai upaya dalam pencegahan dan pengendalian resiko bencana dan perubahan iklim dengan melakukan kesiapan, penyadaran, pemantuan, dan perencanaan penanggulangan harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan baik dan tepat sasaran, hal tersebut diharapkan dapat meminimalisir dampak potensi bencana yang kemungkinan terjadi di Kabupaten Muara Enim.

10) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pasal 201 ayat (8) yang menyatakan bahwa, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim mendorong untuk terwujudnya suasana yang kondusif dalam pelaksanaan Pemilihan Umum yang aman, damai, tertib, dan lancar. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum melalui program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026.

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	GAMBARAN UMUM
BAB	III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB	IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB	V	TUJUAN DAN SASARAN
BAB	VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS
BAB	VII	KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB	VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB	IX	PENUTUP

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 disusun dalam rangka mengisi kekosongan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim dimana masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim berakhir pada tahun 2023, sementara Pemilihan Umum Kepala Daerah yang baru akan dilaksanakan pada tahun 2024.

RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim dalam kurun waktu 2024-2026, dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim seiring dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023, hal ini juga berarti berakhirnya visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023.

Berdasarkan uraian di atas dan untuk menentukan tujuan serta sasaran pembangunan daerah dalam RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 mempedomani Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025.

5.1 VISI DAN MISI RPJPD KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2005-2025

Tabel 5.1
Visi, Misi, dan Tujuan RPJPD Tahun 2005-2025
Kabupaten Muara Enim

RPJPD 2005-2025	
Visi RPJPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025, yaitu “Kabupaten Muara Enim yang Sehat, Mandiri, dan Sejahtera”	
Misi	Sasaran
<u>Visi Sehat diwujudkan melalui Misi sebagai berikut :</u> 1) Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani	<u>Sasaran Sehat adalah sebagai berikut :</u> 1) Terwujudkan masyarakat yang sehat jasmani

RPJPD 2005-2025	
Visi RPJPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025, yaitu “Kabupaten Muara Enim yang Sehat, Mandiri, dan Sejahtera”	
Misi	Sasaran
2) Mewujudkan masyarakat yang sehat rohani	2) Terwujudnya masyarakat yang sehat rohani
Visi Mandiri diwujudkan melalui Misi sebagai berikut : 1) Mewujudkan pengembangan ekonomi berbasis sumberdaya lokal 2) Mewujudkan sumberdaya manusia (SDM) berkualitas 3) Mewujudkan lembaga pemerintahan yang baik 4) Mewujudkan perekonomian yang mempunyai daya saing tinggi	Sasaran Mandiri adalah sebagai berikut : 1) Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis sumberdaya lokal (pertanian dan pertambangan) secara berkelanjutan 2) Terwujudnya pengembangan industri pengolahan yang berbasis pertanian 3) Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan pembangunan 4) Terwujudnya struktur perekonomian yang semakin proporsional 5) Terwujudnya pembangunan sesuai dengan RTRW 6) Terwujudnya Kerjasama antar lembaga, daerah, dan antara negara 7) Terwujudnya SDM yang berkualitas dan menguasai IPTEK 8) Terwujudnya dana pembangunan dari sumber penerimaan lokal (Peningkatan PADS) 9) Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan memadai 10) Terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik 11) Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya tata kelola pemerintahan yang baik 12) Terwujudnya kepastian hukum 13) Terwujudnya kehidupan yang lebih demokratis
Visi Sejahtera diwujudkan melalui Misi sebagai berikut : 1) Mewujudkan masyarakat yang dapat memenuhi hak-hak dasar 2) Mewujudkan masyarakat yang semakin dapat mengaktualisasikan diri	Sasaran Sejahtera adalah sebagai berikut : 1) Terwujudnya masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, dan papan) yang layak

RPJPD 2005-2025	
Visi RPJPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025, yaitu “Kabupaten Muara Enim yang Sehat, Mandiri, dan Sejahtera”	
Misi	Sasaran
	2) Terwujudnya masyarakat yang sehat 3) Terwujudnya masyarakat yang berpendidikan 4) Terwujudnya masyarakat yang mempunyai pekerjaan yang layak 5) Terwujudnya masyarakat yang mempunyai lingkungan yang bersih 6) Terwujudnya masyarakat yang sadar berpolitik 7) Terwujudnya masyarakat yang taat menjalankan syariat agama 8) Terwujudnya keamanan dalam masyarakat 9) Terwujudnya masyarakat yang semakin dapat mengaktualisasikan diri

5.2 TUJUAN DAN SASARAN RPD KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024-2026

Tabel 5.2
Tujuan dan Sasaran RPD
Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET		
					2022	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas kesehatan jasmani dan rohani masyarakat			Penilaian Capaian Kabupaten Sehat	n/a	Padapa (71-80)	Padapa (71-80)	Wiwerda (81-90)
		1.1	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	0.6	0.6	0.7	0.8
		1.2	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama	Indeks Kota Toleran	4.98	5.08	5.18	5.28
		1.3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Lingkungan Hidup	61.70	61.80	61.90	70.00
2	Meningkatnya pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal			Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	5.46	5.54	5.62	5.70
		2.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	8,39	6.60	7.01	7.44
		2.2	Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	0,320	0,319	0,318	0,317
3	Meningkatnya derajat kualitas sumber daya manusia			Indeks Pembangunan Manusia	69.43	69.79	70.15	70.51
		3.1	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Usia Harapan Hidup	69.38	69.63	69.88	70.05

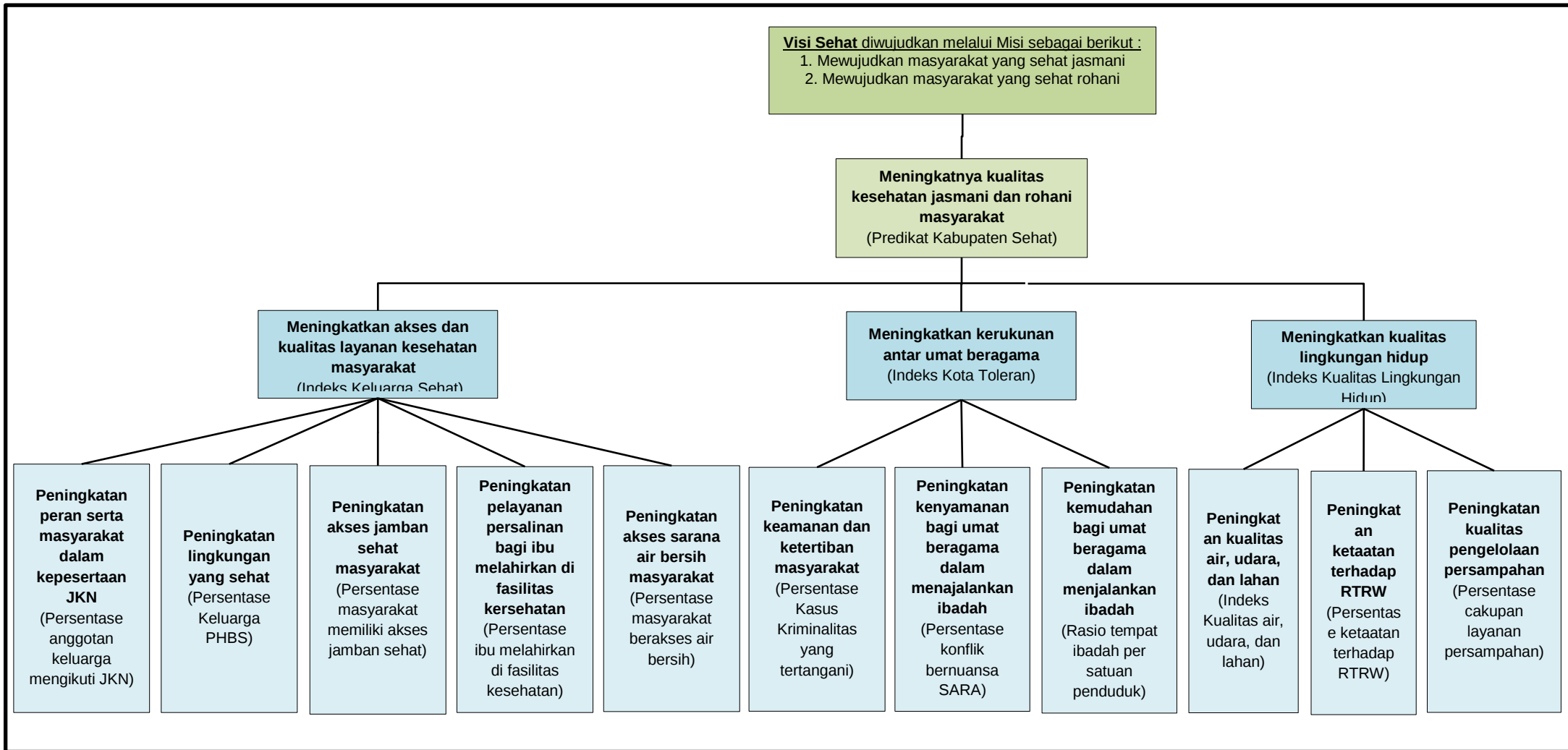
NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET		
					2022	2024	2025	2026
		3.2	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	11.99	12.00	12.01	12.02
				Rata-Rata Lama Sekolah	7.9	7.98	8.06	9.00
		3.3	Meningkatkan daya beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	11,304	11,450	11,597	11,744
4	Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan			Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B
		4.1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	B	B	B
		4.2	Meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	2.91	3.00	3.10	3.20
		4.3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	BB
		4.4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Kualitas Pelayanan Publik	3.90	4.22	4.54	4.86
5	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat			Persentase Penduduk Miskin	11.12	10.71	10.29	9.88
		5.1	Meingkatkan penanganan PPKS	Persentase penurunan penanganan PPKS	85,55	81.73	78.69	75.76
		5.2	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.12	4.00	3.88	3.76
		5.3	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	85.00	87.00	90.00	92.00
		5.4	Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.03	1.02	1.01	1.00

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET		
					2022	2024	2025	2026
		5.5	Meningkatkan kualitas layanan hunian masyarakat	Persentase Rumah Layak Huni	91.88	93.88	95.88	97.88
6	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan masyarakat dalam pembangunan daerah			Indeks Pengarusutamaan Gender (IPG)	89.67	89.76	89.85	89.93
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71.65	74.52	77.39	80.25
		6.1	Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase Peningkatan IPG	0.09	0.09	0.09	0.09
		6.2	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Persentase Peningkatan IDG	2.87	2.87	2.87	2.87
7	Meningkatnya pemenuhan hak anak			Predikat Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Nindya	Utama
		7.1	Meningkatkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Persentase Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	3.25	6.10	10.20	12.20

Secara rinci keterkaitan antara Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 dengan Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 dijabarkan dalam bagan alir (cascading) berikut :

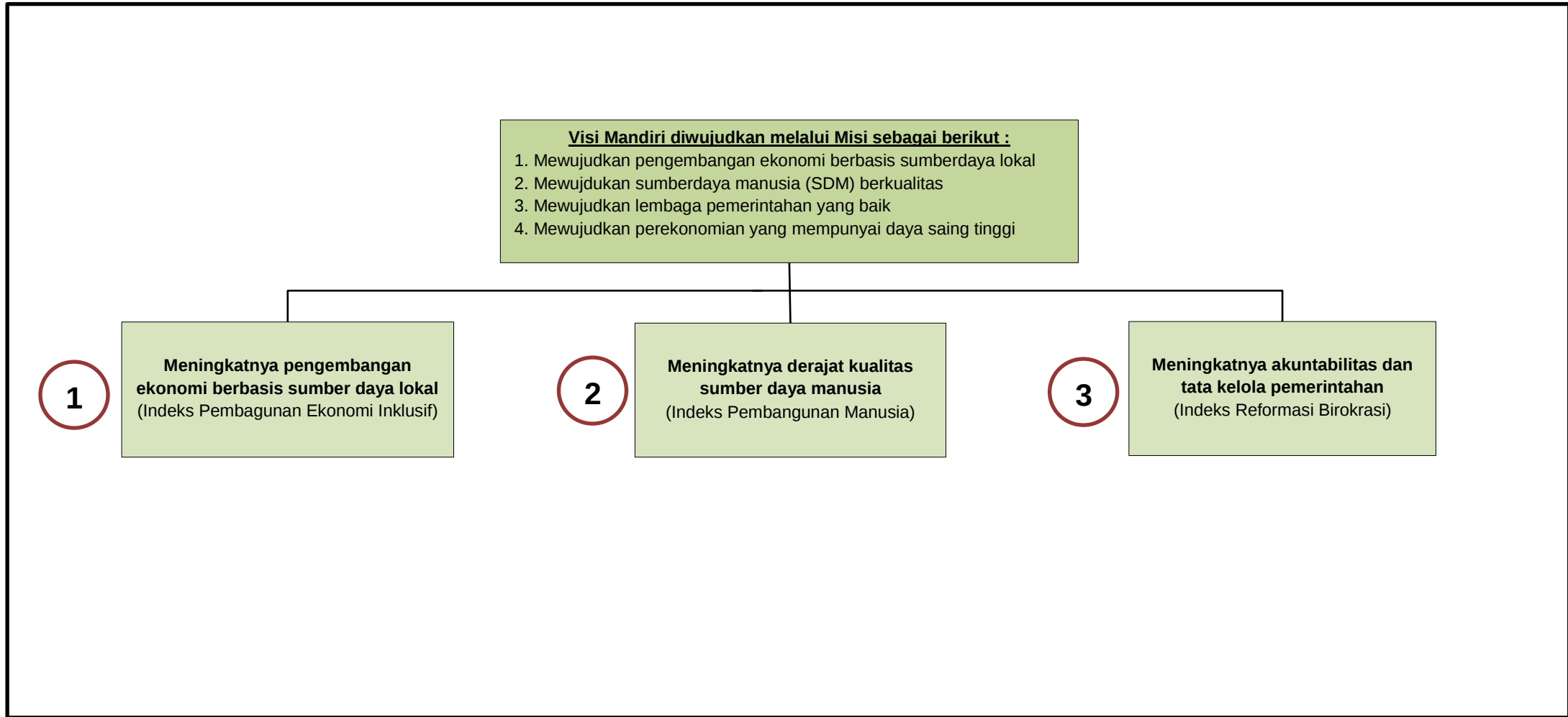
Gambar 5.1

Bagan Alir (Cascading) Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Visi Sehat)

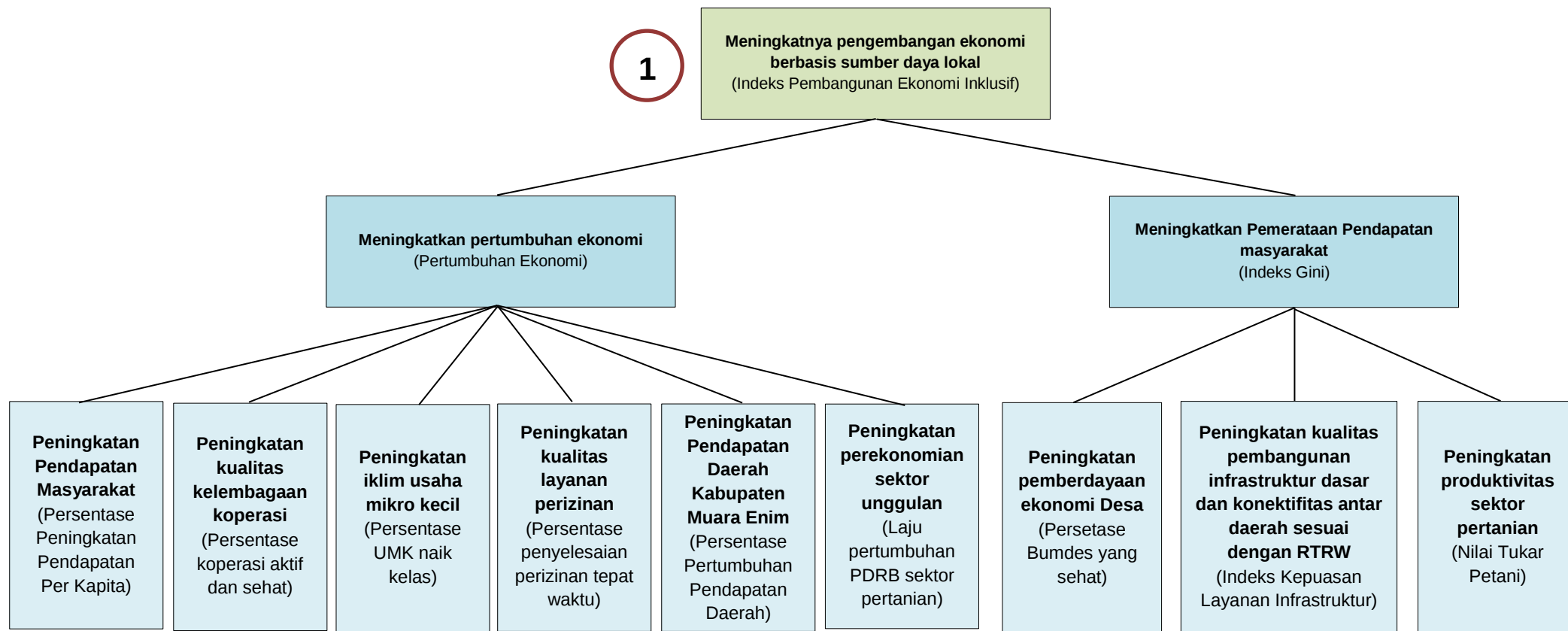


Gambar 5.2

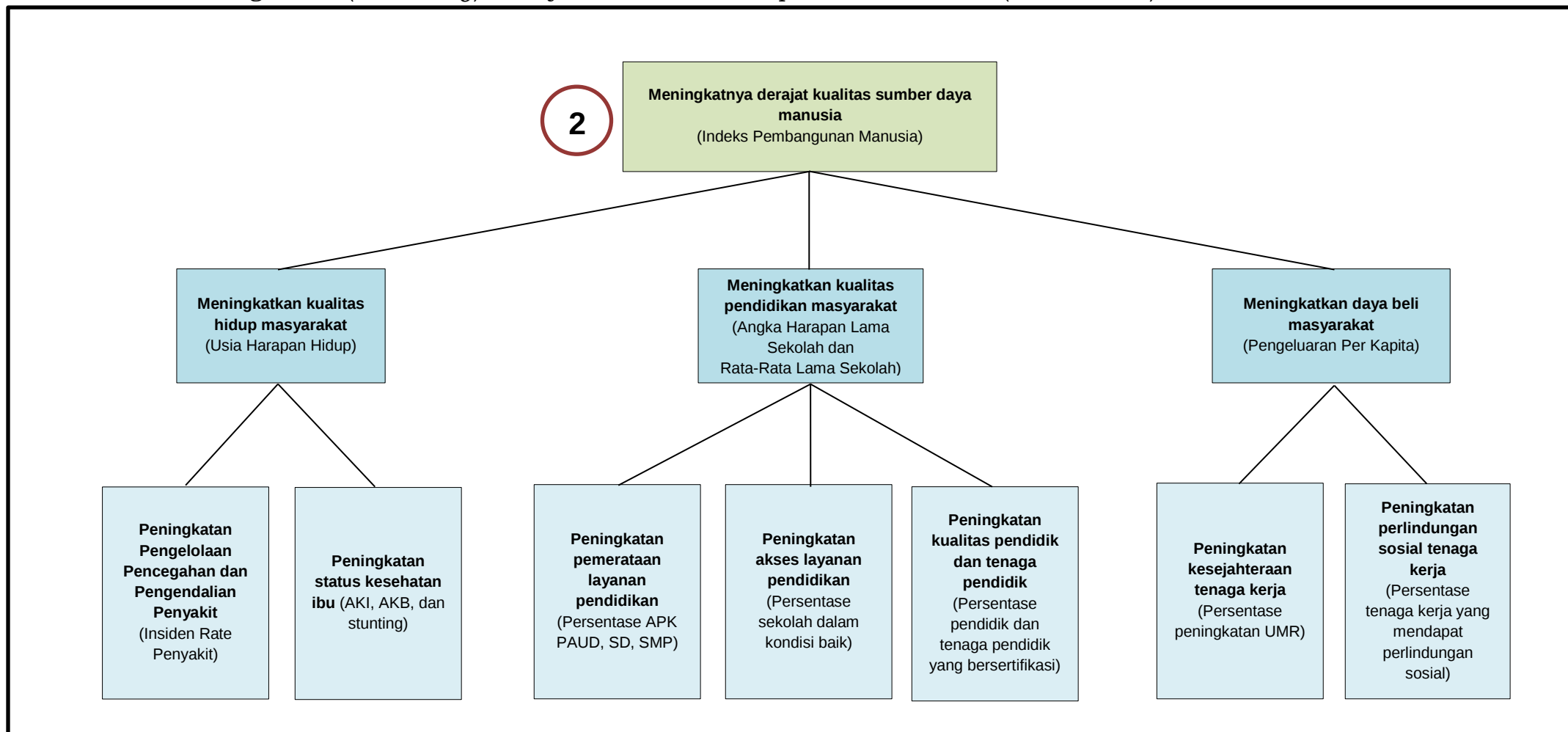
Bagan Alir (Cascading) Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Visi Mandiri)



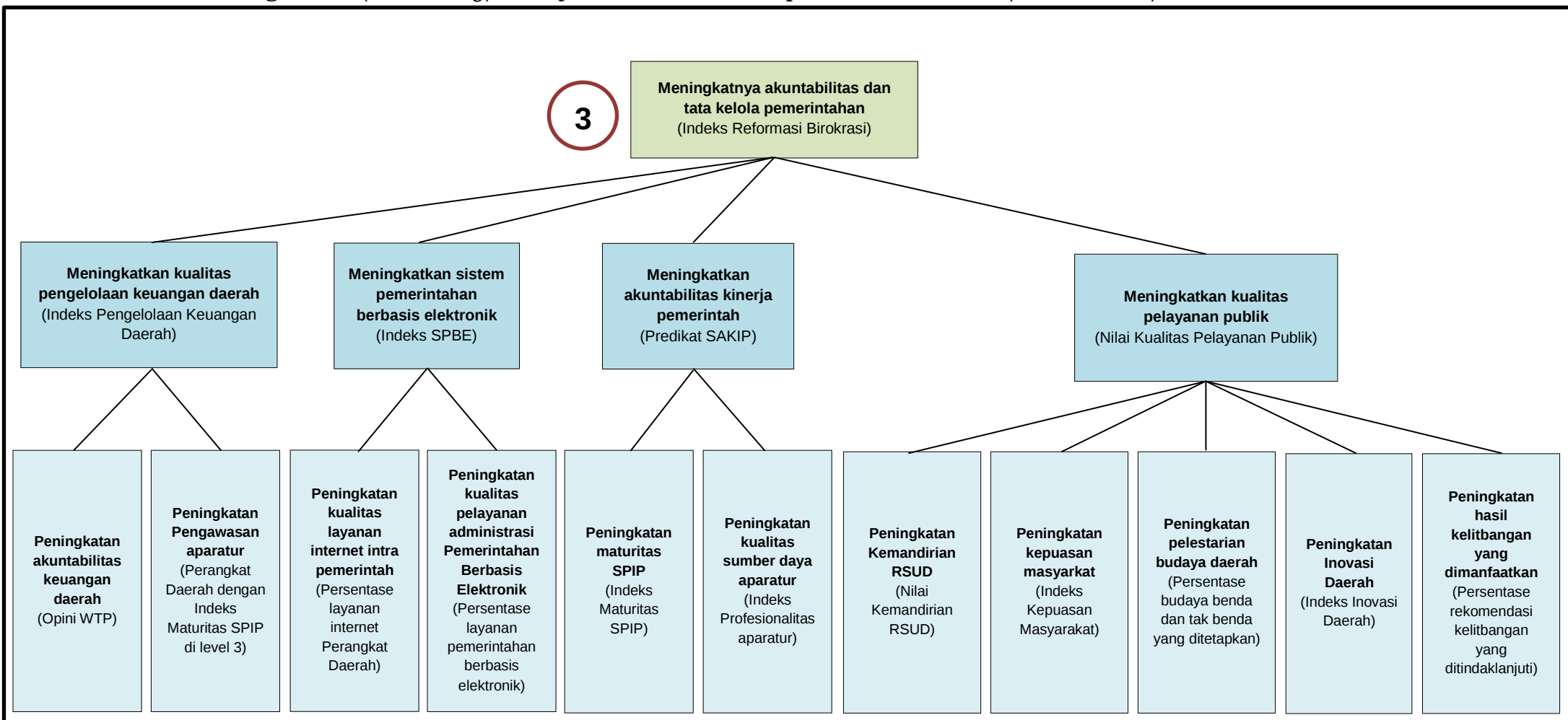
Bagan Alir (Cascading) Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Visi Mandiri) **LANJUTAN ...**



Bagan Alir (*Cascading*) Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Visi Mandiri) **LANJUTAN ...**

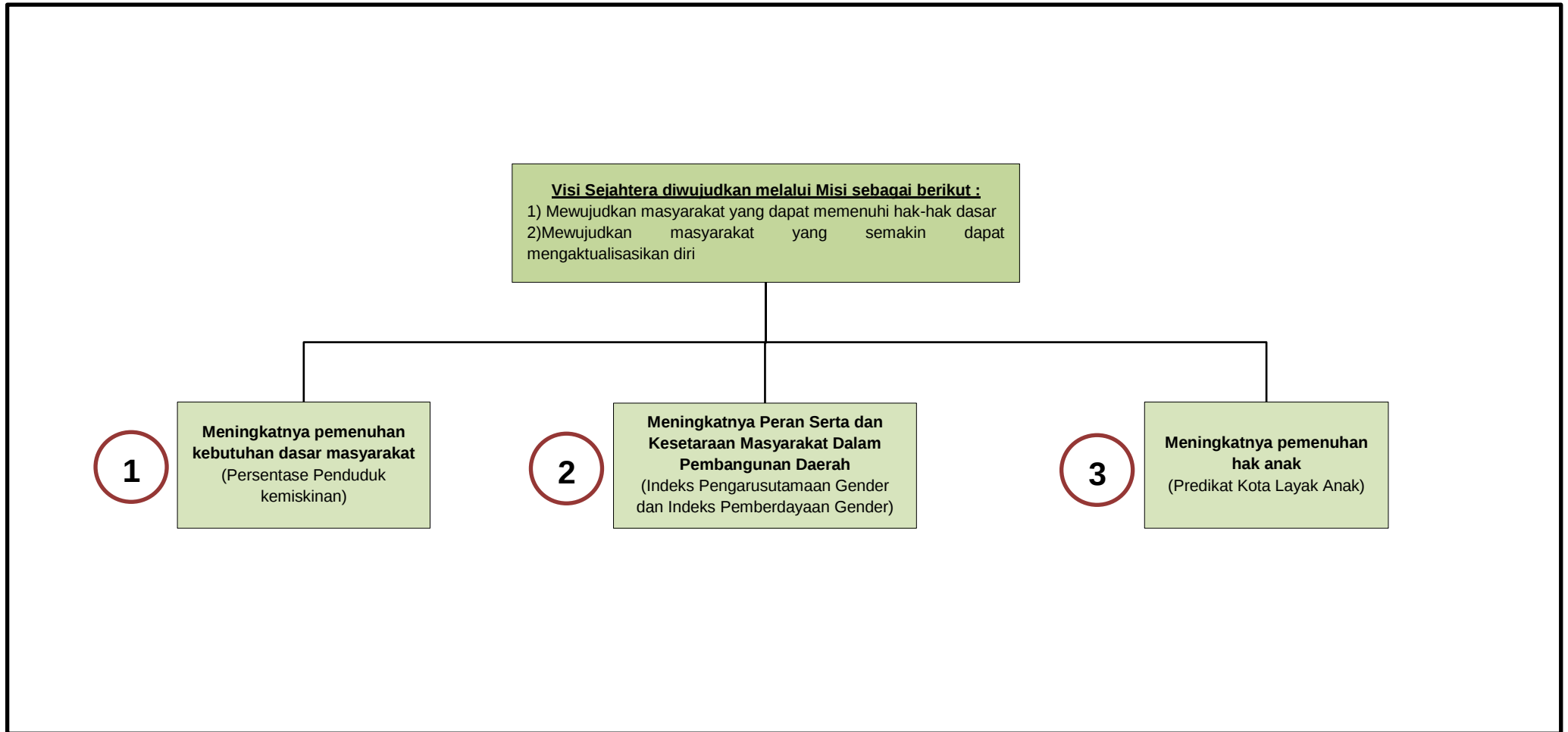


Bagan Alir (Cascading) Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Visi Mandiri) **LANJUTAN ...**

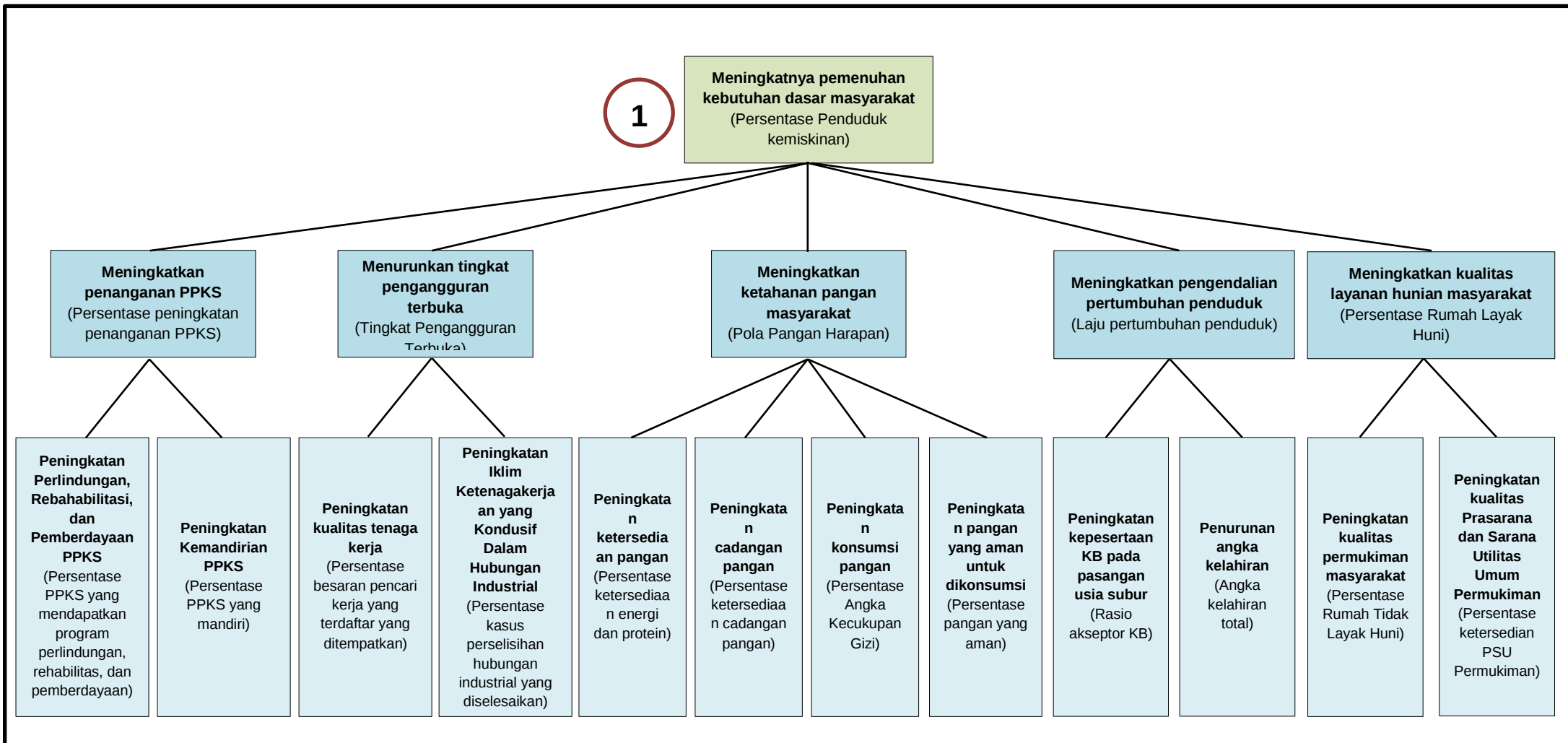


Gambar 5.3

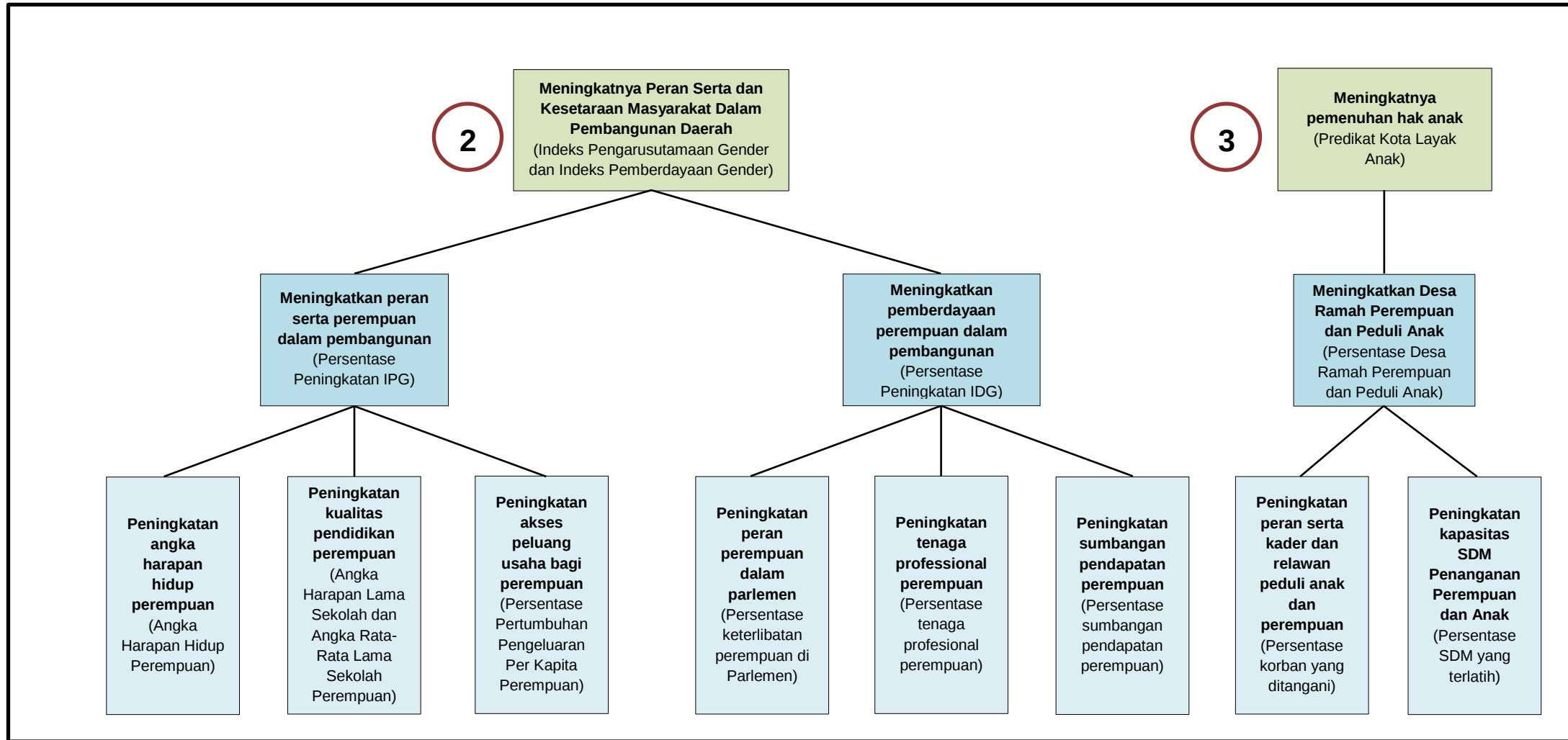
Bagan Alir (*Cascading*) Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Visi Sejahtera)



Bagan Alir (Cascading) Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Visi Sejahtera) **LANJUTAN ...**



Bagan Alir (Cascading) Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Visi Sejahtera) **LANJUTAN ...**



BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	GAMBARAN UMUM
BAB	III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB	IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB	V	TUJUAN DAN SASARAN
BAB	VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS
BAB	VII	KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB	VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB	IX	PENUTUP

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 yang mempedomani visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025, maka diperlukan strategi, arah kebijakan, dan program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama kurun waktu 2024-2026. Sedangkan program prioritas daerah yang ditetapkan merupakan program yang menjadi fokus pembangunan dalam tahun 2024-2026.

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2038. Strategi RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran, dan Strategi
RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN/SASARAN		STRATEGI
1	Meningkatnya kualitas kesehatan jasmani dan rohani masyarakat		
	1.1	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan	a) Peningkatan peran serta masyarakat dalam kepesertaan JKN

NO	TUJUAN/SASARAN			STRATEGI
			masyarakat	b) Peningkatan lingkungan sehat c) Peningkatan akses jamban sehat masyarakat d) Peningkatan pelayanan persalinan bagi ibu melahirkan di fasilitas kesehatan e) Peningkatan akses sarana air bersih masyarakat
		1.2	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama	a) Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat b) Peningkatan kenyamanan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadah c) Peningkatan kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadah
		1.3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	a) Peningkatan kualitas air, udara, dan lahan b) Peningkatan ketaatan terhadap RTRW c) Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan
2	Meningkatnya pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal			
		2.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	a) Peningkatan Pendapatan Masyarakat b) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi c) Peningkatan iklim usaha mikro kecil d) Peningkatan kualitas layanan perizinan e) Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim f) Peningkatan perekonomian sektor unggulan
		2.2	Meningkatkan Pemerataan Pendapatan masyarakat	a) Peningkatan pemberdayaan ekonomi Desa b) Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antar daerah sesuai dengan RTRW c) Peningkatan produktivitas sektor pertanian

NO	TUJUAN/SASARAN			STRATEGI
3	Meningkatnya derajat kualitas sumber daya manusia			
		3.1	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	a) Peningkatan Pengelolaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit b) Peningkatan status kesehatan ibu
		3.2	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	a) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan b) Peningkatan akses layanan pendidikan c) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidik
		3.3	Meningkatkan daya beli masyarakat	a) Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja b) Peningkatan perlindungan sosial tenaga kerja
4	Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan			
		4.1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	a) Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah b) Peningkatan Pengawasan aparatur
		4.2	Meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik	a) Peningkatan kualitas layanan internet intra pemerintah b) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
		4.3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	a) Peningkatan maturitas SPIP b) Peningkatan kualitas sumber daya aparatur
		4.4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	a) Peningkatan Kemandirian RSUD b) Peningkatan kepuasan masyarakat c) Peningkatan pelestarian budaya daerah d) Peningkatan Inovasi Daerah e) Peningkatan hasil kelitbangan yang dimanfaatkan
5	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat			

NO	TUJUAN/SASARAN			STRATEGI
		5.1	Meningkatkan penanganan PPKS	a) Peningkatan Perlindungan, Rehabilitasi, dan Pemberdayaan PPKS b) Peningkatan Kemandirian PPKS
		5.2	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	a) Peningkatan kualitas tenaga kerja b) Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif Dalam Hubungan Industrial
		5.3	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	a) Peningkatan ketersediaan pangan b) Peningkatan cadangan pangan c) Peningkatan konsumsi pangan d) Peningkatan pangan yang aman untuk dikonsumsi
		5.4	Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk	a) Peningkatan kepesertaan KB pada pasangan usia subur b) Penurunan angka kelahiran
		5.5	Meningkatkan kualitas layanan hunian masyarakat	a) Peningkatan kualitas permukiman masyarakat b) Peningkatan kualitas Prasarana dan Sarana Utilitas Umum Permukiman
6	Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah			
		6.1	Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan	a) Peningkatan angka harapan hidup perempuan b) Peningkatan kualitas pendidikan perempuan c) Peningkatan akses peluang usaha bagi perempuan
		6.2	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	a) Peningkatan peran perempuan dalam parlemen b) Peningkatan tenaga profesional perempuan c) Peningkatan sumbangan pendapatan perempuan

NO	TUJUAN/SASARAN			STRATEGI
7	Meningkatkan pemenuhan hak anak			
		7.1	Meningkatkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	a) Peningkatan peran serta kader dan relawan peduli anak dan perempuan b) Peningkatan kapasitas SDM Penanganan Perempuan dan Anak

Berdasarkan hasil perumusan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Muara Enim periode tahun 2024-2026, antara lain sebagai berikut:

Tabel 6.2
Arah Kebijakan
RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026

ARAH KEBIJAKAN		
2024	2025	2026
1) Mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kinerja UMK/IKM dan pemberdayaan masyarakat. 2) Mempercepat penurunan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem. 3) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya guna peningkatan kualitas pelayanan publik. 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi	1) Meningkatkan ketahanan ekonomi dan pangan masyarakat, guna mendukung pengurangan angka kemiskinan. 2) Meningkatkan pemerataan layanan infrastruktur dasar, guna mendukung konektivitas antar wilayah dan peningkatan kualitas pelayanan dasar. 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing daerah. 4) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.	1) Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 2) Meningkatkan layanan infrastruktur dan konektivitas antar daerah, guna meningkatkan pemerataan pembangunan daerah. 3) Meningkatkan nilai tambah sektor unggulan dan daya saing daerah. 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 5) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

ARAH KEBIJAKAN		
2024	2025	2026
Aparatur Sipil Negara untuk mendukung kinerja Reformasi Birokrasi. 5) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. 6) Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan hilirisasi sektor pertanian. 7) Mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang kondusif.	5) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.	6) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat guna mendukung penurunan angka kemiskinan.

Sedangkan tema pembangunan Kabupaten Muara Enim periode 2024-2026, antara lain sebagai berikut :

Tabel 6.3

Tema Pembangunan RPD Kabupaten Muara Enim
Tahun 2024-2026

2024	STABILITAS EKONOMI DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DASAR
Diarahkan untuk peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19 dan peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur daerah	<u>PRIORITAS PEMBANGUNAN :</u> 1) Mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat; 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya; 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan 4) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
2025	MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Diarahkan untuk penguatan ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya di bidang ketahanan pangan dan pertanian, serta pemerataan layanan infrastruktur dasar.	<u>PRIORITAS PEMBANGUNAN :</u> 1) Meningkatkan ketahanan ekonomi dan pangan masyarakat; 2) Meningkatkan pemerataan layanan infrastruktur dasar; 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan 4) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan
2026	PEMANTAPAN EKONOMI LOKAL MELALUI PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH
Diarahkan untuk peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah dan peningkatan konektivitas antar wilayah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.	<u>PRIORITAS PEMBANGUNAN :</u> 1. Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi; 2. Meningkatkan layanan infrastruktur dan konektivitas antar daerah; 3. Meningkatkan nilai tambah sektor unggulan dan daya saing daerah; 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kewilayahan

Mempertimbangkan sinergi RPJPD Kabupaten Muara Enim dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muara Enim, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muara Enim melalui pengembangan sektor agro, wisata, industri dan energi berteknologi tinggi dengan bersendikan pada solidaritas masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam pembangunan daerah, dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan; serta mendorong perubahan dan percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, serta kecamatan.

Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang di Kabupaten Muara Enim diarahkan untuk (1) menciptakan keterpaduan sistem perkotaan kabupaten; (2) mewujudkan keterpaduan infrastruktur dan sistem kota-kota di kabupaten; dan (3) mengembangkan infrastruktur yang dapat mendorong pengembangan wilayah, penanganan kebencanaan serta pertahanan dan keamanan. Selain itu, kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung diarahkan untuk (1) meningkatkan pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; (2) menetapkan dan memantapkan kawasan lindung untuk keberlanjutan pembangunan; dan (3) mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Sementara, kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya diarahkan untuk (1) meningkatkan produksi dan produktivitas serta indeks pertanaman pada lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan guna menjaga ketahanan pangan dan mendukung pengembangan kawasan andalan; (2) mengembangkan kawasan budidaya untuk pengembangan sektor pertanian; (3)

mengembangkan kawasan budidaya untuk pengembangan sektor pariwisata dan industri; dan (4) mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Tabel 6.4
Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026

Strategi	Arah Kebijakan
Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang	
1. Penataan ruang wilayah Kabupaten untuk menciptakan keterpaduan sistem perkotaan	a. memantapkan pusat-pusat kegiatan PKW, PPK dan PPL; b. memperkuat hubungan antara pusat kegiatan dengan <i>hinterland</i> -nya; c. pengembangan prasarana yang dapat mendukung kegiatan ekonomi di wilayah sekitarnya; dan menguatkan sistem kota dengan meningkatkan fungsi dan hierarki kota serta aksesibilitas kawasan perbatasan dan pinggiran
2. Pengembangan struktur ruang yang dapat mendorong terwujudnya keterpaduan infrastruktur dan sistem kota-kota di kabupaten	a. mengembangkan transportasi secara terintegrasi dalam pengembangan jalan, jalan kereta api, transportasi, terminal dan terminal khusus yang menghubungkan antar pusat kegiatan dan antar pusat kegiatan dengan <i>hinterland</i> -nya; b. mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan antar pusat pelayanan dengan permukiman; c. mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum dan terminal khusus sebagai simpul transportasi;

Strategi	Arah Kebijakan
	d. mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana untuk mendukung pergerakan dari pusat kegiatan ke/dari <i>hinterland</i>; dan e. mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan infrastruktur dalam mendorong pengembangan kawasan strategis kabupaten dalam mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.
3. Pengembangan infrastruktur yang mendorong pengembangan wilayah, penanganan kebencanaan serta pertahanan dan keamanan	a. meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana serta fasilitas dalam mendukung kegiatan perkotaan dan perdesaan serta pertahanan dan keamanan; b. mengembangkan dan meningkatkan sistem jaringan energi secara optimal; c. meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis DAS untuk mendukung kegiatan perkotaan dan pertanian; d. mengembangkan sistem Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sesuai dengan proyeksi pertumbuhan penduduk, ekonomi dan perkembangan perkotaan; e. mengembangkan sistem telekomunikasi yang merata terutama untuk menunjang kegiatan penduduk dan ekonomi; f. mengembangkan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan budaya terutama di PKW, PPK dan PPL; g. mengembangkan sistem drainase yang terintegrasi; h. mengembangkan sistem pengolahan limbah

Strategi	Arah Kebijakan
	domestik setempat dan terpusat; dan i. mengembangkan dan peningkatan kualitas jalur evakuasi bencana.
Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang	
1. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup	a. mempertahankan kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya; b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya; dan c. mengembangkan kerjasama antar kabupaten perbatasan dalam meningkatkan fungsi lindung.
2. Penetapan dan pemantapan kawasan lindung untuk keberlanjutan pembangunan	a. menetapkan tata batas kawasan lindung dengan budidaya; b. melaksanakan rehabilitasi fungsi kawasan lindung; c. meningkatkan kapasitas dan wawasan masyarakat terkait sumber daya hayati dan lingkungan hidup; dan d. menggalang kerjasama penelitian, implementasi dan operasional pada tingkat regional, nasional dan internasional.
3. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup	a. melakukan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, sungai, danau/telaga mata air; b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan; c. mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan

Strategi	Arah Kebijakan
	ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan d. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.
Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya	
1. Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan guna menjaga ketahanan pangan dan mendukung pengembangan kawasan andalan	a. meningkatkan produktivitas lahan pertanian, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan; dan b. meningkatkan produksi pertanian, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.
2. Pengembangan kawasan budidaya untuk pengembangan sektor pertanian	a. program intensifikasi pada lahan-lahan produktif; b. menyediakan prasarana dan sarana pendukung pertanian; c. mendukung persediaan akan informasi yang berbasis teknologi terhadap kegiatan pertanian; d. mendukung sistem distribusi kegiatan pertanian (hulu – hilir); dan e. mempertahankan lahan pertanian tanaman pangan agar tidak terkonversi untuk peruntukan lain.
3. Pengembangan	a. meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta

Strategi	Arah Kebijakan
kawasan budidaya untuk pengembangan sektor pariwisata dan industri	dalam usaha pertumbuhan kegiatan pariwisata; b. meningkatkan pemberdayaan usaha kecil, menengah, koperasi, dan masyarakat di bidang usaha pariwisata; c. melestarikan kebudayaan dan kesenian daerah Kabupaten Muara Enim untuk dijadikan obyek dan daya tarik wisata; d. meningkatkan pemanfaatan peran media massa dan teknologi informasi dalam promosi maupun layanan informasi pariwisata di Kabupaten; e. mengembangkan riset, studi dan analisis pasar pariwisata Nasional dan Internasional dalam mendukung upaya pemasaran pariwisata; f. promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik; g. mempromosikan produk baru yang berbasis masyarakat, kelokalan dan keaslian serta bertema spesifik; dan h. melakukan kerjasama Internasional yang sinergi dengan kebijakan/strategi/program dan kegiatan Nasional melalui kerjasama bilateral/multilateral.
4. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan	a. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; b. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan tangkapan air untuk mempertahankan ketersediaan sumber air; dan c. mengatur pemanfaatan di kawasan budidaya melalui mekanisme perizinan dan/atau melalui

Strategi	Arah Kebijakan
	pemberian rekomendasi maupun pertimbangan teknis.

Sumber: Perda RTRW Kabupaten Muara Enim 2018-2038

Fokus pembangunan daerah pada tahun 2024-2026 diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang meliputi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Pengembangan Kawasan (PPK) dan Pusat Pengembangan Lingkungan (PPL).

Tabel 6.5

Pusat-pusat Pengembangan Wilayah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026

Pusat Kegiatan	Lokasi
1. Pusat Kegiatan Wilayah	Ibu Kota Kabupaten Muara Enim di Muara Enim sebagai pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan dan jasa.
2. Pusat Kegiatan Kawasan	1) Pulau Pangung Kecamatan Semende Darat Laut; 2) Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung; 3) Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul; 4) Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas; 5) Gunung Megang Kecamatan Gunung Megang; 6) Cinta Kasih Kecamatan Belimbing; 7) Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru; 8) Sugih Waras Kecamatan Rambang; 9) Beringin Kecamatan Lubai; 10) Karang Agung Kecamatan Lubai Ulu; 11) Gelumbang Kecamatan Gelumbang; 12) Sukarami Kecamatan Sungai Rotan; 13) Aremantai Kecamatan Semende Darat Ulu; 14) Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah; 15) Lebak Budi Kecamatan Panang Enim; 16) Padang Bindu Kecamatan Benakat; 17) Dangku Kecamatan Empat Petulai Dangku; 18) Lembak Kecamatan Lembak; 19) Tanjung Bunut Kecamatan Belida Darat; 20) Menanti Kecamatan Kelekar; dan 21) Patra Tani Kecamatan Muara Belida.

Pusat Kegiatan	Lokasi
3. Pusat Pengembangan Lingkungan	Seluruh kawasan perdesaan dan Kelurahan

Sumber: Perda RTRW Kabupaten Muara Enim 2018-2038.

Arah kebijakan pembangunan kewilayahan selain memperhatikan potensi unggulan wilayah, juga difokuskan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di tingkat desa. Kawasan perdesaan merupakan Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif.

Mempedomani Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Muara Enim, terdapat 8 (delapan) pembagian kawasan perdesaan, yaitu 1) Kawasan Tanaman Pangan, 2) Kawasan Hortikultura, 3) Kawasan Peternakan, 4) Kawasan Perkebunan, 5) Kawasan Perikanan, 6) Kawasan Budidaya Gambut, 7) Kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah, dan 8) Kawasan Pariwisata.

Terhadap kebijakan pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Muara Enim dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

1) Kawasan Tanaman Pangan

Tabel 6.6

Kawasan Tanaman Pangan Kabupaten Muara Enim

No	Kecamatan	Desa
1	Semende Darat Ulu	Desa Arernantai
		Deso Siring Agung
		Desa Tanjung Agung
		Desa Datar Lebar
		Desa Cahaya Alam
		Desa Tanjung Tiga
		Desa Danau Gerak
		Desa Pelakat
2	Semende Darat Tengah	Desa Tanjung Raya
		Desa Tebing Abang
		Desa Batu Surau
		Desa Muara Tenang
		Desa Palak Tanah
		Desa Tenam Bungkok
		Desa Kota Padang
		Desa Gunung Agung
		Desa Rekimai Jaya
		Desa Swarna Dwipa
3	Semende Darat Laut	Muara Dua
		Desa Muara Danau
		Desa Penyandingan
		Desa Tanah Abang
		Desa Pagar Agung
		Desa Babatan
		Desa Penindaian
		Desa Prapau
4	Panang Enim	Desa Lubuk Nipis
		Desa Padang Bindu
		Desa Bedegung
		Desa Muara Meo
		Desa Pandang Dulang
		Desa Inderamayu
		Desa Sukaraja
		Desa Tanjung Baru
		Desa Lembur

No	Kecamatan	Desa
		Desa Sugih Waras
		Desa Pagar Jati
5	Lawang Kidul	Desa Lingga
6	Muara Enim	Desa Kepur
		Desa Tanjung Serian
		Desa Karang Raja
		Desa Tanjung Raja
		Desa Tanjung Jati
		Desa Muara Lawai
		Desa Muara Harapan
7	Ujan Mas	Desa Tanjung Raman
		Desa Muara Gula Baru
		Desa Muara Gula Lama
		Desa Pinang Belarik
		Desa Ujan Mas Baru
		Desa Ulak Bandung
		Desa Guci
8	Gunung Megang	Desa Gunung Megang Luar
		Desa Penanggiran
		Desa Parjito
		Desa Tanjung Muning
		Desa Lubuk Mumpo
		Desa Sidomulyo
9	Belimbing	Desa Tanjung
		Desa Dalam
		Desa Teluk Lubuk
		Desa Darmo Kasih
		Desa Berugo
		Desa Belimbing
		Desa Bulang
		Desa Simpang Tanjung
10	Lubai	Desa Jiwa Baru
11	Lembak	Desa Talang Nangka
		Desa Petanang
12	Gelumbang	Desa Talang Taling
		Desa Tambangan Kelekar
		Desa Pingan Banjar
		Desa Segayam

No	Kecamatan	Desa
13	Sungai Rotan	Desa Modong
		Desa Tanjung Miring
		Desa Sukacinta
		Desa Penandingan
		Desa Danau Rata
		Desa Petar Dalam
		Desa Paya Angus
		Desa Danau Tampang
		Desa Kasai
		Desa Sungai Rotan
		Desa Tanding Marga
		Desa Sukamerindu
		Desa Muara Lematang
		Desa Danau Baru
		Desa Petar Luar
14	Benakat	Desa Betung
		Desa Pagar Jati
		Desa Hidup Baru
		Desa Ramai Pasai
15	Kelekar	Desa Pelempang
		Desa Tanjung Medang
16	Muara Belida	Desa Gedung Buruk
		Desa Arisan Musi
		Desa Harapan Mulya
		Desa Tanjung Baru
		Desa Kayu Ara Batu
		Desa Mulia Abadi
17	Tanjung Agung	Desa Paduraksa
		Desa Embawang
		Desa Lesung Batu
		Desa Tanjung Bulan
		Desa Pagar Dewa
		Desa Matas
		Desa Muara Emil
		Desa Tanjung Karangan
		Desa Sleman
		Desa Tanjung Lalang
		Desa Pandang Enim

No	Kecamatan	Desa
18	Empat Petulai Dangku	Desa Siku
		Desa Kuripan
		Desa Batu Raja
		Desa Banuayu
		Desa Gunung Raja
		Desa Muara Niru
		Desa Kahuripan Baru
		Desa Pangkalan Babat
		Desa Kuripan Selatan

2) Kawasan Hortikultura

Tabel 6.7

Kawasan Hortikultura Kabupaten Muara Enim

No	Kecamatan	Desa	Komoditi Utama
1	Semende Darat Ulu	Desa Segamit	Cabe Merah, Tomat, Buncis, Kentang, Daun Bawang, Bawang Merah, Bawang Putih, Kubis, Terong, dan Strawberry
		Desa Datar Lebar	Cabe Merah, Tomat, Buncis, Kentang, Daun Bawang, Bawang Putih, Brokoli, Sawi, Kubis, dan Terong
		Desa Cahaya Alam	Cabe Merah, Tomat, Buncis, Kentang, Daun Bawang, Brokoli, Sawi, Kubis, dan Terong
		Desa Danau Gerak	Cabe Merah, Tomat, Buncis, Kentang, Daun Bawang, Bawang Merah, Bawang Putih, Brokoli, Sawi, Kubis, dan Terong.
		Desa Pelakat	Cabe Merah, Tomat, Buncis, Kentang, Daun Bawang, Bawang Merah, Bawang Putih, Brokoli, Sawi, Kubis, dan Terong.

No	Kecamatan	Desa	Komoditi Utama
2	Semende Darat Tengah	Desa Tenam Bungkok	Caber Merah, Tomat, Buncis, Kentang, Bawang Merah, dan Bawang Putih
		Desa Kota Padang	Cabe Merah dan Tomat
		Desa Gunung Agung	Cabe Merah, Tomat, Buncis, Kentang, Daun Bawang, Bawang Putih, Brokoli, Sawi, Kubis, Terong, Kacang Panjang, Bayam, dan Kangkung.
		Desa Rekimai Jaya	Cabe Merah, Tomat, Buncis, Kentang, Daun Bawang, Bawang Merah, Bawang Putih, Brokoli, Sawi, Kubis, Terong, Kacang Panjang, Bayam, dan Kangkung.
		Desa Swarna Dwipa	Cabe Merah, Tomat, Buncis, Kentang, Daun Bawang, Brokoli, Sawi, Kubis, Terong, dan Kacang Panjang.
3	Semende Darat Laut	Desa Muara Dua	Cabe Merah, Tomat, dan Buncis
		Desa Pagar Agung	Cabe Merah, Tomat, dan Buncis
		Desa Karya Nyata	Cabe Merah, Tomat, Buncis, Bawang Merah, Bawang Putih, dan Kacang Panjang.
4	Panang Enim	Desa Muara Meo	Cabe Merah, Tomat, Kacang Panjang, dan Kangkung.
5	Lawang Kidul	Desa Tegal Rejo	Cabe Merah, Tomat, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, dan Kangkung.
		Desa Darmo	Cabe Merah, Tomat, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, dan Kankung.
		Desa Lingga	Cabe Merah, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, dan Kangkung.
6	Muara Enim	Desa Tanjung Serian	Cabe Merah, Buncis, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, dan Kangkung.

No	Kecamatan	Desa	Komoditi Utama
		Desa Karang Raja	Cabe Merah, Buncis, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, Kangkung, dan Melon.
		Desa Saka Jaya	Cabe Merah, Buncis, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, dan Kangkung.
7	Ujan Mas	Desa Tanjung Raman	Cabe Merah, Tomat, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, dan Kangkung.
		Desa Pinang Belarik	Cabe Merah, Tomat, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, dan Kangkung.
		Desa Guci	Cabe Merah, Tomat, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, dan Kangkung.
8	Gunung Megang	Desa Penanggiran	Cabe Merah, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, Kangkung, dan Semangka.
		Desa Parjito	Cabe Merah, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, dan Kangkung
		Desa Panang Jaya	Cabe Merah, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, dan Kangkung.
9	Belimbing	Desa Teluk Lubuk	Cabe Merah, Kacang Panjang, dan Bayam.
		Desa Belimbing	Cabe Merah, Kacang Panjang, Bayam, dan Kangkung.
		Desa Bulang	Cabe Merah, Tomat, Kacang Panjang, Bayam, dan Kangkung.
		Desa Belimbing Jaya	Bayam
10	Rambang Niru	Desa Air Limau	Cabe Merah, Tomat, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, dan Kangkung.
11	Lubai	Desa Sukamerindu	Cabe Merah, Tomat, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, dan Kangkung
		Desa Air Asam	Cabe Merah, Ketimun, Terung,

No	Kecamatan	Desa	Komoditi Utama
			Kacang Panjang, Bayam, dan Kangkung.
		Desa Menanti	Cabe Merah, Tomat, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, dan Kangkung.
12	Lubai Ulu	Desa Karang Agung	Cabe Merah, Tomat, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, Kangkung, dan Semangka.
		Desa Karang Mulya	Cabe Merah, Tomat, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, Kangkung, dan Semangka.
		Desa Mekar Jaya	Cabe Merah, Tomat, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, Kangkung, dan Semangka.
		Desa Lubai Makmur	Cabe Merah, Tomat, Ketimun, Kacang Panjang, dan Bayam
		Desa Karang Sari	Cabe Merah, Tomat, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, Kangkung, dan Semangka.
13	Lembak	Desa Tapus	Cabe Merah, Tomat, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, dan Kangkung
		Desa Tanjung Baru	Cabe Merah, Tomat, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, dan Kangkung.
		Desa Alai Selatan	Cabe Merah, Tomat, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, dan Kangkung
14	Belide Darat	Desa Gaung Asam	Cabe Merah, Tomat, Ketimun, Terung, dan Kacang Panjang
		Desa Ibul	Cabe Merah, Tomat, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, dan Kangkung
		Desa Talang Balai	Cabe Merah, Tomat, Ketimun, Terung, dan Kacang Panjang.
15	Gelumbang	Desa Sukamenang	Cabe Merah, Tomat, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, dan Kangkung.
		Desa Talang Taling	Cabe Merah, Tomat, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam,

No	Kecamatan	Desa	Komoditi Utama
			dan Kangkung.
		Desa Payabakal	Terung dan Kacang Panjang
		Desa Sigam	Ketimun, Terung, Kacang Panjang, dan Bayam.
		Desa Karang Endah	Ketimun, Terung, Kacang Panjang, dan Bayam.
		Desa Segayam	Cabe Merah, Tomat, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, dan Kangkung.
		Desa Karta Mulya	Ketimun, Terung, Kacang Panjang, dan Bayam.
		Desa Jambu	Ketimun, Terung, Kacang Panjang, dan Bayam.
		Desa Midar	Cabe Merah, Tomat, Terung, Kacang Panjang, dan Kangkung.
16	Sungai Rotan	Desa Penandingan	Cabe Merah, Tomat, Ketimun, Terung, dan Kacang Panjang.
		Desa Paya Angus	Cabe Merah, Tomat, Ketimun, Terung, dan Kacang Panjang.
		Desa Danau Tampang	Cabe Merah, Tomat, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, Kangkung, dan Semangka.
		Desa Sungai Rotan	Cabe Merah, Tomat, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, Kangkung, dan Semangka.
		Desa Sukamerindu	Cabe Merah, Tomat, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, dan Kangkung.
17	Benakat	Desa Betung	Cabe Merah, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, dan Kangkung.
		Desa Pagar Jati	Ketimun, Terung, dan Kacang Panjang.
18	Rambang	Desa Sugihan	Cabe Merah, Tomat, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, dan Kangkung.
		Desa Sukarami	Cabe Merah, Tomat, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, dan Kangkung.

No	Kecamatan	Desa	Komoditi Utama
		Desa Air Keruh	Cabe Merah, Tomat, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, dan Kangkung.
19	Kelekar	Desa Teluk Jaya	Cabe Merah, Ketimun, Terung, dan Kacang Panjang.
		Desa Pelempang	Cabe Merah, Terung, dan Kacang Panjang.
		Desa Embacang Kelekar	Cabe Merah
		Desa Tanjung Medang	Cabe Merah, Ketimun, Terung, dan Kacang Panjang.
20	Tanjung Agung	Desa Pagar Dewa	Cabe Merah, Ketimun, Kacang Panjang, dan Kangkung.
		Desa Tanjung Karangan	Cabe Merah, Tomat, Kacang Panjang, dan Kangkung.
21	Empat Petulai Dangku	Desa Kuripan	Cabe Merah, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, dan Kangkung.
		Desa Batu Raja	Cabe Merah, Terung, Kacang Panjang, Bayam, dan Kangkung.
		Desa Banuayu	Cabe Merah, Tomat, Ketimun, Terung, Kacang Panjang, Bayam, dan Kangkung.

3) Kawasan Peternakan

Tabel 6.8

Kawasan Peternakan Kabupaten Muara Enim

No	Kecamatan	Desa	Komoditi Utama
1	Semende Darat Ulu	Desa Segamit	Kambing
		Desa Tanjung Agung	Kambing dan Itik
		Desa Cahaya Alam	Itik
		Desa Danau Gerak	Kambing
2	Semende Darat Laut	Desa Muara Dua	Itik
		Desa Muara Danau	Itik

No	Kecamatan	Desa	Komoditi Utama
		Desa Penyandingan	Kambing
		Desa Tanah Abang	Itik
		Desa Babatan	Sapi dan Kambing
		Desa Penindaian	Itik
3	Panang Enim	Desa Pandan Dulang	Itik
4	Lawang Kidul	Desa Tegal Rejo	Kambing dan Ayam Ras
		Desa Darmo	Sapi dan Ayam Ras
		Desa Lingga	Ayam Buras dan Ayam Ras
5	Muara Enim	Desa Karang Raja	Sapi dan Kambing
		Desa Muara Harapan	Sapi
		Desa Saka Jaya	Sapi, Kambing, dan Ayam Ras
		Desa Harapan Jaya	Sapi dan Ayam Ras
6	Ujan Mas	Desa Tanjung Raman	Sapi
		Desa Muara Gula Baru	Kambing
		Desa Muara Gula Lama	Sapi dan Ayam Buras
		Desa Pinang Belarik	Sapi
		Desa Ujan Mas Baru	Itik dan Ayam Ras
		Desa Ulak Bandung	Itik dan Kambing
7	Gunung Megang	Desa Penanggiran	Sapi dan Ayam Ras
		Desa Parjito	Kambing
		Desa Bangun Sari	Sapi
		Desa Sumaja Makmur	Sapi
		Desa Kayu Ara Sakti	Sapi
		Desa Sidomulyo	Kambing
		Desa Pajar Indah	Sapi
		Desa Panang Jaya	Ayam Ras
8	Belimbing	Desa Tanjung	Sapi
		Desa Dalam	Sapi

No	Kecamatan	Desa	Komoditi Utama
		Desa Darmo Kasih	Itik
		Desa Belimbing	Sapi
		Desa Bulang	Itik
		Desa Belimbing Jaya	Sapi
		Desa Simpang Tanjung	Sapi
9	Rambang Niru	Desa Lubuk Raman	Ayam Ras
		Desa Gemawang	Sapi
		Desa Manunggal Jaya	Sapi dan Ayam Ras
		Desa Air Enau	Sapi dan Kambing
		Desa Air Cekdam	Sapi
10	Lubai	Desa Aur	Kambing
		Desa Jiwa Baru	Sapi
		Desa Pagar Gunung	Sapi dan Kambing
		Desa Sukamerindu	Sapi
		Desa Air Asam	Kambing
		Desa Menanti	Kambing
11	Lubai Ulu	Desa Lecah	Sapi
		Desa Sumber Mulia	Sapi
		Desa Mekar Jaya	Sapi
		Desa Sumber Asri	Kambing
		Desa Karang Sari	Sapi
12	Belide Darat	Desa Tanjung Tiga	Kambing
13	Gelumbang	Desa Sukamenang	Ayam Ras
		Desa Talang Taling	Ayam Ras
		Desa Putak	Sapi
		Desa Bitis	Sapi
		Desa Karang Endah	Kambing
		Desa Sebau	Sapi
		Desa Segayam	Sapi dan Ayam Ras
		Desa Teluk Limau	Sapi
14	Sungai Rotan	Desa Petar Dalam	Itik
		Desa Kasai	Sapi

No	Kecamatan	Desa	Komoditi Utama
		Desa Sukamaju	Sapi
15	Benakat	Desa Hidup Baru	Sapi
16	Rambang	Desa Sumber Rahayu	Sapi
		Desa Kencana Mulya	Sapi dan Kambing
		Desa Sugihwaras Barat	Sapi
17	Kelekar	Desa Suban Baru	Ayam Ras dan Itik
		Desa Pelempang	Sapi
		Desa Embacang Kelekar	Itik
		Desa Menanti Selatan	Kambing dan Ayam Ras
18	Muara Belida	Desa Kayu Ara Batu	Itik
19	Tanjung Agung	Desa Tanjung Bulan	Itik
		Desa Matas	Kambing dan Ayam Buras
		Desa Muara Emil	Itik dan Ayam Ras
		Desa Tanjung Karangan	Sapi
20	Empat Petulai Dangku	Desa Sukaraja	Ayam Ras

4) Kawasan Perkebunan

Tabel 6.9

Kawasan Perkebunan Kabupaten Muara Enim

No	Kecamatan	Desa	Komoditi Utama
1	Semende Darat Ulu	Desa Aremantai	Kopi Arabika, Kopi Robusta, Aren, Kakao, Lada, Kapuk, Tembakau, Cengkeh, dan Kayu Manis.
		Desa Siring Agung	Kopi Arabika, Kopi Robusta, Aren, Kakao, Lada, Kapuk, Tembakau, Cengkeh, dan Kayu Manis.

No	Kecamatan	Desa	Komoditi Utama
		Desa Segamit	Kopi arabika, kopi robusta, aren, kakao, lada, kapuk, tembakau, cengkeh dan kayu manis
		Desa Tanjung Agung	Kopi arabika, kopi robusta, aren, kakao, lada, kapuk, ternbakau, cengkeh dan kayu manis;
		Desa Datar Lebar	Kopi arabika, kopi robusta, aren, kakao, lada, kapuk, tembakau, cengkeh dan kayu manis
		Desa Cahaya Alam	Kopi arabika, kopi robusta, aren, kakao, lada, kapuk, tembakau, cengkeh dan kayu manis
		Desa Tanjung Tiga	Kopi arabika, kopi robusta, aren, kakao, lada, kapuk, tembakau, cengkeh dan kayu manis
		Desa Danau Gerak	Kopi arabika, kopi robusta, aren, kakao, lada, kapuk, ternbakau, cengkeh dan kayu manis
		Desa Pelakat	Kopi arabika, kopi robusta, aren, kakao, lada, kapuk, tembakau, cengkeh dan kayu manis
2	Semende Darat Tengah	Desa Tanjung Raya	kopi arabika, kopi robusta, kakao, lada, kapuk, tembakau, cengkeh dan kayu manis
		Desa Tebing Abang	kopi arabika, kopi robusta, kakao, lada, kapuk, tembakau, cengkeh dan kayu manis
		Desa Batu Surau	kopi arabika, kopi robusta, kakao, lada, kapuk, ternbakau, cengkeh dan kayu manis
		Desa Muara Tenang	kopi arabika, kopi robusta, kakao, lada, kapuk, tembakau, cengkeh dan kayu manis
		Desa Kota Agung	kopi arabika, kopi

No	Kecamatan	Desa	Komoditi Utama
			robusta, kakao, lada, kapuk, tembakau, cengkeh dan kayu manis
		Desa Palak Tanah	kopi arabika, kopi robusta, kakao, lada, kapuk, tembakau, cengkeh dan kayu manis
		Desa Tenam Bungkok	kopi arabika, kopi robusta, kakao, lada, kapuk, tembakau, cengkeh dan kayu manis
		Desa Kota Padang	kopi arabika, kopi robusta, kakao, lada, kapuk, tembakau, cengkeh dan kayu manis
		Desa Gunung Agung	kopi arabika, kopi robusta, kakao, lada, kapuk, tembakau, cengkeh dan kayu manis
		Desa Rekimai Jaya	kopi arabika, kopi robusta, kakao, lada, kapuk, tembakau, cengkeh dan kayu manis
		Desa Swarna Dwipa	kopi arabika, kopi robusta, kakao, lada, kapuk, tembakau, cengkeh dan kayu manis
3	Semende Darat Laut	Desa Muara Dua	utama karet, kopi robusta, kelapa, aren, kakao, lada, kapuk, nilam, tebu, tembakau, cengkeh, kemiri dan kayu manis
		Desa Muara Danau	karet, kopi robusta, kelapa, aren, kakao, lada, kapuk, nilam, tebu, tembakau, cengkeh, kemiri dan kayu manis
		Desa Penyandingan	karet, kopi robusta, kelapa, aren, kakao, lada, kapuk, nilam, tebu, tembakau, cengkeh, kemiri dan kayu manis
		Desa Tanah Abang	karet, kopi robusta, kelapa, aren, kakao, lada, kapuk, nilam, tebu, tembakau, cengkeh, kemiri dan kayu manis

No	Kecamatan	Desa	Komoditi Utama
		Desa Pagar Agung	karet, kopi robusta, kelapa, aren, kakao, lada, kapuk, nilam, tebu, tembakau, cengkeh, kemiri dan kayu manis
		Desa Babatan	karet, kopi robusta, kelapa, aren, kakao, lada, kapuk, nilam, tebu, tembakau, cengkeh, kemiri dan kayu manis
		Desa Penindaian	karet, kopi robusta, kelapa, aren, kakao, lada, kapuk, nilam, tebu, tembakau, cengkeh, kemiri dan kayu manis
		Desa Karya Nyata	karet, kopi robusta, kelapa, aren, kakao, lada, kapuk, nilam, tebu, tembakau, cengkeh, kemiri dan kayu manis
		Desa Prapau	karet, kopi robusta, kelapa, aren, kakao, lada, kapuk, nilam, tebu, tembakau, cengkeh, kemiri dan kayu manis
4	Panang Enim	Desa Lubuk Nipis	utama karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, lada, nilam, tebu, tembakau, pinang, cengkeh, kemiri dan kayu manis
		Desa Padang Bindu	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, lada, nilam, tebu, tembakau, pinang, cengkeh, kemiri dan kayu manis
		Desa Bedegung	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, lada, nilam, tebu, tembakau, pinang.
		Desa Muara Meo	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, lada, nilam, tebu, tembakau, pinang, cengkeh, kemiri dan kayu manis

No	Kecamatan	Desa	Komoditi Utama
		Desa Pandan Dulang	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, lada, nilam, tebu, tembakau, pinang, cengkeh, kemiri dan kayu manis
		Desa Inderamayu	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, lada, nilam, tebu, tembakau, pinang, cengkeh, kemiri dan kayu manis
		Desa Sukaraja	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, lada, nilam, tebu, tembakau, pinang, cengkeh, kemiri dan kayu manis
		Desa Tanjung Baru	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, lada, nilam, tebu, tembakau, pinang, cengkeh, kemiri dan kayu manis
		Desa Lambur	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, lada, nilam, tebu, tembakau, pinang, cengkeh, kemiri dan kayu manis
		Desa Sugihwaras	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, lada, nilam, tebu, tembakau, pinang, cengkeh, kemiri dan kayu manis
		Desa Pagar Jati	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, lada, nilam, tebu, tembakau, pinang, cengkeh, kemiri dan kayu manis
5	Lawang Kidul	Desa Tegal Rejo	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, lada, pinang dan kemiri
		Desa Darmo	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, lada,

No	Kecamatan	Desa	Komoditi Utama
			pinang dan kemiri
		Desa Lingga	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, lada, pinang dan kemiri
6	Muara Enim	Desa Kepur	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, lada dan pinang
		Desa Tanjung Serian	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, lada dan pinang
		Desa Karang Raja	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, lada dan pinang
		Desa Tanjung Raja	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, lada dan pinang
		Desa Lubuk Ampelas	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, lada dan pinang
		Desa Tanjung Jati	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, lada dan pinang
		Desa Muara Lawai	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, lada dan pinang
		Desa Harapan Mulia	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, lada dan pinang;
		Desa Saka Jaya	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, lada dan pinang.
		Desa Harapan Jaya	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, Jada dan pinang.
7	Ujan Mas	Desa Tanjung Raman	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, pinang dan cengkeh
		Desa Muara Gula Baru	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, pinang dan cengkeh
		Desa Muara Gula Lama	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, pinang dan cengkeh
		Desa Pinang Belarik	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, pinang dan cengkeh

No	Kecamatan	Desa	Komoditi Utama
		Desa Ujan Mas Baru	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, pinang dan cengkeh
		Desa Ulak Bandung	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, pinang dan cengkeh.
		Desa Guci	kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, pinang dan cengkeh
		Desa Ujan Mas Ulu	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, pinang dan cengkeh
8	Gunung Megang	Desa Gunung Megang Luar	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, kakao, lada, tebu dan cengkeh
		Desa Penanggiran	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, kakao, lada, tebu dan cengkeh
		Desa Perjito	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, kakao, lada, tebu dan cengkeh
		Desa Tanjung Terang	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, kakao, lada, tebu dan cengkeh
		Desa Tanjung Muning	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, kakao, lada, tebu dan cengkeh
		Desa Lubuk Mumpo	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, kakao, lada, tebu dan cengkeh
		Desa Bangun Sari	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, kakao, lada, tebu dan cengkeh
		Desa Sumaja Makmur	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, kakao, lada, tebu dan cengkeh
		Desa Kayu Ara Sakti	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, kakao, lada, tebu dan

No	Kecamatan	Desa	Komoditi Utama
			cengkeh
		Desa Sidomulyo	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, kakao, lada, tebu dan cengkeh
		Desa Pajar Indah	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, kakao, lada, tebu dan cengkeh
		Desa Panang Jaya	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, kakao, lada, tebu dan cengkeh
9	Belimbing	Desa Tanjung	karet, kelapa sawit, kakao dan cengkeh
		Desa Dalam	karet, kelapa sawit, kakao dan cengkeh
		Desa Teluk Lubuk	karet, kelapa sawit, kakao dan cengkeh
		Desa Darmo Kasih	karet, kelapa sawit, kakao dan cengkeh
		Desa Berugo	karet, kelapa sawit, kakao dan cengkeh
		Desa Belimbing	karet, kelapa sawit, kakao dan cengkeh
		Desa Bulang	karet, kelapa sawit, kakao dan cengkeh
		Desa Belimbing Jaya	karet, kelapa sawit, kakao dan cengkeh
		Desa Simpang Tanjung	karet, kelapa sawit, kakao dan cengkeh
10	Rambang Niru	Desa Gerinam	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kapuk, tebu dan pinang
		Desa Tanjung Menang	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kapuk, tebu dan pinang
		Desa Jemenang	Karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kapuk, tebu dan pinang
		Desa Lubuk Raman	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kapuk, tebu dan pinang
		Desa Suban Jeriji	utama karet, kelapa

No	Kecamatan	Desa	Komoditi Utama
			sawit, kopi robusta, kelapa, kapuk, tebu dan pinang
		Desa Gemawang	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kapuk, tebu dan pinang
		Desa Air Limau	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kapuk, tebu dan pinang
		Desa Muara Emburung	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kapuk, tebu dan pinang
		Desa Manunggal Jaya	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kapuk, tebu dan pinang
		Desa Air Talas	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kapuk, tebu dan pinang
		Desa Aiur Enau	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kapuk, tebu dan pinang
		Desa Manunggal Makmur	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kapuk, tebu dan pinang
		Desa Aur Duri	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kapuk, tebu dan pinang
		Desa Air Cekdam	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kapuk, tebu dan pinang
		Desa Kasih Dewa	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kapuk, tebu dan pinang
11	Lubai	Desa Aur	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, kakao dan tebu
		Desa Jiwa Baru	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, kakao dan tebu
		Desa Kota Baru	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, kakao dan tebu
		Desa Pagar Gunung	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, kakao dan tebu
		Desa Gunung Raja	karet, kelapa sawit, kopi

No	Kecamatan	Desa	Komoditi Utama
			robusta, kelapa, aren, kakao dan tebu
		Desa Tanjung Kemala	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, kakao dan tebu
		Desa Sukamerindu	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, kakao dan tebu
		Desa Air Asam	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, kakao dan tebu
		Desa Menanti	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, kakao dan tebu
12	Lubai Ulu	Desa Karang Agung	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, kakao dan tebu
		Desa Pagar Dewa	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, kakao dan tebu
		Desa Lecah	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, kakao dan tebu
		Desa Sumber Mulia	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, kakao dan tebu
		Desa Karang Mulya	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, kakao dan tebu
		Desa Mekar Jaya	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, kakao dan tebu
		Desa Lubai Persada	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, kakao dan tebu
		Desa Lubai Makmur	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, kakao dan tebu
		Desa Sumber Asri	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, kakao dan tebu
		Desa Karang Sari	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, kakao dan tebu
13	Lembak	Desa Alai	karet, kelapa sawit, kopi robusta, aren dan tebu;

No	Kecamatan	Desa	Komoditi Utama
		Desa Sungai Duren	karet, kelapa sawit, kopi robusta, aren dan tebu
		Desa Talang Nangka	karet, kelapa sawit, kopi robusta, aren dan tebu
		Desa Petanang	karet, kelapa sawit, kopi robusta, aren dan tebu
		Desa Tapus	karet, kelapa sawit, kopi robusta, aren dan tebu
		Desa Kemang	karet, kelapa sawit, kopi robusta, aren dan tebu
		Desa Tanjung Baru	karet, kelapa sawit, kopi robusta, aren dan tebu
		Desa Alai Selatan	karet, kelapa sawit, kopi robusta, aren dan tebu
		Desa Lubuk Enau	karet, kelapa sawit, kopi robusta, aren dan tebu
14	Belide Darat	Desa Gaung Asam	karet, kelapa sawit, kopi robusta dan tebu
		Desa Ibul	karet, kelapa sawit, kopi robusta dan tebu
		Desa Babat	karet, kelapa sawit, kopi robusta dan tebu
		Desa Sialingan	karet, kelapa sawit, kopi robusta dan tebu
		Desa Talang Balai	karet, kelapa sawit, kopi robusta dan tebu
		Desa Lubuk Semantung	karet, kelapa sawit, kopi robusta dan tebu
		Desa Lubuk Getam	karet, kelapa sawit, kopi robusta dan tebu
		Desa Tanjung Tiga	karet, kelapa sawit, kopi robusta dan tebu
		Desa Talang Beliung	karet, kelapa sawit, kopi robusta dan tebu
15	Gelumbang	Desa Sukamenang	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, lada, tebu dan kemiri
		Desa Talang Taling	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, lada, tebu dan kemiri
		Desa Putak	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, lada, tebu dan kemiri
		Desa Gumai	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, lada, tebu dan kerniri

No	Kecamatan	Desa	Komoditi Utama
		Desa Bitis	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, lada, tebu dan kemiri
		Desa Payabakal	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, lada, tebu dan kemiri
		Desa Sigam	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, lada, tebu dan kemiri
		Desa Karang Endah	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, lada, tebu dan kemiri
		Desa Tambangan Kelekar	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, Lada, tebu dan kemiri
		Desa Sebau	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, lada, tebu dan kemiri
		Desa Pinang Banjar	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, lada, tebu dan kemiri
		Desa Segayam	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, lada, tebu dan kemiri
		Desa Karta Mulya	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, lada, tebu dan kemiri
		Desa Jambu	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, lada, tebu dan kemiri
		Desa Midar	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, lada, tebu dan kemiri
		Desa Gaung Telang	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, lada, tebu dan kemiri
		Desa Melilian	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, lada, tebu dan kemiri
		Desa Pedataran	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, lada, tebu dan kemiri
		Desa Teluk Limau	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, lada, tebu dan kemiri
		Desa Suka Jaya	karet, kelapa sawit,

No	Kecamatan	Desa	Komoditi Utama
			kopi robusta, kelapa, aren, lada, tebu dan kemiri
		Desa Karang Endah	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, lada, tebu dan kemiri
		Desa Betung	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, aren, lada, tebu dan kemiri
16	Sungai Rotan	Desa Modong	karet, kelapa sawit, kelapa, aren, kakao, lada, tebu dan kemiri
		Desa Tanjung Miring	karet, kelapa sawit, kelapa, aren, kakao, lada, tebu dan kemiri
		Desa Sukacinta	karet, kelapa sawit, kelapa, aren, kakao, lada, tebu dan kemiri
		Desa Penandingan	karet, kelapa sawit, kelapa, aren, kakao, lada, tebu dan kemiri
		Desa Danau Rata	karet, kelapa sawit, kelapa, aren, kakao, lada, tebu dan kemiri
		Desa Sukadana	karet, kelapa sawit, kelapa, aren, kakao, lada, tebu dan kemiri
		Desa Petar Dalam	karet, kelapa sawit, kelapa, aren, kakao, lada, tebu dan kemiri
		Desa Paya Angus	karet, kelapa sawit, kelapa, aren, kakao, lada, tebu dan kemiri
		Desa Danau Tampang	karet, kelapa sawit, kelapa, aren, kakao, lada, tebu dan kemiri
		Desa Kasai	karet, kelapa sawit, kelapa, aren, kakao, lada, tebu dan kemiri
		Desa Sungai Rotan	karet, kelapa sawit, kelapa, aren, kakao, lada, tebu dan kemiri
		Desa Tanding Marga	karet, kelapa sawit, kelapa, aren, kakao, lada, tebu dan kemiri
		Desa Sukamerindu	karet, kelapa sawit, kelapa, aren, kakao, lada,

No	Kecamatan	Desa	Komoditi Utama
			tebu dan kemiri
		Desa Muara Lematang	karet, kelapa sawit, kelapa, aren, kakao, lada, tebu dan kemiri
		Desa Sukajadi	karet, kelapa sawit, kelapa, aren, kakao, lada, tebu dan kemiri
		Desa Sukamaju	karet, kelapa sawit, kelapa, aren, kakao, lada, tebu dan kemiri
		Desa Danau Baru	karet, kelapa sawit, kelapa, aren, kakao, lada, tebu dan kemiri
		Desa Petar Luar	karet, kelapa sawit, kelapa, aren, kakao, lada, tebu dan kemiri
17	Benakat	Desa Pagar Dewa	karet, kelapa sawit, kelapa, aren, tebu dan pinang
		Desa Betung	karet, kelapa sawit, kelapa, aren, tebu dan pinang
		Desa Pagar Jati	karet, kelapa sawit, kelapa, aren, tebu dan pinang
		Desa Hidup Baru	karet, kelapa sawit, kelapa, aren, tebu dan pinang
		Desa Ramai Pasai	karet, kelapa sawit, kelapa, aren, tebu dan pinang
18	Rambang	Desa Sumber Rahayu	karet, kelapa sawit, kakao dan tebu
		Desa Baru Rambang	karet, kelapa sawit, kakao dan tebu
		Desa Negeri Agung	karet, kelapa sawit, kakao dan tebu
		Desa Sugihan	karet, kelapa sawit, kakao dan tebu
		Desa Sukarami	karet, kelapa sawit, kakao dan tebu
		Desa Tanjung Dalam	karet, kelapa sawit, kakao dan tebu
		Desa Tanjung Raya	karet, kelapa sawit, kakao dan tebu
		Desa Pagar Agung	karet, kelapa sawit, kakao dan tebu

No	Kecamatan	Desa	Komoditi Utama
19	Kelekar	Desa Marga Mulya	karet, kelapa sawit, kakao dan tebu
		Desa Kencana Mulya	karet, kelapa sawit, kakao dan tebu
		Desa Air Keruh	karet, kelapa sawit, kakao dan tebu
		Desa Suban Baru	karet, kelapa sawit, kelapa lada dan tebu
		Desa Teluk Jaya	karet, kelapa sawit, kelapa, lada dan tebu
		Desa Pelempang	karet, kelapa sawit, kelapa, lada dan tebu
20	Muara Belida	Desa Embacang Kelekar	karet, kelapa sawit, kelapa, lada dan tebu
		Desa Tanjung Medang	karet, kelapa sawit, kelapa, lada dan tebu
		Desa Menanti Selatan	karet, kelapa sawit, kelapa, lada dan tebu
		Desa Gedung Buruk	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, tebu, pinang dan kerniri
		Desa Arisan Musi	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, tebu, pinang dan kemiri
		Desa Harapan Mulya	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, tebu, pinang dan kemiri
		Desa Arisan Musi Timur	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, tebu, pinang dan kemiri
		Desa Tanjung Baru	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, tebu, pinang dan kemiri
		Desa Kayu Ara Batu	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, tebu, pinang dan kemiri
		Desa Mulia Abadi	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, tebu, pinang dan kemiri
		Desa Paduraksa	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, lada, nilam, tebu, tembakau, pinang, cengkeh, kemiri dan kayu manis
		Desa Embawang	karet, kelapa sawit, kopi
21	Tanjung Agung		

No	Kecamatan	Desa	Komoditi Utama
			robusta, kelapa, kakao, lada, nilam, tebu, tembakau, pinang, cengkeh, kemiri dan kayu manis
		Desa Lesung Batu	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, lada, nilam, tebu, tembakau, pinang, cengkeh, kemiri dan kayu manis
		Desa Tanjung Bulan	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, lada, nilam, tebu, tembakau, pinang, cengkeh, kemiri dan kayu manis
		Desa Pagar Dewa	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, lada, nilam, tebu, tembakau, pinang, cengkeh, kemiri dan kayu manis
		Desa Matas	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, lada, nilam, tebu, tembakau, pinang, cengkeh, kemiri dan kayu manis
		Desa Muara Emil	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, lada, nilam, tebu, tembakau, pinang, cengkeh, kemiri dan kayu manis
		Desa Tanjung Karangan	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, lada, nilam, tebu, tembakau, pinang, cengkeh, kemiri dan kayu manis
		Desa Sleman	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, lada, nilam, tebu, tembakau, pinang, cengkeh, kemiri dan kayu manis

No	Kecamatan	Desa	Komoditi Utama
		Desa Penyandingan	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, lada, nilam, tebu, tembakau, pinang, cengkeh, kemiri dan kayu manis
		Desa Tanjung Lalang	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, lada, nilam, tebu, tembakau, pinang, cengkeh, kemiri dan kayu manis
		Desa Pulau Panggung	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, lada, nilam, tebu, tembakau, pinang, cengkeh, kemiri dan kayu manis
		Desa Pandan Enim	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kakao, lada, nilam, tebu, tembakau, pinang, cengkeh, kemiri dan kayu manis
22	Empat Petulai Dangku	Desa Siku	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kapuk, tebu dan pinang
		Desa Kuripan	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kapuk, tebu dan pinang
		Desa Batu Raja	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kapuk, tebu dan pinang
		Desa Banuayu	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kapuk, tebu dan pinang
		Desa Gunung Raja	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kapuk, tebu dan pinang
		Desa Muara Niru	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kapuk, tebu dan pinang
		Desa Kahuripan Baru	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kapuk, tebu dan pinang
		Desa Pangkalan	karet, kelapa sawit, kopi

No	Kecamatan	Desa	Komoditi Utama
		Babat	robusta, kelapa, kapuk, tebu dan pinang
		Desa Kuripan Selatan	karet, kelapa sawit, kopi robusta, kelapa, kapuk, tebu dan pinang

5) Kawasan Perikanan

Tabel 6.10
Kawasan Perikanan Kabupaten Muara Enim

No	Kecamatan	Desa
1	Semende Darat Ulu	Desa Aremantai
		Desa Siring Agung
		Desa Segamit
		Desa Tanjung Agung
		Desa Datar Lebar
		Desa Cahaya Alam
		Desa Tanjung Tiga
		Desa Danau Gerak
		Desa Pelakat
2	Gelumbang	Desa Sukamenang
		Desa Talang Taling
		Desa Putak
		Desa Gumai
		Desa Bitis
		Desa Payabakal
		Desa Sigam
		Desa Karang Endah
		Desa Tambangan Kelekar
		Desa Sebau
		Desa Pinang Banjar
		Desa Segayam
		Desa Karta Mulya
		Desa Jambu
		Desa Midar
		Desa Gaung Telang
		Desa Melilian
		Desa Pedataran
		Desa Teluk Limau

No	Kecamatan	Desa
		Desa Suka Jaya
		Desa Karang Endah Selatan
		Desa Betung
3	Sungai Rotan	Desa Modong
		Desa Tanjung Miring
		Desa Sukacinta
		Desa Penandingan
		Desa Danau Rata
		Desa Sukadana
		Desa Petar Dalam
		Desa Paya Angus
		Desa Danau Tampang
		Desa Kasai
		Desa Sungai Rotan
		Desa Tanding Marga
		Desa Sukamerindu
		Desa Muara Lematang
		Desa Sukajadi
		Desa Sukamaju
		Desa Danau Baru
		Desa Petar Luar
4	Muara Belida	Desa Gedung Buruk
		Desa Arisan Musi
		Desa Harapan Mulya
		Desa Arisan Musi Timur
		Desa Tanjung Baru
		Desa Kayu Ara Batu
		Desa Mulia Abadi

6) Kawasan Budidaya Gambut

Tabel 6.11
Kawasan Budidaya Gambut Kabupaten Muara Enim

No	Kecamatan	Desa
1	Gelumbang	Desa Sukamenang
		Desa Talang Taling
		Desa Putak
		Desa Gumai

No	Kecamatan	Desa
		Desa Bitis
		Desa Payabakal
		Desa Sigam
		Desa Karang Endah
		Desa Tambangan Kelekar
		Desa Sebau
		Desa Pinang Banjar
		Desa Segayam
		Desa Karta Mulya
		Desa Jambu
		Desa Midar
		Desa Gaung Telang
		Desa Melilian
		Desa Pedataran
		Desa Teluk Limau
		Desa Suka Jaya
		Desa Karang Endah Selatan
		Desa Betung
2	Sungai Rotan	Desa Modong
		Desa Tanjung Miring
		Desa Sukacinta
		Desa Penandingan
		Desa Danau Rata
		Desa Sukadana
		Desa Petar Dalam
		Desa Paya Angus
		Desa Danau Tampang
		Desa Kasai
		Desa Sungai Rotan
		Desa Tanding Marga
		Desa Sukamerindu
		Desa Muara Lematang
		Desa Sukajadi
		Desa Sukamaju
		Desa Danau Baru
		Desa Petar Luar
3	Muara Belida	Desa Gedung Buruk
		Desa Arisan Musi
		Desa Harapan Mulya
		Desa Arisan Musi Timur

No	Kecamatan	Desa
		Desa Tanjung Baru
		Desa Kayu Ara Batu
		Desa Mulia Abadi

7) Kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah

Tabel 6.12

Kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah
Kabupaten Muara Enim

No	Kecamatan	Desa	Komoditi Utama
1	Semende Darat Laut	Desa Pulau Panggung	Sentra Kopi Bubuk
2	Semende Darat Tengah	Desa Palak Tanah	Sentra Kopi Bubuk
3	Lawang Kidul	Desa Tegalrejo	Sentra Makanan Ringan atau Snack
4	Ujan Mas	Desa Ujan Mas Lama	Sentra Batu Bata
		Desa Ulak Bandung	Sentra Batu Bata
5	Lembak	Desa Lembak	Sentra Kerupuk dan Kemplang
6	Muara Belida	Desa Kayu Ara Batu	Sentra Kerajinan Songket
		Desa Tanjung Baru	Sentra Kerajinan Songket
		Desa Harapan Jaya	Sentra Kerajinan Songket

8) Kawasan Pariwisata

Tabel 6.13

Kawasan Pariwisata Kabupaten Muara Enim

No	Kecamatan	Objek Wisata
1	Tanjung Agung	Air Terjun Curup Tenang Bedegung di Desa Bedegung

No	Kecamatan	Objek Wisata
		Air Terjun Napal Carik di Desa Muara Emil
		Air Terjun Lemutu di Desa Pagar Dewa
		Air Terjun Napal Lin tang di Desa Lubuk Nipis
		Air Terjun Barnbang Kihok di Desa Lubuk Nipis
		Air Terjun Lubuk Besak di Desa Lubuk Nipis
		Air Terjun Curup Bali di Desa Lebak Budi
		Air Terjun Selingsing di Desa Tanjung Agung
		Air Terjun Curup Bemban di Desa Tanjung Bulan
		Air Terjun Anak Behuang di Desa Tanjung Bulan
		Air Terjun Tilam di Desa Keban Agung
		Air Terjun Linau di Desa Paduraksa
		Lubuk Putih di Desa Sleman
		Arung Jeram di Desa Bedegung
2	Semende Darat Ulu	Air Terjun Danau Gerak di Desa Danau Gerak
		Air Terjun Curup Padun di Desa Tanjung Tiga
		Air Terjun Curup Genam di Desa Plakat
		Air Terjun Curup Kelingku Desa Danau Gerak
		Air Terjun Curup Kapten di Desa Segamit
		Air Terjun Curup Mulak di Desa Gunung Agung
		Air Panas Gemuhak di Desa Penindaian
		Air Terjun Rindu Ati di Desa Danau Gerak
		Air Terjun Muara Deras di Desa Danau Gerak
		Air Terjun Layang-layang di Desa Cahaya Alam
		Danau Deduhuk di Desa Segamit
		Danau Datar Lehar di Desa Datar Lehar
		Danau Ijang di Desa Danau Gerak
		Liku Semhilan di Desa Tanjung Tiga
		Perbukitan Tinggi Semende
		Perkebunan Strobery di Desa Segamit
		Perkebunan Kopi di Desa Aremantai
		Perkebunan Kopi Desa Siring Agung
		Perkebunan Kopi Desa Segamit
		Perkebunan Kopi Desa Tanjung Agung
		Perkebunan Kopi Desa Datar Lebar
		Perkebunan Kopi Desa Cahaya Alam
		Perkebunan Kopi Desa Tanjung Tiga
		Perkebunan Kopi Desa Danau Gerak
		Perkebunan Kopi Desa Pelakat
		Desa Wisata Cahaya Alam di Desa Cahaya Alam

No	Kecamatan	Objek Wisata
		Desa Wisata Danau Gerak di Desa Danau Gerak
		Desa Wisata Tanjung Tiga di Desa Tanjung Tiga
		Desa Wisata Segamit di Desa Segamit
3	Semende Darat Tengah	Kawasan Mandi Angin di Desa Gunung Agung
		Kawasan Paralayang di Desa Gunung Agung
		Megalit di Desa Muara Tenang
		Air Terjun Curup Nunom di Desa Rekimai Jaya
		Air Terjun Air Suban di Desa Muara Tenang
		Air Terjun Curup Tinggi di Desa Muara Tenang
		Air Terjun Curup Ayek Dago di Desa Gunung Agung
		Danau Tebat Kuta Dalarn di Desa Palak Tanah
		Danau Dalam di Desa Tanjung Raya
		Perbukitan Tinggi di Semende
		Perkebunan Kopi Desa Tanjung Raya
		Perkebunan Kopi Desa Tebing Abang
		Perkebunan Kopi Desa Batu Surau
		Perkebunan Kopi Desa Muara Tenang
		Perkebunan Kopi Desa Kota Agung
		Perkebunan Kopi Desa Palak Tanah
		Perkebunan Kopi Desa Tenam Bungkok
		Perkebunan Kopi Desa Kota Padang
		Perkebunan Kopi Desa Gunung Agung
		Perkebunan Kopi Desa Rekimai Jaya
		Perkebunan Kopi Desa Swarna Dwipa
		Pesanggerahan di Desa Muara Tenang
		Makam Puyang Rabu Samad di Desa Tanjung Raya
		Makam Puyang Karang Jelantang di Desa Tanjung Raya
		Candi Batu Ampar di Desa Muara Tenang
		Desa Wisata Kota Padang di Desa Kota Padang
4	Semende Darat Laut	River Boarding di Desa Penindaian
		Batu Galangan Empat Desa Babatan
		Perbukitan Tinggi Semende
		Perkebunan Kopi Desa Muara Dua
		Perkebunan Kopi Desa Muara Danau
		Perkebunan Kopi Desa Penyandingan
		Perkebunan Kopi Desa Tanah Abang

No	Kecamatan	Objek Wisata
		Perkebunan Kopi Desa Pagar Agung
		Perkebunan Kopi Desa Babatan
		Perkebunan Kopi Desa Pcnindaian
		Perkebunan Kopi Desa Karya Nyata
		Perkebunan Kopi Desa Perapau
		Rumah Adat Semende di Desa Pulau Panggung
		Rumah Pesanggrahan / Rum.ah Dinas Camat Semende Darat Laut di Desa Pulau Panggung
		Talang Gudang di Dcsa Pulau Panggung
5	Lawang Kidul	Taman Kreasi PT.BA di Tanjung Enim
		Kolam Pemancingan Tegal Rejo di Desa Tega! Rejo
		Jogging Track and Zoo di Tanjung Enim
6	Muara Enim	Kawasan Kolam Retensi
		Kawasan Muara Sungai Enirn
		Taman Ribang Gale
		Kuliner Pasar Mambo I
		Kuliner Pasar Mambo II
		Hutan Pemakaman Umum
		Kawasan Pemakaman Tionghoa
7	Lubai	Danau Sekintang di Desa Pagar Gunung
		Cek Dam Air Purun di Desa Jiwa Baru
		Danau Kibekan di Desa Gunung Raja
8	Empat Petuai Dangku	Danau Asam di Desa Kuripan Selatan
		Danau Gelumbang di Desa Kuripan Selatan
		Danau Anyar di Desa Kuripan Selatan
9	Sungai Rotan	Danau Gelanggang
10	Gelumbang	Danau Segayam di Desa Segayam
11	Ujan Mas	Danau PTPN
12	Gunung Megang	Danau Perjito di Desa Perjito

6.3 Program Pembangunan

Terdapat 10 (sepuluh) Program Strategis Daerah dalam 3 (tiga) tahun ke depan yang menjadi bagian dari program prioritas yang akan dilakukan, program tersebut yaitu :

1

Penyelesaian jalan dan jembatan baru kabupaten

Program ini diarahkan untuk penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan yang baru dibangun, guna mendukung kelancaran arus transportasi serta mendukung konektivitas antar wilayah yang ada di Kabupaten Muara Enim.

2

Pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Program ini diarahkan untuk menunjang peningkatan kompetensi aparatur melalui pembangunan gedung Diklat yang representatif, guna mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional aparatur, serta pendidikan lainnya.

3

Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar, khususnya peningkatan prasarana dan sarana kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muara Enim.

4

Pengadaan perlengkapan/pakaian sekolah bagi siswa

Program ini diarahkan untuk pemberian pakaian atau perlengkapan sekolah bagi siswa, diharapkan melalui program ini dapat meringankan beban orang tua dalam pembiayaan pendidikan.

5

Asuransi/Santunan Kematian

Program ini diarahkan untuk memberikan asuransi atau santunan kematian kepada masyarakat dengan syarat tertentu, guna meringankan beban ahli musibah dan bentuk hadirnya Pemerintah Daerah di tengah masyarakat.

6

Pembayaran Premi Asuransi BPJS Kesehatan

Program ini diarahkan untuk melindungi masyarakat Kabupaten Muara Enim di bidang kesehatan, sehingga masyarakat Kabupaten Muara Enim dapat dilayani oleh Fasilitas Kesehatan yang telah ditentukan secara gratis.

7

Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Program ini diarahkan untuk menyediakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di beberapa kecamatan yang telah dijadikan target pembangunan TPA. Melalui program ini diharapkan kualitas pengelolaan persampahan dapat ditingkatkan.

8**Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian serta peningkatan nilai tambah sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan Kabupaten

9**Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat Kabupaten Muara Enim, guna meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungan masyarakat.

10**Penyelesaian Pembangunan Pasar Muara Enim**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan prasarana dan sarana pasar rakyat, guna meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi jual beli.

Tabel 6.14

Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN/SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)	
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Jasmani dan Rohani Masyarakat													
	1.1	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase cakupan pembinaan olahraga	100	100	23.754	100	24.957	100	26.457	100	26.457	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Persentase peningkatan atlet berprestasi	100	100		100		100		100		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	69,48	69,58	196.603	69.68	221.649	69,78	250.301	69,78	250.301	Dinas Kesehatan	
			Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,01	0,01		0,01		0,01					
			Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,24	0,24		0,24		0,24					
			Angka Kematian Bayi	5,3	5,2		5,1		5					
			Angka Kematian Ibu	75	74		73		72					
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	87	87	5.500	89	6.050	90	6.655	90	6.655	Dinas PUPR	

NO	TUJUAN/SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	74	78	15.000	82	15.000	86	15.000	86	15.000	Dinas PUPR
	1.2	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase cakupan pengembangan kapasitas kepramukaan	100	100	588	100	814	100	814	100	814	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentrman, dan Keindahan); Persentase penegakan Perda	85	85	3.515	85	2.826	85	3.352	85	3.352	Satuan Polisi Pamong Praja
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase organisasi masyarakat yang mendapatkan pembinaan penguatan idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	100	2.359	100	2.595	100	2.854	100	2.854	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budava Politik	Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik	100	100	2.371	100	2.608	100	2.869	100	2.869	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	TUJUAN/SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pengawasan terhadap organisasi masyarakat	100	100	1.084	100	1.193	100	1.312	100	1.312	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya terhadap organisasi masyarakat	100	100	908	100	999	100	1.099	100	1.099	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan kasus atau kejadian konflik sosial	100	100	996	100	1.095	100	1.205	100	1.205	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1.3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase cakupan ketersediaan fasilitas pengurangan sampah	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas PUPR	
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	100	100	6.170	100	7.170	100	8.170	100	8.170	Dinas PUPR
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	100	100	1.495	100	1.644	100	1.809	100	1.809	Dinas Lingkungan Hidup

NO	TUJUAN/SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkunga Hidup	58,71	58,08	2.336	58,14	2.570	58,21	2.827	58,21	2.827	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman hayati	100	100	269	100	296	100	325	100	325	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ketaatan pelaku usaha/ kegiatan pengeolaan Limbah B3	75	75	146	80	161	80	177	80	177	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha/ kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	100	100	184	100	203	100	223	100	223	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang difasilitasi	100	100	63	100	69	100	76	100	76	Dinas Lingkungan Hidup

NO	TUJUAN/SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp (dalam juta)		TARG ET	Rp (dalam juta)
						TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)					
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Kelompok Masyarakat yang peduli lingkungan	75	75	258	75	283	80	312	80	312	Dinas Lingkungan Hidup		
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pelaksanaan pemberian penghargaan lingkungan hidup	75	75	194	75	213	80	235	80	235	Dinas Lingkungan Hidup		
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	188	100	207	100	228	100	228	Dinas Lingkungan Hidup		
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	29,44	31,92	9.745	34,42	14.919	39,61	20.611	39,61	20.611	Dinas Lingkungan Hidup		
2.	Meningkatnya pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal															
	2.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	0,56	0,57	1.405	0,58	1.545	0,59	1.700	0,59	1.700	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisata	30	35	1.270	40	1.397	45	1.537	45	1.537	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase peningkatan prasarana Ruang Kreatif / Zona Kreatif	20	25	580	27	638	30	702	30	702	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		

NO	TUJUAN/SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp (dalam juta)		TARG ET	Rp (dalam juta)
						TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)					
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan PAD sektor Pariwisata	50	60	363	70	399	80	439	80	439	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Usaha Simpan Pinjam yang memiliki izin	24.70	24.70	220	30.59	220	36.47	220	36.47	220	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang telah dilakukan pengawasan dan Pemeriksaan	62.08	71.56	168	81.04	193	91.00	222	91.00	222	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase cakupan KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	21.23	22.30	105	23.36	121	24.41	139	24.41	139	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang bersertifikat	6.67	7.56	680	8.43	680	9,3	782	9,3	782	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	82,97	83.36	1.314	83.75	1.511	84.15	1.738	84.15	1.738	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	7.05	7.94	1.366	8.93	1.639	10.04	1.967	10.04	1.967	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
			Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM Naik Kelas	8.15	8.55	1.459	8.95	1.751	9.35	2.101	9.35	2.101	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		

NO	TUJUAN/SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp (dalam juta)		TARG ET	Rp (dalam juta)
						TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)					
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang Bermitra Dengan UMKM	100	100	734	100	808	100	889	100	889	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase minat penanaman modal	100	100	594	100	654	100	654	100	654	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase cakupan data/informasi pelayanan penanaman modal	100	100	775	100	853	100	938	100	938	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dalam miliar	907	927	708	947	779	967	857	967	857	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase izin terbit perizinan dan non perizinan yang diselesaikan	100	100	547	100	602	100	662	100	662	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Presentase pertumbuhan Industri kecil dan menengah	6,2	6,5	644	6,8	672	6,9	677	6,9	677	Dinas Perdagangan		
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Presentase pembinaan usaha industri kecil dan menengah	20	20	810	20	870	20	930	20	930	Dinas Perdagangan		

NO	TUJUAN/SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp (dalam juta)	
						TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)			
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Presentase pengelolan Sistem Informasi Industri Nasional	20	20	560	20	596	20	636	20	636	Dinas Perdagangan
			Program Pengembangan Ekspor	Presentase Peningkatan Nilai Ekspor	n/a	-	0	-	0	-	0	-	0	Dinas Perdagangan
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pedagang/pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pemasaran produk	60	60	95	60	100	60	105	60	105	Dinas Perdagangan
	2..2	Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura			14.077		15.284		16.613		16.613	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
				- Padi	1,5	1,5		1,5		1,5		1,5		
				- Sayuran	5,5	5,5		5,5		5,5		5,5		
				- Buah-buahan	5	5		5		5		5		
				- Daging	3	3		3		3		3		
				- Telur	3	3		3		3		3		
				Luas Penangkar Benih yang bersertifikat (Ha)	141,35	154,2		167,05		179,9		179,9		
				Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Penanggiran	20	20		30		50		50		
				Pengembangan Kawasan BBI Panang Enim	20	20		30		50		50		

NO	TUJUAN/SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp (dalam juta)		TARG ET	Rp (dalam juta)
						TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)					
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian		10.190		19.009		12.910		12.910	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan			
				- Pembangunan irigasi	5		5		5		5			5		
				- Pembangunan jalan usaha tani	5		5		5		5			5		
				- Pembangunan embung	5		5		5		5			5		
				- Pembangunan Rumah Potong Hewan	5		5		5		5			5		
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Tingkat Kematian Ternak		1.402		1.542		1.696		1.696	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan			
				- Ternak Besar	1		1		1		1			1		
				- Ternak Kecil	1		1		1		1			1		
				- Unggas	5		5		5		5			5		
				Persentase tingkat Produksi Produk Hasil Peternakan	2,5		2,5		2,5		2,5			2,5		
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan kelompok tani yang terdampak gangguan perlindungan tanaman	100	100	404	100	444	100	488	100	488	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan		

NO	TUJUAN/SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp (dalam juta)		TARG ET	Rp (dalam juta)
						TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)					
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan Pembinaan Lembaga Tani			1.401		1.541		1.695		1.695	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan		
				- Pemula	2	2		2		2		2				
				- Lanjut	2	2		2		2		2				
				- Madya	0,5	0,5		0,5		0,5		0,5				
				- Utama	0.05	0.05		0.05		0.05		0.05				
				Persentase transfer teknologi pertanian tepat guna	30	30		30		30		30				
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Luas Lahan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dalam hektar	1387	1387	4.172	1387	4.708	1387	5.178	1387	5.178	Dinas Perkebunan		
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Pertanian	100	100	3.259	100	3.585	100	3.944	100	3.944	Dinas Perkebunan		
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Perlindungan Tanaman Perkebunan	97	97	373	97	410	97	452	97	452	Dinas Perkebunan		
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Perizinan Jenis Usaha Pertanian	1	1	67	1	67	1	67	1	67	Dinas Perkebunan		
			Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Jenis Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan	3	3	636	3	700	3	770	3	770	Dinas Perkebunan		

NO	TUJUAN/SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp (dalam juta)		TARG ET	Rp (dalam juta)
						TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)					
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Perairan Umum Daratan yang terkelola	3	10	1.199	20	1.319	30	1.451	30	1.451	Dinas Perikanan		
			Persentase pelaku Utama/Pelaku Usaha perikanan Tangkap yang meningkat usahanya	12,5	12,89	13,68		14,21		14,21						
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Kawasan Perikanan budidaya yang terkelola	100	100	5.644	100	6.208	100	6.829	100	6.829		Dinas Perikanan	
			Persentase pelaku Utama/Pelaku Usaha perikanan Budidaya yang meningkat usahanya	2,44	5,47	5,83		6,2		6,2						
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Sumberdaya Perikanan Tangkap di Perairan Umum Daratan yang Terawasi	5	5	520	10	546	15	573	15	573		Dinas Perikanan	
			Persentase Usaha Pembudidayaan Ikan di Perairan Umum Daratan yang Terawasi	10	10	15		20		20						
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase nilai tambah produk hasil perikanan	100	100	1.890	100	1.984	100	2.084	100	2.084	Dinas Perikanan		

NO	TUJUAN/SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	
				Persentase ketersediaan pasokan ikan Unit Pengolahan Ikan	100	100		100		100		100		
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	60	70	31.087	80	31.087	90	31.087	90	31.087	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	60	60	18.299	70	18.299	80	18.299	80	18.299	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Permukiman	Persentase peningkatan luas kawasan permukiman	n/a	-	0	-	0	-	0	-	0	Dinas PUPR
			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung dan lingkungan atau kawasan yang sesuai dengan intensitas dan pemanfaatan ruang	53,5	85	10	87	80	90	80	90	80	Dinas PUPR
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	persentase Luas bangunan dan lingkungan yang sesuai dengan prinsip dan pemanfaatan ruang	70	72	3	75	3	78	4	78	4	Dinas PUPR
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	95,33	95,8	134.567	96,03	143.498	96,58	152.872	96,58	152.872	Dinas PUPR

NO	TUJUAN/SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp (dalam juta)		TARG ET	Rp (dalam juta)
						TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)					
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	persentase peningkatan kualifikasi usaha bagi badan usaha jasa konstruksi	90	90	300	90	300	90	400	90	400	Dinas PUPR		
			Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase peningkatan kerjasama desa	70	75	242	80	254	85	267	85	267	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan kinerja pengelolaan administrasi desa	60	65	3.686	70	3.871	75	4.064	75	4.064	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
3.	Meningkatnya derajat kualitas sumber daya manusia															
	3.1	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan	90	91	17.964	92	19.760	93	21.737	93	21.737	Dinas Kesehatan		
				Rasio Tenaga Dokter per satuan penduduk	0,47	0,48		0,49		0,5		0,5				
				Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	3,35	3,5		3,75		3,9		3,9				
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Cakupan PSM	80	81	4.439	82	4.883	83	5.371	83	5.371	Dinas Kesehatan		
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Ketersedian Farmasi, alkes dan makanan dan minuman	80	81	222	82	244	83	268	83	268	Dinas Kesehatan		

NO	TUJUAN/SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp (dalam juta)		TARG ET	Rp (dalam juta)
						TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)					
	3.2	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi PAUD	35	36	199.777	37	209.766	38	220.254	38	220.254	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	100	100		100		100		100				
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	100	100		100		100						
				Angka Putus Sekolah (APS) SD	0	0		0		0						
				Angka Putus Sekolah (APS) SMP	0	0		0		0						
				Angka Kelulusan (AL) SD	100	100		100		100						
				Angka Kelulusan (AL) SMP	100	100		100		100						
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	100	100		100		100						
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95,18	98,18		100		100						
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD	91,12	94,12		97,12		100						
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	85,01	88,01		91,01		94,01						
			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase SD yang telah mengembangkan kurikulum muatan lokal	50	55	1.383	60	1.452	65	1.525	65	1.525	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
			Persentase SMP yang telah mengembangkan kurikulum muatan lokal	55	60	65		70		70						

NO	TUJUAN/SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru SD yang telah tersertifikasi	50	53	28.034	56	29.436	59	30.908	59	30.908	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase guru SMP yang telah tersertifikasi	82,95	85,95		88,95		91,95		91,95		
				Persentase tenaga kependidikan SD yang telah memenuhi kualifikasi minimal S1	100	100		100		100				
				Persentase tenaga kependidikan SMP yang telah memenuhi kualifikasi minimal S1	100	100		100		100				
			Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Pengembangan Bahasa dan Sastra	100	100	578	100	606	100	637	100	637	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah	100	100	1.129	100	1.185	100	1.244	100	1.244	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional	100	100	745	100	783	100	822	100	822	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan dan pengembangan wawasan sejarah daerah	100	100	339	100	356	100	374	100	374	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	TUJUAN/SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp (dalam juta)		TARG ET	Rp (dalam juta)
						TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)					
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cakupan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya daerah	100	100	215	100	225	100	237	100	237	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
			Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase cakupan pelestarian dan pengelolaan museum daerah	100	100	1.208	100	1.268	100	1.331	100	1.331	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	3.3	Meningkatkan daya beli masyarakat	Program Hubungan Industrial	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	100	100	314	100	345	100	380	100	380	Dinas Ketenagakerjaan		
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks kualitas pelayanan perekonomian dan pembangunan	100	100	5.694	100	6.263	100	6.889	100	6.889	Sekretariat Daerah		
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Presentase koefisien harga barang kebutuhan pokok	10	10	726	10	763	10	801	10	801	Dinas Perdagangan		
4.	Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan															
	4.1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	435.120	WTP	580.183	WTP	593.091	WTP	593.091	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Daerah			6.523		7.175		7.892		7.892	Badan Pendapatan Daerah		

NO	TUJUAN/SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase cakupan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang terinventaris dengan baik	80	80	3.912	80	4.107	80	4.313	80	4.313	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	4.2	Meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi yang didiseminasikan dan dipublikasikan	100	100	7.252	100	7.977	100	8.775	100	8.775	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Aplikasi Informatika		Persentase terlayannya kebutuhan aptika OPD	100	100	8.512	100	9.363	100	10.300	100	10.300	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Indeks kepuasan pengguna data statistik sektoral	80	80	305	80	336	80	369	80	369	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Persentase cakupan terpenuhinya keamanan Informasi Pemerintah Daerah	90	90	373	90	411	90	452	90	452	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	4.3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks kualitas pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100	100	15.180	100	16.698	100	18.368	100	18.368	Sekretariat Daerah
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	1.475.048	100	1.474.688	100	1.581.489	100	1.581.489	Seluruh Perangkat Daerah

NO	TUJUAN/SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	
			Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100	100	3.541	100	3.871	100	4.077	100	4.077	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah	100	100	5.567	100	5.852	100	5.852	100	5.852	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Program Kebijakan Kepegawaian perangkat daerah	100	100	6.733	100	7.406	100	8.147	100	8.147	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Predikat Indeks Inovasi Daerah (IID)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	8.360	Sangat Inovatif	9.614	Sangat Inovatif	11.057	Sangat Inovatif	11.057	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meingkatnya Kualitas Hasil Pengawasan	100	100	4.825	100	5.549	100	6.381	100	6.381	Inspektorat
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Terwujudnya Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi serta Sistem dan Prosedur Pengawasan yang baik	100	100	1.636	100	2.136	100	2.636	100	2.636	Inspektorat
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	3.352	100	3.641	100	3.942	100	3.942	Seluruh PD Kecamatan

NO	TUJUAN/SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp (dalam juta)		TARG ET	Rp (dalam juta)
						TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)					
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	100	1.717	100	1.647	100	1.808	100	1.808	Seluruh PD Kecamatan		
	4.4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentse cakupan akses publik, kualitas dan kuantitas Peraturan Daerah Prakarsa dan kualitas Tenaga Ahli DPRD	90	90	33.062	90	33.232	90	36.469	90	36.469	Sekretariat DPRD		
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan layanan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat	100	100	27.564	100	74.677	100	41.231	100	41.231	RSUD M. Rabain		
			Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Persentase tata kelola energi baru terbarukan	90	92	1.550	93	1.650	95	1.500	95	1.500	Dinas Perdagangan		
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	13,28	14,06	15.867	15,63	15.777	15,63	8.534	15,63	8.534	Dinas Perdagangan		
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP yang sudah di tera ulang	8	9	1.000	10	1.000	11	1.000	11	1.000	Dinas Perdagangan		
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75	78	3.895	81	4.239	84	4.712	84	4.712	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		

NO	TUJUAN/SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp (dalam juta)	
						TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)			
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	71,47	76,47	5.033	81,47	5.285	86,47	5.549	86,47	5.549	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Presentase Cakupan Makam Pahlawan Dan tugu perjuangan yang terpelihara	100	100	601	100	661	100	728	100	728	Dinas Sosial
			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	n/a	-	0	-	0	-	0	-	0	Dinas Sosial
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah kasus penyelesaian sengketa Tanah Garapan	5	5	223	5	245	5	269	5	269	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	93,5	93,8	5.027	94	5.530	94,5	6.083	94,5	6.083	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang ditetapkan	n/a	-	0	-	0	-	0	-	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Pemanfaatan Tanah Kosong	58	60	49	63	54	65	59	65	59	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Penatagunaan Tanah	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pertanahan	5	6	84	7	92	8	102	8	102	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	TUJUAN/SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	
			Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	99	99	1.984	99	2.183	99	2.401	99	2.401	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil	69	75	615	80	677	85	745	85	745	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Layanan Informasi Data Kependudukan	99	99	869	99	955	99	1.050	99	1.050	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Profil Kependuduakn	99	99	198	99	218	99	240	99	240	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Penataan Desa	Persentase cakupan prasarana sarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	60	65	18.396	75	19.316	80	20.281	80	20.281	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	85	87	427	89	458	91	489	91	489	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Ijin Trayek	0,02	0,02	795	0,02	838	0,02	956	0,02	956	Dinas Perhubungan

NO	TUJUAN/SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp (dalam juta)		TARG ET	Rp (dalam juta)
						TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)					
				Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum	13,05	13,05		13,05		13,1		13,1	Dinas Perhubungan			
				Persentase kepemilikan KIR Angkutan tak Umum	87,36	87,5		87,75		88,1		88,1				
				Persentase pemasangan rambu-rambu	45,62	50		55		60		60				
			Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase layanan angkutan sungai	40	50	385	60	424	70	466	70		466	Dinas Perhubungan	
			Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,35	0,36	2.621	0,38	2.871	0,39	3.158	0,39		3.158	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	50	50	113	50	125	50	137	50		137	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	26	27	850	28	935	29	1.028	29		1.028	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Perangkat Daerah/Kecamatan yang menyerahkan Arsip Statis	2	4	82	6	91	8	100	8		100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

NO	TUJUAN/SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	10.935	100	11.924	100	13.015	100	13.015	Seluruh PD Kecamatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	14.655	100	15.637	100	17.210	100	17.210	Seluruh PD Kecamatan
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	4.425	100	4.553	100	4.977	100	4.977	Seluruh PD Kecamatan
5.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat													
	5.1	Meingkatkan penanganan PPKS	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase cakupan pemberdayaan sosial	92	96,75	11.839	96,75	12.681	96,75	13.590	96,75	13.590	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dapat direhabilitasi	85	90	1.386	90	1.618	90	1.855	90	1.855	Dinas Sosial
			Program Penanganan Bencana	Presentase Bencana yang tertangani	95	98	884	98	972	98	1.069	98	1.069	Dinas Sosial
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	80	95	908	95	993	95	1.086	95	1.086	Dinas Sosial

NO	TUJUAN/SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026						
						TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)	TARGET	Rp (dalam juta)			
	5.2	Menurunkan tingkat penangguran terbuka	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase cakupan pembinaan kepemudaan	100	100	4.236	100	4.236	100	4.236	100	4.236	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)	50	52	106	55	116	60	128	60	128	Dinas Ketenagakerjaan		
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	74,16	75,16	2.492	76,16	2.741	77,16	3.015	77,16	3.015	Dinas Ketenagakerjaan		
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat kesempatan kerja	73,9	73,9	454	73,91	499	73,91	549	73,91	549	Dinas Ketenagakerjaan		
	5.3	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase penyediaan infrastruktur pangan	24,8	26	718	27,6	754	29,6	792	29,6	792	Dinas Ketahanan Pangan		
			Program Pening. Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan utama	90	90	3.173	90	3.331	90	3.498	90	3.498	Dinas Ketahanan Pangan		
					Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase cakupan penanganan daerah Rawan Pangan	85	85	394	85	414	85	435	85	435	Dinas Ketahanan Pangan
					Program Pengawasan Keamanan	Persentase pengawasan dan pembinaan	60	60	383	60	402	60	422	60	422	Dinas Ketahanan Pangan

NO	TUJUAN/SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp (dalam juta)		TARG ET	Rp (dalam juta)
						TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)					
			Pangan	keamanan pangan												
	5.4	Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan kebijakan kependudukan yang dilaksanakan	100	100	1.152	100	1.202	100	1.702	100	1.702	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rasio akseptor KB	65	66	6.664	67	7.064	68	7.664	68	7.664	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga	53	53,2	6.424	53,4	6.833	53,6	7.324	53,6	7.324	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	5.5	Meningkatkan kualitas layanan hunian masyarakat	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Korban Bencana atau Rumah yang Terdampak Relokasi akibat Program Pemerintah yang memiliki Rumah Layak Huni	91,73	91,74	1.280	91,75	1.408	91,76	1.548	91,76	1.548	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
			Program Kawasan Permukiman	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani dalam hektar	1,5	2	16.454	2,5	18.099	3	19.909	3	19.909	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rasio permukiman layak huni	n/a	-	0	-	0	-	0	-	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		

NO	TUJUAN/SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp (dalam juta)		TARG ET	Rp (dalam juta)
						TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)					
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Ketersediaan PSU Permukiman	51	52	37.382	53	41.121	54	45.233	54	45.233	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
			Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase cakupan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan kawasan permukiman	15	15	60	25	66	35	73	35	73	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
6.	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan masyarakat dalam pembangunan daerah															
	6.1	Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan data gender dan anak	2 dok	2 dok	285	2 dok	313	2 dok	345	2 dok	345	Dinas PPPA		
	6.2	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan PUG	25	28	713	28	713	30	713	30	713	Dinas PPPA		
7.	Meningkatkan pemenuhan hak anak															
	7.1	Meningkatkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan yang mendapat layanan penanganan pengaduan oleh petugas	100	100	330	100	380	100	480	100	480	Dinas PPPA		

NO	TUJUAN/SASARAN		PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				
						TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)	TARG ET	Rp (dalam juta)	
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang terbentuk	20	20	58	20	64	20	70	20	70	Dinas PPPA
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak	5	5	552	5	579	5	608	5	608	Dinas PPPA
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak kasus kekerasan yang mendapat layanan perlindungan	100	100	419	100	469	100	519	100	519	Dinas PPPA

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	GAMBARAN UMUM
BAB	III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB	IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB	V	TUJUAN DAN SASARAN
BAB	VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS
BAB	VII	KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB	VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB	IX	PENUTUP

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan pembangunan merupakan rumusan kebutuhan pendanaan untuk penyusunan program pembangunan penyelenggaraan pemerintahan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, melalui sumber pendanaan yang diperoleh dari anggaran pemerintah daerah. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari pendanaan program-program dan indikator kinerja program yang akan dilaksanakan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Program pembangunan yang telah dijabarkan dalam tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai dengan target indikator kinerja program, dan kebutuhan pendanaan berupa pagu indikatif, merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Selain itu, program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen rencana pembangunan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026

(dalam juta rupiah)

Uraian	Proyeksi (Rp)			Rata- Rata Pertumb
	2024	2025	2026	
BELANJA	3,127,261	3,312,413	3,483,655	5.92
BELANJA OPERASI	1,877,283	1,988,429	2,091,225	5.92
Belanja Pegawai	943,053	998,887	1,050,527	5.92
Belanja Barang dan Jasa	860,875	911,844	958,984	5.92
Belanja Bunga	8,004	8,477	8,916	5.92
Belanja Subsidi	3,887	4,117	4,330	5.92
Belanja Hibah	59,937	63,486	66,768	5.92
Belanja Bantuan Sosial	1,526	1,617	1,700	0
BELANJA MODAL	723,218	766,037	805,639	5.92
Belanja Modal Tanah	6,504	6,889	7,245	5.92
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119,453	126,525	133,066	5.92
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	147,939	156,698	164,799	5.92
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	422,211	447,208	470,328	5.92
Belanja Modal Aset Lainnya				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27,112	28,717	30,202	5.92
BELANJA TIDAK TERDUGA	13,085	13,859	14,576	5.92
Belanja Tidak Terduga	13,085	13,859	14,576	5.92
BELANJA TRANSFER	513,675	544,088	572,216	5.92
Belanja Bagi Hasil Pendapatan	9,545	10,110	10,633	5.92
Belanja Bantuan Keuangan	504,130	533,978	561,583	5.92
Surplus/(Defisit)	-367,026	-370,279	-347,634	0.89
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	378,304	381,557	358,912	0.86
Pengeluaran Pembiayaan	11,279	11,279	11,279	0.00
Pembiayaan Netto	367,025	370,278	347,633	0.89
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0

Penjabaran program-program seluruh Perangkat Daerah dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 7.2

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1.01.1.01.2.2 2.0.00.02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				785,694		824,979		866,227		866,227	
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	555,923	100	583,719	100	612,905	100	612,905	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi PAUD	35	36	199,777	37	209,766	38	220,254	38	220,254	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	100	100		100		100		100		
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	100	100		100		100		100		
		Angka Putus Sekolah (APS) SD	0	0		0		0		0		
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP	0	0		0		0		0		
		Angka Kelulusan (AL) SD	90,35	100		100		100		100		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Angka Kelulusan (AL) SMP	96,32	100		100		100		100		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	100	100		100		100		100		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.18	98.18		100		100		100		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD	91.12	94.12		97.12		100		100		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	85.01	88.01		91.01		94.01		94.01		
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase SD yang telah mengembangkan kurikulum muatan lokal	50	55	1,383	60	1,452	65	1,525	65	1,525	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase SMP yang telah mengembangkan kurikulum muatan lokal	55	60		65		70		70		
1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru SD yang telah tersertifikasi	50	53	28,034	56	29,436	59	30,908	59	30,908	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase guru SMP yang telah tersertifikasi	82.95	85.95		88.95		91.95		91.95		
		Persentase tenaga kependidikan SD yang telah memenuhi kualifikasi minimal S1	100	100		100		100		100		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase tenaga kependidikan SMP yang telah memenuhi kualifikasi minimal S1	100	100		100		100		100		
1.01.06	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Pengembangan Bahasa dan Sastra	100	100	578	100	606	100	637	100	637	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1.02.1.02.0.0 0.0.00.01	Dinas Kesehatan				352,447		370,070		388,573		388,573	
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	75	76	133,219	76	123,533	76.5	110,896	76.5	110,896	Dinas Kesehatan
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	69.48	69.58	196,603	69.68	221,649	69.78	250,301	69.78	250,301	Dinas Kesehatan
		Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0.01	0.01		0.01		0.01		0.01		
		Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0.24	0.24		0.24		0.24		0.24		
		Angka Kematian Bayi	5.3	5.2		5.1		5		5		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Angka Kematian Ibu	75	74		73		72		72		
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan	90	91	17,964	92	19,760	93	21,737	93	21,737	Dinas Kesehatan
		Rasio Tenaga Dokter per satuan penduduk	0.47	0.48		0.49		0.5		0.5		
		Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	3.35	3.5		3.75		3.9		3.9		
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Ketersediaan Farmasi, alkes dan makanan dan minuman	80	81	222	82	244	83	268	83	268	Dinas Kesehatan
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Cakupan PSM	80	81	4,439	82	4,883	83	5,371	83	5,371	Dinas Kesehatan
1.02.1.02.0.0 0.0.00.01.00 01	RSUD H.M Rabain				177,128		185,985		195,284		195,284	
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	84,63	100	149,565	100	111,308	100	154,053	100	154,053	RSUD H,M RABAIN
1.02.02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase cakupan layanan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat	98,71	100	27,564	100	74,677	100	41,231	100	41,231	RSUD H,M RABAIN

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1.03.1.03.0.0 0.0.00.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				224,031		235,232		246,994		246,994	
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	12,996	100	13,646	100	14,328	100	14,328	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	60	70	31,087	80	31,087	90	31,087	90	31,087	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	74	78	15,000	82	15,000	86	15,000	86	15,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase cakupan ketersediaan fasilitas pengurangan sampah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	87	88	5,500	89	6,050	90	6,655	90	6,655	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	60	60	18,299	70	18,299	80	18,299	80	18,299	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase peningkatan luas kawasan permukiman	n/a	-	0	-	0	-	0	-	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung dan lingkungan atau kawasan yang sesuai dengan intensitas dan pemanfaatan ruang	54	85	10	87	80	90	80	90	80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	persentase Luas bangunan dan lingkungan yang sesuai dengan prinsip dan pemanfaatan ruang	70	72	3	75	3	78	4	78	4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	95.33	95.80	134,567	96.03	143,498	96.58	152,872	96.58	152,872	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	persentase peningkatan kualifikasi usaha bagi badan usaha jasa konstruksi	90	90	300	90	300	90	400	90	400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	100	100	6,170	100	7,170	100	8,170	100	8,170	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.04.1.04.2.1 0.0.00.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				65,599		71,638		78,255		78,255	
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	10,423	100	10,945	100	11,492	100	11,492	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Korban Bencana atau Rumah yang Terdampak Relokasi akibat Program Pemerintah yang memiliki Rumah Layak Huni	91.73	91.74	1,280	91.75	1,408	91.76	1,548	91.76	1,548	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani dalam hektar	1.5	2	16,454	2.5	18,099	3	19,909	3	19,909	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rasio permukiman layak huni	n/a	-	0	-	0	-	0	-	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Ketersediaan PSU Permukiman	51	52	37,382	53	41,121	54	45,233	54	45,233	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase cakupan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan kawasan permukiman	15	15	60	25	66	35	73	35	73	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
1.05.1.05.0.0 0.0.00.01.	Satuan Polisi Pamong Praja				16,602		16,313		16,840		16,840	
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	13,088	100	13,488	100	13,488	100	13,488	Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)	85	85	3,515	85	2,826	85	3,352	85	3,352	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase penegakan Perda	83	83		83		83		83		
1.05.1.05.0.0 0.0.00.02.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				18,040		19,799		21,828		21,828	
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	14,145	100	15,560	100	17,116	100	17,116	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase tingkat waktu tanggap (<i>respon time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75	78	3,895	81	4,239	84	4,712	84	4,712	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.1.05.0.0 0.0.00.04.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				7,891		8,286		8,700		8,700	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	2,858	100	3,001	100	3,151	100	3,151	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	71.47	76.47	5,033	81.47	5,285	86.47	5,549	86.47	5,549	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
1.06.1.06.0.0 0.0.00.01	Dinas Sosial				37,631		40,884		44,393		44,393	
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	22,013	100	23,959	100	26,065	100	26,065	Dinas Sosial
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase cakupan pemberdayaan sosial	92	96.75	11,839	96.75	12,681	96.75	13,590	96.75	13,590	Dinas Sosial
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	n/a	-	0	-	0	-	0	-	0	Dinas Sosial
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat direhabilitasi	85	90	1,386	90	1,618	90	1,855	90	1,855	Dinas Sosial

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Presentase Penyandang Masalah Sosial (PMKS) yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	80	95	908	95	993	95	1,086	95	1,086	Dinas Sosial
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Presentase Bencana yang tertangani	95	98	884	98	972	98	1,069	98	1,069	Dinas Sosial
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Presentase Cakupan Makam Pahlawan Dan tugu perjuangan yang terpelihara	100	100	601	100	661	100	728	100	728	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
2.07.2.07.3.3 2.0.00.01	Dinas Ketenagakerjaan				11,095		11,818		12,594		12,594	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	7,729	100	8,116	100	8,522	100	8,522	Dinas Ketenagakerjaan
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang telah menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)	50	52	106	55	116	60	128	60	128	Dinas Ketenagakerjaan
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	74.16	75.16	2,492	76.16	2,741	77.16	3,015	77.16	3,015	Dinas Ketenagakerjaan
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat kesempatan kerja	73.90	73.90	454	73.91	499	73.91	549	73.91	549	Dinas Ketenagakerjaan
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	100	100	314	100	345	100	380	100	380	Dinas Ketenagakerjaan
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
2.08. 2.08.0.00.0.0 0.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				12,266		13,418		14,725		14,725	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	90	92	9,909	94	10,900	95	11,990	95	11,990	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan PUG	25	28	713	28	713	30	713	30	713	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan yang mendapat layanan penganganan pengaduan oleh petugas	100	100	330	100	380	100	480	100	480	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang terbentuk	20	20	58	20	64	20	70	20	70	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase cakupan pemuahan kebutuhan data gender dan anak	2 dok	2 dok	285	2 dok	313	2 dok	345	2 dok	345	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak	5	5	552	5	579	5	608	5	608	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak kasus kekerasan yang mendapat layanan perlindungan	100	100	419	100	469	100	519	100	519	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
2.09.2.09.0.0 0.0.00.01.	Dinas Ketahanan Pangan				14,619		15,350		16,118		16,118	
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	9,951	100	10,449	100	10,971	100	10,971	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase penyediaan infrastruktur pangan	24.8	26	718	27.6	754	29.6	792	29.6	792	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan utama	90	90	3,173	90	3,331	90	3,498	90	3,498	Dinas Ketahanan Pangan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan	26	36		50		63		63		
		Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKE dan AKP)	90	90		90		90		90		
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase cakupan penanganan daerah Rawan Pangan	85	85	394	85	414	85	435	85	435	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	60	60	383	60	402	60	422	60	422	Dinas Ketahanan Pangan
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											
1.04.1.04.2.1 0.0.00.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				5,382		5,921		6,513		6,513	
2.10.4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah kasus penyelesaian sengketa Tanah Garapan	5	5	223	5	245	5	269	5	269	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.10.5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	92	93.8	5,027	94	5,530	94.5	6,083	94.5	6,083	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10.7	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang ditetapkan	n/a	-	0	-	0	-	0	-	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.10.8	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Pemanfaatan Tanah Kosong	55	60	49	63	54	65	59	65	59	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Rekomendasi Perizinan Pertanahan	3	6	84	7	92	8	102	8	102	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
2.11.2.11.3.2 8.0.00.01	Dinas Lingkungan Hidup				29,653		36,818		44,700		44,700	
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	14,775	100	16,253	100	17,878	100	17,878	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	100	100	1,495	100	1,644	100	1,809	100	1,809	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkunga Hidup	58.71	58.08	2,336	58.14	2,570	58.21	2,827	58.21	2,827	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman hayati	100	100	269	100	296	100	325	100	325	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase ketaatan pelaku usaha/ kegiatan pengeolaan Limbah B3	75	75	146	80	161	80	177	80	177	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha/ kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	100	100	184	100	203	100	223	100	223	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang difasilitasi	100	100	63	100	69	100	76	100	76	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Kelompok Masyarakat yang peduli lingkungan	75	75	258	75	283	80	312	80	312	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pelaksanaan pemberian penghargaan lingkungan hidup	75	75	194	75	213	80	235	80	235	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	188	100	207	100	228	100	228	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan	16,93	31,92	9.745	34,42	14.919	39,61	20.611	39,61	20.611	Dinas Lingkungan Hidup
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
2.12.2.12.0.0 0.0.00.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				16,067		17,054		18,108		18,108	
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	12,401	100	13,021	100	13,672	100	13,672	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	99	99	1,984	99	2,183	99	2,401	99	2,401	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil	69	75	615	80	677	85	745	85	745	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Layanan Informasi Data Kependudukan	99	99	869	99	955	99	1,050	99	1,050	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Profil Kependuduakn	99	99	198	99	218	99	240	99	240	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
2.13.2.13.0.0 0.0.00.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				35,336		37,113		38,976		38,976	
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	12,585	100	13,214	100	13,875	100	13,875	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase cakupan prasarana sarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	60	65	18,396	75	19,316	80	20,281	80	20,281	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.13.03	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase peningkatan kerjasama desa	70	75	242	80	254	85	267	85	267	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan kinerja pengelolaan administrasi desa	60	65	3,686	70	3,871	75	4,064	75	4,064	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	85	87	427	89	458	91	489	91	489	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
2.14.2.14.0.0 0.0.00.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				21,969		23,214		25,211		25,211	
2.14.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	7,729	100	8,115	100	8,521	100	8,521	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan kebijakan kependudukan yang dilaksanakan	100	100	1,152	100	1,202	100	1,702	100	1,702	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rasio akseptor KB	65	66	6,664	67	7,064	68	7,664	68	7,664	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga	53	53.2	6,424	53.4	6,833	53.6	7,324	53.6	7,324	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
2.15.2.15.0.0 0.0.00.01	Dinas Perhubungan				12,439		13,083		13,834		13,834	
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	11,259	100	11,822	100	12,413	100	12,413	Dinas Perhubungan
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu	Rasio Ijin Trayek	0,02	0,02	10	0,02	10	0,02	10	0,02	10	Dinas Perhubungan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum	13,01	13,05	33	13,05	34	13,1	34	13,1	34	
		Persentase kepemilikan KIR Angkutan tak Umum	86,99	87,5	226	87,75	245	88,1	275	88,1	275	
		Persentase pemasangan rambu-rambu	43,12	50	527	55	549	60	637	60	637	
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase layanan angkutan sungai	30	50	385	60	424	70	466	70	466	Dinas Perhubungan
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
2.16.2.16.2.2 0.2.21.01	Dinas Komunikasi dan Informatika				23,139		25,084		27,206		27,206	
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	7,375	100	7,744	100	8,131	100	8,131	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi yang didiseminasikan dan dipublikasikan	100	100	7,252	100	7,977	100	8,775	100	8,775	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase terlayannya kebutuhan aptika OPD	100	100	8,512	100	9,363	100	10,300	100	10,300	Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
2.17.2.17.0.0 0.0.00.01.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				13,271		15,268		17,695		17,695	
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	7,960	100	9,154	100	10,527	100	10,527	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Usaha Simpan Pinjam yang memiliki izin	18,82	24,70	220	30,59	220	36,47	220	36,47	220	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang telah dilakukan pengawasan dan Pemeriksaan	52,60	71.56	168	81.04	193	91.00	222	91.00	222	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase cakupan KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	20,85	22,30	105	23,36	121	24,41	139	24,41	139	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang bersertifikat	5,79	7,56	680	8,43	680	9,3	782	9,3	782	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	82,58	83,36	1,314	83,75	1,511	84,15	1,738	84,15	1,738	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	6,27	7,94	1,366	8,93	1,639	10,04	1,967	10,04	1,967	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM Naik Kelas	7,75	8,55	1,459	8,95	1,751	9,35	2,101	9,35	2,101	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
2.18.2.18.0.0 0.0.00.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				11,877		13,064		14,305		14,305	
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	8,517	100	9,369	100	10,306	100	10,306	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang Bermitra Dengan UMKM	83,18	100	734	100	808	100	889	100	889	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Minat Penanaman Modal	69,2	100	594	100	654	100	654	100	654	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase cakupan data/informasi pelayanan penanaman modal	87,29	100	775	100	853	100	938	100	938	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dalam miliar	808	927	708	947	779	967	857	967	857	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase izin terbit perizinan dan non perizinan yang diselesaikan	71,06	100	547	100	602	100	662	100	662	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.19.2.19.0.0 0.0.00.01	Dinas Kepemudaan dan Olahraga				44,294		46,509		48,834		48,834	
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	15,716	100	16,502	100	17,327	100	17,327	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase cakupan pembinaan kepemudaan	100	100	4,236	100	4,236	100	4,236	100	4,236	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase wirausaha muda	100	100		100		100		100		
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase cakupan pembinaan olahraga	100	100	23,754	100	24,957	100	26,457	100	26,457	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase peningkatan atlet berprestasi	100	100		100		100		100		
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase cakupan pengembangan kapasitas kepramukaan	100	100	588	100	814	100	814	100	814	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
2.16.2.16.2.2 0.2.21.01	Dinas Komunikasi dan Informatika				305		336		369		369	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks kepuasan pengguna data statistik sektoral	80	80	305	80	336	80	369	80	369	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
2.16.2.16.2.2 0.2.21.01	Dinas Komunikasi dan Informatika				373		411		452		452	
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase cakupan terpenuhinya keamanan Informasi Pemerintah Daerah	90	90	373	90	411	90	452	90	452	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
1.01.1.01.2.2 2.0.00.02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				3,635		3,817		4,008		4,008	
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah	100	100	1,129	100	1,185	100	1,244	100	1,244	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional	100	100	745	100	783	100	822	100	822	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan dan pengembangan wawasan sejarah daerah	100	100	339	100	356	100	374	100	374	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cakupan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya daerah	100	100	215	100	225	100	237	100	237	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase cakupan pelestarian dan pengelolaan museum daerah	100	100	1,208	100	1,268	100	1,331	100	1,331	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
2.23.2.23.2.2 4.0.00.02	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				11,335		12,010		12,310		12,310	
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	65	75	8,600	85	9,015	95	9,015	95	9,015	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0.35	0.36	2,621	0.38	2,871	0.39	3,158	0.39	3,158	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	50	50	113	50	125	50	137	50	137	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											
2.23.2.23.2.2 4.0.00.02	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				932		1,025		1,128		1,128	
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	26	27	850	28	935	29	1,028	29	1,028	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase peningkatan SDM pengelola kearsipan	25	26		26		27		27		
2.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Perangkat Daerah/Kecamatan yang menyerahkan Arsip Statis	2	4	82	6	91	8	100	8	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.25.3.25.0.0 0.0.00.01	Dinas Perikanan				16,098		17,246		18,484		18,484	
3.25.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	6,846	100	7,188	100	7,547	100	7,547	Dinas Perikanan
3.25.3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Perairan Umum Daratan yang terkelola	2,5	10	1,199	20	1,319	30	1,451	30	1,451	Dinas Perikanan
		Persentase pelaku Utama/Pelaku Usaha perikanan Tangkap yang meningkat usahanya	12.50	12.89		13.68		14.21		53.28		
3.25.4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Kawasan Perikanan budidaya yang terkelola	100	100	5,644	100	6,208	100	6,829	100	6,829	Dinas Perikanan
		Persentase pelaku Utama/Pelaku Usaha perikanan Budidaya yang meningkat usahanya	2.44	5.47		5.83		6.20		19.94		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.25.5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Sumberdaya Perikanan Tangkap di Perairan Umum Daratan yang Terawasi	0	5	520	10	546	15	573	15	573	Dinas Perikanan
		Persentase Usaha Pembudidayaan Ikan di Perairan Umum Daratan yang Terawasi	0	10		15		20		20		
3.25.6	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase nilai tambah produk hasil perikanan	100	100	1,890	100	1,984	100	2,084	100	2,084	Dinas Perikanan
		Persentase ketersediaan pasokan ikan Unit Pengolahan Ikan	100	100		100		100		100		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
3.26.3.26.0.0 0.0.00.01	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				13,080		13,734		14,420		14,420	
3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	9,462	100	9,755	100	10,042	100	10,042	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	0.56	0.57	1,405	0.58	1,545	0.59	1,700	0.59	1,700	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisata	30	35	1,270	40	1,397	45	1,537	45	1,537	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase peningkatan prasarana Ruang Kreatif / Zona Kreatif	20	25	580	27	638	30	702	30	702	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan PAD sektor Pariwisata	50	60	363	70	399	80	439	80	439	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
3.27.3.27.0.0 0.0.00.01	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan				58,505		70,404		67,615		67,615	
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	31,032	100	32,584	100	34,213	100	34,213	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura			14,077		15,284		16,613		16,613	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Padi	1.5	1.5		1.5		1.5		1.5		
		- Sayuran	5.5	5.5		5.5		5.5		5.5		
		- Buah-buahan	5	5		5		5		5		
		- Daging	3	3		3		3		3		
		- Telur	3	3		3		3		3		
		Luas Penangkar Benih yang bersertifikat (Ha)	141.35	154.2		167.05		179.9		179.9		
		Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Penanggiran	20	20		30		50		50		
		Pengembangan Kawasan BBI Panang Enim	20	20		30		50		50		
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian			10,190		19,009		12,910		12,910	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
		- Pembangunan irigasi	5	5		5		5		5		
		- Pembangunan jalan usaha tani	5	5		5		5		5		

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Pembangunan embung	5	5		5		5		5		
		- Pembangunan Rumah Potong Hewan	5	5		5		5		5		
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Tingkat Kematian Ternak			1,402		1,542		1,696		1,696	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
		- Ternak Besar	1	1		1		1		1		
		- Ternak Kecil	1	1		1		1		1		
		- Unggas	5	5		5		5		5		
		Persentase tingkat Produksi Produk Hasil Peternakan	2.5	2.5		2.5		2.5		2.5		
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan kelompok tani yang terdampak gangguan perlindungan tanaman	100	100	404	100	444	100	488	100	488	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3.27.07	Program Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan Pembinaan Lembaga Tani			1,401		1,541		1,695		1,695	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Pemula	2	2		2		2		2		
		- Lanjut	2	2		2		2		2		
		- Madya	0.5	0.5		0.5		0.5		0.5		
		- Utama	0.05	0.05		0.05		0.05		0.05		
		Persentase transfer teknologi pertanian tepat guna	30	30		40		50		50		
3.27.3.27.0.0 0.0.00.06	Dinas Perkebunan				20,781		21,812		24,047		24,047	
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	12,272	100	12,341	100	13,635	100	13,635	Dinas Perkebunan
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Lahan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dalam hektar	1,312	1,387	4,172	1,387	4,708	1,387	5,178	1,387	5,178	Dinas Perkebunan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Pertanian	100	100	3,259	100	3,585	100	3,944	100	3,944	Dinas Perkebunan
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Perlindungan Tanaman Perkebunan	97	97	373	97	410	97	452	97	452	Dinas Perkebunan
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Perizinan Jenis Usaha Pertanian	1	1	67	1	67	1	67	1	67	Dinas Perkebunan
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Jenis Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan	3	3	636	3	700	3	770	3	770	Dinas Perkebunan
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL											
3.30.3.30.3.2 9.3.31.01	Dinas Perdagangan				1,550		1,650		1,500		1,500	
3.29.05	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Persentase tata kelola energi baru terbarukan	90	92	1,550	93	1,650	95	1,500	95	1,500	Dinas Perdagangan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
3.30.3.30.3.2 9.3.31.01	Dinas Perdagangan				29,110		29,632		23,032		23,032	
3.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	11.421	100	11.992	100	12.592	100	12.592	Dinas Perdagangan
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	12,50	14,06	15.867	14,06	15.777	15,63	8.534	15,63	8.534	Dinas Perdagangan
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Presentase koefisien harga barang kebutuhan pokok	9,91	10	726	10	763	10	801	10	801	Dinas Perdagangan
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Presentase Peningkatan Nilai Ekspor	n/a	-	0	-	0	-	0	-	0	Dinas Perdagangan
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP yang sudah di tera ulang	8	9	1,000	10	1,000	11	1,000	12	1,000	Dinas Perdagangan
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pedagang/pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pemasaran produk	60	60	95	60	100	60	105	60	105	Dinas Perdagangan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
3.30.3.30.3.2 9.3.31.01	Dinas Perdagangan				2,014		2,138		2,243		2,243	
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Presentase pertumbuhan Industri kecil dan menengah	6.2	6.5	644	6.8	672	6.9	677	6.9	677	Dinas Perdagangan
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Presentase pembinaan usaha industri kecil dan menengah	20	20	810	20	870	20	930	20	930	Dinas Perdagangan
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Presentase pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	20	20	560	20	596	20	636	20	636	Dinas Perdagangan
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI											
2.07.2.07.3.3 2.0.00.01	Dinas Ketenagakerjaan				0		0		0		0	
3.32.04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase pembinaan warga eks transmigrasi	n/a	-	0	-	0	-	0	-	0	Dinas Ketenagakerjaan
4	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.4.01.0.0 0.0.00.01	Sekretariat Daerah				77,192		84,911		93,402		93,402	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	56,318	100	61,950	100	68,145	100	68,145	Sekretariat Daerah
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks kualitas pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100	100	15,180	100	16,698	100	18,368	100	18,368	Sekretariat Daerah
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks kualitas pelayanan perekonomian dan pembangunan	100	100	5,694	100	6,263	100	6,889	100	6,889	Sekretariat Daerah
4.02	SEKRETARIAT DPRD											
4.02.4.02.0.0 0.0.00.01	Sekretariat DPRD				83,473		84,035		91,787		91,787	
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	90	90	50,411	90	50,803	90	55,318	90	55,318	Sekretariat DPRD

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase cakupan akses publik, kualitas dan kuantitas Peraturan Daerah Prakarsa dan kualitas Tenaga Ahli DPRD	90	90	33,062	90	33,232	90	36,469	90	36,469	Sekretariat DPRD
5	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5.01	PERENCANAAN											
5.01.5.01.0.0 0.0.00.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				21,432		21,430		20,814		20,814	
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	12,324	100	11,707	100	10,885	100	10,885	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100	100	3,541	100	3,871	100	4,077	100	4,077	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah	100	100	5,567	100	5,852	100	5,852	100	5,852	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.02	KEUANGAN											
5.02.5.02.0.0 0.0.00.02	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				614,601		663,638		680,719		680,719	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	75,569	100	79,348	100	83,315	100	83,315	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	435,120	WTP	580,183	WTP	593,091	WTP	593,091	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase cakupan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang terinventaris dengan baik	80	80	3,912	80	4,107	80	4,313	80	4,313	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.5.02.0.0 0.0.00.02	Badan Pendapatan Daerah				26,069		27,698		29,441		29,441	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	19,546	100	20,523	100	21,549	100	21,549	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan Pendapatan Daerah	100	100	6,523	100	7,175	100	7,892	100	7,892	Badan Pendapatan Daerah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.03	KEPEGAWAIAN											
5.03.5.03.5.0 4.0.00.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				35,157		16,672		18,339		18,339	
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	30,371	100	11,409	100	12,549	100	12,549	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Program Kebijakan Kepegawaian perangkat daerah	100	100	4,785	100	5,264	100	5,790	100	5,790	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
5.03.5.03.5.0 4.0.00.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				6,733		7,406		8,147		8,147	
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Program Kebijakan Kepegawaian perangkat daerah	100	100	6,733	100	7,406	100	8,147	100	8,147	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
5.05.5.05.0.0 0.0.00.01	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah				13,694		15,215		16,937		16,937	
5.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	5,334	100	5,601	100	5,881	100	5,881	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Predikat Indeks Inovasi Daerah (IID)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	8,360	Sangat Inovatif	9,614	Sangat Inovatif	11,057	Sangat Inovatif	11,057	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
6.01	INSPEKTORAT DAERAH											
6.01.6.01.0.0 0.0.00.01	Inspektorat				24,076		27,943		32,314		32,314	
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	17,615	100	20,258	100	23,297	100	23,297	Inspektorat
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meingkatnya Kualitas Hasil Pengawasan	100	100	4,825	100	5,549	100	6,381	100	6,381	Inspektorat

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Terwujudnya Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi serta Sistem dan Prosedur Pengawasan yang baik	100	100	1,636	100	2,136	100	2,636	100	2,636	Inspektorat
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.7.01.0.0 0.0.00.01	Kecamatan Semende Darat Ulu				4,667		5,133		5,646		5,646	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	3,653	100	4,018	100	4,420	100	4,420	Kecamatan Semende Darat Ulu
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	104	100	114	100	125	100	125	Kecamatan Semende Darat Ulu
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	321	100	354	100	389	100	389	Kecamatan Semende Darat Ulu

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	n/a	100	311	100	342	100	376	100	376	Kecamatan Semende Darat Ulu
7.01.05	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100	111	100	122	100	134	100	134	Kecamatan Semende Darat Ulu
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	168	100	184	100	203	100	203	Kecamatan Semende Darat Ulu
7.01.7.01.0.0 0.0.00.02	Kecamatan Semende Darat Tengah				4,516		5,468		6,515		6,515	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	3,461	100	4,307	100	5,238	100	5,238	Kecamatan Semende Darat Tengah
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	184	100	202	100	222	100	222	Kecamatan Semende Darat Tengah
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	395	100	434	100	478	100	478	Kecamatan Semende Darat Tengah
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase Terlaksananya tugas forum pimpinan Tingkat Kecamatan	n/a	100	218	100	240	100	264	100	264	Kecamatan Semende Darat Tengah

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.05	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	n/a	100	98	100	108	100	119	100	119	Kecamatan Semende Darat Tengah
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	160	100	176	100	194	100	194	Kecamatan Semende Darat Tengah
7.01.7.01.0.0 0.0.00.03	Kecamatan Semende Darat Laut				4,351		4,786		5,265		5,265	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	3,583	100	3,941	100	4,335	100	4,335	Kecamatan Semende Darat Laut
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	164	100	180	100	198	100	198	Kecamatan Semende Darat Laut
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	383	100	421	100	463	100	463	Kecamatan Semende Darat Laut
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	n/a	100	157	100	173	100	190	100	190	Kecamatan Semende Darat Laut
7.01.05	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100	39	100	43	100	47	100	47	Kecamatan Semende Darat Laut

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	25	100	28	100	30	100	30	Kecamatan Semende Darat Laut
7.01.7.01.0.0 0.0.00.04	Kecamatan Tanjung Agung				6,579		7,237		7,961		7,961	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	4,782	100	5,260	100	5,786	100	5,786	Kecamatan Tanjung Agung
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	220	100	242	100	266	100	266	Kecamatan Tanjung Agung
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	825	100	908	100	999	100	999	Kecamatan Tanjung Agung
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase Terlaksananya tugas forum pimpinan Tingkat Kecamatan	n/a	100	250	100	275	100	303	100	303	Kecamatan Tanjung Agung
7.01.05	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	n/a	100	250	100	275	100	303	100	303	Kecamatan Tanjung Agung
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	252	100	278	100	305	100	305	Kecamatan Tanjung Agung

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.7.01.0.0 0.0.00.05	Kecamatan Lawang Kidul		100%		9,060		9,437		10,381		10,381	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	5,937	100	6,531	100	7,184	100	7,184	Kecamatan Lawang Kidul
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	2,019	100	2,221	100	2,443	100	2,443	Kecamatan Lawang Kidul
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	599	100	659	100	725	100	725	Kecamatan Lawang Kidul
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	n/a	100	350	-	0	-	0	-	0	Kecamatan Lawang Kidul
7.01.05	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100	130	-	0	-	0	-	0	Kecamatan Lawang Kidul
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	24	100	26	100	29	100	29	Kecamatan Lawang Kidul
7.01.7.01.0.0 0.0.00.06	Kecamatan Muara Enim				16,121		17,733		19,506		19,506	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	9,862	100	10,849	100	11,934	100	11,934	Kecamatan Muara Enim
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	3,132	100	3,445	100	3,790	100	3,790	Kecamatan Muara Enim
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	2,387	100	2,626	100	2,888	100	2,888	Kecamatan Muara Enim
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	n/a	100	325	100	357	100	393	100	393	Kecamatan Muara Enim
7.01.05	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	n/a	100	169	100	185	100	204	100	204	Kecamatan Muara Enim
7.01.06	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	246	100	270	100	297	100	297	Kecamatan Muara Enim
7.01.7.01.0.0 0.0.00.07	Kecamatan Ujan Mas				4,207		4,628		5,091		5,091	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	3,067	100	3,374	100	3,711	100	3,711	Kecamatan Ujan Mas

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	202	100	222	100	245	100	245	Kecamatan Ujan Mas
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	440	100	484	100	533	100	533	Kecamatan Ujan Mas
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	n/a	100	320	100	352	100	388	100	388	Kecamatan Ujan Mas
7.01.05	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	n/a	100	136	100	150	100	165	100	165	Kecamatan Ujan Mas
7.01.06	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100	100	41	100	45	100	50	100	50	Kecamatan Ujan Mas
7.01.7.01.0.0 0.0.00.08	Kecamatan Benakat				4,003		4,403		4,843		4,843	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	3,463	100	3,809	100	4,190	100	4,190	Kecamatan Benakat
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	126	100	139	100	153	100	153	Kecamatan Benakat

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	371	100	408	100	449	100	449	Kecamatan Benakat
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	17	100	19	100	21	100	21	Kecamatan Benakat
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	25	100	28	100	31	100	31	Kecamatan Benakat
7.01.7.01.0.0 0.0.00.09	Kecamatan Gunung Megang				4,568		5,025		5,528		5,528	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	3,025	100	3,328	100	3,661	100	3,661	Kecamatan Gunung Megang
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	290	100	319	100	351	100	351	Kecamatan Gunung Megang
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	929	100	1,022	100	1,125	100	1,125	Kecamatan Gunung Megang

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	184	100	202	100	222	100	222	Kecamatan Gunung Megang
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	n/a	100	100	100	110	100	121	100	121	Kecamatan Gunung Megang
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	40	100	44	100	49	100	49	Kecamatan Gunung Megang
7.01.7.01.0.0 0.0.00.10	Kecamatan Rambang Niru				4,341		4,607		4,882		4,882	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	3,374	100	3,543	100	3,720	100	3,720	Kecamatan Rambang Niru
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilasi SAKIP Kecamatan	100	100	213	100	234	100	258	100	258	Kecamatan Rambang Niru
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan yang dilaksanakan	100	100	485	100	534	100	587	100	587	Kecamatan Rambang Niru

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan	100	100	52	100	58	100	63	100	63	Kecamatan Rambang Niru
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase terlaksananya tugas Forum Pimpinan Tingkat Kecamatan	n/a	100	79	100	87	100	95	100	95	Kecamatan Rambang Niru
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	n/a	100	59	100	65	100	72	100	72	Kecamatan Rambang Niru
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa	100	100	79	100	87	100	87	100	87	Kecamatan Rambang Niru
7.01.7.01.0.0 0.0.00.11	Kecamatan Lubai				4,282		4,603		4,993		4,993	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	2,996	100	3,096	100	3,351	100	3,351	Kecamatan Lubai

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	319	100	330	100	360	100	360	Kecamatan Lubai
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	420	100	580	100	630	100	630	Kecamatan Lubai
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	n/a	100	200	100	230	100	270	100	270	Kecamatan Lubai
7.01.05	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100	48	100	53	100	58	100	58	Kecamatan Lubai
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	300	100	315	100	325	100	325	Kecamatan Lubai
7.01.7.01.0.0 0.0.00.12	Kecamatan Rambang				6,631		7,259		7,936		7,936	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	5,034	100	5,487	100	5,986	100	5,986	Kecamatan Rambang

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	260	100	290	100	310	100	310	Kecamatan Rambang
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	910	100	1,010	100	1,121	100	1,121	Kecamatan Rambang
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	180	100	200	100	220	100	220	Kecamatan Rambang
7.01.05	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100	48	100	53	100	58	100	58	Kecamatan Rambang
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	200	100	220	100	242	100	242	Kecamatan Rambang
7.01.7.01.0.0 0.0.00.13	Kecamatan Lembak				5,586		5,794		5,999		5,999	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	4,036	100	4,220	100	4,342	100	4,342	Kecamatan Lembak
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	326	100	329	100	330	100	330	Kecamatan Lembak

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	496	100	496	100	565	100	565	Kecamatan Lembak
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	n/a	100	310	100	412	100	418	100	418	Kecamatan Lembak
7.01.05	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100	135	100	50	100	54	100	54	Kecamatan Lembak
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	282	100	287	100	291	100	291	Kecamatan Lembak
7.01.7.01.0.0 0.0.00.14	Kecamatan Kelekar				4,154		4,891		5,665		5,665	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	3,347	100	4,014	100	4,715	100	4,715	Kecamatan Kelekar
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	172	100	189	100	208	100	208	Kecamatan Kelekar
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	328	100	361	100	397	100	397	Kecamatan Kelekar

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	n/a	100	224	100	235	100	248	100	248	Kecamatan Kelekar
7.01.05	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100	60	100	66	100	70	100	70	Kecamatan Kelekar
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	23	100	25	100	28	100	28	Kecamatan Kelekar
7.01.7.01.0.0 0.0.00.15	Kecamatan Gelumbang				7,575		8,333		9,166		9,166	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	4,789	100	5,268	100	5,795	100	5,795	Kecamatan Gelumbang
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	580	100	638	100	702	100	702	Kecamatan Gelumbang
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	1,482	100	1,630	100	1,793	100	1,793	Kecamatan Gelumbang

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	n/a	100	320	100	352	100	388	100	388	Kecamatan Gelumbang
7.01.05	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100	56	100	62	100	68	100	68	Kecamatan Gelumbang
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	348	100	383	100	421	100	421	Kecamatan Gelumbang
7.01.7.01.0.0 0.0.00.16	Kecamatan Sungai Rotan				6,066		6,673		7,340		7,340	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	4,421	100	4,863	100	5,349	100	5,349	Kecamatan Sungai Rotan
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	698	100	768	100	845	100	845	Kecamatan Sungai Rotan
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	495	100	545	100	599	100	599	Kecamatan Sungai Rotan
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	n/a	100	220	100	242	100	267	100	267	Kecamatan Sungai Rotan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.05	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100	32	100	35	100	39	100	39	Kecamatan Sungai Rotan
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	199	100	219	100	241	100	241	Kecamatan Sungai Rotan
7.01.7.01.0.0 0.0.00.17	Kecamatan Muara Belida				3,993		4,392		4,831		4,831	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	2,687	100	2,956	100	3,252	100	3,252	Kecamatan Muara Belida
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	508	100	559	100	615	100	615	Kecamatan Muara Belida
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa / dan Kelurahan	100	100	528	100	580	100	638	100	638	Kecamatan Muara Belida
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	n/a	100	130	100	143	100	157	100	157	Kecamatan Muara Belida

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.05	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100	36	100	40	100	44	100	44	Kecamatan Muara Belida
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa	100	100	103	100	114	100	125	100	125	Kecamatan Muara Belida
7.01.7.01.0.0 0.0.00.18	Kecamatan Belimbing				5,002		5,301		5,623		5,623	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	3,522	100	3,673	100	3,832	100	3,832	Kecamatan Belimbing
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	261	100	288	100	316	100	316	Kecamatan Belimbing
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	100	100	711	100	782	100	860	100	860	Kecamatan Belimbing

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase Terlaksananya tugas forum pimpinan Tingkat Kecamatan	100	100	208	100	229	100	252	100	252	Kecamatan Belimbing
7.01.05	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	n/a	100	50	100	55	100	61	100	61	Kecamatan Belimbing
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemerintahan desa	100	100	250	100	275	100	303	100	303	Kecamatan Belimbing
7.01.7.01.0.0 0.0.00.19	Kecamatan Belida Darat				3,791		3,980		4,179		4,179	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	3,240	100	3,402	100	3,572	100	3,572	Kecamatan Belida Darat
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	151	100	159	100	167	100	167	Kecamatan Belida Darat
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa / dan Kelurahan	100	100	226	100	237	100	249	100	249	Kecamatan Belida Darat

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Persentase pemberdayaan masyarakat desa / dan Kelurahan	100	100	12	100	13	100	14	100	14	Kecamatan Belida Darat
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa	100	100	162	100	170	100	178	100	178	Kecamatan Belida Darat
7.01.7.01.0.0 0.0.00.20	Kecamatan Lubai Ulu				4,441		4,885		5,374		5,374	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	3,356	100	3,691	100	4,061	100	4,061	Kecamatan Lubai Ulu
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	209	100	230	100	253	100	253	Kecamatan Lubai Ulu
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	510	100	561	100	617	100	617	Kecamatan Lubai Ulu
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	n/a	100	100	100	110	100	121	100	121	Kecamatan Lubai Ulu

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.05	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100	50	100	55	100	61	100	61	Kecamatan Lubai Ulu
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	217	100	238	100	262	100	262	Kecamatan Lubai Ulu
7.01.7.01.0.0 0.0.00.21	Kecamatan Empat Petulai Dangku				4,168		4,535		4,939		4,939	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	2,676	100	2,943	100	3,238	100	3,238	Kecamatan Empat Petulai Dangku
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	663	100	679	100	697	100	697	Kecamatan Empat Petulai Dangku
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	100	100	461	100	507	100	558	100	558	Kecamatan Empat Petulai Dangku
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Keterbitan Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Keterbitan Umum	n/a	100	268	100	294	100	324	100	324	Kecamatan Empat Petulai Dangku
7.01.05	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100	60	100	66	100	73	100	73	Kecamatan Empat Petulai Dangku

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Umum	100	100	41	100	45	100	50	100	50	Kecamatan Empat Petulai Dangku
7.01.7.01.0.0 0.0.00.22	Kecamatan Panang Enim				3,838		3,672		4,039		4,039	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	2,494	100	2,744	100	3,018	100	3,018	Kecamatan Panang Enim
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	134	100	147	100	162	100	162	Kecamatan Panang Enim
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	100	953	100	498	100	548	100	548	Kecamatan Panang Enim
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	n/a	100	40	100	44	100	48	100	48	Kecamatan Panang Enim
7.01.05	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	n/a	100	50	100	55	100	61	100	61	Kecamatan Panang Enim
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	167	100	184	100	203	100	203	Kecamatan Panang Enim

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik											
8.01.8.01.0.0 0.0.00.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				8,703		9,573		10,531		10,531	
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	985	100	1,083	100	1,192	100	1,192	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase organisasi masyarakat yang mendapatkan pembinaan penguatan idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	100	2,359	100	2,595	100	2,854	100	2,854	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik	100	100	2,371	100	2,608	100	2,869	100	2,869	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pengawasan terhadap organisasi mayarakat	100	100	1,084	100	1,193	100	1,312	100	1,312	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	KONDISI AWAL RPD (2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	Target	Rp (dalam juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya terhadap organisasi masyarakat	100	100	908	100	999	100	1,099	100	1,099	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan kasus atau kejadian konflik sosial	100	100	996	100	1,095	100	1,205	100	1,205	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	TOTAL				3,127,261		3,312,413		3,483,655		3,483,655	

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	GAMBARAN UMUM
BAB	III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB	IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB	V	TUJUAN DAN SASARAN
BAB	VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS
BAB	VII	KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB	VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB	IX	PENUTUP

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 berpedoman pada Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025. Keberhasilan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 diukur melalui Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen ini dengan memperhatikan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025;
2. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2038;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Standar Pelayanan Minimal; dan
5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Pada dokumen RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 telah dilakukan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dari keberhasilan program prioritas pembangunan, serta telah ditetapkan 7 (tujuh) tujuan pembangunan dalam RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026, yaitu :

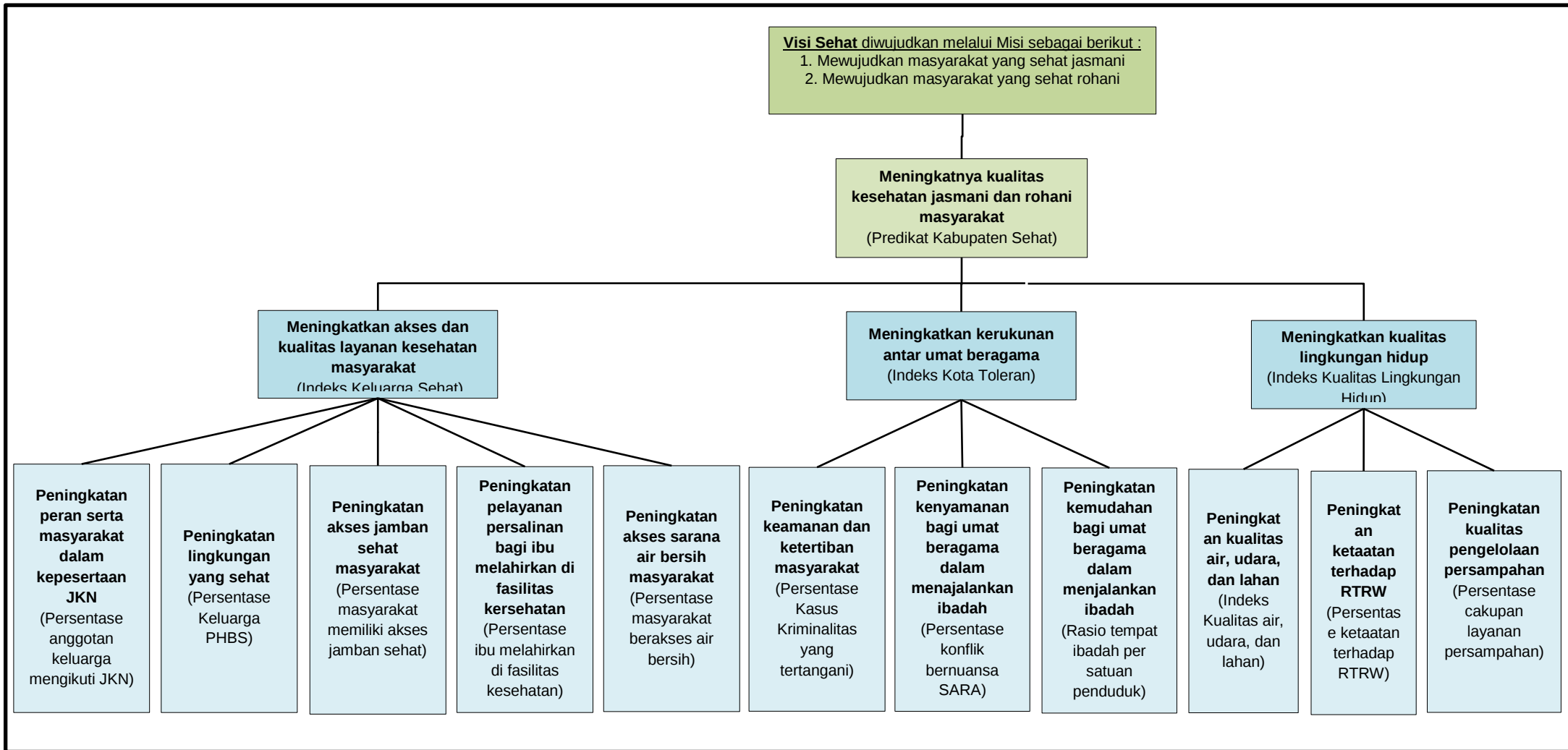
1. Meningkatnya kualitas kesehatan jasmani dan rohani masyarakat;
2. Meningkatnya pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal;
3. Meningkatnya derajat kualitas sumber daya manusia;

4. Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan;
5. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
6. Meningkatnya peran serta dan kesetaraan masyarakat dalam pembangunan daerah; dan
7. Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan.

Secara rinci keterkaitan antara Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 dengan Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 dijabarkan dalam bagan alir (*cascading*) berikut :

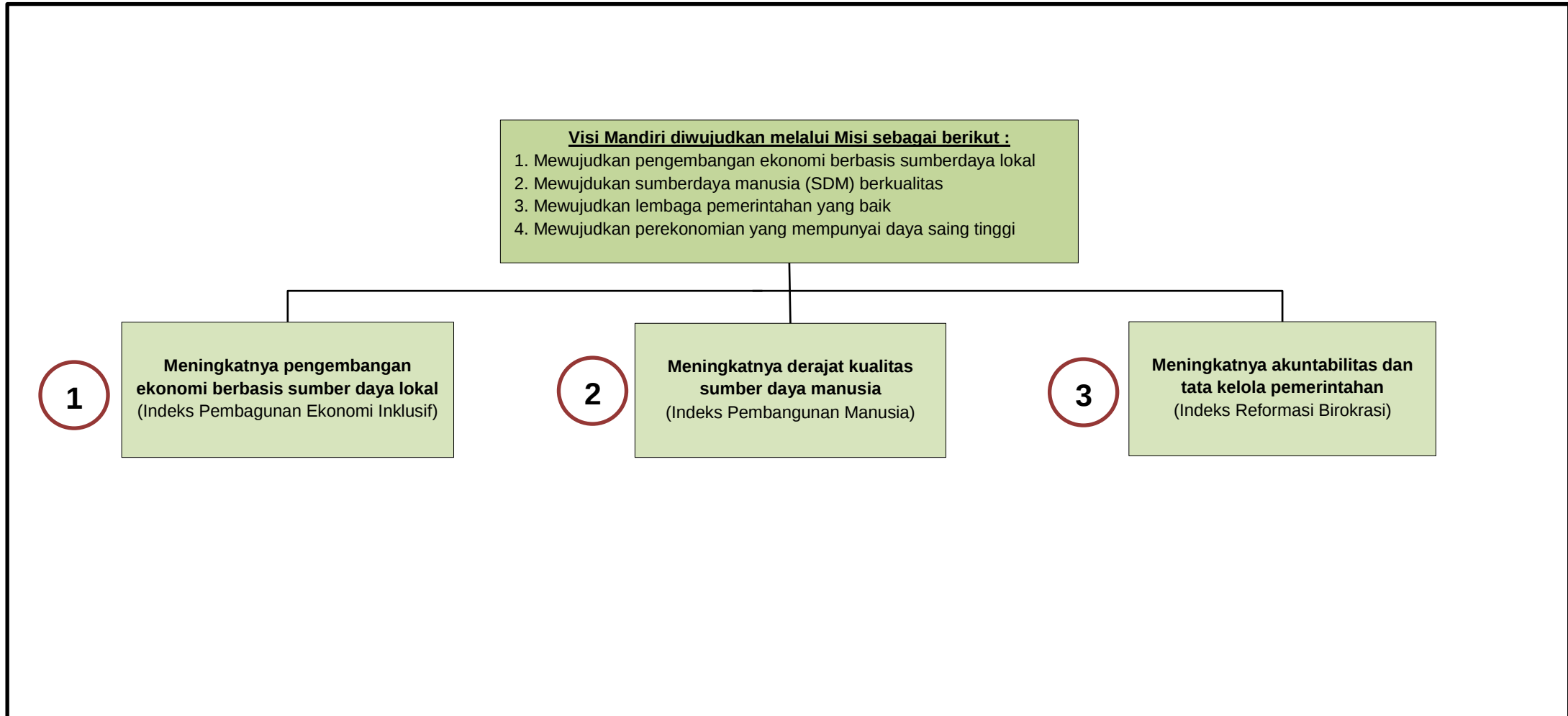
Gambar 8.1

Bagan Alir (Cascading) Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Visi Sehat)

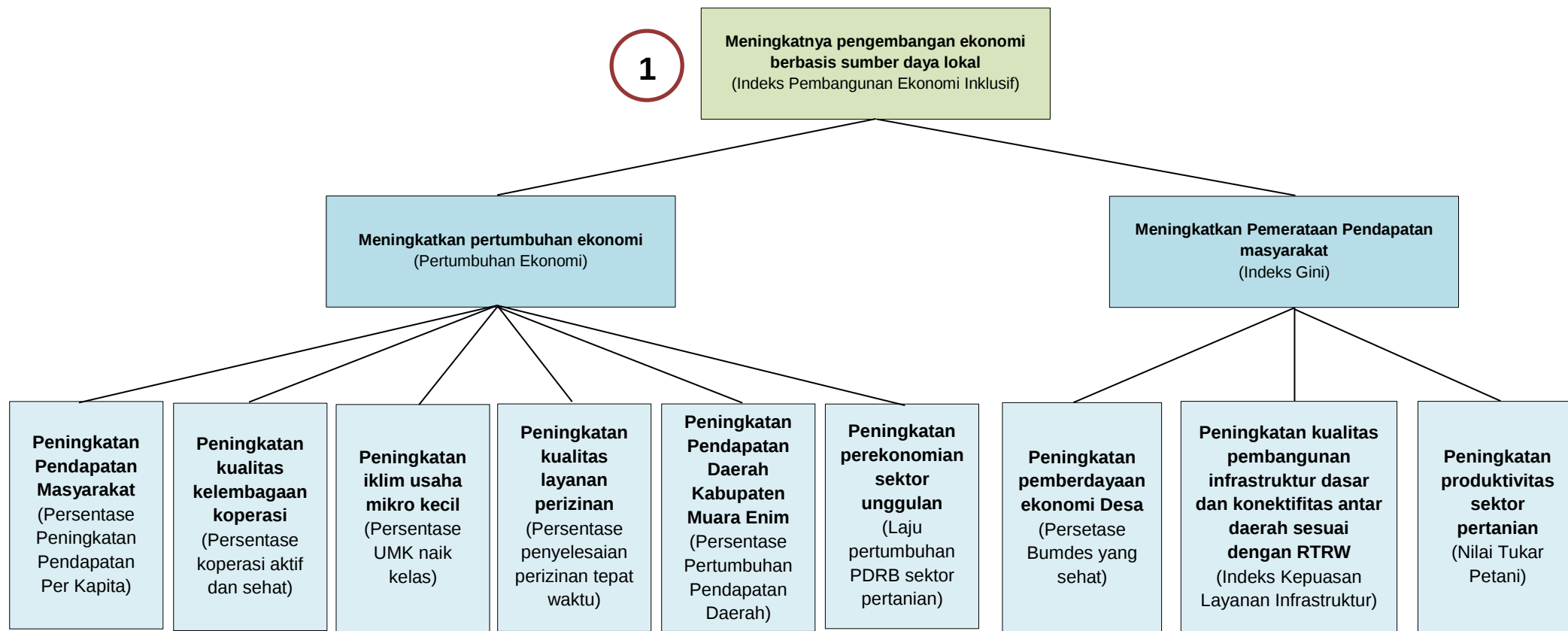


Gambar 8.2

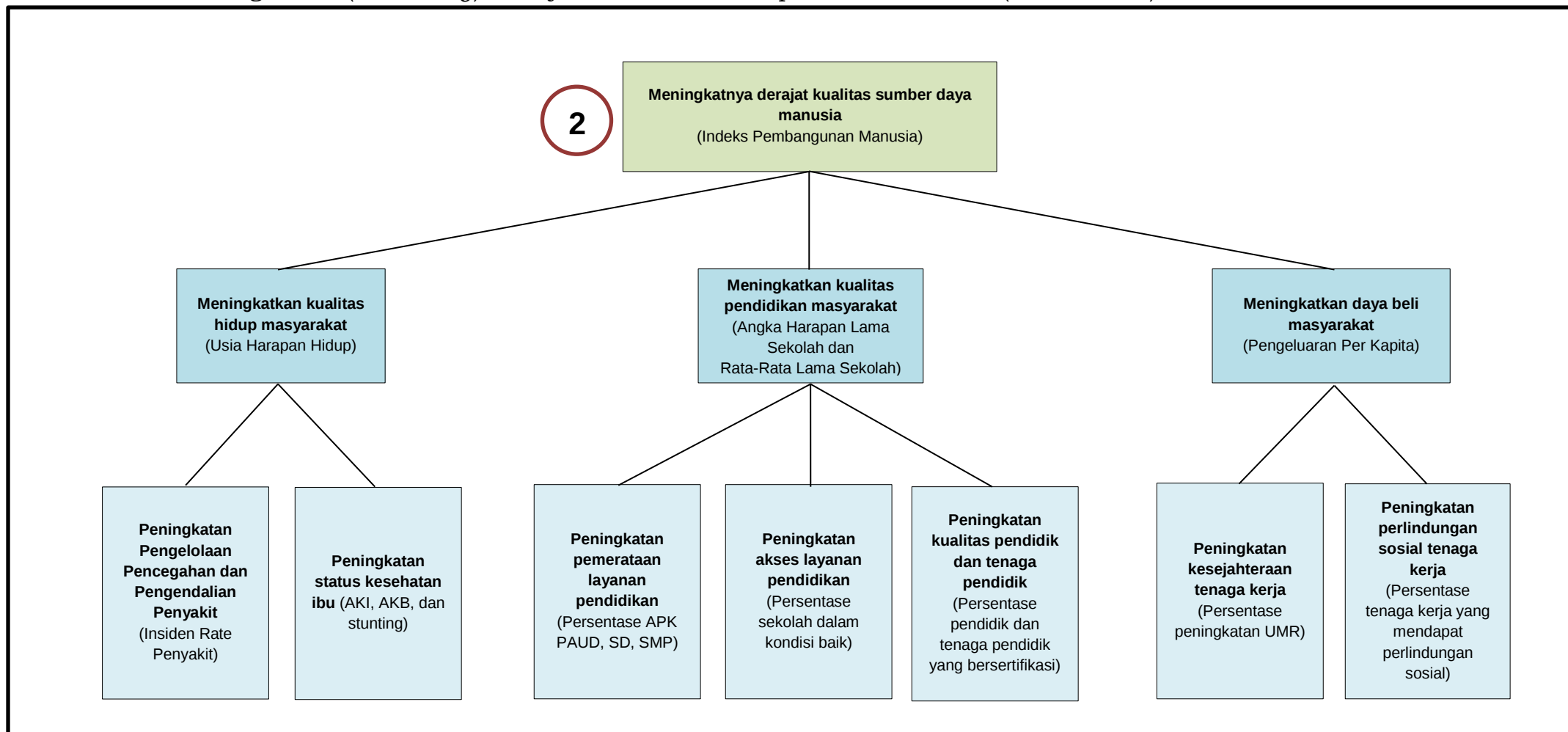
Bagan Alir (Cascading) Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Visi Mandiri)



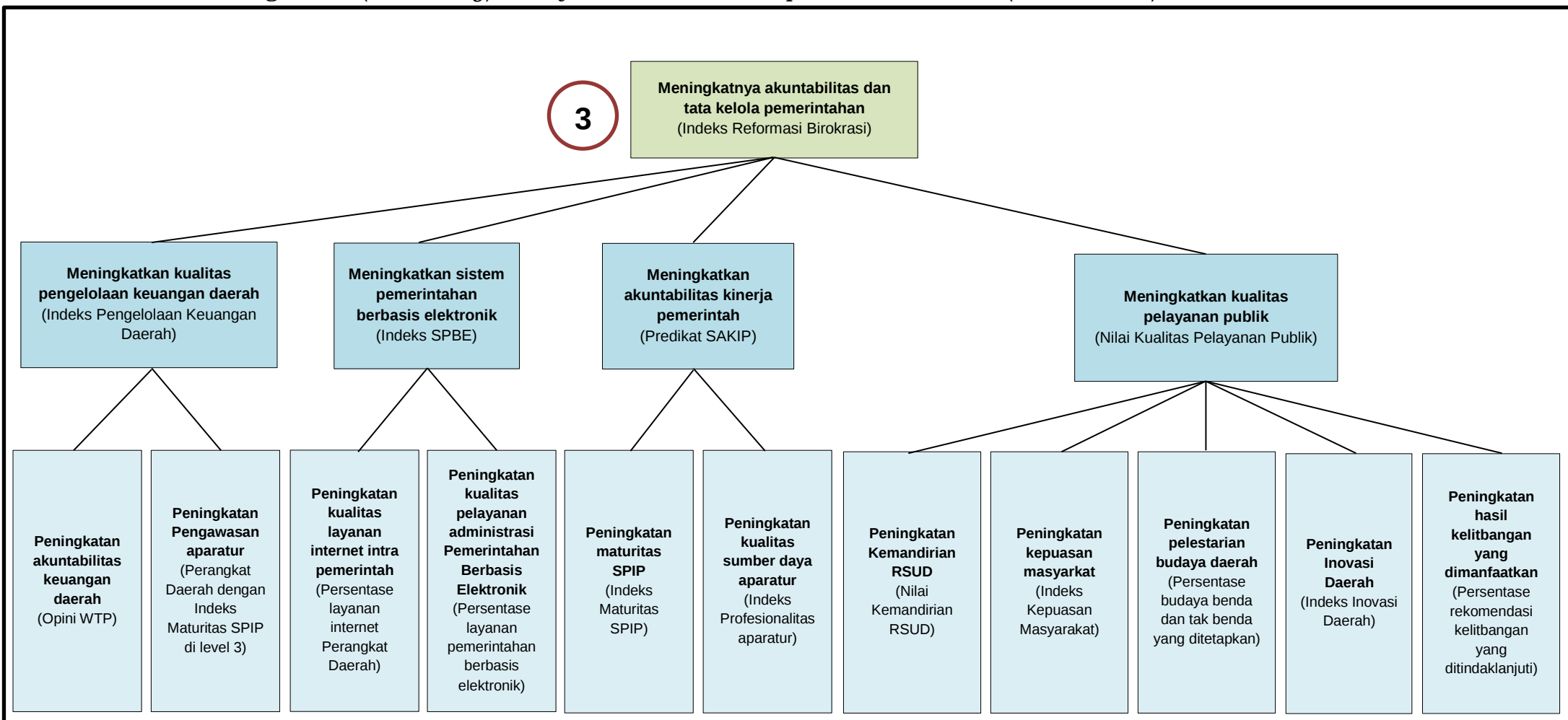
Bagan Alir (Cascading) Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Visi Mandiri) **LANJUTAN ...**



Bagan Alir (Cascading) Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Visi Mandiri) **LANJUTAN ...**

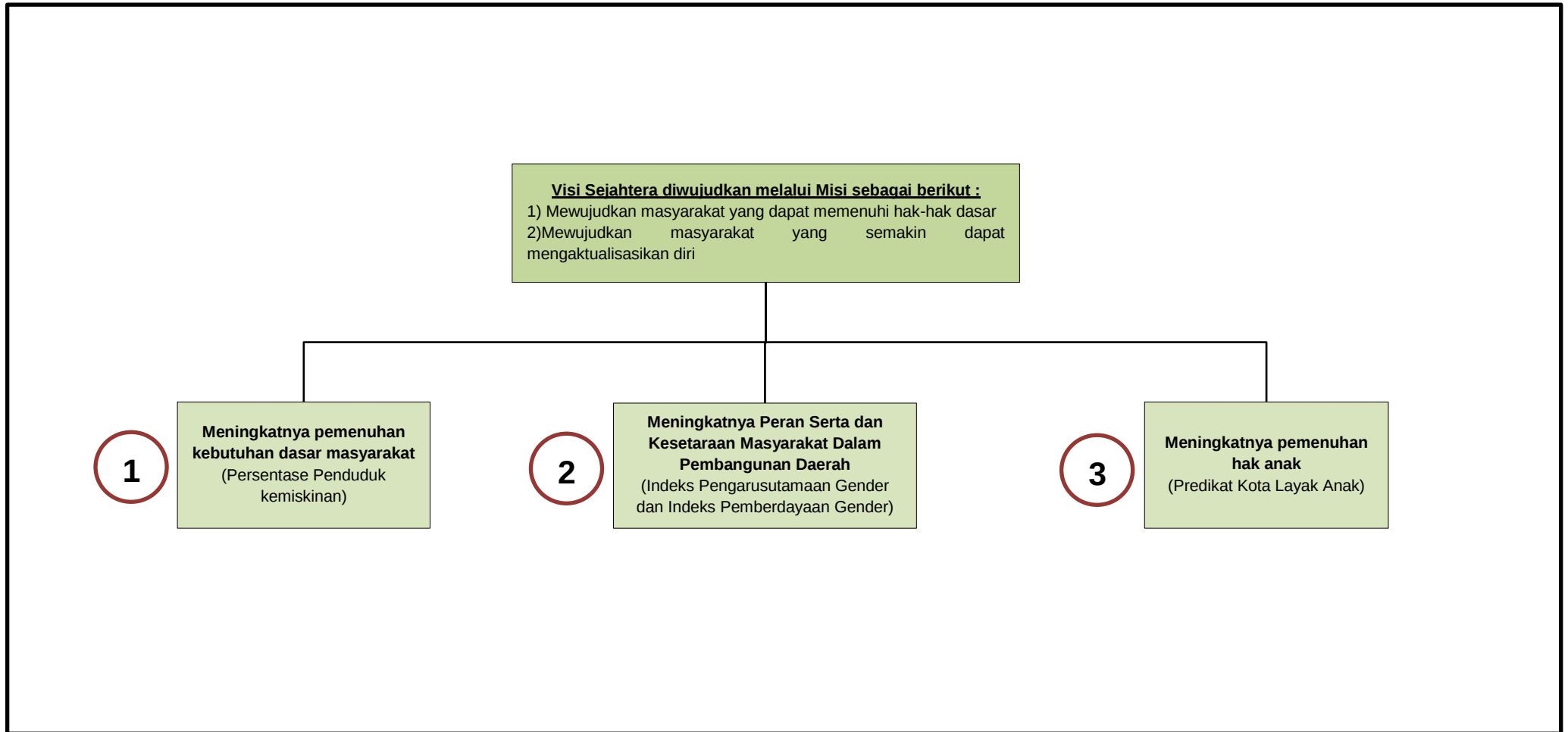


Bagan Alir (Cascading) Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Visi Mandiri) **LANJUTAN ...**

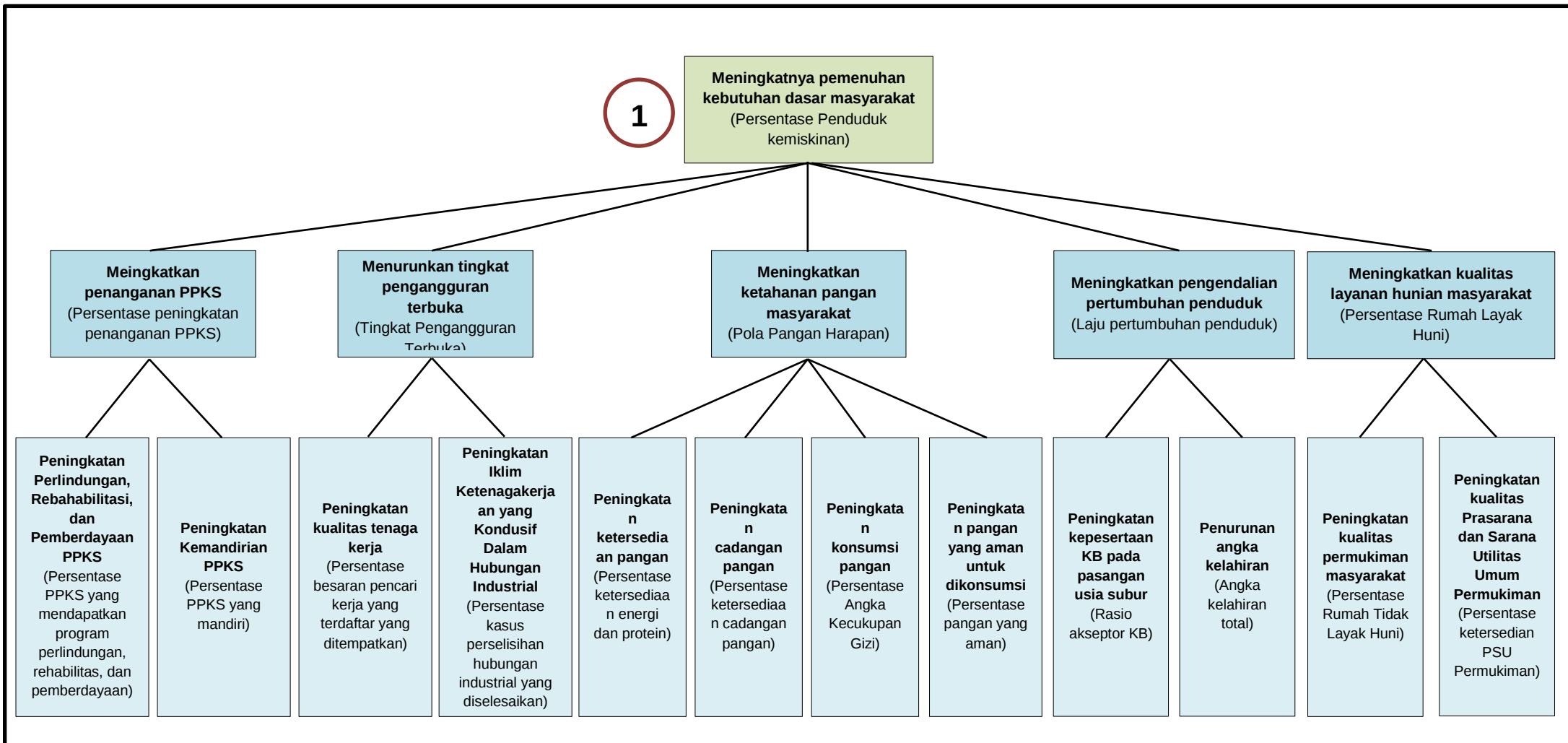


Gambar 8.3

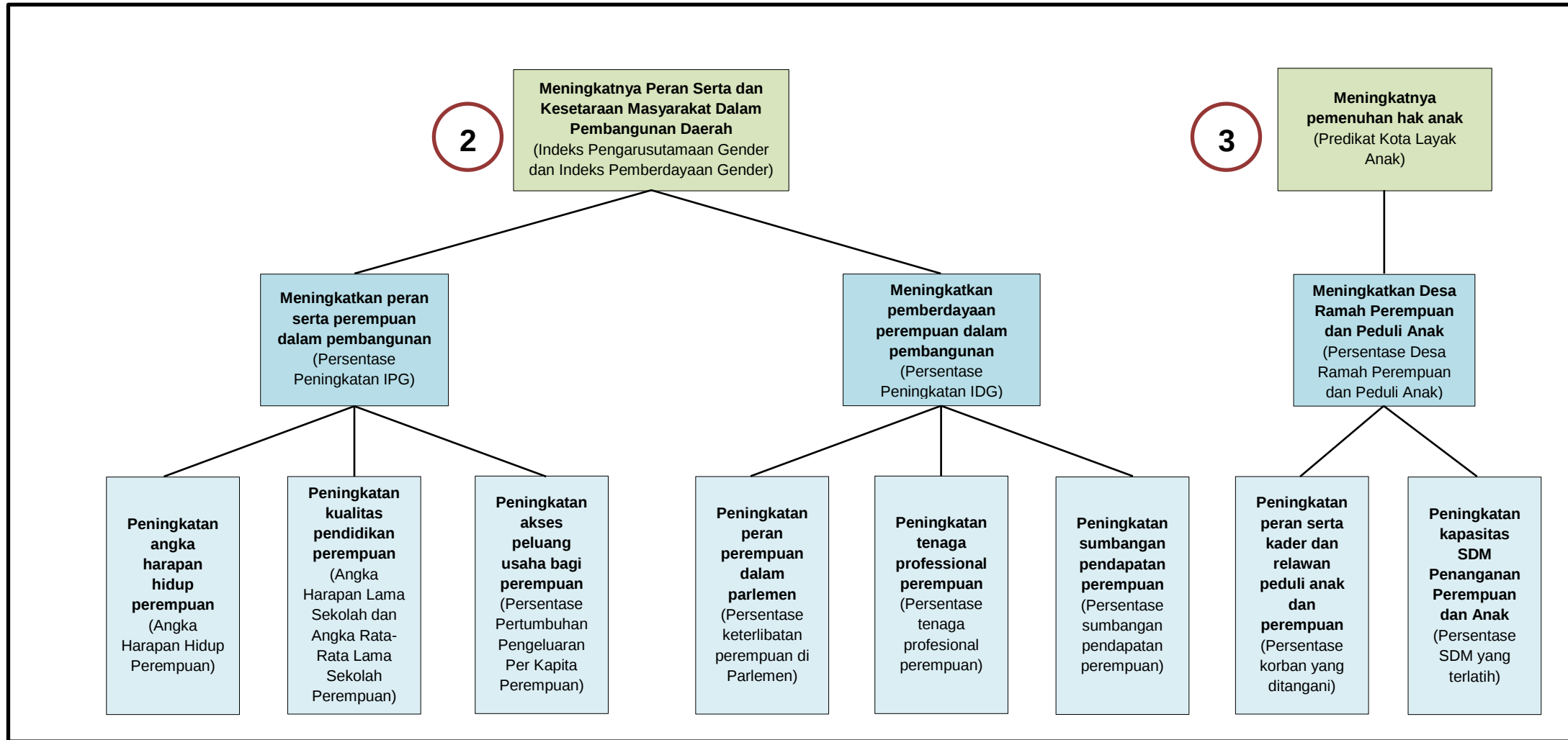
Bagan Alir (*Cascading*) Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Visi Sejahtera)



Bagan Alir (Cascading) Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Visi Sejahtera) **LANJUTAN ...**



Bagan Alir (Cascading) Kinerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Visi Sejahtera) **LANJUTAN ...**



Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET		
					2022	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas kesehatan jasmani dan rohani masyarakat			Penilaian Capaian Kabupaten Sehat	n/a	Padapa (71-80)	Padapa (71-80)	Wiwerda (81-90)
		1.1	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	0.6	0.6	0.7	0.8
		1.2	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama	Indeks Kota Toleran	4.98	5.08	5.18	5.28
		1.3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Lingkungan Hidup	61.70	61.80	61.90	70.00
2	Meningkatnya pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal			Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	5.46	5.54	5.62	5.70
		2.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	8,39	6.60	7.01	7.44
		2.2	Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	0,320	0,319	0,318	0,317
3	Meningkatnya derajat kualitas sumber daya manusia			Indeks Pembangunan Manusia	69.43	69.79	70.15	70.51
		3.1	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Usia Harapan Hidup	69.38	69.63	69.88	70.05
		3.2	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	11.99	12.00	12.01	12.02
				Rata-Rata Lama Sekolah	7.9	7.98	8.06	9.00
		3.3	Meningkatkan daya beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	11,304	11,450	11,597	11,744
4	Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan			Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET		
					2022	2024	2025	2026
		4.1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	B	B	B
		4.2	Meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	2.91	3.00	3.10	3.20
		4.3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	BB
		4.4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Kualitas Pelayanan Publik	3.90	4.22	4.54	4.86
5	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat			Persentase Penduduk Miskin	11.12	10.71	10.29	9.88
		5.1	Meingkatkan penanganan PPKS	Persentase penurunan penanganan PPKS	85,55	81.73	78.69	75.76
		5.2	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.12	4.00	3.88	3.76
		5.3	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	85.00	87.00	90.00	92.00
		5.4	Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.03	1.02	1.01	1.00
		5.5	Meningkatkan kualitas layanan hunian masyarakat	Persentase Rumah Layak Huni	91.88	93.88	95.88	97.88
6	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan masyarakat dalam pembangunan daerah			Indeks Pengarusutamaan Gender (IPG)	89.67	89.76	89.85	89.93
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71.65	74.52	77.39	80.25
		6.1	Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase Peningkatan IPG	0.09	0.09	0.09	0.09

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET		
					2022	2024	2025	2026
		6.2	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Persentase Peningkatan IDG	2.87	2.87	2.87	2.87
7	Meningkatnya pemenuhan hak anak			Predikat Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Nindya	Utama
		7.1	Meningkatkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Persentase Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	3.25	6.10	10.20	12.20

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
			2022	2024	2025	2026	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Persen	8,39	6,60	7,01	7,44	7,44
2	Laju Inflasi	Persen	n/a	2,5	2,5	2,5	2,5
3	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Rp (Milyar)	113.170	96.383	103.665	110.946	110.946
4	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Rp (Milyar)	47.970	59.232	62.629	66.025	66.025
5	Indeks Gini	Indeks	0,320	0,319	0,318	0,317	0,317
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,43	69,79	70,15	70,51	70,51
7	Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	73,53	59.36	56.15	52.95	52.95
8	Persentase Penduduk Miskin	Persen	11,12	10,71	10,29	9,88	9,88
9	Angka Melek Huruf	Persen	98,55	99,41	99,53	99,65	99,65
10	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,90	7,98	8,06	9,00	9,00
11	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,99	12	12,01	12,02	12,02
12	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,38	69,63	69,88	70,05	70,05
13	Prevalensi <i>stunting</i>	Persen	29,70	17,59	13,24	8,89	8,89
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,12	4,00	3,88	3,76	3,76
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	72,53	74,46	74,76	75,06	75,06
16	Penduduk yang bekerja	Jiwa	334.937	335.718	340.103	344.488	344.488
17	Angkatan kerja	Jiwa	349.329	346.565	350.459	354.354	354.354

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
			2022	2024	2025	2026	
18	Rasio Penduduk yang Bekerja	Persen	95,88	96,88	97,07	97,27	97,27
19	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kinerja	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
20	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persen	8,45	9,48	9,48	9,48	9,48
21	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	85,40	87,00	90,00	92,00	92,00
23	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,50	89,55	89,60	89,65	89,65
24	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	71.65	74.52	77.39	80.25	80.25
25	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Persen	3,02	2,85	3,00	3,05	3,05
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Pengeluaran Perkapita	Rp (Ribu)	12.097	11.450	11.597	11.744	11.744
2	Pendapatan Perkapita	Rp (Juta)	181,35	187,54	193,73	199,92	199,92
3	Rasio Ketergantungan	Rasio	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47
4	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	107,80	100,20	100,45	101,00	101,00
5	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar	Indeks	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
ASPEK PELAYANAN UMUM							
Layanan Urusan Wajib Dasar							
1.	Pendidikan						
1)	Angka Partisipasi Kasar (APK)						

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
			2022	2024	2025	2026	
	· APK SD/MI	Persen	100,64	115	118	121	121
	· APK SLTP/MTs	Persen	87,20	83,00	86,00	90,00	90,00
2)	Angka Partisipasi Murni (APM)						
	· APM SD/MI	Persen	92,23	120	126	132	132
	· APM SLTP/MTs	Persen	73,27	80,00	84,00	88,00	88,00
3)	Angka Kelulusan						
	· SD/MI	Persen	90,35	98,46	99,00	99,00	99,00
	· SMP/MTs	Persen	96,32	96,44	95,84	95,25	95,25
4)	Angka Putus Sekolah						
	· SD/MI	Persen	0,63	0,14	0,12	0,10	0,10
	· SMP/MTs	Persen	1,71	0,08	0,05	0,02	0,02
5)	Rasio Guru/Murid						
	· SD/MI	Rasio	1:21	1:18	1:16	1:14	1:14
	· SMP/MTs	Rasio	1:17	1:18	1:16	1:14	1:14
6)	Rasio Sekolah / Murid						
	· SD/MI	Rasio	1:168	1:160	1:155	1:150	1:150
	· SMP/MTs	Rasio	1:175	1:235	1:230	1:225	1:225
7)	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi D-4/S1						
	· SD/MI	Persen	85	87	88	89	89
	· SMP/MTs	Persen	83	85	86	87	87

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
			2022	2024	2025	2026	
2.	Kesehatan						
1)	Angka Kematian Bayi	Per 10 KH	6,60	6,50	6,00	5,50	5,50
2)	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	141	145	144	143	143
3)	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,41	0,50	0,55	0,60	0,60
4)	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	89,87	100	100	100	100
5)	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persen	95,21	100	100	100	100
6)	Persentase Pelayanan Anak Balita	Persen	92,75	100	100	100	100
7)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	91,48	100	100	100	100
8)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persen	100	100	100	100	100
9)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persen	88,74	100	100	100	100
10)	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Persen	93,75	100	100	100	100
11)	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persen	92,09	100	100	100	100
12)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Persen	87,30	100	100	100	100
13)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Penderita Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persen	79,23	100	100	100	100
14)	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persen	100	100	100	100	100
15)	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus HIV	Persen	100	100	100	100	100
16)	Persentase anggota keluarga mengikuti JKN	Persen	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
			2022	2024	2025	2026	
17)	Persentase keluarga PHBS	Persen	100	100	100	100	100
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1)	Persentase Jalan Kabupaten yang Kondisi Baik	Persen	92,79	93,33	94,50	95,33	95,33
2)	Persentase rumah tangga dengan jamban sendiri	Persen	87,82	89,00	92,00	95,00	95,00
3)	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	Persen	71,36	72,50	73,50	75,00	75,00
4)	Jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	94,00	71,19	71,29	71,39	71,39
5)	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	71,38	79,06	79,26	79,46	79,46
6)	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Persen	100	100	100	100	100
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						
1)	Persentase rumah layak huni	Persen	48,53	93,88	95,88	97,88	97,88
2)	Lingkungan permukiman kumuh	Persen	2,00	6,69	6,64	6,59	6,59
3)	Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	Persen	n/a	10	10	10	10
4)	Cakupan layanan persampahan	Persen	16,93	34,07	38,70	43,32	43,32
5)	Persentase rumah tangga dengan penerangan listrik	Persen	99,49	97,84	99,88	100	100
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
1)	Kasus Kriminalitas yang tertangani	Persen	72,00	75,50	76,00	76,50	76,50

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
			2022	2024	2025	2026	
2)	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	49,00	78,00	81,00	84,00	84,00
3)	Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk	Persen	69,85	70,00	71,00	71,00	71,00
4)	Persentase Penegakan PERDA	Persen	100	100	100	100	100
5)	Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks	152,86	150,86	148,50	145,00	145,00
6)	Persentase konflik bernuansa SARA	Persen	0	0	0	0	0
6.	Sosial						
1)	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	97,96	87,49	84,23	81,10	81,10
2)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana alam dan sosial	Persen	100	100	100	100	100
3)	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	n/a	54,13	60,02	66,13	66,13
Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
1.	Tenaga Kerja						
1)	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Persen	73,91	65,00	70,00	75,00	75,00

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
			2022	2024	2025	2026	
2)	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1)	Angka Harapan Hidup Perempuan	Tahun	71,33	71,84	72,10	72,35	72,35
2)	Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan	Tahun	12,16	12,18	12,19	12,20	12,20
3)	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan	Tahun	7,50	7,68	7,77	7,86	7,86
4)	Persentase Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita Perempuan	Persen	2,67	2,77	2,85	2,90	2,90
5)	Persentase keterlibatan perempuan di Parlemen	Persen	15,56	15,56	17,78	17,78	17,78
6)	Persentase tenaga profesional perempuan	Persen	54,48	54,50	54,90	55,40	55,40
7)	Persentase sumbangan pendapatan perempuan	Persen	37,12	37,30	36,32	36,33	36,33
8)	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	Persen	100	100	100	100	100
3.	Pangan						
1)	Ketersediaan pangan utama	Kal/kap/tahun	2.488	2.304	2.352	2.400	2.400
2)	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Gr/kap/tahun	80,97	60,48	61,74	63,00	63,00

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
			2022	2024	2025	2026	
4.	Pertanahan						
1)	Tanah milik pemerintah bersertifikat yang tercatat pada KIB	Persil	51	60	65	70	70
5.	Lingkungan Hidup						
1)	Indeks kualitas air	Indeks	57,01	57,11	57,21	57,31	57,31
2)	Indeks kualitas udara	Indeks	79,98	80,08	80,18	80,28	80,28
3)	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	36,13	36,23	36,33	36,43	36,43
4)	Pengaduan terkait lingkungan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100
5)	Cakupan area pelayanan persampahan	Persen	16,93	31,92	34,42	39,61	39,61
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1)	Persentase Kepemilikan KTP	Persen	98,82	99,86	99,88	99,88	99,88
2)	Persentase Penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Persen	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
3)	Persentase bayi berakte kelahiran	Persen	97,30	98,50	99,00	99,50	99,50
4)	Persentase kepemilikan KIA	Persen	45,59	50,00	55,00	60,00	60,00

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
			2022	2024	2025	2026	
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1)	Persentase PKK Aktif	Persen	100	100	100	100	100
2)	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Persen	75,00	75,60	75,70	75,80	75,80
3)	Persentase BUMDES yang sehat	Persen	75,00	75,07	75,80	76,00	76,00
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1)	Laju Pertumbuhan penduduk	Persen	1,30	1,28	1,38	1,36	1,36
2)	Total Fertility Rate (TFR)	TFR	2,45	2,44	2,43	2,42	2,42
3)	Cakupan peserta KB Aktif	Persen	65,00	66,00	67,00	68,00	68,00
4)	Indeks pembangunan keluarga	Indeks	53,00	53,20	53,40	53,60	53,60
5)	Jumlah pasangan Usia subur	Jiwa	104.500	129.000	130.000	132.000	132.000
9.	Perhubungan						
1)	Rasio izin trayek	Rasio	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
2)	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Juta Orang	1,042	1,063	1,084	1,106	1,106
3)	Jumlah uji KIR angkutan umum	Jumlah	2.616	2.755	2.838	2.923	2.923
4)	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,00672	0,00672	0,00672	0,00672	0,00672
5)	Jumlah orang/barang melalui terminal	Jumlah	186.990	215.040	215.100	215.300	215.300
10.	Komunikasi dan Informatika						
1)	Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	78,77	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
			2022	2024	2025	2026	
2)	Persentase desa dengan akses internet	Persen	100	100	100	100	100
3)	Persentase informasi publik yang tersedia dan diumumkan sesuai KIP	Persen	100	100	100	100	100
4)	Indeks SPBE	Indeks	2.91	3.00	3.10	3.20	3.20
5)	Persentase layanan internet Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100
6)	Persentase layanan pemerintahan berbasis elektronik	Persen	100	100	100	100	100
11.	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah						
1)	Persentase koperasi aktif	Persen	82,58	83,36	83,75	84,15	84,15
2)	Persentase koperasi sehat	Persen	20,85	22,30	23,36	24,41	24,41
3)	UMKM naik kelas	Unit	939	1.094	1.105	1.118	1.118
4)	Pertumbuhan wirausaha baru	Unit	800	1.012	1.138	1.280	1.280
12.	Penanaman Modal						
1)	Cakupan realisasi investasi	Persen	35,3	36,3	36,6	36,9	36,9
2)	Jumlah investor	Jumlah	55	60	65	70	70
3)	Persentase penyelesaian perizinan tepat waktu	Persen	95,93	100	100	100	100
13.	Kepemudaan dan Olah Raga						
1)	Indeks pembangunan pemuda	Indeks	49	51	53	55	55

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
			2022	2024	2025	2026	
2)	Indeks pembangunan olahraga	Indeks	16	17	19	20	20
14.	Kebudayaan						
1)	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	3	4	5	6	6
2)	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	59,09	100	100	100	100
15.	Perpustakaan						
1)	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jiwa	8.509	9.381	9.850	10.342	10.342
2)	Jumlah perpustakaan	Unit	30	40	45	50	50
3)	Jumlah peminjam buku perpustakaan	Jiwa	4.392	4.894	5.138	5.934	5.934
16.	Kearsipan						
1)	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Kearsipan secara baku	Persen	34	75,00	75,00	80,00	80,00
Layanan Urusan Pilihan							
1.	Pariwisata						
1)	Kunjungan Wisatawan	Persen	30,00	40,00	45,00	45,00	45,00
2.	Pertanian						
1)	Persentase pembinaan lembaga tani berbasis agribisnis						

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
			2022	2024	2025	2026	
	- Pemula	Persen	n/a	2,00	2,00	2,00	2,00
	- Lanjut	Persen	n/a	1,00	1,00	1,00	1,00
	- Madya	Persen	n/a	0,50	0,50	0,50	0,50
	- Utama	Persen	n/a	0,05	0,05	0,05	0,05
2)	Produktivitas tanaman padi	Kw/Ha	49,65	49,65	49,65	49,65	49,65
3.	Perdagangan						
1)	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok	Persen	9,91	10,00	10,00	10,00	10,00
2)	Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	Persen	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
4.	Perindustrian						
1)	Pertumbuhan jumlah industri kecil menengah	Persen	6,20	6,50	6,80	6,70	6,70
5.	Kelautan dan Perikanan						
1)	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	8.266,72	8.852,00	9.166,00	9.479,00	9.479,00
2)	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	3.399,55	3.467,10	3.501,77	3.536,79	3.536,79
3)	Produksi Produk Hasil Olahan Perikanan	Ton	908,07	1.063,00	1.135,71	1.213,40	1.213,40

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
			2022	2024	2025	2026	
Penunjang Urusan							
1.	Perencanaan Pembangunan						
1)	Program prioritas selaras dengan prioritas pembangunan	Persen	98,60	100	100	100	100
2)	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100
3)	Capaian sasaran pembangunan sesuai target	Persen	85,00	100	100	100	100
2.	Keuangan						
1)	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2)	Persentase Akurasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD	Persen	100	100	100	100	100
3)	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	3,10	3,10	3,17	3,26	3,26
4)	Persentase Pendapatan Transfer Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	3,21	3,21	3,28	3,39	3,39
5)	Persentase Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	3,07	3,07	3,11	3,16	3,16
3.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan						
1)	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	36,05	50,72	52,54	54,35	54,35
2)	Indeks Profesionalitas Aparatur	Indeks	53,26	57,8	58	58,5	58,5

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN			KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
			2022	2024	2025	2026	
4.	Penelitian dan Pengembangan						
1)	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	100	100	100	100	100
2)	Persentase Kebijakan Inovasi Daerah yang Diterapkan di Daerah	Persen	100	100	100	100	100
5.	Pengawasan						
1)	Indeks Maturitas SPIP	Level	3	3	2	2	2
2)	Perangkat Daerah dengan Indeks Maturitas SPIP di level 3	Persen	60,00	70,00	75,00	80,00	80,00
3)	Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti.	Persen	89,30	92,50	93	94	94
	Persentase temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti.	Persen	65,00	95	96	97	97
6.	Sekretariat Dewan						
1)	Survey Persepsi Masyarakat terhadap Anggota DPRD	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2)	Survey Kepuasan Anggota DPRD	Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
3)	Persentase Perundang-Undangan yang Disahkan	Persen	100	80	85	90	90
4)	Persentase Keputusan Dewan yang Disahkan	Persen	100	100	100	100	100

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	GAMBARAN UMUM
BAB	III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB	IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BAB	V	TUJUAN DAN SASARAN
BAB	VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS
BAB	VII	KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB	VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB	IX	PENUTUP

BAB IX

PENUTUP

Dengan berakhirnya masa jabatan Bupati - Wakil Bupati Muara Enim Periode 2018-2023, serta untuk menjaga keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan daerah maka dipandang perlu menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penyusunan rancangan KUA-PPAS, serta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya, RPD Kabupaten Muara Enim akan digunakan oleh Pj Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penyusunan RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 memperhatikan diantaranya penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2026, kesesuaian saran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025, hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023, Perubahan RPJMD Provinsi dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional, dan regulasi yang berlaku.


Plt. BUPATI MUARA ENIM

AHMAD USMARWI KAFAH